



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara maju, tangguh dan berbudaya diperlukan rencana pembangunan jangka panjang daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional;
 - b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025 telah berakhir sehingga perlu ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045 sebagai arah pembangunan daerah dalam upaya mendukung perwujudan Visi Indonesia Emas 2045 dan Provinsi Kalimantan Timur yang maju, adil dan berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf b, dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025-2045.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kutai Kartanegara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disebut dengan Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJP Nasional adalah dokumen rencana pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah adalah dokumen rencana pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh)

tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.

10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah adalah dokumen rencana pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 yang memuat visi, sasaran visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJM Nasional adalah dokumen rencana pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program pasangan Presiden dan Wakil Presiden dengan berpedoman pada RPJPN.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah dokumen rencana pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah dokumen rencana pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati dengan berpedoman pada RPJPD, RPJMN dan RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKP Daerah adalah dokumen rencana pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

16. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
18. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB II

KERANGKA RPJP DAERAH

Pasal 2

- (1) Rencana Pembangunan Daerah dituangkan dalam:
 - a. RPJP Daerah;
 - b. RPJM Daerah; dan
 - c. RKP Daerah.
- (2) Rencana Pembangunan Perangkat Daerah dituangkan dalam:
 - a. Renstra Perangkat Daerah; dan
 - b. Renja Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RPJP Daerah.
- (2) Pembangunan Daerah periode 2025-2045 dilaksanakan dengan berpedoman pada RPJP Daerah.

Pasal 4

- (1) RPJP Daerah terdiri atas:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB III Permasalahan dan Isu Strategis;
 - d. BAB IV Visi dan Misi Daerah;
 - e. BAB V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok; dan
 - f. BAB VI Penutup.

- (2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Visi RPJP Daerah, Kukar Maju Tangguh Berbudaya 2045: Pusat Pangan, Pariwisata, Industri Hijau, Sejahtera dan Berkelanjutan.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur melalui 5 (lima) sasaran visi yang terdiri atas:
- peningkatan pendapatan per kapita;
 - pengentasan kemiskinan dan ketimpangan;
 - peningkatan perekonomian dan daya saing daerah;
 - peningkatan daya saing sumber daya manusia; dan
 - penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju *net zero emission*.
- (3) Misi RPJP Daerah:
- mewujudkan transformasi sosial dengan membangun kualitas hidup manusia yang unggul dan berdaya saing;
 - mewujudkan transformasi ekonomi dengan membangun sektor non-ekstraktif untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
 - mewujudkan transformasi tata kelola dengan membangun penyelenggaraan pemerintahan yang cerdas, adaptif, dan efisien;
 - mewujudkan demokrasi substansial yang partisipatif dan stabilitas ekonomi daerah yang tangguh;
 - mewujudkan ketahanan sosial-budaya, dan ketahanan ekologi berbasis kearifan lokal;
 - mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dengan membangun konektivitas dan integrasi regional untuk pertumbuhan yang inklusif.
 - mewujudkan sarana dan prasarana yang merata dan berkualitas berbasis inovasi hijau; dan

- h. mewujudkan sinergitas dan kesinambungan pembangunan.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) arah pembangunan, dengan 52 (lima puluh dua) indikator utama pembangunan.

BAB III

RPJP DAERAH

SEBAGAI DASAR PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 6

- (1) RPJP Daerah menjadi dasar dalam penyusunan RPJM Daerah.
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam periodisasi 5 (lima) tahun, yaitu sebagai berikut:
 - a. RPJM Daerah I Tahun 2025-2029;
 - b. RPJM Daerah II Tahun 2030-2034;
 - c. RPJM Daerah III Tahun 2035-2039; dan
 - d. RPJM Daerah IV Tahun 2040-2044.
- (4) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan RKP Daerah.
- (5) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun oleh Perangkat Daerah dan menjadi dasar dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- (6) Penyusunan Renstra Perangkat Daerah oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat sasaran strategis berupa indikator kinerja utama yang ditetapkan dalam rangka pencapaian sasaran Pembangunan Daerah dalam RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan digunakan sebagai pengukuran kinerja Perangkat Daerah.

- (7) RKP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagai penjabaran dari RPJM Daerah serta digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (8) RKP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi dasar dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- (9) Renja Perangkat Daerah disusun oleh Perangkat Daerah dengan mengacu pada prioritas Pembangunan Daerah dan ketersediaan pendanaan, serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.

Pasal 7

Dalam rangka menjaga kesinambungan rencana pembangunan jangka panjang, Kepala Daerah terpilih yang mengakhiri masa jabatannya pada tahun 2045 diwajibkan menyusun RPJP Daerah untuk periode 20 tahun berikutnya.

BAB IV

RPJP DAERAH

SEBAGAI PEDOMAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 8

- (1) RPJP Daerah menjadi pedoman pembentukan dan evaluasi materi muatan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
- (2) RPJP Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan visi, misi dan program dalam persyaratan pencalonan, materi kampanye, dan materi debat bagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.
- (3) RPJP Daerah menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan bagi seluruh pelaku pembangunan pemerintah dan pelaku pembangunan nonpemerintah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.

Pasal 9

Dalam rangka menjaga kesinambungan Pembangunan Daerah, Bupati pada tahun terakhir pemerintahannya wajib menyusun dan menetapkan RKP Daerah untuk tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya dengan berdasarkan pada RPJP Daerah.

BAB V

PELAKSANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 10

RPJP Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam lingkup wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya, dengan melibatkan instansi/lembaga, badan usaha, masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan RPJP Daerah, Pemerintah Daerah melalui Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJP Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melingkupi pengendalian dan evaluasi terhadap:
 - a. pencapaian target sasaran visi RPJP Daerah; dan
 - b. pencapaian target indikator utama pembangunan RPJP Daerah.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi RPJM Daerah.

Pasal 12

- (1) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah

untuk melakukan peninjauan kembali terhadap RPJP Daerah.

- (2) Dalam hal hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan perubahan terhadap Lampiran Peraturan Daerah ini, perubahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Perubahan RPJP Daerah hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJP Daerah kurang dari 7 (tujuh) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyebarluasan RPJP Daerah kepada instansi/lembaga, badan usaha, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait dalam rangka memberikan pemahaman atas RPJP Daerah.

- (2) Penyebarluasan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dan/atau non-elektronik.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - a. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 147), tetap berlaku sampai dengan akhir periode, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang RKP Daerah Tahun 2025, tetap berlaku sampai dengan akhir periode, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Produk hukum daerah yang mengatur mengenai rencana induk, peta jalan, atau dengan sebutan lainnya terkait Perencanaan Pembangunan daerah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan periode masa jabatan bupati dan wakil bupati, penyusunan dan periodisasi RPJM Daerah, wajib mengikuti dan selaras dengan periode masa jabatan bupati dan wakil bupati, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap berpedoman pada RPJP Daerah.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 11 Desember 2024

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 12 Desember 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

SUNGGONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024 NOMOR 180
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 64.02/75/17/2024

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah yang bertujuan untuk meningkatkan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan karakteristik dan kearifan lokal. Untuk mewujudkan hal tersebut, pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah harus terencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berkelanjutan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditentukan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, telah mengatur tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan. Rencana pembangunan ini memiliki lingkup waktu jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang disusun oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

RPJP Daerah merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, sasaran visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah yang disusun dengan berpedoman secara imperatif pada RPJP Provinsi dan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Kartanegara. Proses penyusunan RPJP Daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah, dan bawah-atas yang secara substansi berorientasi pada pendekatan teknokratik, holistik, integratif, dan spasial.

RPJP Daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah ini memiliki tujuan utama untuk mewujudkan Visi Kukar Maju Tangguh Berbudaya 2045: Pusat Pangan, Pariwisata, Industri hijau, Sejahtera dan Berkelanjutan. Visi daerah digagas setelah mempertimbangkan secara matang posisi Kabupaten Kutai Kartanegara dalam peta perencanaan nasional, mandat provinsi, hingga nilai historis yang dimiliki oleh daerah yang identik dengan Sungai Mahakam ini. Demikian pula dengan modal dasar maupun pengaruh eksternal yang kemudian diterjemahkan menjadi sebuah cita-cita jangka panjang. RPJP Daerah disusun dengan mempertimbangkan dan menganalisis potensi dan tantangan pembangunan yang diperkirakan akan terjadi dalam berbagai bidang selama dua dekade mendatang. Perubahan tersebut mencakup aspek demografi, geopolitik, geoekonomi, kemajuan teknologi, urbanisasi, dinamika perdagangan, tata kelola keuangan global, pertumbuhan kelas menengah, kompetisi dalam sumber daya alam, dan perubahan iklim. Analisis ini bertujuan untuk merumuskan langkah-langkah transformatif yang diperlukan guna mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan masyarakat, yang merupakan bagian dari pencapaian visi RPJP Daerah.

Visi RPJP Daerah direalisasikan melalui 5 (lima) sasaran visi yang diukur dengan 12 (dua belas) indikator sasaran visi. Selanjutnya visi ini dilaksanakan dengan 8 (delapan) misi yang terdiri dari 3 (tiga) transformasi, 2 (dua) landasan transformasi, dan 3 (tiga) kerangka implementasi transformasi. Misi ini kemudian terbagi ke dalam 4 (empat) arah kebijakan tahap pembangunan lima tahunan. Keseluruhan agenda ini dilaksanakan melalui 6 (enam) sasaran pokok yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) arah pembangunan yang diukur dengan 52 (lima puluh dua) indikator utama pembangunan. Dalam upaya mewujudkan visi RPJP Daerah, terdapat 82 (delapan puluh dua) arah kebijakan transformasi dan 22 (dua puluh dua) upaya transformatif super prioritas (*game changer*) yang harus

dilaksanakan.

Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah terdiri dari 6 (enam) Bab dan 16 (enam belas) Pasal yang mengatur mengenai pengertian, kerangka RPJP Daerah, RPJP Daerah sebagai pedoman pembangunan daerah, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi rencana pembangunan daerah dan ruang untuk melakukan peninjauan dan penyesuaian terhadap RPJP Daerah. Peraturan Daerah ini ditujukan untuk : (a) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah dan nasional; (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antarprovinsi dan kabupaten/kota, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota; (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta pengawasan; (d) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan (e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Perumusan visi mempedomani visi RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Kalimantan Timur yang disesuaikan dengan karakteristik daerah.

Ayat (2)

Penjabaran 5 (lima) sasaran visi dilakukan dengan mempedomani sasaran visi RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Kalimantan Timur yang disesuaikan dengan karakteristik daerah.

Ayat (3)

Perumusan misi mempedomani 8 (delapan) misi RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Kalimantan Timur.

Ayat (4)

Perumusan 17 (tujuh belas) arah pembangunan dan 52 (lima puluh dua) indikator utama pembangunan diselaraskan dengan 17 (tujuh belas) arah pembangunan dan 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Kalimantan Timur yang disesuaikan dengan karakteristik daerah.

Pasal 6

Ayat (1)

Arah kebijakan dan indikator utama pembangunan pada RPJP Daerah menjadi pedoman penyusunan sasaran prioritas pembangunan daerah dalam RPJM Daerah.

RPJM Daerah menjabarkan visi, misi, dan program pasangan Bupati dan Wakil Bupati.

RPJM Daerah memuat tujuan, sasaran, prioritas pembangunan, strategi, arah kebijakan, program Perangkat Daerah, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Sasaran prioritas pembangunan daerah dalam RPJM Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan sasaran prioritas pembangunan daerah dalam RKP Daerah dan sasaran strategis Renstra Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat sasaran strategis, tujuan, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

RKP Daerah memuat rancangan kerangka ekonomi makro yang meliputi gambaran perekonomian secara menyeluruh, sasaran makro pembangunan, serta prioritas pembangunan daerah yang mencakup program perangkat daerah, arah kebijakan kewilayahan dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Prioritas Pembangunan Daerah harus ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup orang banyak.

Pasal 7

Tahun 2045 merupakan tahun terakhir periode pelaksanaan RPJP Daerah, oleh karena itu Kepala Daerah terpilih yang memangku jabatan sampai dengan tahun 2045 harus menyusun RPJP Daerah untuk 20 tahun berikutnya.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pelaku pembangunan pemerintah” adalah pelaku pembangunan yang mencakup *state actors* dalam hal ini Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan "pelaku pembangunan nonpemerintah" adalah pelaku pembangunan yang mencakup *non-state actors* yang dalam hal ini mencakup antara lain dan tidak terbatas pada badan usaha, media, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, filantropi, dan masyarakat.

Pasal 9

Tahun pertama periode pemerintahan pasangan Bupati dan Wakil Bupati berikutnya yaitu pada Tahun 2025, Tahun 2030, Tahun 2035, Tahun 2040 dan Tahun 2045.

Pasal 10

Yang dimaksud “instansi/lembaga” adalah badan pemerintah umum (seperti jawatan atau kantor), sistem badan sosial atau organisasi yang melakukan usaha untuk mencapai tujuan tertentu.

Yang dimaksud dengan "badan usaha" adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang melakukan kegiatan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan terkait” adalah pihak yang memiliki kepentingan baik individu, atau kelompok masyarakat yang memiliki hubungan terhadap organisasi atau isu/permasalahan yang sedang diangkat.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengendalian dan evaluasi" adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengukur pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “efektivitas” adalah ukuran hasil tugas atau keberhasilan dalam mencapai tujuan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “bencana” adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Daerah yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan/atau dampak psikologis.

Yang dimaksud dengan “goncangan politik” adalah ketidakstabilan dalam struktur dan/atau implementasi politik Daerah.

Yang dimaksud dengan “krisis ekonomi” adalah kondisi di mana perekonomian Daerah mengalami penurunan yang sangat signifikan.

Yang dimaksud dengan “konflik sosial budaya” adalah pertikaian atau ketegangan yang terjadi antara kelompok-kelompok masyarakat Daerah yang memiliki nilai, norma, kepercayaan, atau identitas budaya yang berbeda.

Yang dimaksud dengan “gangguan keamanan” adalah suatu kondisi tidak aman yang diakibatkan oleh gangguan keamanan, huru hara, ataupun konflik sosial antarkelompok yang ditandai oleh benturan fisik dan berlangsung pada waktu tertentu serta mengganggu stabilitas Daerah.

Yang dimaksud dengan “pemekaran daerah” adalah pemecahan kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih.

Yang dimaksud dengan “perubahan kebijakan nasional” adalah perubahan kebijakan yang dibuat oleh negara untuk mencapai tujuan nasional.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “akhir periode” adalah akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Huruf c

Yang dimaksud “akhir periode” adalah akhir periode RKP Daerah Tahun 2025.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN
2024 NOMOR 90

LAMPIRAN:
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada perencanaan yang cermat, yang juga mencakup dukungan dari perencanaan pembangunan daerah. Pembangunan diartikan sebagai upaya untuk memanfaatkan segala potensi yang dimiliki oleh daerah guna menyelesaikan masalah dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, sumber daya pembangunan yang tersedia sangat terbatas, sehingga diperlukan perencanaan jangka panjang yang dapat menjadi pedoman untuk pelaksanaan pembangunan jangka pendek agar dapat berkelanjutan.

Tujuan dibentuknya Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU 25/2004) adalah untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dapat terlaksana dengan baik. Konsiderans UU 25/2004 menyatakan bahwa untuk menyempurnakan kemerdekaan dan mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis, diperlukan sebuah sistem yang dapat memastikan pembangunan dilaksanakan secara berjalan efektif, efisien, dan bersasaran. Sistem tersebut merupakan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Materi muatan mengenai SPPN dalam UU 25/2004 kemudian disempurnakan oleh Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (UU 17/2007) Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) beserta perubahannya. Kedua UU tersebut memberikan amanat kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun Dokumen Perencanaan

Pembangunan Daerah (Dokrenda). Dokrenda merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan nasional yang dirinci menjadi tiga macam, yaitu:

- a). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
- b). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan
- c). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Fokus dokumen ini adalah pada Dokrenda yang pertama adalah RPJPD. RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro berwawasan dua puluh tahunan dan memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Penyusunan RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara 2025 – 2045 dilakukan dengan prinsip transparansi, responsivitas, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, partisipasi, keterukuran, keadilan, kesadaran lingkungan, dan keberlanjutan. Oleh karena itu, proses perencanaan pembangunan daerah untuk RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara 2025 – 2045 yang berfokus pada proses ini mengadopsi beberapa pendekatan khusus sebagai berikut.

1. Pendekatan teknokratik diterapkan dengan menggunakan metode dan kerangka pemikiran ilmiah oleh lembaga atau unit kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.
2. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dalam pembangunan. Keterlibatan ini bertujuan untuk memperoleh aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
3. Pendekatan politis menganggap bahwa proses penyusunan rencana berkaitan dengan pemilihan kepala daerah, karena pemilih membuat keputusan berdasarkan program-program pembangunan yang diajukan oleh masing-masing calon kepala daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.
4. Pendekatan *top-down* dan *bottom-up* dalam perencanaan dilakukan sesuai dengan tingkatan pemerintahan. Rencana yang dihasilkan dari proses *top-down* dan *bottom-up* diselaraskan melalui musyawarah di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan.

Selain itu, dalam proses penyusunan RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara 2025–2045, yang merupakan perencanaan pembangunan daerah yang berfokus pada substansi, digunakan beberapa pendekatan khusus sebagai berikut:

1. Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh elemen, bagian, dan

kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor yang mencakup potensi, tantangan, hambatan, dan masalah yang saling terkait, dengan fokus pada kebijakan yang relevan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

2. Pendekatan integratif dalam perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan menggabungkan berbagai kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas untuk mencapai sasaran utama pembangunan daerah.
3. Pendekatan spasial dalam perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan mempertimbangkan prioritas berdasarkan data dan informasi yang akurat serta lokasi yang jelas, sehingga memudahkan proses integrasi dan pemantauan pembangunan di lapangan.

Tak dapat disangkal bahwa pembangunan daerah di era global memerlukan perencanaan yang matang agar dapat memenuhi kebutuhan semua pemangku kepentingan yang terlibat. Daerah memiliki peran krusial dalam mengidentifikasi keunggulannya, baik yang bersifat komparatif maupun kompetitif. Selain mengidentifikasi keunggulan, sangat penting juga untuk memahami masalah dan isu-isu strategis yang dihadapi daerah serta cara mengatasinya.

Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan memerlukan perencanaan yang cermat, tidak hanya berfokus pada masalah atau isu saat ini, tetapi juga harus relevan dengan perubahan di masa depan. Hal ini sangat penting karena Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) mengatur perencanaan daerah untuk 20 tahun ke depan. Selain itu, RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memiliki jangka waktu lima tahun. RPJMD ini kemudian akan diterjemahkan ke dalam Rencana Strategis masing-masing Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renstra SKPD) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahunan.

Pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara telah menunjukkan tanda-tanda menuju arah yang lebih maju. Hal ini terlihat dengan capaian kinerja per tahapan RPJMD yang meraih nilai predikat kerja “tinggi” dan “sangat tinggi” sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 1.1
Capaian Kinerja Per Tahapan RPJPD
Kabupaten Kutai Kartanegara, 2005 - 2025

No	Tahapan RPJPD	Capaian Kinerja	Predikat Kinerja
1	RPJMD 2005-2010	82,53	Tinggi
2	RPJMD 2011-2015	90,95	Sangat Tinggi
3	RPJMD 2016-2020	86,99	Sangat Tinggi
4	RPJMD 2021-2026*	86,23	Sangat Tinggi
Rata-rata		86,68	Sangat Tinggi

*Keterangan: Perhitungan kinerja RPJMD 2021-2026, dua tahun pelaksanaan (2021-2022)

Sumber: Dokumen Evaluasi RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara 2005-2025

Catatan terhadap keberhasilan maupun kelemahan dari pembangunan daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara di atas hanyalah sebagian kecil dari banyaknya indikator pembangunan daerah yang dapat dievaluasi lebih komprehensif dan detail. Selain itu, juga diperlukan persiapan yang matang merespons dinamika pembangunan dalam 20 tahun ke depan (2025-2045) seperti bagaimana dengan menghadirkan analisis isu-isu strategis. Oleh karena itu, guna menyusun kebijakan yang dapat mendukung arah kebijakan nasional dan daerah yang lebih baik, disusunlah dokumen RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2045.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya dalam pengambilan keputusan. Selain itu, dokumen ini juga merujuk pada rencana pembangunan jangka panjang di tingkat nasional dan provinsi untuk periode yang sama, dengan tujuan menciptakan perencanaan pembangunan daerah yang terkoordinasi, terstruktur, transparan, dan akuntabel.

Melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2045, diharapkan terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran bersama dengan alam sebagai upaya mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara. Isi dari RPJPD yang mencakup visi, misi, tujuan, arah, dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah akan menjadi panduan bagi Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mencapai tujuan tersebut hingga tahun 2045, dengan merinci langkah-langkah strategis yang harus diambil.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara 2025 – 2045 berlandaskan pada:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 7) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6766);
- 8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6781);
- 9) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5941);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6323);
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);

- 21) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- 22) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- 23) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 103);
- 24) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Nomor 2022 Nomor 180);
- 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
- 29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- 30) Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 – 2042.

1.3. Hubungan antar Dokumen

RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 – 2045 memiliki hubungan yang erat dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagai berikut:

a) RPJP Nasional 2025 – 2045

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan dengan merujuk pada panduan visi, misi, tujuan, target, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Proses ini mencakup penyelarasan visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Kutai Kartanegara dengan arah kebijakan pembangunan nasional serta arah kebijakan pembangunan kewilayahan di Kalimantan Timur, sesuai dengan mandat yang terdapat dalam RPJPN.

b) RPJPD Provinsi Kalimantan Timur 2025 – 2045

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara dilaksanakan secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur. Dengan demikian, RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara akan tetap selaras dan berpedoman pada visi, misi, tujuan, target, serta arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJPD Provinsi.

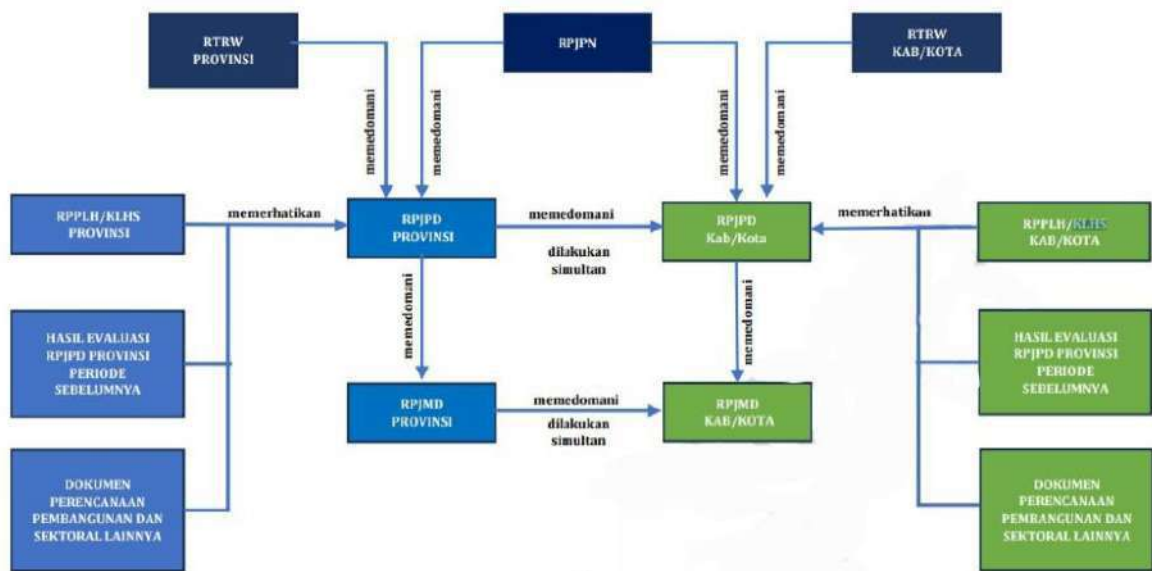
c) RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara 2023 – 2042

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara berpedoman pada Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 – 2042, dengan memperhitungkan pemanfaatan seluruh wilayah daratan, lautan, dan udara. RTRW tersebut mencakup perencanaan terkait tata letak, pemanfaatan, dan pengendalian ruang wilayah yang telah dituangkan dalam RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Secara diagramatis, hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1

Hubungan antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sumber: Instruksi Mendagri Nomor 1 tahun 2024 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Tahun 2025 – 2045

1.4. Maksud dan Tujuan

RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025-2045 ditetapkan dengan maksud:

1. sebagai arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Kutai Kartanegara pada periode 2025-2045.
2. sebagai acuan dan dasar hukum bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan pemerintahan, masyarakat, dunia usaha/swasta, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Kutai dalam 20 tahun mendatang.
3. untuk menjamin terjadinya keterpaduan dan kesinambungan pembangunan yang berkelanjutan dalam jangka panjang sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah dalam mewujudkan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama.

Tujuan RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1. memberikan arah dan acuan bagi para calon Kepala Daerah dalam menyusun visi, misi dan program kerja yang akan disampaikan pada masa pemilihan Kepala Daerah;
2. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan baik antar waktu, antar fungsi pemerintah daerah dan pemerintah pusat;

- 3. mewujudkan partisipasi pemangku kepentingan pembangunan daerah dan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
- 4. menjaga kesinambungan pembangunan daerah yang dilaksanakan dalam waktu lima tahunan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2045 ini didasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. Dalam instruksi tersebut penyusunan RPJPD terdiri atas enam bab utama sebagai berikut.

Tabel 1. 2
Sistematika Penulisan RPJPD
di Kabupaten Kutai Kartanegara 2025 – 2045

Judul Bab	Penjabaran
BAB I PENDAHULUAN Menjelaskan gambaran umum latar belakang urgensi penyusunan RPJPD, dasar hukum yang relevan, hubungan antar dokumen pendukung, maksud dan tujuan, serta sistematika dokumen RPJPD.	1.1. Latar Belakang
	1.2. Dasar Hukum Penyusunan
	1.3. Hubungan antar Dokumen Perencanaan
	1.4. Maksud dan Tujuan
	1.5. Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Menjelaskan kondisi existing baik kondisi alam dan maupun kondisi-kondisi aspek pembangunan daerah sejak 20 tahun terakhir hingga tahun 2025 dengan memperhatikan kondisi data yang tersedia. Selain itu, dilengkapi dengan kajian evaluasi pelaksanaan RPJPD sebelumnya 2005-2025, kajian proyeksi peningkatan demografi dan sarana prasarana, serta kajian pusat pertumbuhan wilayah vital.	2.1. Aspek Geografi dan Demografi
	2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
	2.3. Aspek Daya Saing
	2.4. Aspek Pelayanan Umum
	2.5. Evaluasi Hasil RPJPD
	2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik
	2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah
BAB III PERMASALAHAN & ISU STRATEGIS	3.1. Permasalahan

Judul Bab	Penjabaran
Menjelaskan masalah dan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten saat ini yang akan terus menjadi tantangan hingga 20 tahun ke depan.	3.2. Isu Strategis Daerah
BAB IV VISI & MISI DAERAH	4.1. Visi Pembangunan
Menjelaskan visi dan misi daerah selama 20 tahun ke depan.	4.2. Misi Pembangunan
BAB V ARAH KEBIJAKAN & SASARAN POKOK	5.1. Arah Kebijakan
Merinci arah kebijakan berupa tahapan pembangunan per lima tahun dalam rangka mewujudkan visi daerah hingga tahun 2045.	5.2. Sasaran Pokok RPJPD 2025-2045
BAB VI PENUTUP	Memuat salah satunya tentang manajemen risiko pembangunan daerah dan nasional sebagai bagian dari kaidah pelaksanaan.

Sumber: Instruksi Mendagri Nomor 1 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Untuk dapat merumuskan unsur-unsur yang menjadi masalah dan isu strategis, perlu diketahui dengan *komprehensif* karakteristik dan kondisi daerah. Oleh karena itu, segmen ini akan memberikan gambaran secara deskriptif analitik mengenai 7 (tujuh) hal, yaitu:

- a. kondisi alam/geografis dan perkembangan demografi masyarakat;
- b. dinamika isu kesejahteraan masyarakat multidimensi;
- c. daya saing daerah;
- d. kinerja Pemerintah Daerah selama dua puluh tahun terakhir dalam melayani kebutuhan dasar (*public services*);
- e. refleksi pembangunan dalam dua puluh tahun terakhir berdasarkan hasil evaluasi RPJPD 2005-2025;
- f. proyeksi tren Demografi dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik dalam dua puluh tahun ke depan; dan
- g. bagaimana strategi RPJPN dalam mengembangkan pusat pertumbuhan wilayah di Kalimantan, termasuk daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Aspek Geografi

Pedoman umum dalam aspek geografi dan demografis telah memberikan gambaran setidaknya tentang 4 (empat) hal besar sebagai berikut:

- a. Bagaimana karakteristik geografis berperan strategis dalam pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara selama dua puluh tahun terakhir.
- b. Variabel apa saja yang menjadi potensi Sumber Daya Alam (SDA) Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan dokumen Kajian Lingkungan Hidup dan Strategis (KLHS).
- c. Bagaimana kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan terhadap kebutuhan masyarakat selama ini.
- d. Bagaimana gambaran kualitas lingkungan hidup berdasarkan indeks-indeks lingkungan di Kabupaten Kutai Kartanegara beserta kajian kebencanaannya.

Keempat hal di atas dapat dijelaskan satu persatu sebagai berikut.

2.1.1.1. Peran Strategis Daerah

(1) Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan satu di antara sepuluh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan Perda Nomor 7

Tahun 2023 tentang RTRW Kutai Kartanegara Tahun 2023-2042, luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 25.292,24 km² dan menempatkan Kutai Kartanegara sebagai kabupaten terluas ke-2 di Indonesia setelah Kutai Timur (31.051,71 km²). Kabupaten Kutai Kartanegara terletak antara 115°26' Bujur Timur dan 117°36' Bujur Timur serta di antara 1°28' Lintang Utara dan 1°08' Lintang Selatan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kutai Kartanegara (2023), secara geografis Kabupaten Kutai Kartanegara berbatasan dengan:

- a. Bagian Timur dengan Selat Makassar;
- b. Bagian Barat dengan Kabupaten Kutai Barat;
- c. Bagian Selatan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan; dan
- d. Bagian Utara dengan Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang.

Dengan adanya perkembangan dan pemekaran wilayah dan terbentuknya Ibu Kota Negara Nusantara, Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari 18 kecamatan. Kedelapan belas kecamatan tersebut meliputi Muara Jawa, Sanga-Sanga, Loa Janan, Loa Kulu, Muara Muntai, Muara Wis, Kota Bangun, Kota Bangun Darat, Tenggarong, Sebulu, Tenggarong Seberang, Anggana, Muara Badak, Marangkayu, Muara Kaman, Kenohan, Kembang Janggut, dan Tabang. Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai belasan sungai yang tersebar pada hampir semua kecamatan dan merupakan sarana angkutan utama di samping angkutan darat, dengan sungai yang terpanjang Sungai Mahakam dengan panjang sekitar 920 km.

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki karakteristik wilayah yang terbagi menjadi 3 zona, yakni Zona Hulu, Zona Tengah dan Zona Pesisir.

Zona Hulu dengan karakteristik wilayah dataran, perbukitan dan perairan sungai dengan potensi ekonomi pertanian, perkebunan dan perikanan tangkap dan budidaya perairan sungai, yang terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yakni Kecamatan Tabang, Kembang Janggut, Kenohan, Kota Bangun, Muara Muntai dan Muara Wis.

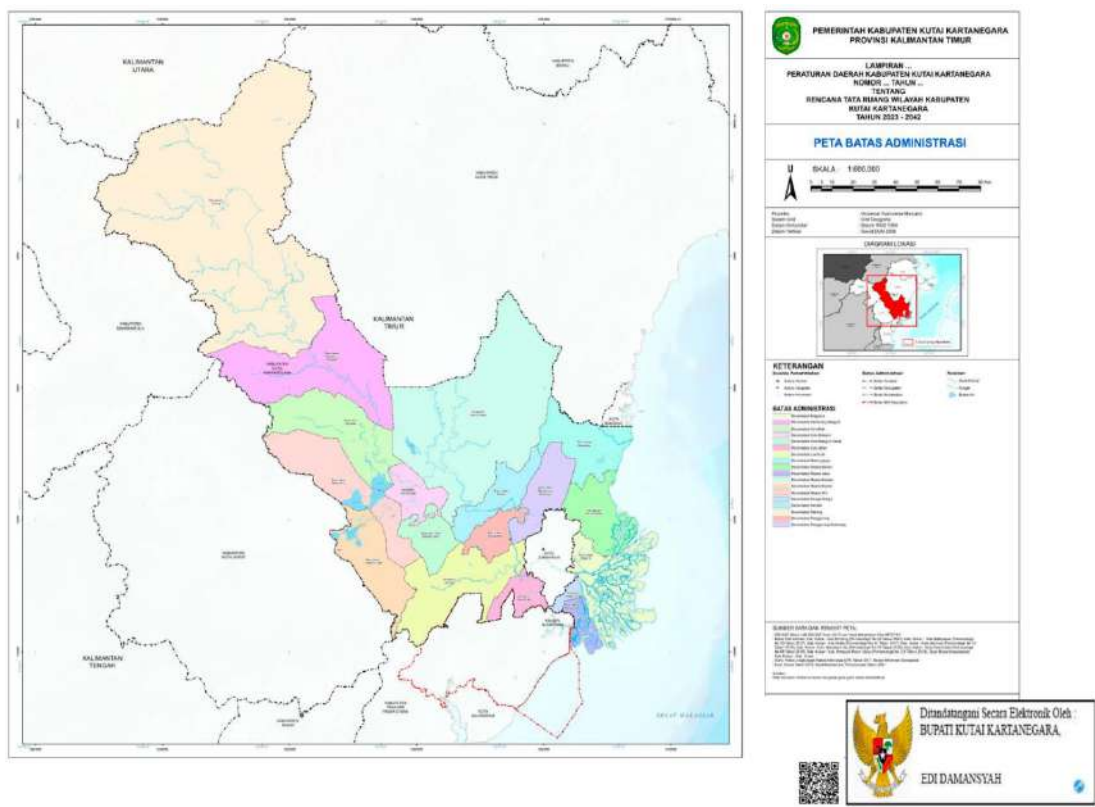
Zona Tengah dengan kecenderungan karakteristik wilayah dataran, perbukitan dan perairan sungai, potensi ekonomi didominasi pertanian, perikanan, perdagangan dan jasa, terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yakni, Kecamatan Muara Kaman, Sebulu, Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Kulu dan Loa Janan.

Zona Pesisir dengan kecenderungan karakteristik wilayah dataran, perbukitan dan perairan laut dan muara, potensi wilayah didominasi oleh pertanian dan perikanan, terdiri dari 5 (lima) kecamatan, yakni Kecamatan Marangkayu, Muara Badak, Sanga- Sanga, Anggana, dan Muara Jawa.

Dari luas area Kutai Kartanegara sekitar 25.368,35 km², direkapitulasi bahwa Tabang merupakan kecamatan dengan cakupan wilayah terbesar ketimbang yang lain, yakni sebesar 8.111,61 km² atau dengan persentase terhadap luas Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 32,07%. Dari dua puluh kecamatan yang ada, Sanga-Sanga menjadi kecamatan dengan luas area terkecil, yaitu 100,36 km² (0,40%). Kehadiran Kota Bangun Darat ditunjang oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 5 Tahun 2020 tentang “Pembentukan Kecamatan Kota Bangun Darat”. Menariknya, terdapat dua wilayah di Kutai Kartanegara yang mempunyai masing-masing satu pulau, yakni Kecamatan Loa Kulu dan Kecamatan Tenggarong.

Gambar 2.1

Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara



Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara 2023-2042

Secara rinci nama kecamatan beserta luas wilayahnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1

Daftar Kecamatan, Ibukota Kecamatan, Luas Area, Persentase Luas, dan Jumlah Pulau di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2022

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Area (km ²)	Persentase terhadap Luas Kab. (%)	Jumlah Pulau
Muara Jawa	Muara Jawa Ulu	204,84	0,81	-
Sanga-Sanga	Sanga-Sanga Dalam	100,36	0,40	-
Loa Janan	Loa Janan Ulu	329,47	1,30	-
Loa Kulu	Loh Sumber	1.365,47	5,38	1
Muara Muntai	Muara Mental Ilir	947,11	3,73	-
Muara Wis	Muara Wis	1.313,84	5,18	-
Kota Bangun	Kota Bangun Uu	441,74	1,74	-
Kota Bangun Darat	Kedang Ipil	460,25	1,81	-
Tenggarong	Melayu	358,48	1,41	1
Sebulu	Sebulu Ilir	600,19	2,37	-
Tenggarong Seberang	Manunggal Jaya	657,28	2,59	-
Anggana	Sungai Meriam	1.068,01	4,21	-
Muara Badak	Muara Badak Ulu	798,54	3,15	-
Marangkayu	Sebuntal	864,85	3,41	-
Muara Kaman	Muara Kaman Ulu	4.238,71	16,71	-
Kenohan	Kahala	1.316,30	5,19	-
Kembang Janggut	Kembang Janggut	2.191,31	8,64	-
Tabang	Sidomulyo	8.111,61	31,98	-
Kutai Kartanegara	Tenggarong	25.368,35	100,00	2

Sumber: Peta Dasar Revisi RTRW 2023-2042 Kutai Kartanegara

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki belasan sungai besar yang tersebar di hampir semua kecamatan. Sungai-sungai ini menjadi jalur lalu-lintas utama di samping angkutan darat. Sungai yang terpanjang adalah Sungai Mahakam (920 kilometer).

Daratan Kabupaten Kutai Kartanegara berupa gugusan gunung dan pegunungan yang terdapat di hampir seluruh kecamatan, ada sekitar 10 gunung di kabupaten ini. Gunung tertinggi adalah Gunung Lengkup (485 mdpl) yang terletak di Kecamatan Loa Kulu. Selain itu, di Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat 16 danau, yang paling luas adalah Danau Semayang (13.000 hektare).

Selain sumber daya alam, letak geografis ini juga memiliki potensi strategis bagi perekonomian. Wilayah Kutai Kartanegara yang terletak di tengah Provinsi Kalimantan Timur menjadikannya sebagai jalur penghubung antar kabupaten. Selain itu, lokasinya yang mengelilingi Kota Samarinda, serta berdekatan dengan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara berpengaruh pada semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi di kabupaten ini.

(2) Kondisi Topografi

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Kutai Kartanegara 2025-2045, kondisi topografi wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagian besar bergelombang dan berbukit dengan kelerengan yang didominasi oleh kelas datar (0-8%) yang mencapai 71,94% dari total luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Daerah dengan kelas kemiringan datar terutama terdapat di wilayah pantai dan daerah aliran Sungai Mahakam. Pada wilayah pedalaman dan perbatasan umumnya merupakan daerah kawasan pegunungan. Sementara itu terdapat 0,10% atau seluas 2.637,64 Ha yang tidak memiliki data dikarenakan beberapa sebab, di antaranya wilayah tersebut tertutup awan saat satelit merekam citra di daerah tersebut.

Tabel 2.2

Luas Area untuk Tiap Kelas Lereng di Kabupaten Kutai Kartanegara

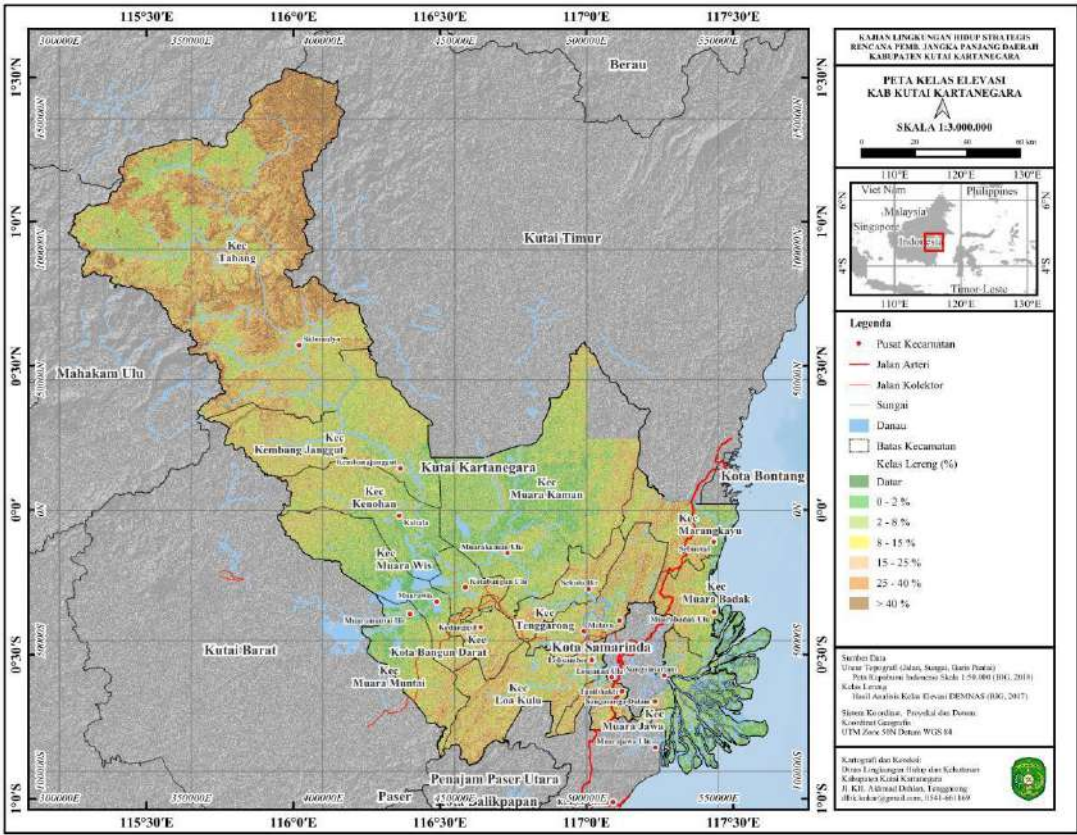
Kecamatan	Luas Kelas Kelerengan (Ha)							Total (Ha)
	0-2%	2-8%	8-15%	15-25%	25-40%	>40%	No Data	
Anggana	104.889,49	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,91	106.801,32
Kembang Janggut	189.325,81	19.084,84	8.498,01	2.077,58	0,00	0,00	68,61	219.130,52
Kenohan	128.555,94	2.988,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4,64	131.629,81
Kota Bangun	43.936,51	104,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.173,71
Kota Bangun Darat	29.051,41	12.507,87	4.430,45	0,00	0,00	0,00	0,00	46.024,94
Loa Janan	31.813,71	1.079,89	20,79	0,00	0,00	0,00	19,19	32.946,96
Loa Kulu	82.738,30	27.262,24	26.225,82	206,88	0,00	0,00	25,61	136.546,90
Marangkayu	78.324,99	7.810,88	267,53	0,00	0,00	0,00	42,79	86.484,58
Muara Badak	72.601,40	1.117,73	32,41	0,00	0,00	0,00	99,12	79.853,94
Muara Jawa	20.384,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,41	20.484,22
Muara Kaman	417.299,62	6.226,63	5,48	0,00	0,00	0,00	54,45	423.870,60
Muara Muntai	77.306,37	6.740,42	10.539,60	44,41	0,00	0,00	45,90	94.711,27
Muara Wis	125.974,88	4.790,09	427,23	0,00	0,00	0,00	0,68	131.384,18

Kecamatan	Luas Kelas Kelerengan (Ha)							Total (Ha)
	0-2%	2-8%	8-15%	15-25%	25-40%	>40%	No Data	
Sanga-Sanga	9.987,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,47	10.035,55
Sebulu	53.472,76	6.022,81	474,91	0,00	0,00	0,00	0,00	60.019,35
Tabang	93.657,47	63.205,67	137.452,51	213.544,89	270.506,43	32.067,09	114,40	811.160,78
Tenggarong	35.747,51	72,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.848,35
Tenggarong Seberang	57.289,20	8.230,28	155,55	0,00	0,00	0,00	2,45	65.728,13
Kutai Kartanegara	1.652.357,72	167.251,41	188.530,29	215.873,76	270.506,43	32.067,09	2.637,64	2.536.835,10

Sumber: Dokumen Induk KLHS RPJPD Kutai Kartanegara 2025-2045

Gambar 2.2

Peta Topografi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024



Sumber: Dokumen Induk KLHS RPJPD Kutai Kartanegara 2025-2045

(3) Kondisi Geologi

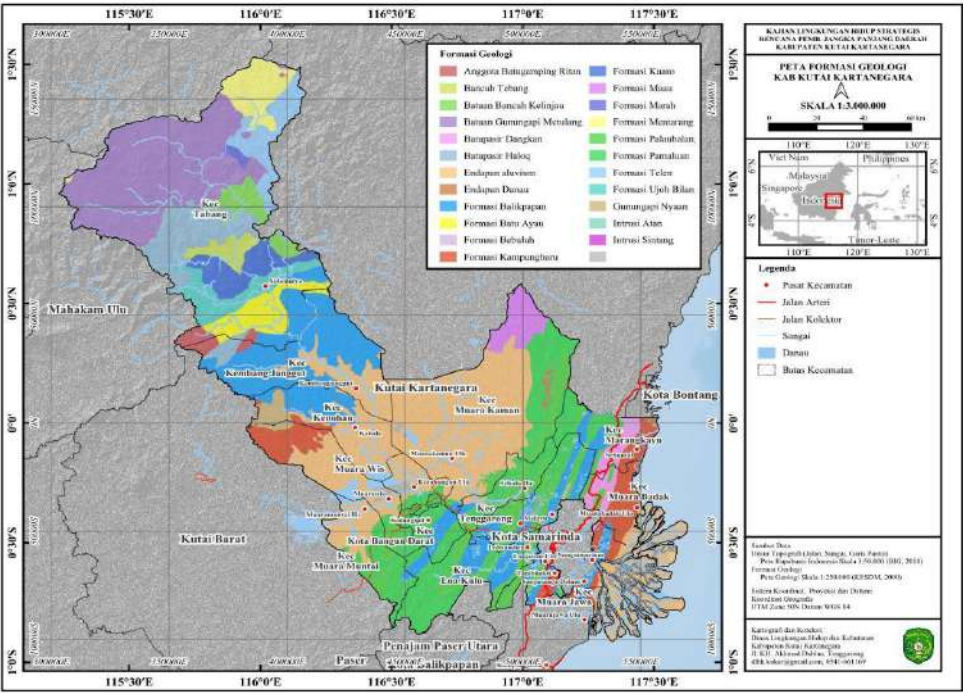
Berdasarkan dokumen KLHS RPJPD Kutai Kartanegara 2025-2045, Formasi geologi pembentuk wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara didominasi dengan formasi endapan aluvium seluas 644.389,23 Ha atau sekitar 25,48% dari total luas wilayah daerah ini. Endapan aluvium ini berwarna abu-abu gelap hingga hitam terdiri atas lumpur organik, lempung, dan sedikit pasir halus,

mengandung material organik dan akar tumbuh-tumbuhan. Endapan ini bersifat lepas, lembek, dan sangat lunak serta jenuh air. Formasi ini sebagian besar terdapat di Kecamatan Muara Kaman, Muara Muntai, Kota Bangun, Muara Wis dan Kenohan.

Formasi selanjutnya yang mendominasi Kabupaten Kutai Kartanegara adalah formasi Balikpapan seluas 369.275,49 Ha atau sekitar 14,60% dari total luas wilayah ini. Formasi Balikpapan berumur miosen akhir bagian bawah hingga miosen tengah bagian atas. Formasi ini terdiri dari siklus endapan laut dangkal yang membentuk batuan sedimen klastik dan batuan sedimen biokimiawi. Pada lingkungan pengendapan laut dangkal saat persediaan sedimen di daratan diangkut menuju laut, maka perselingan pasir, lempung dan lanau akan diendapkan. Endapan ini terkompaksi, diagenesa, sementasi dan menjadi batuan sedimen klastik. Formasi ini banyak terdapat di Kecamatan Tabang, Kembang Janggut, Tenggarong, Loa Kulu dan Kota Bangun Darat.

Gambar 2.3

Peta Formasi Geologi di Kabupaten Kutai Kartanegara 2024.



Sumber: Dokumen Induk KLHS RPJPD Kutai Kartanegara 2025-2045.

Tabel 2.3

Luas Formasi Geologi di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2024

Formasi	Luas (Ha)	Formasi	Luas (Ha)
Anggota Batugamping Ritan	19.872,67	Formasi Kuaro	57.055,66
Bancuh Tebang	24.240,40	Formasi Maaui	40.956,11
Batuan Bancuh Kelinjau	36.594,22	Formasi Marah	5.392,90
Batuan Gunungapi Metulang	315.697,51	Formasi Mentarang	58.699,68
Batupasir Dangkan	34.288,25	Formasi Palaubalang	178.325,79
Batupasir Haloq	103.657,83	Formasi Pamaluan	283.594,70
Endapan aluvium	644.389,23	Formasi Telen	59.195,70
Endapan Danau	5.196,56	Formasi Ujoh Bilang	54.713,19
Formasi Balikpapan	369.275,49	Gunungapi Nyaan	19.750,42
Formasi Batu Ayau	54.785,61	Intrusi Atan	846,98
Formasi Bebuluh	1.307,86	Intrusi Sintang	66,02
Formasi Kampungbaru	113.992,55	Total	2.536.835,10

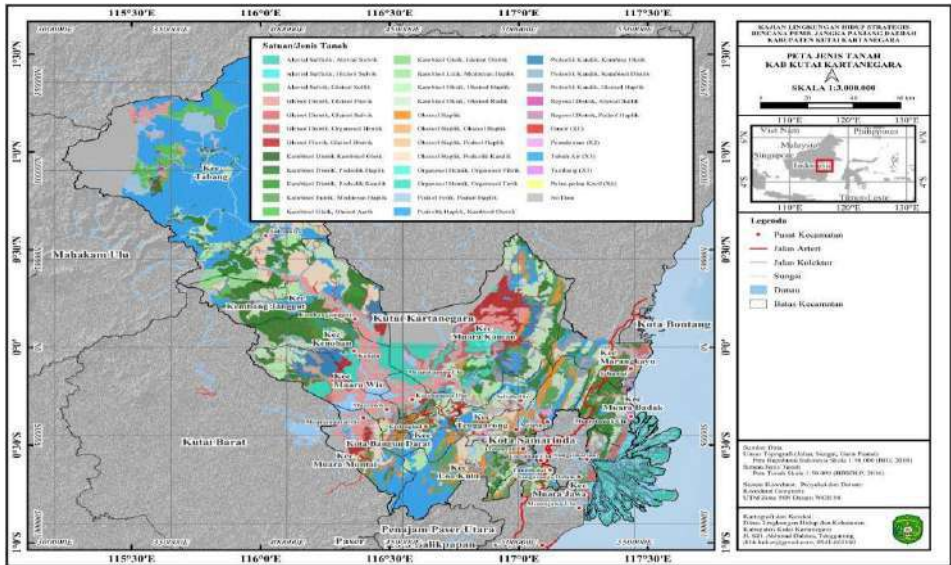
Sumber: Dokumen Induk KLHS RPJPD Kutai Kartanegara 2025-2045.

(4) Kondisi Tanah

Sebanyak 24,42% atau seluas 617.599,28 Ha wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara didominasi oleh tanah Podsolik Haplik, Kambisol Distrik. Jenis tanah ini memiliki ciri drainase baik, tekstur halus, sangat masam, memiliki kapasitas tukar kation yang rendah dan kejenuhan basa tanah yang sangat rendah. Tanah ini termasuk ke dalam jenis tanah yang terbentuk dari suhu rendah dengan curah hujan yang tinggi dengan bahan induk berupa batu liat. Jenis tanah ini merupakan salah satu jenis tanah yang termasuk ke dalam kelompok tanah mineral tua dengan warna kemerahan maupun kekuningan dan biasanya terdapat di daerah yang memiliki relief berbukit kecil.

Gambar 2.4

Peta Jenis Tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2024



Sumber: Dokumen Induk KLHS RPJPD Kutai Kartanegara 2025-2045.

Tabel 2.4
Jenis Tanah yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2024

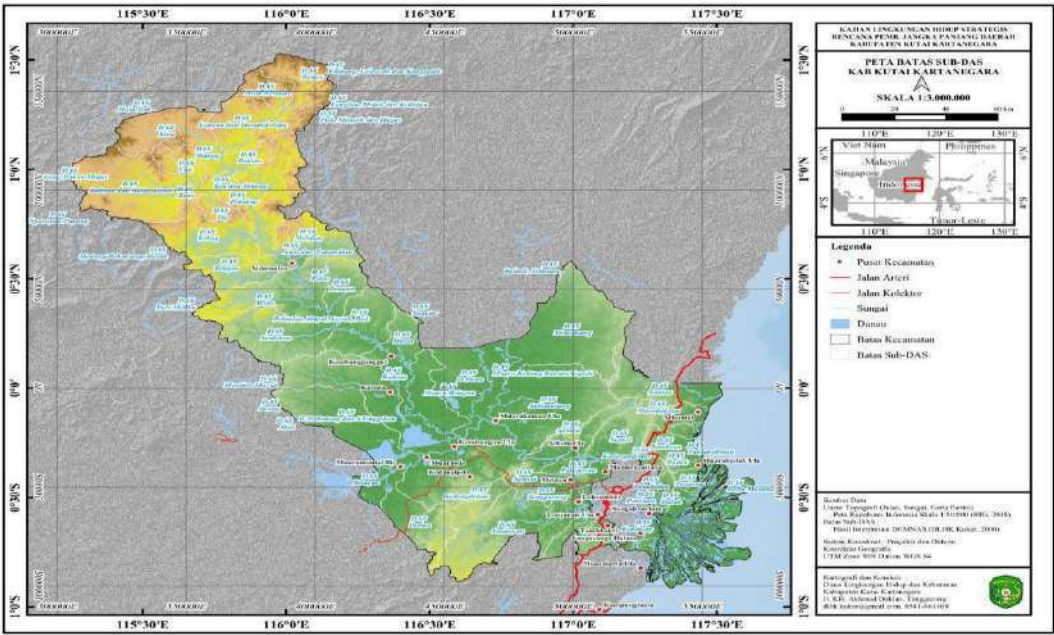
Jenis Satuan Tanah	Luas (Ha)	Jenis Satuan Tanah	Luas (Ha)
Aluvial Sulfurik, Aluvial Sulvik	100.319,83	Kambisol Oksik, Oksisol Rodik	204.573,51
Aluvial Sulfurik, Gleisol Sulvik	12.405,65	Oksisol Haplik	64.418,34
Aluvial Sulvik, Gleisol Sulfik	1.506,28	Oksisol Haplik, Oksisol Haplik	1.589,64
Gleisol Distrik, Gleisol Fluvik	189.170,97	Oksisol Haplik, Podsol Haplik	1.419,36
Gleisol Distrik, Gleisol Sulvik	17.288,66	Oksisol Haplik, Podsolik Kandik	88.005,18
Gleisol Distrik, Organosol Hemik	23.313,95	Organosol Hemik, Organosol Fibrik	8.428,25
Gleisol Fluvik, Gleisol Distrik	149.220,30	Organosol Hemik, Organosol Terik	73.707,02
Kambisol Distrik Kambisol Gleik	7.464,38	Podsol Ferik, Podsol Haplik	31.393,19
Kambisol Distrik, Podsolik Haplik	243.386,33	Podsolik Haplik, Kambisol Distrik	617.599,28
Kambisol Distrik, Podsolik Kandik	16.278,12	Podsolik Kandik, Kambiso Oksik	48.653,03
Kambisol Eutrik, Mediteran Haplik	127.987,54	Podsolik Kandik, Kambisol Distrik	4.118,73
Kambisol Gleik, Gleisol Aerik	45.232,92	Podsolik Kandik, Oksisol Haplik	48.330,66
Kambisol Gleik, Gleisol Distrik	37.495,81	Regosol Distrik, Aluvial Sulfik	872,20
Kambisol Litik, Mediteran Haplik	17.577,70	Regosol Distrik, Podsol Haplik	6.653,43
Kambisol Oksik, Oksisol Haplik	62.356,84	Total	2.536.835,10

Sumber: Dokumen Induk KLHS RPJPD Kutai Kartanegara 2025-2045.

(5) Kondisi Hidrogeologi

Kondisi hidrologi wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat berupa air permukaan maupun air bawah permukaan (air tanah). Air permukaan tercermin sebagai aliran sungai yang terbagi menjadi beberapa DAS (daerah aliran sungai), mata air, dan cekungan air tanah (CAT). Sungai merupakan bagian penting dari DAS, sangat berperan penting bagi kehidupan dan aktivitas masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara. Secara keseluruhan terdapat 5 DAS di wilayah ini yang terdiri dari 74 buah Sub DAS di mana 24 di antaranya tidak termasuk di dalam kelima DAS yang ada. Hal ini dapat disebabkan sub DAS tersebut berada di perbatasan wilayah sehingga sub-sub DAS tersebut masuk ke DAS yang berada di wilayah lain atau berada di garis pantai. Gambar berikut menampilkan DAS dan Sub DAS yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara yang rinciannya disajikan pada tabel selanjutnya.

Gambar 2.5
Peta Jaringan Sungai di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2024



Sumber: Dokumen Induk KLHS RPJPD Kutai Kartanegara 2025-2045

Tabel 2.5
DAS dan Sub DAS yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2024

Nama DAS dan Sub DAS		Luas (Ha)	Nama DAS dan Sub DAS		Luas (Ha)
DAS Belayan			DAS Kelinjau-Telen		
1	Atan dan Tamandiun	8.692,01	39	Beliwit, Jelmuan	1.003,44
2	Bean	3.683,08	40	Embung, Lelensoh dan Kongpetak	488,54
3	Belayo	46.989,30	41	Longlun, Melah dan Kelinjau	304,81
4	Belinau dan Belinau Lesot	125.472,43	42	Puh, Menyok dan Hagar	901,67
5	Bengen	48.946,23	43	Senyiur	1.026,98
6	D Semayang dan S Lamintelihan	120.825,19	Luas DAS Kelinjau-Telen		3.725,44
7	Hiran	26.550,05	DAS Mahakam		
8	Hulu Belayan	26.258,09	44	Bakung-Dawin-Mujut	330,13
9	Jumahang dan Melafang	44.453,88	45	Hulu Boh	92,42
10	Kahala	22.727,75	46	Karangmumus	9.302,56
11	Kebaq	73.365,93	47	Medang-Belenoang-Merah	239,49
12	Keq dan Tokong	8.096,98	48	Menihin-Muyub	1.322,60
13	Kiau	68.127,55	49	Ngaruyan-Payang	3,30
14	Lanyau dan Tawang Kelapa	31.090,04	50	Pari-Melibu	272,20
15	Lau dan Matelai	91.872,91	Luas DAS Mahakam		11.562,70
16	Melajan	48.780,62	Tidak Ada Data		
17	Muara Belayan	46.523,25	51	Badak	7.781,19
18	Mupoq	21.636,56	52	Buluh	6.402,37
19	Niruk, Tengkeran dan Tembutuk	18.981,09	53	Delta Mahakam	116.173,97
20	Pekakap	9.872,79	54	Haji Brahim	6.513,39

Nama DAS dan Sub DAS		Luas (Ha)	Nama DAS dan Sub DAS		Luas (Ha)
21	Pelanjau, Hapai, Lurah, Buk	42.673,96	55	Jembayan	133.740,87
22	Peleo	21.393,38	56	Kedang Dalam	13.358,76
23	Penoon	36.523,90	57	Kembang	4.299,32
24	Peuleu	17.848,58	58	Lacengek-Bosang	5.886,91
25	Ritan	66.291,18	59	Loa Haur	22.579,17
26	Sentekan	85.671,11	60	Mangkurawang	11.554,93
27	Tiq	13.715,75	61	Marangkayu	24.718,64
28	Ugu	17.854,62	62	Nilam	4.179,85
Luas DAS Belayan		1.194.918,21	63	Palujawan	15.023,07
DAS Bongan-Kedang Pahu			64	Pangkalan	11.216,10
29	Abid	148,60	65	Panjang	3.637,26
30	Bongan	24.326,25	66	Pantuan	4.376,74
31	D Melintang dan S Enggelam	104.067,81	67	Sambera	19.982,02
32	Jawaq	53,00	68	Sanga-sanga	5.736,23
33	Perian	52.725,06	69	Santan	54.148,09
34	Wis-Kedang Ipil	125.215,30	70	Sebulu	37.013,99
Luas DAS Bongan-Kedang Pahu		306.536,02	71	Senoni	15.053,76
DAS Kedang Rantau-Kedang Kepala			72	Separi	45.205,42
35	D Siran	63.861,87	73	Tanjung Limau	5.610,75
36	Menamang	156.285,58	74	Tenggarong	24.293,42
37	Muara Kedang Rantau/Kepala	32.896,41	75	Tidak Ada Data	21.251,38
38	Sabintulung	139.700,50	Luas DAS		619.737,60
Luas DAS Kedang Rantau-Kedang Kepala		392.744,36	Total Luas DAS		2.536.835,10

Sumber: Dokumen Induk KLHS RPJPD Kutai Kartanegara 2025-2045

Sementara itu, terdapat 5 Cekungan Air Tanah (CAT) di Kabupaten Kutai Kartanegara yang berada di 16 kecamatan dari 20 kecamatan. Cekungan Air Tanah (CAT) adalah suatu wilayah untuk cadangan penyimpanan air yang terdapat di bawah tanah dalam waktu tertentu, yang memiliki batasan hidrogeologis sesuai dengan daerahnya masing- masing. Dari total 931.329,14 Ha luas CAT yang ada di Kutai Kartanegara, 64,57%-nya atau 601.333,16 Ha merupakan CAT Sendawar yang meliputi Kecamatan Kembang Janggut, Kenohan, Kota Bangun, Muara Kaman, Muara Muntai, Muara Wis dan Sebulu.

Tabel 2.6

DAS dan Sub DAS yang Ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2024

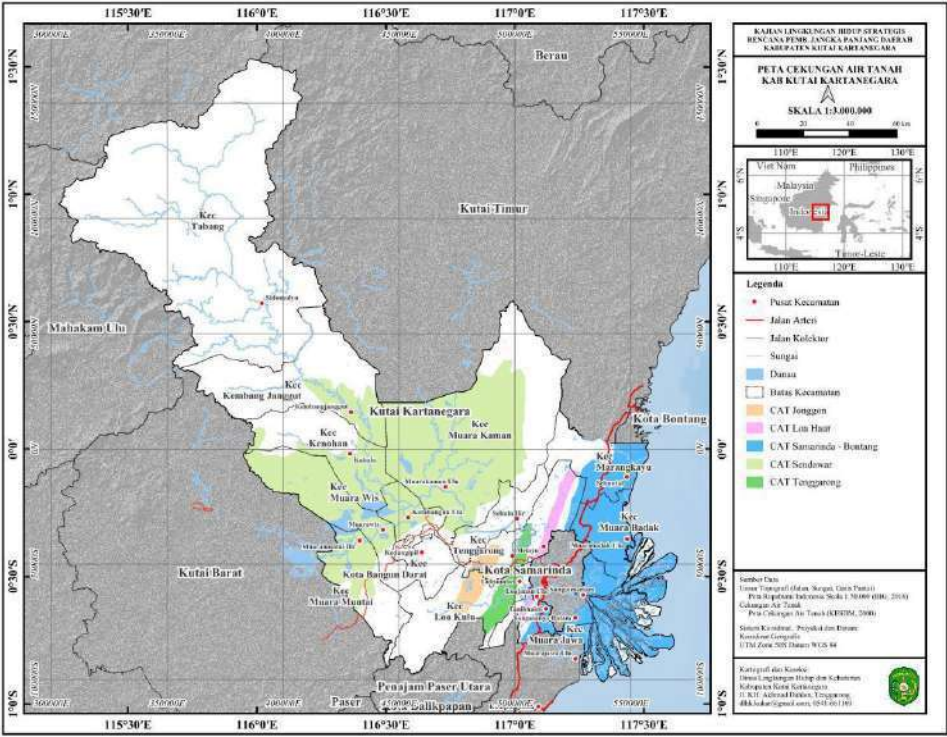
Kecamatan	Luas CAT (Ha)	Kecamatan	Luas CAT (Ha)
CAT Samarinda-Bontang		CAT Jonggon	
• Anggana	90.203,20	• Loa Kulu	16.017,38
• Loa Janan	11.943,13	• Tenggarong	10.998,23
• Marangkayu	46.682,55	Luas CAT Jonggon	
• Muara Badak	65.874,33	CAT Loa Haur	
• Muara Jawa	15.894,48	• Loa Janan	3.949,88
• Sanga-Sanga	10.035,55	• Loa Kulu	459,17
• Tenggarong Seberang	7.817,67	• Marangkayu	469,33

Kecamatan	Luas CAT (Ha)	Kecamatan	Luas CAT (Ha)
Luas CAT Samarinda-Bontang	248.450,90	• Tenggarong Seberang	16.759,99
CAT Sendawar		Luas CAT Loa Haur	21.638,38
• Kembang Janggut	46.535,60	CAT Tenggarong	
• Kenohan	62.471,30	• Loa Janan	234,01
• Kota Bangun	34.785,01	• Loa Kulu	22.296,99
• Muara Kaman	292.731,34	• Sebulu	55,81
• Muara Muntai	51.104,71	• Tenggarong	4.461,68
• Muara Wis	108.381,35	• Tenggarong Seberang	5.842,61
• Sebulu	5.323,84	Luas CAT Tenggarong	32.891,10
Luas CAT Sendawar	601.333,16	Total Luas CAT	931.329,14

Sumber: Dokumen Induk KLHS RPJPD Kutai Kartanegara 2025-2045

Gambar 2.6

Peta Cekungan Air Tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2024



Sumber: Dokumen Induk KLHS RPJPD Kutai Kartanegara 2025-2045

CAT merupakan tempat semua kejadian *hidrogeologis* seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung di suatu wilayah yang dibatasi oleh batas *hidrogeologis*. Peta CAT yang ada digunakan sebagai acuan pembuatan tata ruang sumber daya air, termasuk di antaranya air tanah yang digunakan dalam berbagai kegiatan manusia, baik untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, kegiatan industri, pertanian, perikanan, jasa, termasuk di antaranya kegiatan pariwisata.

(6) Kondisi Curah Hujan

Curah hujan merupakan ketinggian air hujan yang terkumpul dalam tempat yang datar, tidak menguap, tidak meresap dan tidak mengalir. Satuan curah hujan yang umum digunakan di Indonesia adalah dalam satuan milimeter (mm). Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana juga wilayah lainnya di Indonesia beriklim tropis yang memiliki dua musim, yakni musim hujan dan musim kemarau.

Berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang dikutip dari BPS, curah hujan tertinggi di tahun 2023 terjadi pada bulan April, yaitu 303,3 mm namun hari hujan terbanyak di tahun tersebut terjadi pada bulan Maret, yakni 25 hari. Sementara masih berdasarkan sumber data yang sama, curah hujan terendah di tahun 2023 terjadi pada bulan Agustus, yakni 45 mm dengan hari hujan 8 hari yang merupakan jumlah hari hujan paling sedikit di tahun tersebut. Pada tabel berikut disajikan data curah hujan dan jumlah hari hujan yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam periode 2015-2023.

Tabel 2.7
Curah Hujan dan Jumlah Hari Hujan di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2015-2023

Bulan	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	CH	HH	CH	HH	CH	HH	CH	HH	CH	HH	CH	HH	CH	HH	CH	HH	CH	HH
Januari	317	62	130	6	241	15	306	18	190	12	241	11	241	11	279	23	144	21
Februari	339	20	113	8	118	7	127	11	104	6	141	7	141	7	190	22	153	19
Maret	336	19	125	9	199	11	269	13	254	12	123	8	123	8	317	26	232	25
April	339	20	186	9	365	13	206	15	191	11	190	11	190	11	202	24	303	20
Mei	262	19	199	13	200	13	153	12	129	12	291	14	291	14	250	24	177	21
Juni	280	20	121	11	144	10	149	10	263	13	181	15	181	15	154	24	230	23
Juli	76	7	135	10	157	10	100	9	70	6	167	15	167	15	176	24	72	11
Agustus	27	5	84	7	146	12	74	6	66	5	148	12	148	12	166	25	45	8
September	16	2	196	14	103	10	82	6	34	4	207	18	207	18	225	24	134	13
Oktober	82	7	264	18	155	11	176	12	178	12	223	14	223	14	243	26	111	16
November	172	17	216	11	214	11	206	14	137	10	250	15	250	15	198	24	283	19
Desember	233	14	291	18	212	12	186	12	223	12	226	16	226	16	169	22	159	22
Jumlah	2.479	212	2.060	134	2.254	135	2.034	138	1.839	115	2.388	156	2.388	156	2.569	288	2.043	218
Rata-rata	207	18	172	11	188	11	170	12	153	10	199	13	199	13	214	24	170	18

Sumber: Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Angka 2022-2024 (BPS)

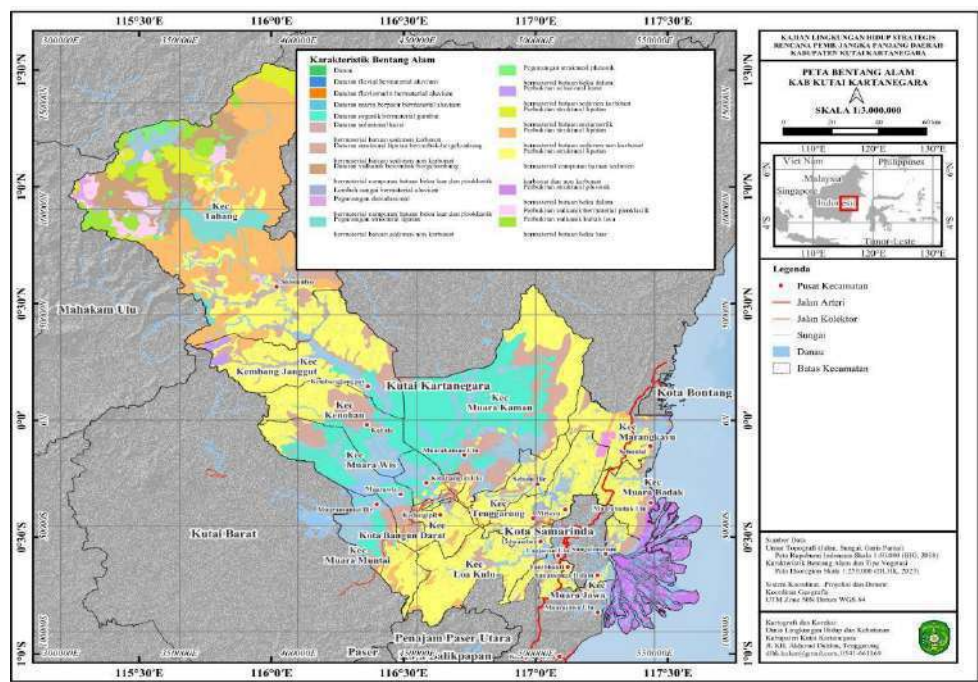
(7) Kondisi Ekoregion

A. Bentang Alam

Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup (Pasal 1 angka 29 UUPPLH 32/2009). Lebih lanjut dalam Pasal 7 ayat (2) pada undang-undang yang sama dijelaskan bahwa penetapan batas ekoregion dengan mempertimbangkan kesamaan dalam hal: karakteristik bentang alam (*natural landscape*), daerah aliran sungai, iklim, flora dan fauna asli, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat dan hasil inventarisasi lingkungan hidup. Merujuk kepada undang-undang tersebut, maka identifikasi bentang alam geografis memegang peranan penting dalam penyusunan satuan ekoregion sebagai kerangka dasar bagi perumusan seluruh kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sejak tahap perencanaan hingga pengawasan dan pengendaliannya. Wilayah ekoregion di Indonesia telah ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021 tentang Penetapan Karakteristik Bentang Alam dan Karakteristik Vegetasi Alami Peta Wilayah Ekoregion Indonesia Skala 1:250.000. Satuan ekoregion tersusun atas beberapa pertimbangan, dengan aspek utama penyusun adalah bentang alam.

Kabupaten Kutai Kartanegara didominasi oleh bentang alam perbukitan struktural lipatan bermaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat yang mencakup 34,91% dari luas keseluruhan wilayah atau seluas 882.882,42 Ha. Perbukitan struktural lipatan bermaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat ini memiliki struktur batuan sedimen campuran (karbonat dan non karbonat) yang biasanya terdapat pada vegetasi hutan *dipterokarpa pamah*. Bentang alam ini mempunyai potensi tinggi, antara lain pada jasa lingkungan pengatur perlindungan bencana, jasa lingkungan *ekoturisme* dan jasa lingkungan pendukung *biodiversitas*.

Gambar 2.7
Peta Bentang Alam Kabupaten Kutai Kartanegara, 2024



Sumber: Dokumen Induk KLHS RPJPD Kutai Kartanegara 2025-2045

Bentang alam dominan kedua adalah bentang alam perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat yang mencakup 13,57% dari total luas Kabupaten Kutai Kartanegara atau seluas 343.195,75 Ha. Sebagaimana bentang alam perbukitan struktural lipatan bermaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat, karakteristik bentang alam ini juga biasanya terdapat pada vegetasi hutan dipterokarpa pamah dengan struktur batuan sedimen non karbonat. Jenis bentang alam ini mempunyai potensi tinggi, antara lain pada jasa lingkungan penyedia air, jasa lingkungan pengatur tata aliran air dan banjir, dan jasa lingkungan pengatur perlindungan bencana.

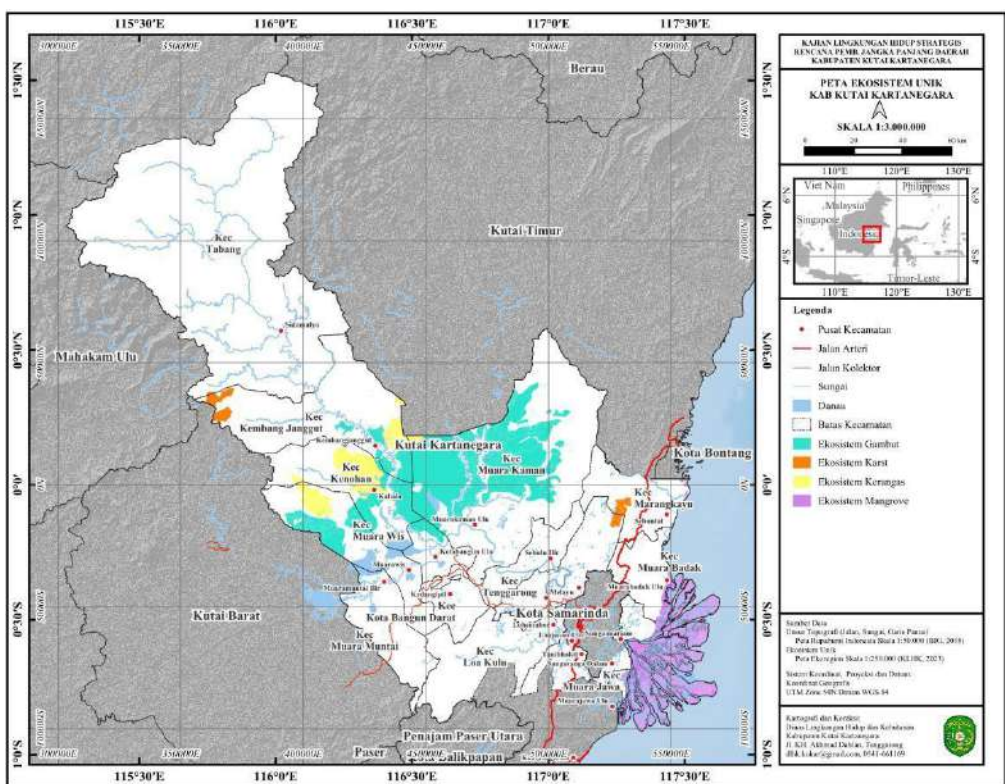
Bentang alam dataran organik bermaterial gambut menduduki posisi ketiga dengan luas mencapai 12,47% dari total luas Kabupaten Kutai Kartanegara atau seluas 315.375,94 Ha. Satuan bentang alam dataran organik bermaterial gambut merupakan bentang alam yang umumnya ditemukan di lokasi rawa gambut yang memiliki penutup lahan berupa padang rumput. Bentang alam ini mempunyai potensi tinggi, antara lain pada jasa lingkungan penyedia air.

B. Ekosistem Unik

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki 4 (empat) ekosistem unik yang termasuk ekosistem langka seluas 438.304,18 Ha atau sekitar 17,33% dari total luas wilayah ini. Keempat ekosistem tersebut adalah ekosistem karst, gambut, kerangas dan mangrove yang tersebar di beberapa kecamatan. Bahkan ekosistem kerangas termasuk ekosistem yang terancam di mana ekosistem ini terdapat di Kecamatan Kembang Janggut, Kenohan, Muara Kaman dan Muara Wis dengan luas 53.578,40 Ha.

Gambar 2.8

Peta Ekosistem Unik di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2024



Sumber: Dokumen Induk KLHS RPJPD Kutai Kartanegara 2025-2045

Tabel berikut menyajikan rincian luasan ekosistem unik yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 2.8

Luas Ekosistem Unik di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2024

Ekosistem Unik	Luas (Ha)	Ekosistem Unik	Luas (Ha)
Ekosistem Karst		Ekosistem Kerangas	
• Kecamatan Kembang Janggut	6.997,94	• Kecamatan Kembang Janggut	10.918,29
• Kecamatan Marangkayu	3.191,28	• Kecamatan Kenohan	28.817,27
• Kecamatan Tabang	276,35	• Kecamatan Muara Kaman	2.210,87
• Kecamatan Tenggarong Seberang	2.010,99	• Kecamatan Muara Wis	11.631,96
Luas Ekosistem Karst	12.476,55	Luas Ekosistem	53.578,40

Ekosistem Unik	Luas (Ha)	Ekosistem Unik	Luas (Ha)
		Kerangas	
Ekosistem Gambut		Ekosistem Mangrove	
• Kecamatan Kembang Janggut	15.897,71	• Kecamatan Anggana	87.128,38
• Kecamatan Kenohan	24.699,37	• Kecamatan Marangkayu	984,93
• Kecamatan Kota Bangun	5.790,31	• Kecamatan Muara Badak	22.680,83
• Kecamatan Muara Kaman	171.044,53	• Kecamatan Muara Jawa	16.289,38
• Kecamatan Muara Muntai	135,94	• Kecamatan Sanga-Sanga	53,59
• Kecamatan Muara Wis	27.544,26	Luas Ekosistem Mangrove	127.137,11
Luas Ekosistem Gambut	245.112,11	Total Luas	438.304,18

Sumber: Dokumen Induk KLHS RPJPD Kutai Kartanegara 2025-2045

C. Vegetasi Alami

Vegetasi alami adalah mosaik komunitas tumbuhan dalam lanskap yang belum dipengaruhi oleh kegiatan manusia. Vegetasi alami beradaptasi dengan lingkungannya dan karena itu ada dalam keharmonisan dengan unsur-unsur lain dari lanskap. Vegetasi alami bukan hanya merupakan sebuah komponen dari keanekaragaman hayati yang menyediakan sumber daya alam, tetapi juga mempunyai peran penting dalam segi hidrologi dan perbaikan iklim. Dengan demikian luasan, kualitas dan keanekaragaman vegetasi alami setiap lanskap perlu dikonservasi secara maksimal. Struktur, komposisi jenis dan sebaran geografi vegetasi ditentukan oleh faktor lingkungan, terutama iklim dan tanah. Hubungan antara vegetasi dan tanah sangat erat sehingga dapat dianggap sebagai suatu keutuhan (*entity*). Lingkungan tumbuhan adalah semua faktor (terutama suhu, air, kimia dan fisik) yang mempengaruhinya (habitat).

Tabel 2.9

Luas Vegetasi Alami Berdasarkan Tipe Vegetasi di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2024

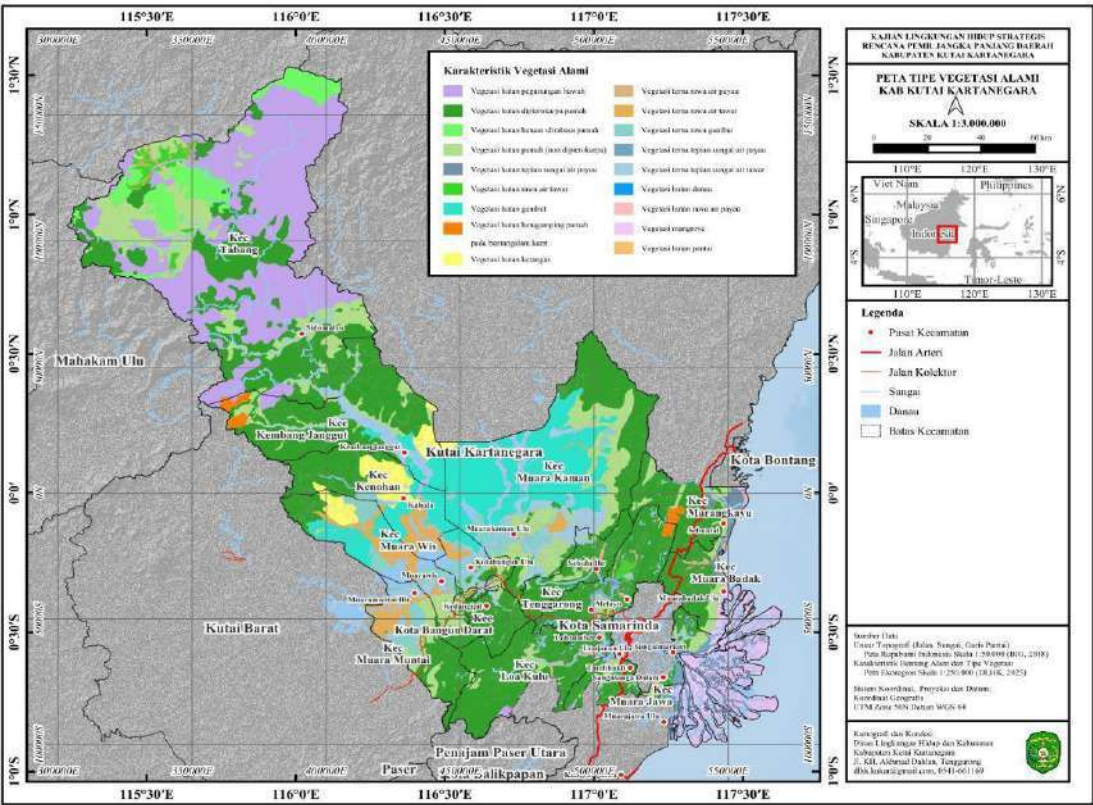
No	Tipe Vegetasi Alami	Luas	
		Ha	%
1	Hutan batuan ultra basa pamah	73.061,80	2,89
2	Hutan batu gamping pamah pada bentang alam karst	12.439,12	0,49
3	Hutan danau	25.016,27	0,99
4	Hutan dipterokarpa pamah	979.457,89	38,73
5	Hutan gambut	244.376,75	9,66
6	Hutan kerangas	53.417,66	2,11
7	Hutan pamah (non dipterokarpa)	327.550,41	12,95
8	Hutan pantai	1.960,78	0,08

9	Hutan pegunungan bawah	385.441,88	15,24
10	Hutan rawa air payau	75,67	0,00
11	Hutan rawa air tawar	19.433,86	0,77

Sumber: Dokumen Induk KLHS RPJPD Kutai Kartanegara 2025-2045

Gambar 2.9

Peta Tipe Vegetasi Alami di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2024



Sumber: Dokumen Induk KLHS RPJPD Kutai Kartanegara 2025-2045

Tipe vegetasi alami yang paling luas penyebarannya di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah hutan dataran rendah dipterocarpa atau dikenal juga dengan sebutan hutan *dipterocarpa pamah* (*Lowland Dipterocarp Forest*). Vegetasi ini menguasai 38,73% dari luas Kabupaten Kutai Kartanegara atau seluas 979.457,89 Ha. Tipe hutan ini umumnya tumbuh pada tanah podsolik merah kuning pada elevasi 0-1000 mdpl. Kanopi utama hutan mencapai 30-45 m dengan tinggi pohon hingga 60 m. Disebut hutan Dipterocarpa karena tipe hutan ini didominasi oleh jenis-jenis tumbuhan dari suku Dipterocarpaceae, terutama marga Anisoptera, Balanocarpus, Cotylelobium, Dipterocarpus, Dryobalanops, Hopea, Parashorea, Shorea, Upuna dan Vatica. Tidak jarang dalam satu lokasi, beberapa jenis Dipterocarpaceae tumbuh bersama-sama dan menguasai kanopi atas. Sebagian besar jenis-jenis Dipterocarpaceae terdapat pada daerah beriklim basah, kelembaban tinggi, pada ketinggian tempat 0 -800 mdpl dan curah hujan di atas 2000 mm/tahun dengan musim kemarau yang

Sumber: Dokumen Induk KLHS RPJPD Kutai Kartanegara 2025-2045

Tabel 2.10
Luas Tutupan Lahan di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2024

No	Jenis Tutupan Lahan	Luas (Ha)	No	Jenis Tutun Lahan	Luas (Ha)
1	Bandara	83,58	24	Padang Rumput	8.295,28
2	Belukar	211.574,75	25	Pasir	6,73
3	Belukar Rawa	33.351,53	26	Pasir/Bukit Pasir Darat	25,77
4	Danau	34.914,21	27	Pelabuhan Ferry	1,23
5	Dermaga	0,43	28	Pemukiman	297,81
6	Empang	28,48	29	Pemukiman dan Kantor Perusahaan	634,76
7	Hutan Lahan Kering Sekunder	1.140.718,99	30	Pemukiman dan TempatKegiatan	1.691,34
8	Hutan Mangrove	0,04	31	Pemukiman Teratur	31,99
9	Hutan Mangrove Kerapatan Sedang	15.602,85	32	Pemukiman Tidak Teratur	9.525,47
10	Hutan Mangrove Kerapatan Tinggi	49.104,83	33	Perkebunan Sawit	273.000,68
11	Hutan Rawa	12.123,03	34	Perkebunan/Kebun	6.984,37
12	Hutan Rawa Gambut	173.131,26	35	Pertambangan	22.448,80
13	Hutan Rimba	17.508,80	36	Rawa	24.788,96
14	Hutan Tanaman	101.427,08	37	Sawah	15.077,74
15	Industri	1.025,00	38	Semak	149.293,14
16	Jalan	1.522,85	39	Semak Belukar	12.772,40
17	Jalan Tanah	118,58	40	Semak Rawa	37.925,12
18	Kebun	2.614,20	41	Sungai	16.819,52
19	Kebun Campuran	51.700,28	42	Tambak	57.081,45
20	Kolam	941,89	43	Tanah Kosong/Lahan Penambangan	3,17
21	Kolam Bekas Tambang	676,77	44	Tegalan	2.746,70
22	Ladang	454,78	45	Tegalan/Ladang	21.721,82
23	Lahan Terbuka	19.425,85	Total Luas		2.536.835,10

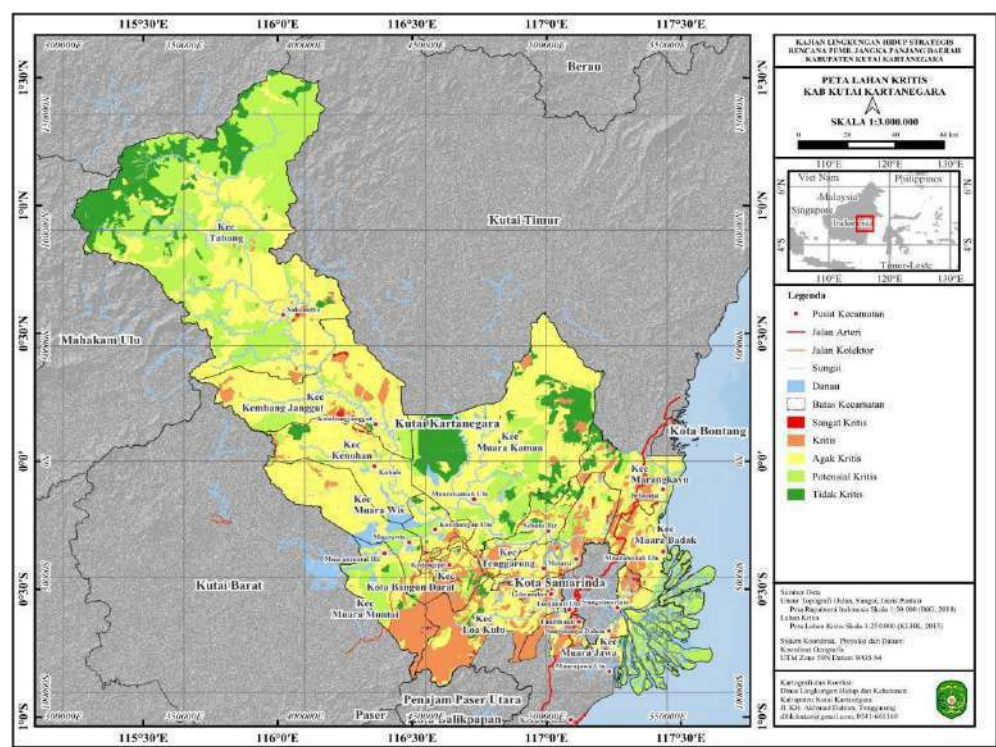
Sumber: Dokumen Induk KLHS RPJPD Kutai Kartanegara 2025-2045

Sementara itu, lebih dari setengah wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara berstatus Agak Kritis, tepatnya 52,04% atau seluas 1.316.168,42 Ha. Lahan Kritis di kabupaten ini terindikasi sebesar 10,69% atau seluas 270.417,13 Ha dan lahan berstatus Sangat Kritis sebesar 0,36% atau seluas 9.107,10 Ha.

Lahan berstatus Kritis terluas di Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat di Kecamatan Loa Kulu seluas 74.451,29 Ha dan lahan berstatus Sangat Kritis paling luas terdapat di Kecamatan Kembang Janggut dan Anggana, masing-masing seluas 1.855,35 Ha dan 1.019,94 Ha.

Gambar 2.11.

Peta Lahan Kritis di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2024



Sumber: Dokumen Induk KLHS RPJPD Kutai Kartanegara 2025-2045

Tabel 2.11

Luas Lahan Kritis di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2024

Kecamatan	Luas Lahan (Ha)					
	Tidak Kritis	Potensial Kritis	Agak Kritis	Kritis	Sangat Kritis	Total
Anggana	3.872,87	77.097,39	18.704,03	5.893,06	1.019,94	106.801,32
Kembang Janggut	2.459,79	23.542,18	174.820,61	16.376,92	1.855,35	219.130,52
Kenohan	10.449,65	9.181,79	108.529,40	2.741,45	646,56	131.629,81
Kota Bangun	4.798,04	7.613,40	28.993,14	2.433,61	202,66	44.173,71
Kota Bangun Darat	2.522,64	3.507,88	18.589,98	20.492,26	876,97	46.024,94
Loa Janan	301,42	8,39	10.711,13	20.968,10	944,54	32.946,96
Loa Kulu	4.913,58	2.724,90	53.422,54	74.451,29	946,55	136.546,90
Marangkayu	9.477,99	10.356,32	49.273,62	16.700,18	638,08	86.484,58
Muara Badak	785,16	16.762,63	41.390,88	14.854,73	57,26	79.853,94
Muara Jawa	2.232,76	13.431,48	4.195,77	842,82		20.484,22
Muara Kaman	98.623,15	68.797,33	246.875,27	9.290,44		423.870,60
Muara Muntai	4.136,14	34.959,41	23.595,33	31.390,28	595,53	94.711,27
Muara Wis	9.542,51	9.840,97	102.251,42	9.495,82	62,16	131.384,18
Sanga-Sanga	322,45	0,51	7.845,88	1.969,57		10.035,55

Tabel 2. 12

Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2024

Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Luas (%)	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Luas (%)
Badan Air	43.553,57	1,72	Perkebunan	341.752,54	13,51
Danau	4.061,81	0,16	Perkebunan Rakyat	15.682,14	0,62
Cagar Alam	32.045,96	1,27	Permukiman Perdesaan	17.567,54	0,69
Ekosistem Mangrove	3.031,57	0,12	Permukiman Perkotaan	50.052,24	1,98
Hortikultura	8.650,67	0,34	Peruntukan Industri	5.847,99	0,23
Hutan Lindung	205.942,28	8,14	Sekitar Danau atau Waduk	3.787,11	0,15
Hutan Produksi Terbatas	541.993,17	21,43	Suaka Alam	0,00	0,00
Hutan Produksi Tetap	686.997,79	27,16	Tanaman Pangan	307.348,17	12,15
Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	27.397,19	1,08	Sempadan Pantai	1.974,21	0,08
Imbuhan Air Tanah	32.169,45	1,27	Sempadan Sungai	23.337,13	0,92
Lindung Gambut	69.330,35	2,74	Suaka Margasatwa	1.039,97	0,04
Pariwisata	421,23	0,02	Taman Hutan Raya	46331,56	1,83
Pelestarian Alam	8,63	0,00	Taman Nasional	40602,13	1,61
Perikanan Budi Daya	18.297,92	0,72	Total Luas	2.536.835,10	100,00

Sumber: Dokumen Induk KLHS RPJPD Kutai Kartanegara 2025-2045

2.1.1.2. Potensi Energi Terbarukan

Kutai Kartanegara pun memiliki potensi tenaga surya yang cukup tinggi yakni seluas 954,31 km² dengan rata-rata 661,35 watt/m² dan rata-rata 4,3 kwh/m² . Total potensi ini senilai 39,13 *Global Warming Potential (GWP)* dan merupakan yang tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2.13

Potensi Tenaga Surya Provinsi Kalimantan Timur

Kab/Kota	Luas (km2)	Rata-rata watt/m2	Rata-rata kwh/m2	Potensi GWP
Berau	286.61	689.92	4.48	11.75
Kota Balikpapan	111.49	691.54	4.49	4.57
Kota Bontang	30.73	708.33	4.60	1.26
Kota Samarinda	140.08	628.72	4.09	5.74
Kutai Barat	247.63	667.35	4.34	10.15
Kutai Timur	351.07	681.95	4.43	14.39
Kutai Kartanegara	954.31	661.35	4.30	39.13
Mahakam Ulu	73.70	668.40	4.34	3.02
Paser	198.78	663.22	4.31	8.15
Penajam Paser Utara	189.73	670.90	4.36	7.78
KALIMANTAN TIMUR	2,584.12	672.42	4.37	105.95

Sumber : Bappeda Kutai Kartanegara

Potensi PLTS terapung di Kabupaten Kutai Kartanegara tersebar di 14 kecamatan dengan besaran potensi besar di Kecamatan Kota Bangun seluas 10.674,70 ha dan potensi 533.73 megawatt. Total potensi PLTS terapung di Kabupaten Kutai Kartanegara ini senilai 1.125,19 megawatt yang merupakan tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2.14

Potensi PLTS terapung Kabupaten Kutai Kartanegara

Kecamatan/Kabupaten	luas (ha)	potensi (mw)	klasifikasi
Kec. Konahan , Kab. Kutai Kartanegara	579.46	28.97	Kecil
Kec. Kota Bangun , Kab. Kutai Kartanegara	10674.70	533.73	Besar
Kec. Kota Bangun , Kab. Kutai Kartanegara	28.42	1.42	Kecil
Kec. Loa Janan , Kab. Kutai Kartanegara	23.00	1.15	Kecil
Kec. Loa Kulu , Kab. Kutai Kartanegara	97.10	4.86	Kecil
Kec. Marangkayu , Kab. Kutai Kartanegara	40.02	2.00	Kecil
Kec. Muara Kaman , Kab. Kutai Kartanegara	1207.40	60.37	Sedang
Kec. Muara Muntai , Kab. Kutai Kartanegara	848.81	42.44	Kecil
Kec. Muara Wis , Kab. Kutai Kartanegara	8506.95	425.35	Sedang
Kec. Muara Wis , Kab. Kutai Kartanegara	33.38	1.67	Kecil
Kec. Samboja , Kab. Kutai Kartanegara	167.18	8.36	Kecil
Kec. Sanga-sanga , Kab. Kutai Kartanegara	78.89	3.94	Kecil
Kec. Tenggarong Seberang , Kab. Kutai Kartanegara	142.42	7.12	Kecil
Kec. Tenggarong , Kab. Kutai Kartanegara	75.99	3.80	Kecil
Kutai Kartanegara	22503.72	1125.19	

Sumber : Bappeda Kutai Kartanegara

Kemudian, potensi tenaga angin di Kabupaten Kutai Kartanegara juga merupakan yang tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur, yakni sebesar kecepatan angin 2.676,05 dengan luasan 424,73 km².

Tabel 2.15

Potensi Tenaga Angin Provinsi Kalimantan Timur

Kab/Kota	Kecepatan angin (di ketinggian 50 m)	Luas (km2)
Berau	1,257.43	246.10
Kota Balikpapan	296.07	60.59
Kota Bontang	263.51	19.48
Kutai Barat	773.44	195.37
Kutai Timur	1,595.18	233.60
Kutai Kartanegara	2,676.05	424.73
Paser	1,461.49	298.24

Kab/Kota	Kecepatan angin (di ketinggian 50 m)	Luas (km2)
Penajam Paser Utara	419.23	63.78
KALIMANTAN TIMUR	8,742.40	1,541.91

Sumber : Bappeda Kutai Kartanegara

Secara keseluruhan, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki banyak potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang dapat dikembangkan untuk menggerakkan perekonomian dan mendukung upaya *net zero emission*. Karenanya, dibutuhkan perencanaan yang tepat pada pemanfaatan potensi SDA ini.

2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDT-LH)

A. Dokumen DDDT-LH 2020

Sebelum dilakukannya delineasi tiga kecamatan ke wilayah IKN, berdasarkan hasil kajian dokumen DDDT-LH 2020 Kutai Kartanegara, terdapat 11 kesimpulan yang dirumuskan sebagai berikut.

- 1). Kondisi daya dukung lahan di Kabupaten Kutai Kartanegara masih belum melampaui batas atau *overcapacity*. Hasil akhir perhitungan dalam dokumen D3LH menyatakan bahwa daya dukung lahan masih memenuhi kebutuhan lahan per jiwa di setiap kecamatan. Hasil perhitungan daya dukung lahan terhadap jumlah populasi yang hidup dapat ditujukan melalui tabel berikut:

Tabel 2.16
Daya Dukung Demografis/Lahan Menurut Kecamatan
di Kabupaten Kutai Kartanegara

Kecamatan	Luas Lahan (ha)	Jumlah Populasi	Daya Dukung
Anggana	179.880	47.436	3,79
Kembang Janggut	192.390	41.525	4,63
Kenohan	130.220	10.291	12,65
Kota Bangun	114.374	34.273	3,34
Loa Janan	64.420	67.543	0,95
Loa Kulu	140.570	48.003	2,93
Marangkayu	116.571	24.370	4,78
Muara Badak	93.909	50.459	1,86
Muara Jawa	75.450	47.145	1,60
Muara Kaman	341.010	37.447	9,11
Muara Muntai	92.860	18.816	4,94
Muara Wis	110.816	9.171	12,08
Samboja	104.590	69.903	1,50

Kecamatan	Luas Lahan (ha)	Jumlah Populasi	Daya Dukung
Sanga - Sanga	23.340	22.938	1,02
Sebulu	85.950	39.183	2,19
Tabang	776.450	10.567	73,48
Tenggarong	39.810	128.052	0,31
Tenggarong Seberang	43.700	79.001	0,55
Total	2.726.310	786.123	

Sumber: Dokumen DDDT-LH Tahun 2020

- 2). Dokumen DDDT-LH menyimpulkan bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara belum dapat berswasembada pangan. Hal ini disebabkan karena daya dukung wilayah pertanian hanya menunjukkan angka 0,25 (di bawah 1). Kesimpulan ini didasarkan pada perhitungan antara luas lahan panen, kebutuhan fisik minimum, dan produktivitas rata-rata lahan per hektare.

Tabel 2.17

Daya Dukung Wilayah Pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara

Luas Panen (Ha)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Fisik Minimum (Kg/ Kapita/ Tahun)	Produktivitas Padi (Kg/Ha)	Daya Dukung Wil. Pertanian
28,33	786.123	650	4.511	0,25

Sumber: Dokumen DDDT-LH Tahun 2020

- 3). Beberapa wilayah permukiman di Kabupaten Kutai Kartanegara *overlap* dengan kawasan lindung dan kawasan rawan bencana. Hal ini terjadi di Kecamatan Loa Janan, Muara Kaman, Muara Wis, Tabang, dan Tenggarong Seberang. Daya dukung beberapa kecamatan yang sudah terlampaui yaitu Tenggarong Seberang, Tabang, Muara Wis, Muara Kaman, dan Loa Janan.

Tabel 2.18

Luas Layak Permukiman Menurut Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara

Kecamatan	Luas Kawasan Lindung	Luas Kawasan Bencana	Luas Layak Pemukiman
	m ²	m ²	m ²
Anggana	97.581.753,10	92.948.412,15	1.608.269.834,75
Kembang Janggut	110.264.778,60	761.453.066,45	1.052.182.154,95
Kenohan	50.398.122,52	639.020.062,65	612.781.814,83
Kota Bangun	21.444.589,82	638.137.265,57	484.158.144,61
Loa Janan	242.600.922,14	593.679.861,96	-192.080.784,10
Loa Kulu	3.100.053,62	350.350.559,78	1.052.249.386,60
Marangkayu	31.812.810,53	815.788.885,55	318.108.303,92

Kecamatan	Luas Kawasan Lindung	Luas Kawasan Bencana	Luas Layak Pemukiman
	m ²	m ²	m ²
Muara Badak	18.380.110,53	252.167.057,56	668.542.831,91
Muara Jawa	209.308.891,90	510.173.640,05	35.017.468,05
Muara Kaman	1.038.293.036,85	3.588.159.102,06	-1.216.352.138,91
Muara Muntai	12.317.366,38	243.396.397,60	672.886.236,02
Muara Wis	11.708.976,88	1.132.971.767,28	- 36.520.744,16
Samboja	160.071.284,51	664.239.051,03	221.589.664,46
Sanga - Sanga	1.572.339,83	123.198.397,54	108.629.262,63
Sebulu	5.866.319,36	640.431.148,24	213.202.532,40
Tabang	1.992.194.262,33	7.207.605.604,43	-1.435.299.866,76
Tenggarong	4.349.551,83	176.939.249,36	216.811.198,81
Tenggarong Seberang	4.152.199,12	511.094.465,48	-78.246.664,60
JUMLAH	4.015.417.369,85	23.147.622.785,55	100.059.844,60

Sumber: Dokumen DDDT-LH Tahun 2020

- 4). Hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan surplus ketersediaan air dengan status aman. Satu kecamatan menjadi catatan dengan daya dukung lingkungan aman bersyarat yaitu Tenggarong.
- 5). Secara keseluruhan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat menyediakan jasa ekosistem berupa jasa penyediaan air bersih berkategori tinggi 17,49 persen, sedang 67,18 persen, dan rendah 11,91 persen.
- 6). Jasa ekosistem penyediaan pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara berkategori rendah adalah 38,5 persen dan sedang 36,96 persen.
- 7). Penyediaan jasa pengaturan tata aliran air dan banjir dalam kategori sedang 64,42 persen, tinggi 15,34 persen, dan sangat tinggi 11,94 persen dari total luas wilayah.
- 8). Penyediaan jasa pengaturan iklim dominan termasuk dalam kategori tinggi 66,68 persen dan sangat tinggi 14,16 persen dari luas wilayah total.
- 9). Penyediaan jasa pengaturan mitigasi bencana longsor termasuk dalam kategori tinggi 46,87 persen dan sedang 28,27 persen dari luas wilayah total.
- 10). Jasa lingkungan hidup pengatur mitigasi bencana banjir Kabupaten Kutai Kartanegara kategori tinggi (52,68 persen) dan sangat tinggi (24,52 persen) mendominasi setiap wilayah kecamatan. Sedangkan pada kategori sangat rendah (0,34 persen), rendah (10,32 persen) dan sedang (10,59 persen) hanya terdapat pada beberapa kecamatan.

- 11). Jasa lingkungan hidup pengatur mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan bahwa kategori sangat tinggi (53,42 persen) dan tinggi (22,10 persen) mendominasi setiap wilayah Kecamatan. Sedangkan pada kategori sangat rendah (0,14 persen), rendah (1,94 persen) dan sedang (20,83 persen) hanya terdapat pada beberapa kecamatan saja.

Sehubungan dengan kondisi objektif di atas, hasil analisis dokumen DDDT-LH memberikan beberapa rekomendasi terhadap kebijakan pemanfaatan ruang dan penyediaan sumber daya alam sebagai berikut.

- 1). Meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan pemanfaatan teknologi pada areal-areal yang mempunyai produktivitas rendah, terutama komoditas tanaman padi.
- 2). Mengarahkan pemanfaatan lahan sebagai permukiman pada areal yang memiliki daya dukung pemukiman yang tinggi, sehingga areal permukiman merupakan areal yang tidak saja dapat dihuni tetapi merupakan areal yang aman (di luar kawasan lindung dan areal rawal bencana).
- 3). Melakukan upaya-upaya konservasi, khususnya pada areal rawan bencana untuk menurunkan luas daerah rawan bencana, sehingga dapat dimanfaatkan bagi peruntukan lainnya.
- 4). Membuat kebijakan terkait peningkatan semua jasa lingkungan hidup dengan kategori rendah dan sangat rendah.

A. Dokumen KLHS RPJPD Kutai Kartanegara 2025-2045

Konsep penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup melibatkan penilaian terhadap kondisi daya dukung, daya tampung, ekoregion, dan penutup lahan. Berdasarkan kerangka konsep ini, ukuran daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dihitung melalui pendekatan jasa lingkungan. Artinya, semakin tinggi nilai jasa lingkungan, semakin besar pula kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Dalam kajian KLHS RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara, data yang digunakan berasal dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai Daya Dukung dan Daya Tampung Jasa Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dengan skala 1:250.000. Perhitungan DDDTLH menggunakan data dari peta bentang lahan, tutupan lahan, dan vegetasi. Penilaian DDDTLH di Kutai Kartanegara mencakup 20 jenis jasa lingkungan hidup, termasuk penyediaan air, pangan, serat, serta berbagai fungsi ekologis

dan budaya. Rincian mengenai kondisi dan fungsi jasa lingkungan di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat di bawah ini.

1) Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air.

Ketersediaan air di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan bahwa mayoritas lahan, sebesar 1.680.921,36 Ha (66,26 persen), tergolong dalam kategori penyediaan air yang rendah. Hal ini diikuti oleh lahan dengan penyediaan air “sangat rendah” sebesar 494.327,75 Ha (19,49 persen); “sedang” mencapai 319.220,33 Ha (12,58 persen), “tinggi” hanya 26.144,32 Ha (1,03 persen); sangat tinggi sangat terbatas, hanya 16.221,34 Ha (0,64 persen).

2) Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan.

Kondisi jasa lingkungan hidup penyedia pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dalam kemampuan wilayah untuk menyediakan lahan subur bagi kegiatan pertanian. Berdasarkan data yang disajikan, lahan dengan kategori penyediaan pangan sangat tinggi mencakup 136.740,35 Ha (5,39 persen) dari total luas wilayah 2.536.835,10 Ha. Lahan dengan kategori penyediaan pangan tinggi mencakup 133.843,13 Ha (5,28 persen), sementara lahan dengan kategori sedang mendominasi dengan luas 1.596.877,50 Ha (62,95 persen). Sebaliknya, lahan dengan kategori rendah mencakup 300.936,39 Ha (11,86 persen), dan kategori sangat rendah mencakup 368.437,71 Ha (14,52 persen).

3) Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Serat.

Jasa lingkungan hidup penyedia serat di Kabupaten Kutai Kartanegara yang didominasi oleh kategori tinggi dengan luas wilayah sebesar 1.161.174,40 Ha atau 45,77 persen dari total luas 2.536.835,10 Ha. Rincian kategori capaian lainnya meliputi: kategori sangat tinggi sebesar 6.774,56 Ha (0,27 persen), kategori sedang sebesar 440.265,57 Ha (17,35 persen), kategori rendah sebesar 561.537,56 Ha (22,14 persen), dan kategori sangat rendah sebesar 367.083,00 Ha (14,47 persen).

4) Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Sumber Daya Genetik.

Jasa lingkungan hidup penyedia sumber daya genetik di Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki distribusi yang bervariasi. Kategori tinggi mendominasi dengan luas 990.892,59 Ha (39,06 persen), diikuti oleh kategori sedang seluas 539.026,17 Ha (21,25 persen), dan kategori sangat tinggi sebesar 506.201,00 Ha (19,95 persen). Kategori rendah dan sangat

rendah masing-masing mencakup 262.728,66 Ha (10,36 persen) dan 238.019,79 Ha (9,38 persen).

5) Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Kualitas Udara.

Kebutuhan oksigen merupakan paling utama bagi kehidupan manusia. Kebutuhan tidak hanya secara kuantitas akan tetapi kualitas. Kualitas udara yang buruk justru akan berdampak terhadap kesehatan manusia. Jasa lingkungan hidup pengatur kualitas udara di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan sebagian besar wilayah berada dalam kategori sangat tinggi dengan luas 902.326,86 Ha (35,57 persen). Kategori tinggi mencakup 559.662,29 Ha (22,06 persen), kategori sedang 436.639,39 Ha (17,21 persen), kategori rendah 512.418,93 Ha (19,19 persen), dan kategori sangat rendah 125.788,63 Ha (5,96 persen).

6) Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Iklim.

Luas kawasan hutan sangat mempengaruhi jasa lingkungan hidup dalam mengatur iklim. Hutan berperan dalam menghasilkan karbon dan oksigen, yang membantu menjaga suhu tetap sejuk. Pada skala lokal, kondisi vegetasi dapat mempengaruhi iklim mikro di sekitarnya, sedangkan pada skala ekoregion, kondisi tersebut dapat mempengaruhi pengaturan iklim secara global. Jasa lingkungan hidup pengatur iklim di Kabupaten Kutai Kartanegara, yang mayoritas termasuk dalam kategori tinggi dengan luas 1.554.727,73 Ha atau 61,29 persen dari total luas 2.536.835,10 Ha. Kategori lainnya adalah sangat tinggi dengan luas 176.649,87 Ha (6,96 persen), sedang dengan 163.771,15 Ha (6,46 persen), rendah dengan 623.579,13 Ha (24,58 persen), dan sangat rendah dengan 18.107,23 Ha (0,71 persen).

7) Jasa Lingkungan Hidup Pencegah Banjir.

Jasa lingkungan hidup dalam pencegahan banjir di Kabupaten Kutai Kartanegara, di mana kategori sangat tinggi mencakup luas terbesar yaitu 962.072,45 Ha atau 37,92 persen dari total luas 2.536.835,10 Ha. Kategori tinggi meliputi 800.143,66 Ha (31,54 persen), sedang 412.632,90 Ha (16,27 persen), rendah 352.181,97 Ha (13,88 persen), dan kategori sangat rendah 9.804,11 Ha (0,39 persen). Kawasan hutan yang luas mampu mengendalikan aliran permukaan dengan mengurangi laju aliran dan meningkatkan evapotranspirasi. Sebaliknya, tanah aluvial yang telah menjadi permukiman memiliki potensi pencegahan banjir yang sangat rendah. Permukaan tanah yang telah diperkeras di permukiman menyebabkan air hujan langsung mengalir ke sungai atau menggenang,

sehingga meningkatkan potensi banjir akibat kenaikan aliran sungai dalam waktu singkat. Jumlah vegetasi yang dapat menahan air hujan juga berkurang drastis karena digantikan oleh bangunan dan permukiman.

8) Jasa Lingkungan Hidup Pencegah Tanah Longsor.

Tanah longsor umumnya terjadi di wilayah dengan banyak lereng curam, dengan kemiringan lebih dari 45 derajat, meskipun juga bisa terjadi di tanah datar dengan kemungkinan lebih kecil. Proses ini sering terjadi karena terganggunya keseimbangan, membuat tanah menjadi labil dan mudah bergeser akibat adanya air yang masuk ke dalam lapisan tanah, berperan sebagai area gelincir. Jika air masuk ke dalam area gelincir pada lapisan tanah, maka pembatas antara tanah bagian atas dan bawah menjadi goyah, memudahkan pergeseran. Risiko ini meningkat jika terdapat bangunan di atas tanah yang sudah goyah, menambah beban pada tanah.

Jasa lingkungan hidup dalam pencegahan tanah longsor di Kabupaten Kutai Kartanegara, di mana hasil analisis menunjukkan bahwa kategori sangat tinggi mendominasi dengan luas 895.633,03 Ha atau 35,31 persen dari total luas 2.536.835,10 Ha. Kategori tinggi mencakup 623.135,40 Ha (24,56 persen), kategori sedang 282.355,29 Ha (11,13 persen), kategori rendah 547.602,72 Ha (21,59 persen), dan kategori sangat rendah 188.108,66 Ha (7,42 persen).

9) Jasa Lingkungan Hidup Pencegah Kebakaran Hutan dan Lahan

Insiden kebakaran hutan dan lahan sering menjadi ancaman signifikan di wilayah Kalimantan Timur, termasuk di Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada periode musim kemarau yang berkepanjangan, kondisi hutan dan lahan di Kabupaten Kutai Kartanegara sangat rentan terhadap risiko kebakaran. Oleh karena itu, pembukaan lahan selama musim kemarau harus dilaksanakan dengan sangat hati-hati, dan penggunaan metode pembakaran secara tegas dilarang.

Kondisi jasa lingkungan hidup pencegah kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan bahwa lahan dalam kategori "Sangat Tinggi" mencakup 133.540,47 Ha (5,26 persen) dari total luas lahan. Sementara itu, kategori "Tinggi" mencakup 1.115.455,08 Ha (43,98 persen), dan kategori "Sedang" mendominasi dengan 1.287.839,54 Ha (50,77 persen) dari total 2.536.835,10 Ha yang dianalisis. Tidak ada lahan yang masuk dalam kategori "Rendah" dan "Sangat Rendah".

10) Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Air

Kondisi jasa lingkungan hidup pengatur air di Kabupaten Kutai Kartanegara di daerah yang tidak bervegetasi, kemampuan tumbuhan untuk menyimpan air menjadi tidak ada, sehingga air hujan lebih banyak mengalir sebagai aliran permukaan. Vegetasi penutup tanah memainkan peran penting dalam siklus air di permukaan bumi, dan kemampuan suatu ekoregion sebagai pengatur air sangat bervariasi. Jasa lingkungan hidup pengatur air di Kabupaten Kutai Kartanegara didominasi oleh lahan dengan kategori "Tinggi", yang mencakup 1.101.726,90 Ha (43,43 persen) dari total luas lahan. Kategori "Sedang" mencakup 409.841,27 Ha (16,16 persen), kategori "Rendah" mencakup 715.982,18 Ha (28,22 persen), dan kategori "Sangat Rendah" mencakup 267.309,33 Ha (10,54 persen). Kategori "Sangat Tinggi" hanya mencakup 41.975,42 Ha (1,65 persen) dari total luas lahan.

11) Jasa Lingkungan Hidup Pemurnian Air dan Pengolahan Limbah

Jasa lingkungan hidup dalam hal pemurnian air dan pengolahan limbah di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan variasi kemampuan lahan dalam mendukung proses *self-purification*. Tanah dan batuan alami berperan sebagai penyaring alami yang membantu memurnikan air. Kondisi Jasa Lingkungan Hidup Pemurnian Air dan Pengolahan Limbah mengungkap bahwa lahan dengan kapasitas pemurnian air sangat tinggi mendominasi, mencakup 776.752,53 Ha atau 30,62 persen dari total luas wilayah. Kategori "Tinggi" mencakup 739.544,47 Ha atau 29,15 persen, sementara kategori "Sedang" meliputi 215.591,43 Ha atau 8,50 persen. Kategori "Rendah" dan "Sangat Rendah" masing-masing mencakup 366.339,44 Ha (14,44 persen) dan 438.607,24 Ha (17,29 persen).

12) Jasa Lingkungan Hidup Penyerbukan Alami

Jasa lingkungan hidup dalam pengaturan penyerbukan alami di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan variasi signifikan antar kecamatan. Penyerbukan alami, penting bagi reproduksi tumbuhan berbunga, dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan keberadaan spesies penyerbuk. Kategori "Tinggi" mendominasi dengan luas 1.115.151,83 Ha (43,96 persen), diikuti "Sedang" 425.592,86 Ha (16,78 persen), "Rendah" 502.750,72 Ha (19,82 persen), dan "Sangat Rendah" 484.295,25 Ha (19,09 persen). Potensi lahan dalam kategori "Sangat Tinggi" hanya mencakup 9.044,43 Ha (0,36 persen).

13) Jasa Lingkungan Hidup Pengendali Hama

Pengendalian hama dan penyakit adalah upaya untuk mengatur makhluk-makhluk atau organisme yang dianggap mengganggu kesehatan manusia, ekologi, atau ekonomi. Jasa Lingkungan Hidup dalam pengendalian hama dan penyakit di Kabupaten Kutai Kartanegara bervariasi dari kategori "Sedang" hingga "Sangat Rendah". Tidak ada lahan dalam kategori "Sangat Tinggi". Kategori "Sedang" mencakup 840.243,32 Ha (33,12 persen), "Tinggi" 513.208,67 Ha (20,23 persen), "Rendah" 714.139,64 Ha (28,15 persen), dan "Sangat Rendah" 469.243,46 Ha (18,50 persen).

14) Jasa Lingkungan Hidup Pendukung Habitat dan Kehati

Jasa lingkungan hidup pendukung habitat dan keanekaragaman hayati (kehati) di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan variasi yang cukup signifikan antar kecamatan. Berdasarkan total luas wilayah penyedia jasa sebesar 2.536.835,10 Ha. Dari total tersebut, 764.022,85 Ha (30,12 persen) berada dalam kategori "Sangat Tinggi", 602.476,87 Ha (23,75 persen) berada dalam kategori "Tinggi", dan 437.698,11 Ha (17,25 persen) berada dalam kategori "Sedang". Sementara itu, kategori "Rendah" mencakup 490.609,13 Ha (19,34 persen), dan kategori "Sangat Rendah" mencakup 242.028,14 Ha (9,54 persen).

15) Jasa Lingkungan Hidup Pembentukan dan Regenerasi Tanah

Jasa lingkungan hidup untuk pembentukan dan regenerasi tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan distribusi yang beragam. Kategori sangat tinggi mencakup luas sebesar 835.846,75 Ha (32,95 persen), Kategori "Sangat Tinggi" mencakup 835.846,75 Ha (32,95 persen), "Tinggi" 771.956,15 Ha (30,43 persen), "Sedang" 525.194,06 Ha (20,70 persen), "Rendah" 249.616,64 Ha (9,84 persen), dan "Sangat Rendah" 154.221,50 Ha (6,08 persen), dengan total area 2.536.835,10 Ha.

16) Jasa Lingkungan Hidup Pendukung Produksi Primer

Di Kabupaten Kutai Kartanegara, potensi biomassa sebagai jasa lingkungan hidup pendukung produksi primer beragam. Kategori "Sangat Tinggi" mencakup 227.815,55 Ha (8,98 persen), "Tinggi" 994.541,12 Ha (39,20 persen), "Sedang" 782.722,36 Ha (30,85 persen), "Rendah" 365.348,12 Ha (14,40 persen), dan "Sangat Rendah" 166.407,95 Ha (6,56 persen). Mayoritas potensi produksi primer ada pada kategori "Tinggi" (39,20 persen) dan "Sedang" (30,85 persen) dari total luas 2.536.835,10 Ha.

17) Jasa Lingkungan Hidup Pendukung Siklus Hara

Jasa lingkungan hidup siklus hara di Kabupaten Kutai Kartanegara didominasi oleh kategori sedang, yaitu 1.033.631,02 Ha (40,75 persen), diikuti kategori tinggi 506.657,19 Ha (19,97 persen) dan kategori rendah 630.624,67 Ha (24,86 persen). Kategori sangat rendah memiliki luas 365.922,22 Ha atau 14,42 persen. Total luas keseluruhan adalah 2.536.835,10 Ha.

18) Jasa Lingkungan Hidup Kultural Estetika

Senada dengan jasa lingkungan hidup siklus hara dan jasa lingkungan hidup kultural rekreasi, jasa lingkungan kultural estetika di Kabupaten Kutai Kartanegara, terlihat bahwa luas area yang termasuk dalam kategori sangat tinggi adalah 52.557,87 Ha (2,07 persen). Area yang masuk dalam kategori tinggi mencapai 332.304,54 Ha (13,10 persen). Kategori sedang mendominasi dengan luas 1.848.155,65 Ha (72,85 persen), sedangkan kategori rendah meliputi 12.855,03 Ha (0,51 persen). Kategori sangat rendah memiliki luas 290.961,01 Ha (11,47 persen), dengan total luas keseluruhan 2.536.835,10 Ha. Mayoritas potensi jasa lingkungan hidup kultural estetika di Kabupaten Kutai Kartanegara didominasi oleh kategori sedang (72,85 persen) dari total luas areal.

19) Jasa Lingkungan Hidup Kultural Rekreasi

Jasa lingkungan hidup kultural rekreasi di Kabupaten Kutai Kartanegara didominasi oleh kategori sedang 1.790.208,47 Ha (70,57 persen). Luas area yang termasuk dalam kategori sangat tinggi adalah 48.681,02 Ha (1,92 persen), kategori tinggi mencapai 139.941,27 Ha (5,52 persen), kategori rendah meliputi 267.042,88 Ha (10,53 persen), dan kategori sangat rendah memiliki luas 290.961,01 Ha (11,47 persen).

20) Jasa Lingkungan Hidup Warisan Budaya dan Identitas

Luas jasa lingkungan hidup warisan budaya dan identitas di Kabupaten Kutai Kartanegara, menunjukkan bahwa luas area dengan kategori tinggi adalah 1.075.568,48 Ha (42,40 persen), kategori sedang 975.921,38 Ha (38,47 persen), kategori rendah 158.606,84 Ha (6,25 persen), dan kategori sangat rendah 320.619,88 Ha (12,64 persen), dengan total luas keseluruhan 2.536.835,10 Ha.

2.1.1.4. Gambaran Kualitas Lingkungan Hidup

Setelah mengetahui kondisi peran strategis daerah, potensi SDA, dan daya dukung, serta daya tampung lingkungan di Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu

ditinjau bagaimana pembangunan yang telah dilakukan dalam satu dekade terakhir berpengaruh terhadap lingkungan hidup.

A) Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup dapat diukur melalui indeks umum makro yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH merupakan indikator yang ditujukan untuk menghitung kualitas lingkungan suatu daerah berdasarkan perhitungan gabungan parameter Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks tutupan lahan.

Pada tahun 2019, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengelompokkan predikat IKLH menjadi lima kategori sebagai berikut:

- a). Sangat baik ($IKLH > 80$);
- b). Baik ($80 > IKLH > 70$);
- c). Cukup baik ($70 > IKLH > 60$);
- d). Kurang baik ($60 > IKLH > 50$); dan
- e). Sangat kurang baik ($50 > IKLH > 40$).

Berdasarkan ketersediaan data dari DLHK, Kabupaten Kutai Kartanegara meraih predikat “cukup baik” dan “baik” dalam 7 (tujuh) tahun terakhir. IKLH merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu.

IKLH Kabupaten Kutai Kartanegara pada 2016-2023 menunjukkan tren peningkatan. Namun demikian pada 2020 mengalami penurunan sebesar 68,76 dan pada 2021 kembali mengalami peningkatan dengan nilai indeks sebesar 71,76. Kemudian meningkat lagi pada 2022 (71,77) dan 2023 (72,41).

Meningkatnya IKLH periode 2021-2023 dikarenakan adanya perbaikan pada Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Air (IKA). Selain itu, adanya perubahan pembobotan dalam rumus untuk tahun 2021 juga berpengaruh dalam peningkatan IKLH. Perkembangan IKLH Kabupaten Kutai Kartanegara secara detail dapat ditinjau melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 2.19
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Kutai Kartanegara,
2016-2023

Tahun	IKA	IKU	IKTL	IKLH
2016	49,50	76,63	59,99	61,84
2017	56,40	89,93	59,99	67,87
2018	81,43	69,51	59,95	75,37

Tahun	IKA	IKU	IKTL	IKLH
2019	84,08	91,68	62,93	77,90
2020	52,73	85,94	64,50	68,76
2021	52,98	91,69	70,89	71,76
2022	53,08	88,78	71,38	71,77
2023	50,53	91,53	74,62	72,41

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024

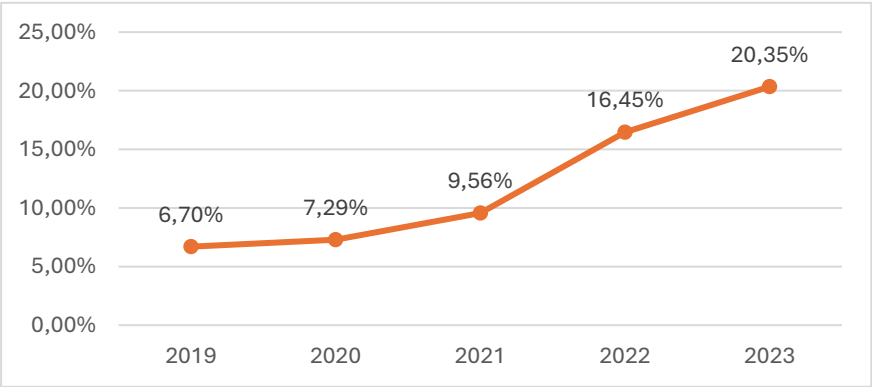
Berdasarkan data DLKH, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab perubahan kualitas air, salah satunya adalah adanya kecenderungan peningkatan beban pencemaran di sungai dari tahun ke tahun. Sementara itu, kemampuan daya tampung dan dukung lingkungan terbatas. Kualitas air di Kabupaten Kutai Kartanegara perlu dilakukan pembenahan secara luas. Hal tersebut untuk mendukung pemerataan penyediaan air yang akan dibutuhkan untuk pemenuhan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Dari hasil pengujian kualitas udara, terlihat bahwa capaian indeks di Kabupaten Kutai Kartanegara masih berada dalam kategori “baik”, meskipun terjadi tren fluktuatif dari tahun sebelumnya. Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berhubungan, seperti lalu lintas, pengelolaan ruang terbuka hijau, pengawasan penggunaan bahan-bahan emisi yang tidak ramah lingkungan, serta partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam upaya menjaga kualitas udara yang baik.

Salah satu indikator partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan dapat dilihat dari grafik yang menunjukkan persentase pengurangan timbulan sampah melalui metode 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun 2019 hingga 2023, di mana terlihat bahwa persentase pengurangan sampah meningkat setiap tahun.

Grafik 2.1

Persentase Timbulan Sampah yang Dikurangi melalui 3R di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2019 – 2023



Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa persentase pengurangan sampah meningkat setiap tahun dimana pada tahun 2019, persentase pengurangan sampah adalah 6,70 persen lalu pada tahun berikutnya, yaitu 2020, persentase ini naik menjadi 7,29 persen. Kenaikan lebih signifikan terjadi pada tahun 2021, di mana persentase mencapai 9,56 persen.

Trend peningkatan ini terus berlanjut dengan lebih tajam pada tahun 2022, di mana persentase pengurangan sampah melalui 3R meningkat menjadi 16,45 persen. Pada tahun 2023, peningkatan ini mencapai puncaknya dengan persentase sebesar 20,35 persen. Data ini menunjukkan adanya upaya yang konsisten dan berhasil dalam pengurangan sampah melalui program 3R di Kabupaten Kutai Kartanegara, yang dapat mencerminkan kesadaran dan partisipasi masyarakat yang semakin meningkat dalam pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan.

Kemudian mengenai sarana irigasi, di Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi infrastruktur vital dalam menopang pertumbuhan dan perekonomian wilayah. Irigasi menjadi bagian penting dari proses pembangunan sektor pertanian, kondisi pelayanan irigasi sampai dengan 2021 dalam kondisi baik mencapai 78,17 persen, dengan total luas wilayah irigasi sebesar 23,154.12 hektare.

Kemudian pada 2022 terjadi penurunan drastis, di mana luas irigasi menjadi 13.891,64 hektare dengan persentase dalam kondisi baik hanya mencapai 46,06 persen. Hal ini tentu menjadi kelemahan bagi bidang pertanian dan perkebunan, karena irigasi merupakan kebutuhan pokok untuk perkembangan tanaman. Perkembangan kondisi irigasi di Kabupaten Kutai Kartanegara disajikan seperti tabel berikut.

Tabel 2.20

Kondisi Irigasi di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2017 - 2023

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (ha)	16354,35	16791,12	17173,90	17925,92	18098,92	6409,35	8606,88
Luas irigasi	23154,13	23154,14	23154,15	231554,16	23154,17	13891,64	13429,43

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten (ha)							
Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (%)	70,63	70,96	71,17	77,42	78,17	46,06	64,09

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kutai Kartanegara, 2024

B) Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau

Data berikut menunjukkan perkembangan Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah ber-HPL/HGB (km²) di Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun 2016 hingga 2023. Rasio RTH ini mengalami peningkatan setiap tahunnya, dari 14,97 km² pada tahun 2016 menjadi 18,70 km² pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam memperluas dan mempertahankan ruang terbuka hijau di wilayahnya, yang merupakan komponen penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem, mengurangi efek pemanasan global, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Stabilitas rasio RTH pada 18,03 km² dari tahun 2020 hingga 2022 menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan seperti urbanisasi dan perkembangan infrastruktur, Kabupaten Kutai Kartanegara mampu mempertahankan area hijau yang ada.

Tabel 2.21

Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2016 - 2023

Tahun	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (km2)	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan
2016	14,97	58,68
2017	15,73	59,88
2018	16,85	62,17
2019	17,63	64,35
2020	18,03	65,81
2021	18,03	65,81
2022	18,03	65,81
2023	18,70	n.a.

Sumber : DLHK, 2024

Selain itu, luasan RTH publik yang diharapkan mencapai 20% dari luas wilayah kota atau kawasan perkotaan juga menunjukkan tren peningkatan dari 58,68 km² pada tahun 2016 menjadi 65,81 km² pada tahun 2022. Meskipun data untuk tahun 2023 tidak tersedia, tren sebelumnya menunjukkan komitmen yang kuat terhadap target tersebut. Peningkatan RTH publik ini penting untuk menyediakan area rekreasi, meningkatkan estetika kota, dan memberikan manfaat ekologi yang signifikan seperti penyerapan karbon dan perlindungan keanekaragaman hayati. Kesenambungan dalam peningkatan luasan RTH publik ini menunjukkan adanya kebijakan yang konsisten dan efektif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

C) Fasilitas Perumahan dan Permukiman

Persentase rumah layak huni mengalami peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun, menunjukkan upaya dalam meningkatkan kualitas hunian. Namun, luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan mengalami peningkatan yang signifikan, mencerminkan tantangan dalam mengatasi pembangunan yang tidak teratur di wilayah perkotaan. Proporsi rumah tangga kumuh di perkotaan juga mengalami peningkatan, menunjukkan adanya masalah dalam penyediaan hunian yang layak di daerah urban.

Secara keseluruhan, data ini menggambarkan upaya dan tantangan dalam menyediakan fasilitas perumahan dan permukiman yang layak bagi masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan beberapa indikator menunjukkan peningkatan yang positif sementara yang lain menunjukkan masalah yang perlu terus diperhatikan dan diperbaiki.

Tabel 2.22

Fasilitas Perumahan dan Permukiman di Kutai Kartanegara, 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase lingkungan permukiman kumuh	53	53	62	62	53
Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	19.78	21.89	50.25	51.73	65.05
Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	1.24	1.24	0.81	0.81	2.68
Rumah Layak Huni (%)	89.53	89.9	92.76	93.25	93.49
Rasio rumah layak huni	0.231	0.249	0.236	0.226	1.098

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat, 2024

2.1.1.5. Kebencanaan

A) Indikasi Kebencanaan

Menurut BNPB, salah satu indeks makro yang digunakan dalam mengukur kerentanan bencana adalah Indeks Ketahanan Daerah (IKD). IKD terdiri atas 7 (tujuh) parameter yang tersusun atas 7 (tujuh) prioritas dan 71 indikator kebencanaan. Ketujuh prioritas tersebut tersusun sebagai berikut.

- 1. Penguatan kebijakan dan kelembagaan,
- 2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu,
- 3. Pengembangan sistem informasi, diklat, dan logistik,
- 4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana,
- 5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana,
- 6. Penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, serta
- 7. Pengembangan sistem pemulihan bencana.

Berdasarkan data yang tersedia pada tahun 2023 nilai IKD Kabupaten Kutai Kartanegara adalah 0,50. Jumlah tersebut terdiri atas beberapa penilaian pada setiap prioritas di atas dengan nilai masing-masing dapat ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.23

Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2023

Keterangan	Prioritas						
	I	II	III	IV	V	VI	VII
Indeks Prioritas	0.72	1.00	0.42	0.70	0.28	0.46	0.53
Indeks Ketahanan Daerah	0.50						

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, 2024

Indeks lain yang digunakan untuk menilai kerentanan bencana adalah Indeks Risiko Bencana (IRB). Hasil indeks data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengenai Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2023, di Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk dalam kerawanan bencana kategori sedang, dengan skor 114,16 dan peringkat indeks 371 secara nasional.

BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara juga telah mengidentifikasi beberapa jenis ancaman bencana yang terdiri atas 12 ancaman bencana. Indeks makro yang diperlukan untuk mengetahui kondisi lingkungan kerentanan bencana adalah IRB. Berdasarkan dokumen DDDT-LH, Rumus dasar IRB adalah *Hazard x Vulnerability Capacity*. Bahaya (*hazard*) merupakan suatu ukuran yang menunjukkan peringkat bahaya berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi, dan kekuatan (*magnitude*) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung berapi, dan lainnya. Kerentanan (*vulnerability*) diukur berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik, dan lingkungan. Kapasitas dinilai dari pendekatan tingkat ketahanan daerah yang sama persis seperti IKD.

Berdasarkan aplikasi *Inarisk* milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), IRB Kabupaten Kutai Kartanegara cenderung menurun. Hal ini menjadi indikasi baik menurunnya risiko bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara tiap tahunnya. Data Indeks Risiko Bencana (IRB) tersebut secara detail disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.24
Indeks Risiko Bencana (IRB) di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2018-2023

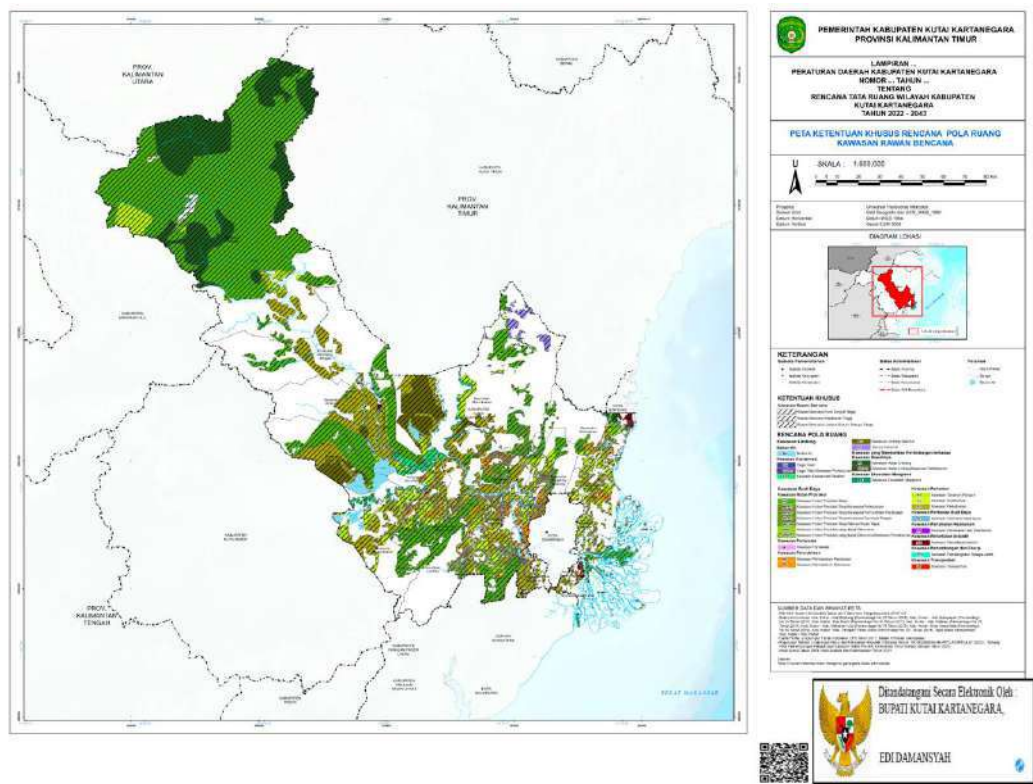
Tahun	2018	2019	2020	2021	2022	2023
IRB	124,79	124,79	119,20	119,20	120,96	114,30

Sumber: Inarisk BNPB, 2024

Jenis bencana alam yang telah diidentifikasi di Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut yakni bencana banjir dan banjir bandang, cuaca ekstrem, epidemi atau wabah penyakit, gelombang ekstrem dan abrasi, gempa bumi, tanah longsor, tsunami, multi bahaya, kekeringan, konflik sosial, serta kebakaran hutan dan lahan.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara 2023-2042, terdapat beberapa kawasan yang termasuk dalam kategori rawan bencana yang ditujukan melalui gambar berikut:

Gambar 2.13
Peta Rawan Bencana Alam di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2023



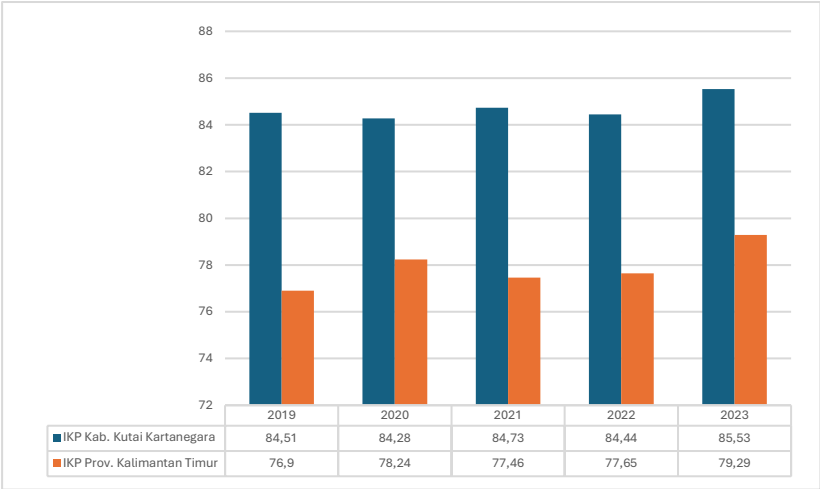
Sumber: Dokumen Rencana Tata Ruang Kutai Kartanegara 2023-2042

Terkait ketersediaan pangan, kondisi di Kabupaten Kutai Kartanegara digambarkan melalui Indeks Ketahanan Pangan (IKP) memiliki angka yang termasuk kelompok sangat tahan (2019-2023) berdasarkan pengelompokkan yang disusun oleh Badan Pangan Nasional. Pada tahun 2023, IKP Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai nilai 85,53 (sangat tahan) lebih tinggi dari nilai yang diperoleh di Provinsi Kalimantan Timur senilai 79,29.

Grafik 2.2
Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2019-2023

	Kabupaten	Kota	Provinsi
sangat rentan	≤ 41,52	≤ 28,84	≤ 37,61
rentan	> 41,5 - 51,42	> 28,84 - 41,44	>37,61 - 48,27
agak rentan	> 51,42 - 59,58	> 41,44 - 51,29	>48,27 - 57,11
agak tahan	> 59,58 - 67,75	> 41,44 - 51,29	> 57,11 - 65,96
tahan	> 67,75 - 75,68	> 61,13 - 70,64	> 65,96 - 74,40
sangat tahan	> 75,68	> 70,64	> 74,40

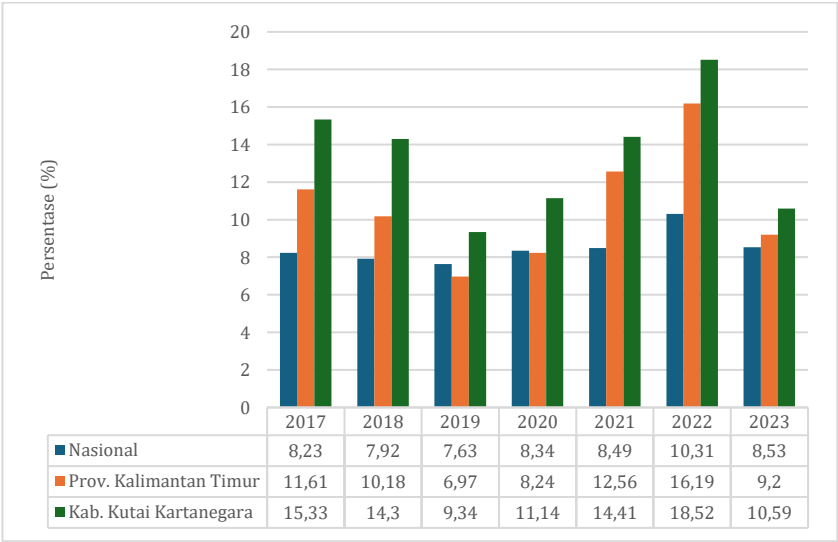
Sumber : Badan Pangan Nasional, 2023



Meskipun demikian, dianalisis dari prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment/PoU*)-nya, proporsi penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif terhitung cukup tinggi dengan persentase yang melampaui Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional (2017-2023). Hal ini menjadi faktor krusial yang mengindikasikan urgensi penurunan angka Prevalensi ketidakcukupan pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara pada periode berikutnya:

Grafik 2.3

Prevalensi Ketidakcukupan Pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dan Nasional, 2017-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Kemudian, dalam mengukur ketahanan air di Kabupaten Kutai Kartanegara, digunakan analisis terhadap kapasitas air baku atau jumlah debit

air yang dapat diolah dan/atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri, dan lain-lain yang bersumber dari mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, atau sumber air lainnya. Angka kapasitas air baku menunjukkan besaran yang fluktuatif tiap tahunnya, namun meningkat pada tahun 2023 (1,92 m³/detik) yang mengindikasikan kecukupan ketahanan air yang membaik. Hal ini kemudian menjadi dasar perbaikan kualitas kapasitas air baku yang diarahkan untuk terus meningkat pada periode berikutnya sebagai upaya peningkatan ketahanan air di Kabupaten Kutai Kartanegara. Detail terkait kapasitas air baku di Kabupaten Kutai Kartanegara diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.25

Kapasitas Air Baku (m³/detik)di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2019-2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Kapasitas Air Baku (m ³ /detik)	1,70	1,68	1,86	1,85	1,92

Sumber : PDAM Kutai Kartanegara, 2024

B) Ancaman Perubahan Iklim

Selain memperhatikan indikasi kebencanaannya, terdapat ancaman perubahan iklim yang perlu diantisipasi. Kondisi perubahan iklim di Kabupaten Kutai Kartanegara ini diukur salah satunya melalui total emisi gas rumah kaca (GRK) yang dihasilkan serta data curah hujan dan hari hujan. Berdasarkan Rencana Aksi Daerah (RAD) GRK, proyeksi dampak perubahan emisi GRK dapat sejak tahun 2015 hingga tahun 2030 disajikan melalui tabel berikut:

Tabel 2.26

Proyeksi Baseline BAU dari Sumber-Sumber Emisi GRK
di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2015-2030

Tahun	Sektor				Total
	(Ton CO2-eq)				(Ton CO2-eq)
	AFOLU	Pengelolaan Limbah	Energi	Transportasi	Kabupaten Kutai Kartanegara
2015	89.340.15	40.349,35	2.837.420	2,537.660,29	5.762.939,79
2016	162,642.06	84.005,37	2.988.845	2.474.656,50	5.966.800,93
2017	194,088.80	115.021,68	3.181.547	2.651.365,75	6.436.747,23
2018	188,394.06	137.514,99	3.325.620	2.923.349,68	6.977.030,73

Tahun	Sektor				Total
	(Ton CO2-eq)				(Ton CO2-eq)
	AFOLU	Pengelolaan Limbah	Energi	Transportasi	Kabupaten Kutai Kartanegara
2019	188,447.45	154.243,39	3.532.484	2.851.957,78	7.048.361,62
2020	191.117,77	164.988,69	3.677.772	2.924.133,88	7.346.082,34
2021	201.581,24	174.660,21	3.848.186	3.026.300,12	7.665.958,57
2022	208.309,52	183.755,40	4.015.962	3.108.351,35	7.958.771,27
2023	214.364,39	191.324,31	4.183.736	3.202.785,86	8.261.764,56
2024	220.831,53	197.829,01	4.351.511	3.308.519,84	8.575.409,38
2025	226.892,66	203.581,34	4.519.285	3.401.102,78	8.874.739,78
2026	233.088,1	208.756,60	4.687.061	3.496.753,61	9.176.700,31
2027	239.279,83	213.492,97	4.854.834	3.590.927,93	9.476.735,73
2028	245.478,57	217.898,54	5.022.610	3.686.249,48	9.777.600,59
2029	251.669,63	222.045,29	5.190.383	3.781.571,03	10.078.194,95
2030	257.867,42	225.982,33	5.358.160	3.876.892,57	10.378.589,32
Total	3.313.393,18	2.735.449,46	65.575.416	50.842.578,45	129.762.427,09

Sumber: Laporan RAD GRK Kutai Kartanegara 2021-2030

Selain data proyeksi di atas, DLHK Kabupaten Kutai Kartanegara juga merilis data realisasi penurunan GRK pada tahun 2021-2023 yang menunjukkan terjadinya peningkatan realisasi penurunan emisi tiap tahun yang juga telah melampaui target penurunan emisinya.

Tabel 2.27
Perbandingan Target dengan Realisasi Penurunan GRK
di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2022-2023

Tahun	Target Penurunan Emisi (Ton CO2-eq)	Realisasi Penurunan Emisi (Ton CO2-eq)
2021	383,297.93	440,712.48
2022	397,938.56	434,835.24
2023	413,088.23	468,311,85

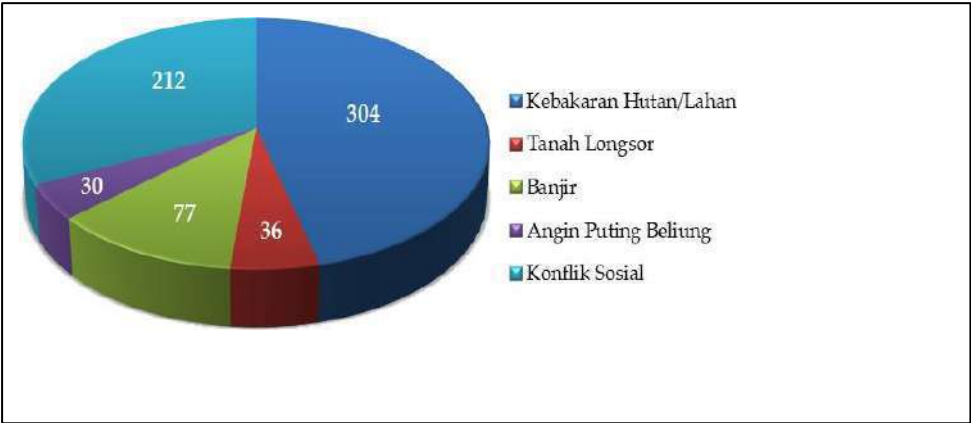
Sumber: DLHK Kabupaten Kutai Kartanegara, 2024

C) Kondisi Kebencanaan

Berdasarkan data sejarah kejadian bencana yang tercatat di BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun 2013 sampai 2019 bahwa selama 7 tahun tersebut, bencana yang dominan terjadi adalah bencana kebakaran hutan dan lahan, konflik sosial dan banjir. Dalam laporan BPBD, uraian kondisi kebencanaan di Kabupaten Kutai Kartanegara akan lebih difokuskan pada 6 (enam) bencana, yakni banjir, banjir bandang, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, gempa bumi, dan tsunami.

Grafik 2.4

Jumlah Kejadian Bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2013-2019



Sumber: BPBD Kutai Kartanegara

Secara keseluruhan, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki tingkat risiko bencana banjir pada kelas Tinggi. Hampir semua kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki kelas risiko tinggi, kecuali Kecamatan Kembang Janggut, Kota Bangun Darat, Marangkayu, Muara Jawa, Sebulu, Tabang dan Tenggarong Seberang yang memiliki tingkat risiko banjir di kelas Sedang. Detail luas risiko banjir di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada tabel dan peta berikut:

Tabel 2.28

Luas Kelas Risiko Banjir di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2024

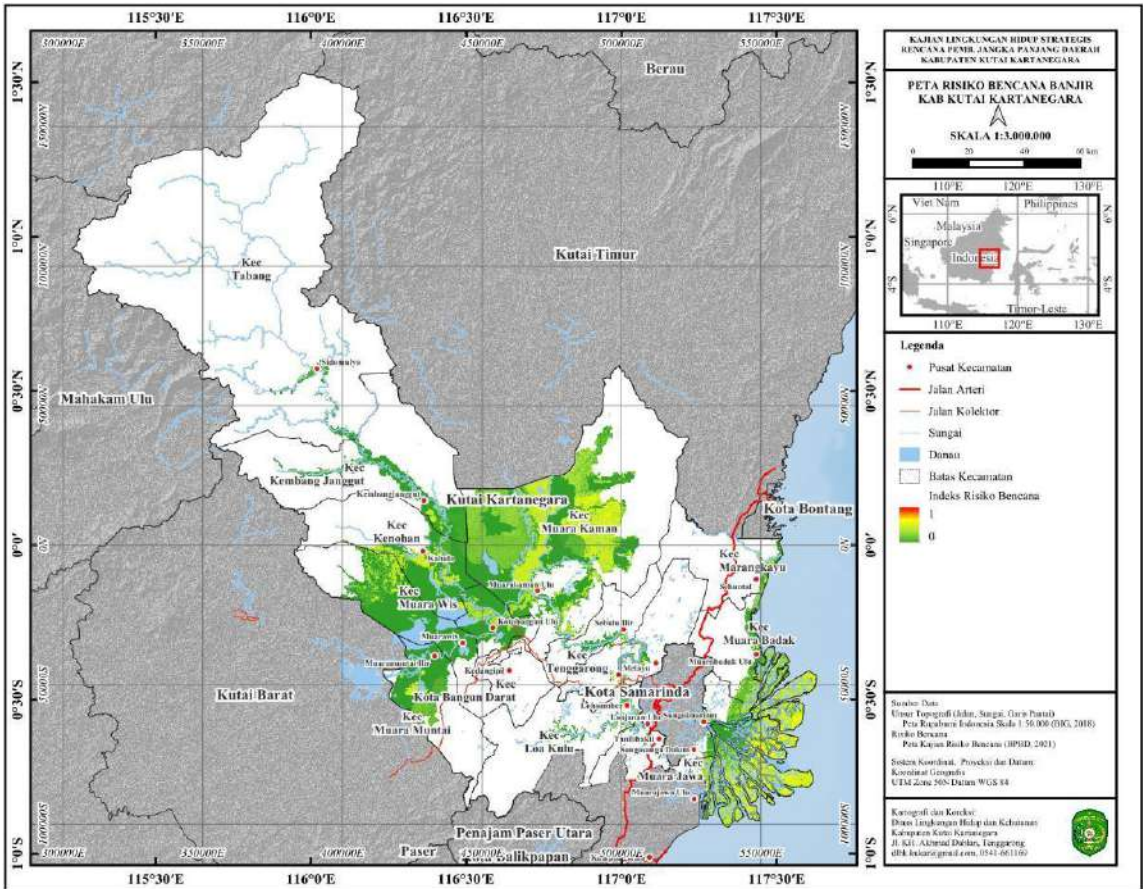
Kecamatan	Luas Kelas Risiko (Ha)			Kecamatan	Luas Kelas Risiko (Ha)		
	Rendah	Sedang	Tinggi		Rendah	Sedang	Tinggi
Anggana	19.946,07	56.828,88	67,05	Muara Kaman	91.751,22	70.870,32	5,49
Kembang Janggut	16.973,37	2.142,72	0,00	Muara Muntai	12.556,26	3.031,38	5,76
Kenohan	10.153,35	10.517,85	9,90	Muara Wis	11.676,15	6.652,08	18,18
Kota Bangun	6.579,90	4.525,92	2,07	Sanga-Sanga	2.360,43	444,69	1,26
Kota Bangun Darat	272,25	0,09	0,00	Sebulu	1.866,69	604,80	0,00

Loa Janan	758,25	392,22	17,55	Tabang	7.074,36	526,77	0,00
Loa Kulu	6.693,75	496,71	2,07	Tenggarong	1.445,31	856,08	66,15
Marangkayu	4.432,95	1.493,55	0,00	Tenggarong	1.350,00	348,21	0,00
Muara Badak	18.797,22	4.468,59	47,25	Seberang			
Muara Jawa	6.044,94	11.575,62	0,00	Kutai	220.732,47	175.776,48	242,73
				Kartanegara			

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kutai Kartanegara 2025-2045

Gambar 2.14

Peta Risiko Banjir di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2024



Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kutai Kartanegara 2025-2045

Pada risiko tanah longsor, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki tingkat risiko tanah longsor pada kelas Sedang, namun hampir semua kecamatan berada pada kelas risiko Rendah, kecuali Kecamatan Loa Kulu, Muara Badak, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Tabang dan Tenggarong Seberang yang memiliki tingkat risiko tanah longsor pada kelas Sedang. Detail luas risiko tanah longsor di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada tabel dan peta berikut:

Tabel 2.29

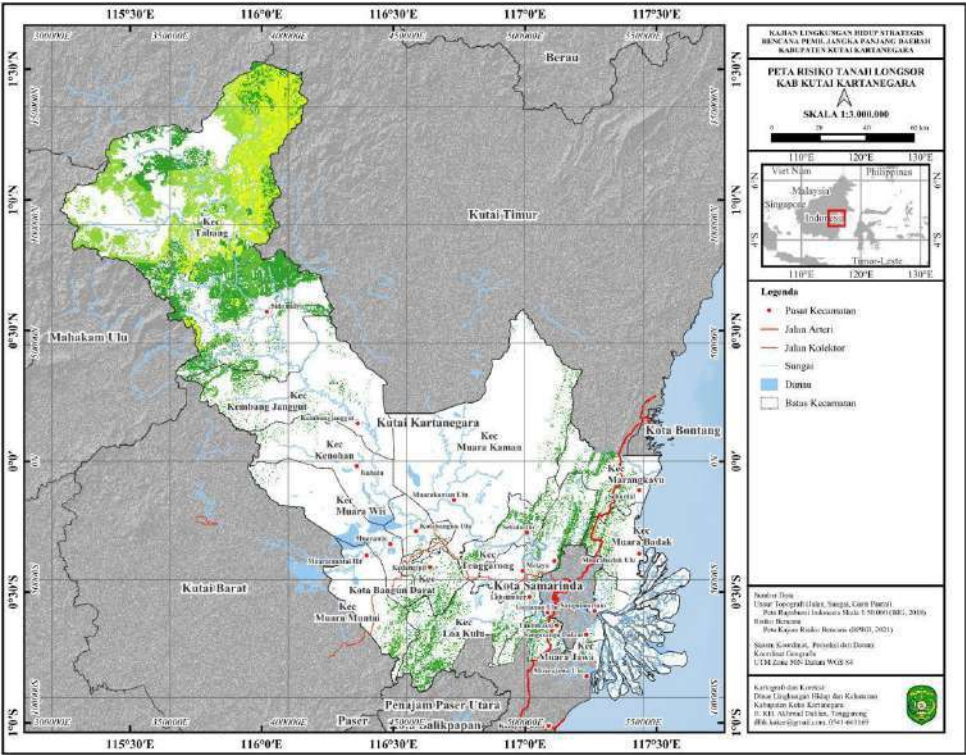
Luas Kelas Risiko Tanah Longsor di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2024

Kecamatan	Luas Kelas Risiko (Ha)			Kecamatan	Luas Kelas Risiko (Ha)		
	Rendah	Sedang	Tinggi		Rendah	Sedang	Tinggi
Anggana	466,56	0,00	0,00	Muara Kaman	2.864,34	0,00	0,00
Kembang Janggut	13.103,37	0,00	0,00	Muara Muntai	7.714,80	0,00	0,00
Kenohan	1.581,57	0,00	0,00	Muara Wis	1.005,66	0,00	0,00
Kota Bangun	234,54	0,00	0,00	Sanga-Sanga	136,17	0,09	0,00
Kota Bangun Darat	1.860,75	0,00	0,00	Sebulu	3.614,85	0,00	0,00
Loa Janan	4.777,20	0,00	0,00	Tabang	174.952,80	146.034,18	0,00
Loa Kulu	7.793,19	0,36	0,00	Tenggarong	79,11	0,00	0,00
Marangkayu	2.830,77	0,00	0,00	Tenggarong Seberang	751,05	3,51	0,00
Muara Badak	4.415,13	0,72	0,00	Kutai Kartanegara	228.234,60	146.039,04	0,00
Muara Jawa	52,74	0,18	0,00				

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kutai Kartanegara 2025-2045

Gambar 2.15

Peta Risiko Tanah Longsor di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2024



Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kutai Kartanegara 2025-2045

Untuk kondisi risiko kebakaran hutan dan lahan, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki tingkat risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada kelas Tinggi. Hampir semua kecamatan berada pada kelas risiko ini, kecuali Kecamatan Muara Jawa yang memiliki tingkat risiko karhutla pada kelas Sedang. Detail luas risiko karhutla di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada tabel dan peta berikut:

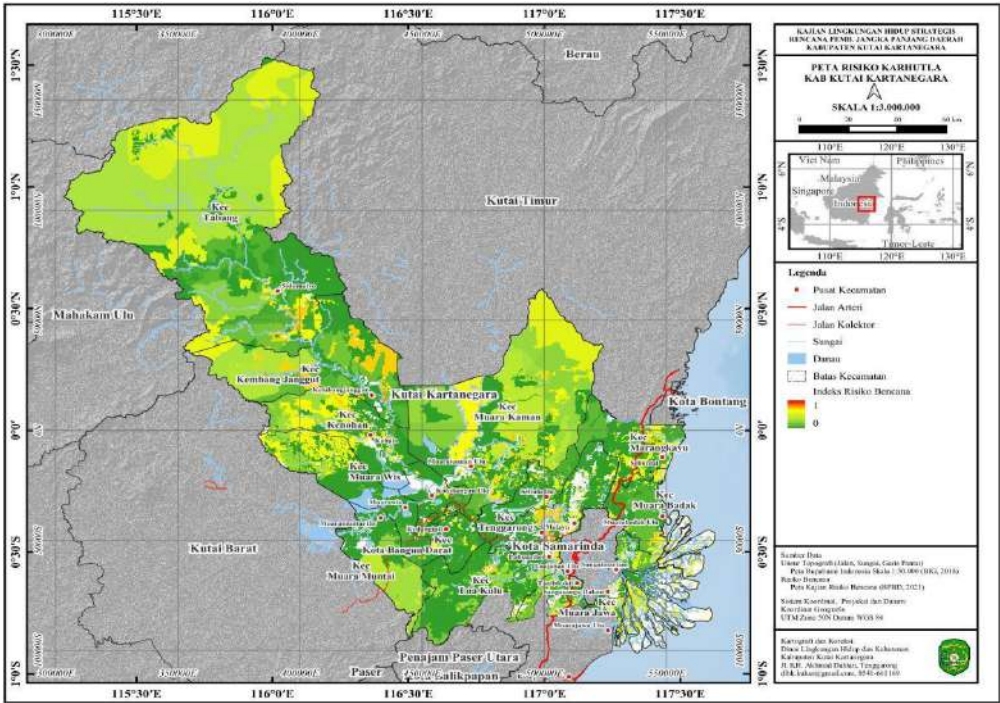
Tabel 2.30
Luas Kelas Risiko Karhutla di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2024

Kecamatan	Luas Kelas Risiko (Ha)			Kecamatan	Luas Kelas Risiko (Ha)		
	Rendah	Sedang	Tinggi		Rendah	Sedang	Tinggi
Anggana	8.215,29	26.596,17	140,58	Muara Kaman	142.714,62	172.930,14	9.462,06
Kembang Janggut	62.387,01	66.769,56	29.355,75	Muara Muntai	38.814,66	15.431,76	26,37
Kenohan	32.939,82	35.550,72	5.393,34	Muara Wis	26.842,32	26.964,45	1.546,38
Kota Bangun	6.454,17	2.061,81	891,81	Sanga-Sanga	3.143,07	1.386,00	280,98
Kota Bangun Darat	12.241,17	4.250,88	288,36	Sebulu	20.924,82	4.144,59	696,42
Loa Janan	12.740,22	4.154,31	715,95	Tabang	140.934,33	533.497,23	8.644,59
Loa Kulu	33.570,09	6.590,25	4.195,71	Tenggarong	5.949,45	924,66	4.491,63
Marangkayu	31.572,09	16.388,82	2.500,29	Tenggarong	4.353,30	6.718,32	4.231,17
Muara Badak	35.236,53	10.648,17	1.955,52	Seberang			
Muara Jawa	1.242,45	11.242,98	0,00	Kutai Kartanegara	620.275,41	946.250,82	74.816,91

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kutai Kartanegara 2025-2045

Gambar 2.16

Peta Risiko Karhutla di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2024



Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kutai Kartanegara 2025-2045

Pada risiko gempa bumi, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki tingkat risiko bencana gempa bumi pada kelas Tinggi, namun hanya Kecamatan Kembang Janggut, Kenohan dan Kota Bangun yang memiliki tingkat risiko di kelas yang sama. Sementara kecamatan lainnya terindikasi tidak memiliki tingkat risiko gempa bumi. Detail luas risiko gempa bumi di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada tabel dan peta berikut:

Tabel 2.31

Luas Kelas Risiko Gempa Bumi di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2024

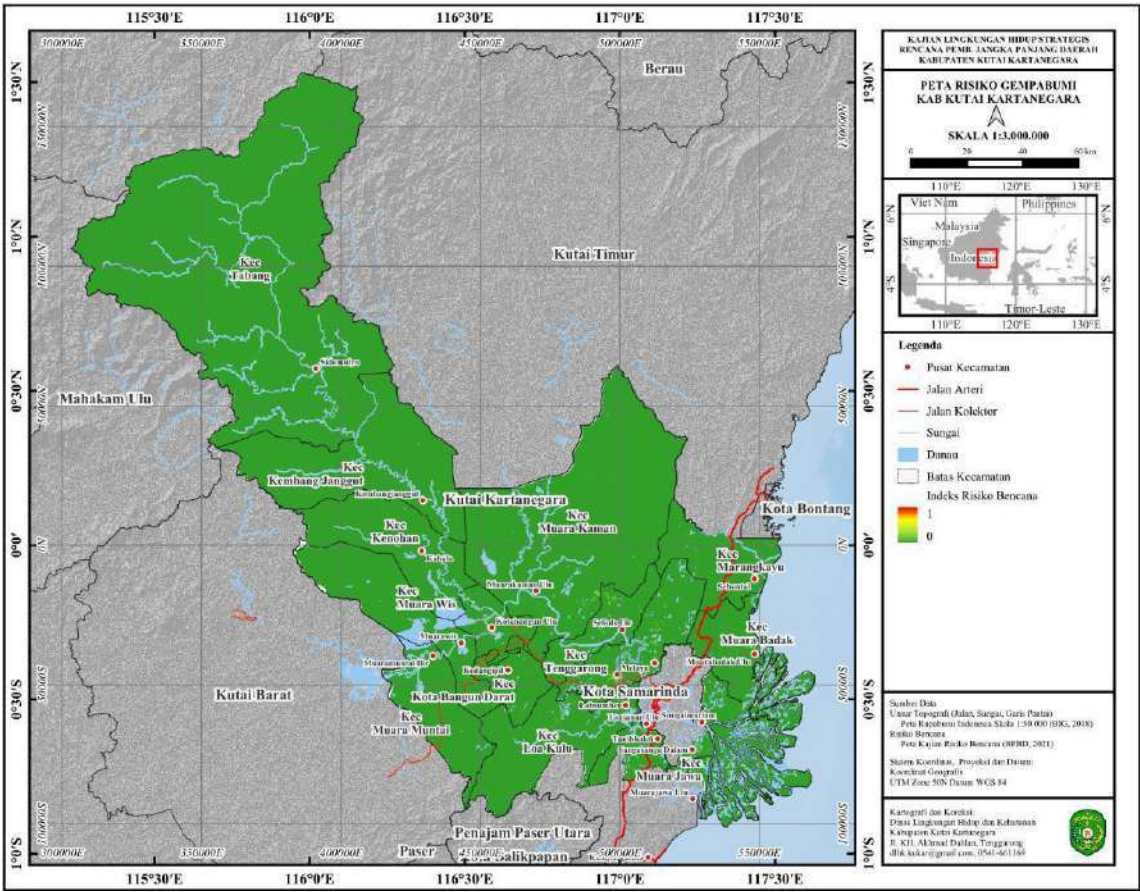
Kecamatan	Luas Kelas Risiko (Ha)			Kecamatan	Luas Kelas Risiko (Ha)		
	Rendah	Sedang	Tinggi		Rendah	Sedang	Tinggi
Anggana	0,00	0,00	0,00	Muara Kaman	0,00	0,00	0,00
Kembang Janggut	90,09	12,78	0,72	Muara Muntai	0,00	0,00	0,00
Kenohan	304,65	84,06	3,15	Muara Wis	0,00	0,00	0,00
Kota Bangun	75,24	10,80	3,24	Sanga-Sanga	0,00	0,00	0,00
Kota Bangun	0,00	0,00	0,00	Sebulu	0,00	0,00	0,00

Kecamatan	Luas Kelas Risiko (Ha)			Kecamatan	Luas Kelas Risiko (Ha)		
	Rendah	Sedang	Tinggi		Rendah	Sedang	Tinggi
Darat							
Loa Janan	0,00	0,00	0,00	Tabang	5.910,12	761,04	0,00
Loa Kulu	0,00	0,00	0,00	Tenggarong	0,00	0,00	0,00
Marangkayu	0,00	0,00	0,00	Tenggarong	0,00	0,00	0,00
Muara Badak	0,00	0,00	0,00	Seberang			
Muara Jawa	0,00	0,00	0,00	Kutai Kartanegara	6.380,10	868,68	7,11

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kutai Kartanegara 2025-2045

Gambar 2.17

Peta Risiko Gempa Bumi di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2024



Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kutai Kartanegara 2025-2045

Kemudian pada kondisi risiko tsunami, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki tingkat risiko bencana tsunami pada kelas Sedang, namun hanya Kecamatan Anggana, Marangkayu, Muara Badak Muara Jawa dan Sanga-Sanga yang memiliki tingkat risiko di kelas yang sama karena daerah ini

berbatasan langsung dengan laut. Sementara kecamatan lainnya terindikasi tidak memiliki tingkat risiko tsunami. Detail luas risiko tsunami di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada tabel dan peta berikut:

Tabel 2.32

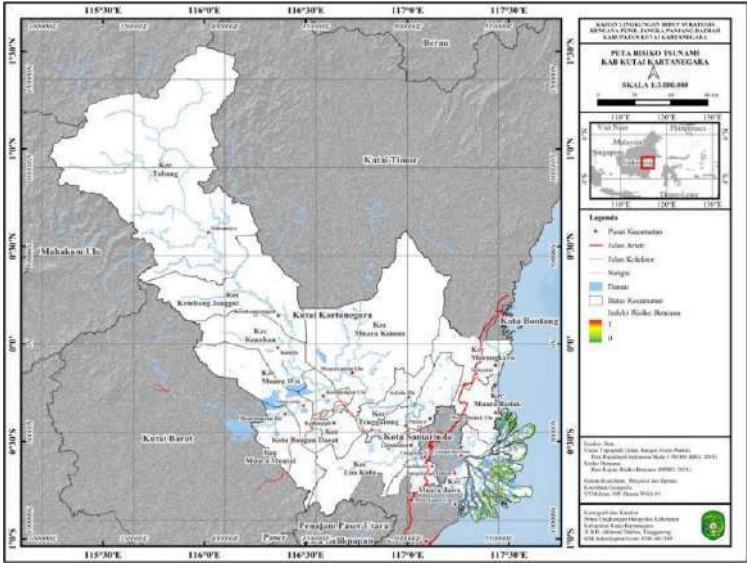
Luas Kelas Risiko Tsunami di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2024

Kecamatan	Luas Kelas Risiko (Ha)			Kecamatan	Luas Kelas Risiko (Ha)		
	Rendah	Sedang	Tinggi		Rendah	Sedang	Tinggi
Anggana	14.257,08	10.178,91	0,00	Muara Kaman	0,00	0,00	0,00
Kembang Janggut	0,00	0,00	0,00	Muara Muntai	0,00	0,00	0,00
Kenohan	0,00	0,00	0,00	Muara Wis	0,00	0,00	0,00
Kota Bangun	0,00	0,00	0,00	Sanga-Sanga	100,62	6,30	0,00
Kota Bangun Darat	0,00	0,00	0,00	Sebulu	0,00	0,00	0,00
Loa Janan	0,00	0,00	0,00	Tabang	0,00	0,00	0,00
Loa Kulu	0,00	0,00	0,00	Tenggarong	0,00	0,00	0,00
Marangkayu	487,44	9,63	0,00	Tenggarong Seberang	0,00	0,00	0,00
Muara Badak	7.055,10	164,16	0,00				
Muara Jawa	3.319,02	90,90	0,00	Kutai Kartanegara	25.219,26	10.449,90	0,00

Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kutai Kartanegara 2025-2045

Gambar 2.18

Peta Risiko Tsunami di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2024



Sumber: Dokumen KLHS RPJPD Kutai Kartanegara 2025-2045

2.1.2. Kondisi Demografi

Terkait kondisi demografi, data yang digunakan merupakan kondisi sebelum terjadinya delineasi wilayah Kutai Kartanegara ke wilayah IKN. Jumlah penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara per 2023 tercatat sejumlah 788.113 jiwa dengan laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun ini sebesar 6,76 persen dari tahun sebelumnya. Pada awal periode (2015), jumlah penduduk hanya 717.789 jiwa dan terus mengalami pertumbuhan dengan laju peningkatan yang cukup stabil tiap tahunnya. Satu-satunya penurunan jumlah penduduk terjadi di tahun 2020 yang dianalisis merupakan dampak dari terjadinya pandemi Covid-19.

Secara keseluruhan, jumlah penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara masih di bawah satu juta jiwa, dengan pertumbuhan setiap tahun meningkat dengan stabil, dengan rata-rata pertumbuhan 1,24 persen per tahun.

Tabel 2.33
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk
di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2015-2023

Tahun	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan (%)
2015	717.789	
2016	735.016	2,4
2017	752.091	2,32
2018	769.337	2,29
2019	786.122	2,18
2020	729.382	-7,22
2021	733.626	0,58
2022	738.189	0,62
2023	788.113	6,76

Sumber: Kutai Kartanegara dalam Angka, 2016-2024

2.1.2.1 Komposisi Penduduk

A) Komposisi Penduduk berdasar Kategori Usia

Berdasarkan data dari dokumen Kutai Kartanegara dalam Angka 2016-2024, komposisi penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara dikelompokkan ke dalam kategori usia, dengan jumlah terbesar pada kategori usia nol sampai empat tahun (2015-2019), bergeser ke proporsi terbesar pada usia sepuluh

sampai dengan 14 (2020-2022), dan bergeser lagi ke proporsi terbesar pada usia 15-19 di tahun 2023. Sementara itu, jumlah penduduk terendah berada pada kategori usia 55-59 tiap tahunnya (2015-2023).

Hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara didominasi oleh penduduk berusia muda serta jumlah penduduk dengan kategori dewasa pun lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia tua. Hal ini dapat menjadi indikasi baik jika dibersamai dengan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang mumpuni.

Tabel 2.34
Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Usia
di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2015-2023 (Jiwa)

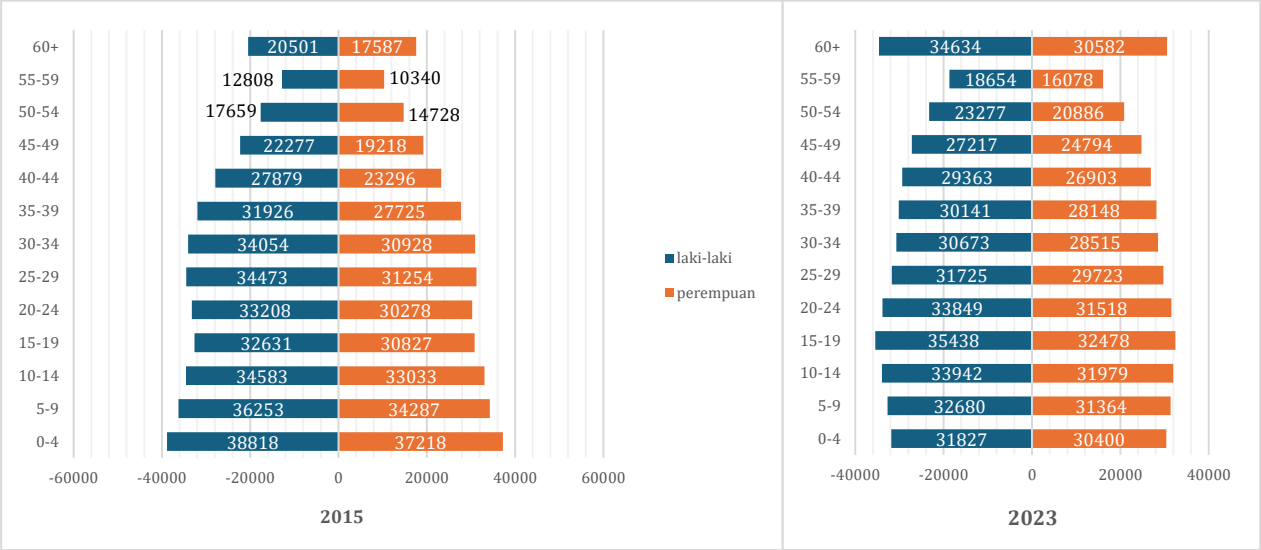
Kelompok Umur	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0-4	76.036	74.523	74.727	74.9	74.983	64.514	64.271	64.024	62.227
5-9	70.54	69.809	70.93	72.095	73.183	64.851	63.857	63.208	64.044
10-14	67.616	66.504	67.157	67.745	68.383	68.032	66.876	65.597	65.921
15-19	63.458	62.942	63.936	65.01	65.858	66.231	65.847	65.476	67.916
20-24	63.486	61.204	61.544	61.938	62.562	62.414	62.479	62.452	65.367
25-29	65.727	64.192	64.445	64.758	64.866	59.195	59.115	59.168	61.448
30-34	64.982	65.342	66.264	66.883	67.487	58.73	58.48	58.166	59.188
35-39	59.651	61.432	62.844	64.27	65.504	57.379	57.731	58.118	58.289
40-44	51.175	53.901	55.509	57.213	58.837	54.596	55.002	55.32	56.266
45-49	41.495	45.593	47.594	49.424	51.153	48.299	49.234	50.14	52.011
50-54	32.387	36.61	38.629	40.718	42.809	39.263	40.448	41.658	44.163
55-59	23.148	27.072	28.843	30.643	32.487	30.353	31.524	32.647	34.732
60-64	38.088	45.892	49.669	53.74	58.055	55.525	58.762	24.457	65.216
65-69								16.119	
70-74								10.645	
75+								10.994	
Total	717.789	735.016	752.091	769.337	786.122	729.382	733.626	738.189	756.788

Sumber: Kutai Kartanegara dalam Angka, 2016-2024

Dianalisis dari piramida penduduknya pada tahun 2015 dan 2023, proporsi penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara masih memiliki pergeseran penduduk muda ke penduduk dewasa yang cukup proporsional, pola piramida penduduk di tahun 2023 terfokus pada jumlah penduduk dewasa yang cukup merata di tiap kelompok usia. Selain itu, terdapat

peningkatan jumlah penduduk tua yang cukup signifikan utamanya pada kelompok usia lebih dari 60 tahun.

Grafik 2.5
Piramida Penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2015 dan 2024



Sumber: Kutai Kartanegara dalam Angka, 2016, 2024

B) Komposisi Penduduk berdasar Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelaminnya, komposisi penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki perbandingan laki-laki dan perempuan yang tidak jauh berbeda, dengan jumlah laki-laki yang lebih tinggi di setiap tahunnya. Menilik rasio jenis kelaminnya, kabupaten ini memiliki rasio di atas 100 sejak 2015 hingga 2023, dengan rasio tertinggi terjadi pada 2016 (112,71). Rasio jenis kelamin ini cenderung menurun setiap tahunnya, dengan perubahan yang tidak terlalu signifikan. Pada akhir periode di tahun 2023, rasio jenis kelamin sebesar 108,27 yakni terdapat penduduk laki-laki 392.404 jiwa dan perempuan 361.458 jiwa. Rata-rata rasio jenis kelamin di Kabupaten Kutai Kartanegara pada periode 2015-2022 sebesar 109,93.

Tabel 2.35
Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kutai
Kartanegara, 2015-2023

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Sex Ratio
2015	377.070	340.719	110,67
2016	385.994	342.452	112,71
2017	394.876	357.215	110,54
2018	403.825	365.512	110,48
2019	412.529	373.593	110,42
2020	380.560	348.822	109,10
2021	382.209	351.417	108,76
2022	384.005	354.184	108,42
2023	393.42	363.368	108,27

Sumber: Kutai Kartanegara dalam Angka, 2016-2024

2.1.2.2 Distribusi dan Kepadatan Penduduk

Berdasarkan data luasan wilayah dan data demografis sebelum delineasi IKN, kepadatan penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara terhitung sebesar 29,29 jiwa per kilometer persegi (2023). Angka tersebut merupakan angka tertinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Namun demikian, angka kepadatan penduduk di kabupaten ini masih lebih rendah dibandingkan dengan angka kepadatan penduduk Provinsi Kalimantan Timur pada 2023 (31 jiwa per kilometer persegi). Meningkatnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun menjadi penyebab utama meningkatnya tingkat kepadatan penduduk di Kutai Kartanegara.

Tabel 2.36
Jumlah dan Kepadatan Penduduk
di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2015-2023

Tahun	Luas Wilayah (km2)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km2)
2015	26.909,93	717.789	26,67
2016		735.016	27,31
2017		752.091	27,95
2018		769.337	28,59

Tahun	Luas Wilayah (km2)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km2)
2019		786.122	29,21
2020		729.382	27,10
2021		733.626	27,26
2022		738.189	27,43
2023		788.113	29,29

Sumber: Kutai Kartanegara dalam Angka, 2016-2024

Jika ditelusuri pada data persebaran penduduk per kecamatan, jumlah penduduk terbanyak pada 2023 masih tersebar di Kecamatan Tenggarong (114.039 jiwa). Pada 2021 terjadi pemekaran wilayah, menghasilkan dua kecamatan baru di Kutai Kartanegara yaitu Kecamatan Kota Bangun Barat dan Samboja Barat.

Kemudian, jumlah penduduk terendah terdapat di Kecamatan Muara Wis. Meskipun jumlahnya bertumbuh, namun jumlah penduduk pada 2023 di kecamatan ini hanya sejumlah 9.730 jiwa.

Tabel 2.37
Persebaran Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan
di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2015-2023

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anggana	40.701	42.315	43.990	45.71	47.436	33.416	33.183	32.964	38.674
Kembang Janggut	32.821	34.964	36.968	39.206	41.525	25.810	25.775	25.75	26.620
Kenohan	10.08	10.127	10.178	10.181	10.291	11.588	11.664	11.744	12.346
Kota Bangun	33.295	33.579	33.833	34.074	34.273	36.655	36.883	37.125	23.839
Kota Bangun Barat		-							14.468
Loa Janan	62.921	64.110	65.282	66.445	67.543	67.417	68.067	68.692	76.051
Loa Kulu	44.713	45.596	46.419	47.234	48.003	51.639	52.459	53.310	57.048
Marang Kayu	24.047	24.094	24.111	24.117	24.370	26.823	26.934	27.054	29.244

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Muara Badak	45.954	47.095	48.226	49.361	50.459	46.656	46.945	47.253	50.686
Muara Jawa	41.236	42.665	44.141	45.648	47.145	41.561	42.001	42.461	44.070
Muara Kaman	36.255	36.588	36.899	37.195	37.447	45.885	46.819	47.789	46.309
Muara Muntai	18.336	18.433	18.608	18.724	18.816	19.396	19.432	19.475	21.234
Muara Wis	8.999	9.050	9.097	9.139	9.171	9.398	9.398	9.400	9.730
Samboja	63.467	64.982	66.632	68.291	69.903	66.617	67.306	68.025	41.607
Samboja Barat		-							31.513
Sanga-Sanga	20.477	21.203	21.782	22.366	22.938	19.728	19.767	19.814	20.969
Sebulu	38.363	38.619	38.834	39.033	39.183	40.925	41.014	41.117	43.329
Tabang	10.349	10.415	10.493	10.537	10.567	11.457	11.514	11.575	13.277
Tenggarong	114.307	117.809	121.341	124.921	128.052	106.483	106.553	106.669	114.039
Tenggarong Seberang	71.467	73.372	72.257	77.155	79.001	67.877	67.912	67.972	73.060
Total	717.788	735.016	749.091	769.337	786.123	729.328	733.626	738.189	788.113

Sumber: Kutai Kartanegara dalam Angka, 2016-2024

Persebaran penduduk tersebut selaras dengan tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara per kecamatan. Angka tertinggi diduduki Kecamatan Tenggarong, dengan jumlah yang konsisten di atas 250 sejak 2015, hingga ada akhir periode di tahun 2023 kepadatan penduduknya mencapai 317,14 jiwa per kilometer persegi.

Sebaliknya, Kecamatan Tabang merupakan kecamatan dengan wilayah terluas dan justru memiliki jumlah penduduk yang relatif kecil dibandingkan dengan wilayah lainnya. Kecamatan ini memiliki tingkat kepadatan penduduk terendah. Sejak 2015 hingga 2023, nilai kepadatan penduduk tertinggi terjadi pada 2023 (1,64 jiwa per kilometer persegi). Hal ini menunjukkan bahwa

persebaran penduduk belum merata di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor.

Tabel 2.38
Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2015-2023

Kecamatan	Luas Wilayah (km2)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anggana	1,052.94	38.65	40.19	41.78	43.41	45.05	31.74	31.51	31.31	36.73
Kembang Janggut	1,308.47	25.08	26.72	28.25	29.96	31.74	19.73	19.70	19.68	20.34
Kenohan	2,195.25	4.59	4.61	4.64	4.64	4.69	5.28	5.31	5.35	5.62
Kota Bangun	440.35	36.98	37.30	37.58	37.85	38.07	40.72	40.97	41.24	54.14
Kota Bangun Darat	459.9									31.46
Loa Janan	699	90.02	91.72	93.39	95.06	96.63	96.45	97.38	98.27	108.80
Loa Kulu	1,613.72	27.71	28.26	28.77	29.27	29.75	32.00	32.51	33.04	35.35
Marang Kayu	864.18	27.83	27.88	27.90	27.91	28.20	31.04	31.17	31.31	33.84
Muara Badak	738.28	62.24	63.79	65.32	66.86	68.35	63.20	63.59	64.00	68.65
Muara Jawa	517.46	79.69	82.45	85.30	88.22	91.11	80.32	81.17	82.06	85.17
Muara Kaman	4,235.45	8.56	8.64	8.71	8.78	8.84	10.83	11.05	11.28	10.93
Muara Muntai	946.5	19.37	19.47	19.66	19.78	19.88	20.49	20.53	20.58	22.43
Muara Wis	1,315.73	6.84	6.88	6.91	6.95	6.97	7.14	7.14	7.14	7.40
Samboja	101.71	165.56	169.51	173.82	178.14	182.35	173.78	175.57	177.45	409.07
Samboja Barat	281.64									111.89
Sanga-Sanga	416.57	49.16	50.90	52.29	53.69	55.06	47.36	47.45	47.56	50.34
Sebulu	599.7	63.97	64.40	64.76	65.09	65.34	68.24	68.39	68.56	72.25
Tabang	8,106.73	1.28	1.28	1.29	1.30	1.30	1.41	1.42	1.43	1.64
Tenggarong	359.59	317.88	327.62	337.44	347.40	356.11	296.12	296.32	296.64	317.14
Tenggarong Seberang	656.75	108.82	111.72	110.02	117.48	120.29	103.35	103.41	103.50	111.24
Total	26,909.92	26.67	27.31	27.84	28.59	29.21	27.10	27.26	27.43	29.29

Sumber: Kutai Kartanegara dalam Angka, 2016-2024

2.1.2.3 Keberadaan Masyarakat Adat

Masyarakat adat memiliki asal-usul berdasarkan ikatan genealogis dan ikatan teritorial tertentu yang sudah ada sejak nenek moyang dahulu. Kutai

Kartanegara dengan sejarah budaya kerajaan yang kuat, masih memiliki budaya adat yang kuat hingga kini.

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kalimantan Timur, terdapat sejumlah masyarakat adat di Kabupaten Kutai Kartanegara yang terdiri dari Suku Banjar dan Suku Kutai. Kemudian, DPMPD Kalimantan Timur pun mencatat terdapat Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Kabupaten Kutai Kartanegara yang per Mei 2024 masih dalam proses pengakuan melalui Surat Keputusan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Kelima MHA di Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut, yakni MHA Kutai Adat Lawas, Kenyah Lepo Bem, Kenyah Lepoq Jaalan Lung Anai Anai, Kenyah Lepoq Jaalan Sungai Bawang, Kenyah Umaq Lasan, dan MHA Punan Bekatan.

Hal ini menunjukkan dibutuhkannya fokus pengelolaan dalam menjaga kelestarian budaya serta perlindungan terhadap masyarakat adat di Kutai Kartanegara ini. Dalam upaya tersebut terdapat lembaga adat yang tersebar di setiap kecamatan yang terdaftar dalam data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2.39
Lembaga Adat di Tiap Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2023

No.	Kecamatan	Lembaga Adat		Jumlah
		Desa	Kelurahan	
1	Kota Bangun	11	-	11
2	Kota Bangun Barat	7	-	7
3	Kembang Janggut	11	-	11
4	Kenohan	9	-	9
5	Muara Kaman	20	-	20
6	Tabang	19	-	19
7	Tenggarong	2	9	11
8	Tenggarong Seberang	12	-	12
9	Muar Wis	7	-	7
10	Loa Janan	8	-	8
11	Loa Kulu	9	-	9
12	Sebulu	14	-	14
13	Muara Muntai	13	-	13
14	Muara Badak	4	-	4

No.	Kecamatan	Lembaga Adat		Jumlah
		Desa	Kelurahan	
15	Anggana	8	-	8
16	Muara Jawa	8	-	8
17	Samboja	3	10	13
18	Samboja Barat	1	9	10
19	Marang Kayu	2	-	2
20	Sanga-Sanga	-	1	1
Jumlah		168	29	197

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kartanegara, 2023

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, aspek yang perlu diperhatikan dan dianalisis dalam konteks pembangunan meliputi pemerataan ekonomi dan sosial budaya. Dalam perspektif ekonomi, terdapat beberapa indikator penting yang dapat digunakan untuk mengevaluasi, seperti penilaian terhadap laju pertumbuhan ekonomi, Indeks Gini, angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan indeks pembangunan manusia.

Sementara itu, pada isu sosial budaya terdapat beberapa indikator yang relevan, termasuk indeks: keluarga sehat, kualitas keluarga, perlindungan anak, pemberdayaan/pembangunan gender/ketimpangan gender, pembangunan pemuda, dan pembangunan kebudayaan. Rincian yang lebih detail terkait aspek-aspek kesejahteraan masyarakat dapat dijelaskan lebih lanjut dalam sub-bab berikut ini.

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

2.2.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses jangka panjang yang mengembangkan kemampuan suatu wilayah dalam memproduksi dan menyediakan beragam barang dan jasa kepada penduduknya. Secara umum, pertumbuhan ekonomi dapat diukur melalui laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan. Artinya, suatu daerah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika nilai PDRB-nya lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada 2013, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami perlambatan dari 5,49 persen menjadi 0,04 persen. Bahkan pada periode 2014-2016, laju pertumbuhannya justru menunjukkan angka negatif. Penurunan terparah terjadi pada 2015 dengan laju pertumbuhan minus 7,17 persen. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh penurunan laju pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian, yang tercatat minus 10,66 persen. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi baru terjadi pada periode 2017- 2019. Namun, akselerasinya kembali menurun pada tahun 2020 dengan laju pertumbuhan minus 4,21 persen akibat dampak Pandemi Covid-19.

Setengah dari sektor usaha di Kutai Kartanegara mengalami laju pertumbuhan negatif, termasuk sektor pertambangan dan penggalian yang merupakan penopang utama pertumbuhan ekonomi. Dalam kondisi tersebut, terdapat tiga sektor yang justru menunjukkan pertumbuhan positif, yaitu pengadaan listrik dan gas, informasi dan komunikasi, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Ketiga sektor ini diperkirakan menjadi sektor yang paling dibutuhkan dan berkembang pesat selama masa Pandemi Covid-19, sejalan dengan kebijakan *work from home*, *study from home*, dan berbagai pembatasan kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Meskipun sempat mengalami penurunan yang signifikan pada 2021, Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan perbaikan dalam laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 sebesar 3,71 persen meningkat menjadi 5,13 persen pada tahun 2023. Hal ini ditandai dengan kembalinya capaian laju pertumbuhan positif secara keseluruhan. Secara umum, pada tahun 2023, angka laju pertumbuhan ekonomi di Kutai Kartanegara mencapai nilai yang positif, yang ditandai dengan keseragaman capaian nilai positif di seluruh sektor lapangan usaha.

Tabel 2.40
Laju Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha
di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2011-2023

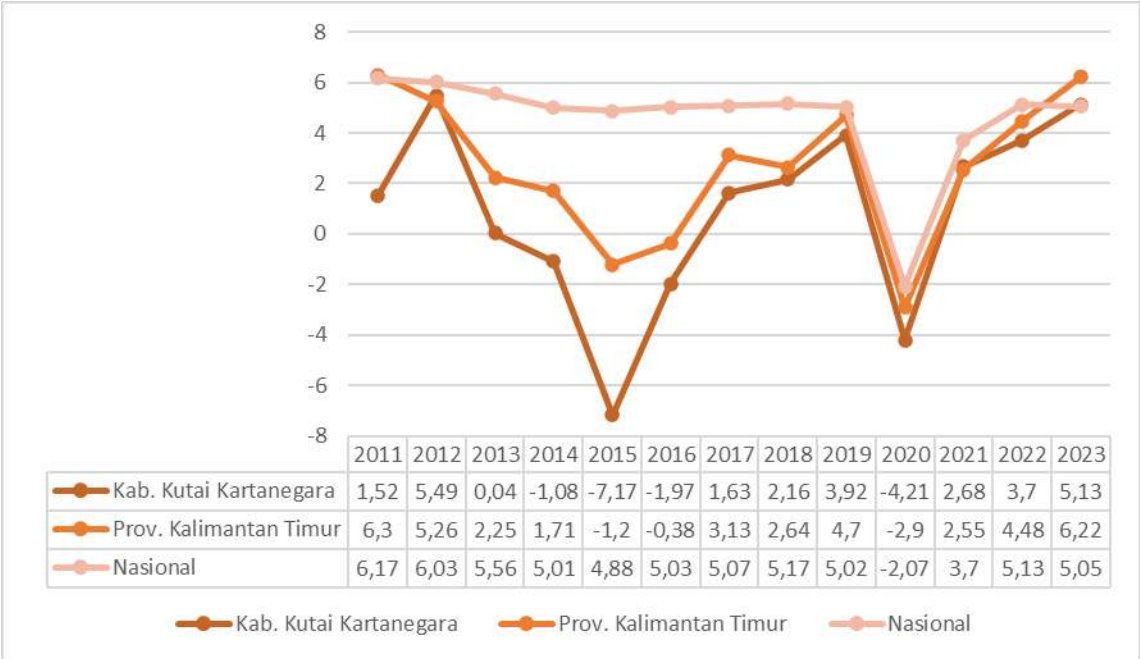
Kategori/ Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,26	4,56	9,42	4,67	6,75	2,11	6,5	6,85	5,96	0,6	1,11	1,91	2,91
B. Pertambangan dan Penggalian	0,42	5,17	-1,67	-3,27	-10,66	-3,25	0,08	0,35	3,25	-5,83	2,60	3,00	4,20
C. Industri Pengolahan	2,52	5,82	6,23	5,45	4,91	8,61	4,75	6,29	4,68	-3,54	0,69	2,92	2,11
D. Pengadaan Listrik dan Gas	16,68	6,04	3,38	21,22	28,23	9,63	11,88	14,16	9,38	12,34	1,49	4,80	17,17
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	15,84	-1,01	7,02	6,28	5,81	7,64	8,94	2,95	5,02	3,5	4,95	12,50	11,25
F. Konstruksi	4,42	8,38	4,7	14,12	-0,03	-6,91	6,34	8,99	4,92	-4,01	5,80	11,28	15,45
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,96	7,75	4,91	2,19	2,2	4,57	6,15	6,58	5,99	1,72	3,82	5,29	7,66
H. Transportasi dan Pergudangan	7,34	9,22	7,63	6,65	4,43	6,56	6,1	6,93	5,77	-0,17	3,40	11,07	11,24
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11,92	6,15	6,87	6,85	5,99	11,26	8,11	7,56	6,28	-0,48	2,27	7,58	13,30
J. Informasi dan Komunikasi	13,53	12,13	11,04	11,76	10,86	9,03	9,57	6,47	7,89	8,94	8,76	6,98	7,74
K. Jasa Keuangan	3,75	11,56	16,52	3,4	6,21	4,1	3,74	7,1	5,95	2,05	3,49	8,19	5,75
L. Real Estate	4,47	5,14	5,69	7,4	4,31	-1,3	1,17	4,22	2,85	0,39	-1,83	2,42	12,44
M,N. Jasa Perusahaan	13,09	6,06	4,22	6,5	-1,77	-7,07	3,55	4,4	3,04	-3,72	1,30	5,63	12,39
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-1,48	4,82	5,08	8,9	13,87	-1,4	-0,62	0,48	3,02	-3,79	2,05	6,46	6,79
P. Jasa Pendidikan	21,61	15,61	14,81	11,91	8,76	12,05	8,97	8,36	7,32	0,86	3,05	4,54	5,15
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	16,57	25,95	6,06	9,59	10,88	12,34	9,45	9,43	9,23	18,73	11,69	4,81	6,80

Kategori/ Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
R,S,T,U. Jasa Lainnya	4,92	3,27	4,54	9,19	9,12	15,94	8,46	7,52	8,4	-1,81	3,25	7,16	9,33
Total	1,52	5,49	0,04	-1,08	-7,17	-1,97	1,63	2,16	3,92	-4,21	2,68	3,70	5,13

Sumber: BPS Kutai Kartanegara, 2024

Grafik 2.6

Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kutai Kartanegara,
Provinsi Kalimantan Timur, dan Nasional, 2011-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011-2023

Apabila dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Provinsi Kalimantan Timur dalam rentang waktu 2011 hingga 2023, terlihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara cenderung selalu berada di bawah Provinsi Kalimantan Timur. Namun demikian, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara pernah lebih tinggi dibandingkan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2012 dan 2021. Pada tahun 2012, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 5,49 persern, sedangkan Provinsi Kalimantan Timur mencapai 5,26 persen. Pada tahun 2021, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 2,67 persen, sementara Provinsi Kalimantan Timur mencapai 2,55 persen. Selain itu, jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional, laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Kutai Kartanegara selalu lebih rendah.

2.2.1.2. Rata-rata Konsumsi Per Kapita

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi rumah tangga maka semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita yang dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Kelompok komoditas makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sebagainya. Kelompok komoditas bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.

Berdasarkan Hukum Engel (*Engel Law*), bahwa semakin tinggi pendapatan atau kesejahteraan seseorang maka proporsi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan makanan akan menurun. Namun sebaliknya, pengeluaran untuk nonmakanan proporsinya akan semakin meningkat. Dari data di bawah dapat dilihat bahwa penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara mengalokasikan sebagian besar dari pengeluaran konsumsi rumah tangganya untuk non-makanan. Namun hal tersebut tidak bisa langsung menjadi kesimpulan bahwa masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami peningkatan kesejahteraan yang signifikan dalam lima tahun terakhir, karena peningkatan proporsinya tidak stabil. Meskipun begitu, kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara tetap meningkat karena pengeluaran secara keseluruhan, baik untuk makanan maupun non-makanan mengalami peningkatan.

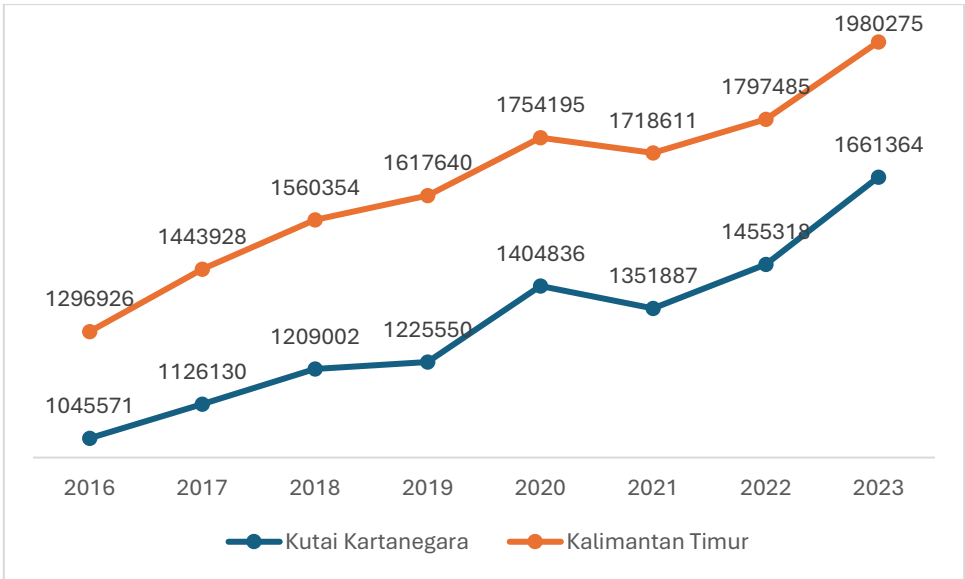
Tabel 2.41
Total Pengeluaran Konsumsi Per Kapita Sebulan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dan Nasional, 2019 – 2023

Tahun	Kab. Kutai Kartanegara		Prov. Kalimantan Timur		Indonesia	
	Makanan (%)	Non-makanan(%)	Makanan	Non-makanan	Makanan	Non-makanan
2019	48,73	51,27	44,78	55,22	49,14	50,86
2020	48,37	51,63	45,06	54,94	49,22	50,78

2021	46,52	53,48	42,85	57,15	49,25	50,75
2022	48,92	51,08	45,25	52,74	50,14	49,86
2023	47,38	52,62	44,69	55,31	48,99	51,01

Berikut merupakan rata-rata konsumsi per kapita Sebulan di Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun 2016 hingga 2023.

Grafik 2.7
Rata-rata Konsumsi per Kapita Sebulan
di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Provinsi Kalimantan Timur,
2016 – 2023



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Data tersebut menunjukkan perkembangan rata-rata konsumsi per kapita sebulan di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2016 hingga 2023. Secara umum, terjadi peningkatan konsumsi per kapita di kedua wilayah tersebut dari tahun ke tahun. Kutai Kartanegara, misalnya, mengalami peningkatan konsumsi dari 1.045.571 pada tahun 2016 menjadi 1.661.364 pada tahun 2023. Hal serupa juga terjadi di Kalimantan Timur, di mana konsumsi per kapita naik dari 1.296.926 pada tahun 2016 menjadi 1.980.275 pada tahun 2023.

Peningkatan ini dapat mencerminkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat di wilayah tersebut, terutama di Kutai Kartanegara. Meskipun terdapat fluktuasi kecil, seperti penurunan konsumsi di tahun 2021, tren keseluruhan tetap menunjukkan kenaikan yang signifikan. Data ini juga dapat mengindikasikan perubahan pola konsumsi

masyarakat serta dampak dari berbagai faktor seperti inflasi, kebijakan ekonomi, atau perkembangan sektor industri di daerah tersebut.

2.2.1.3. Indeks Gini

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus diimbangi dengan pemerataan. Jika hanya berfokus pada pertumbuhan, maka dapat memicu dua masalah krusial: ketidaksetaraan ekonomi dan kemiskinan. Ketidaksetaraan ekonomi merujuk pada disparitas dalam distribusi pendapatan. Ketidaksetaraan ini bermula dari distribusi pendapatan yang tidak merata, yang mengakibatkan disparitas pendapatan sebagai akibat dari perbedaan tingkat kesejahteraan di antara kelompok masyarakat.

Ketidaksetaraan ekonomi dapat semakin memburuk apabila kelompok masyarakat berpendapatan rendah terus mengalami pertumbuhan yang lambat atau bahkan menurun, sementara kelompok berpendapatan tinggi mengalami pertumbuhan yang pesat. Apabila masalah ini dibiarkan tanpa penanganan, dampaknya dapat berujung pada ketidakpuasan sosial dan politik yang berpotensi merugikan.

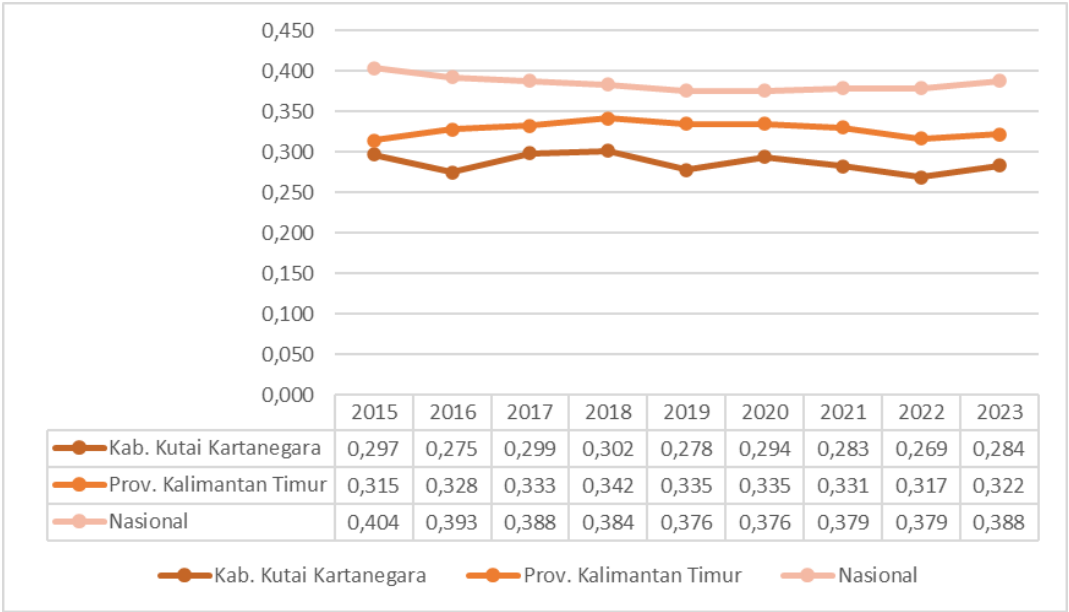
Sebagai inti dari semua ini, kesenjangan ekonomi antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan rendah serta tingkat kemiskinan menjadi dua masalah yang serius di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Meskipun isu pemerataan akan selalu muncul dalam setiap tahap pembangunan, penting untuk terus mengendalikan dampaknya agar tidak meluas. Ketimpangan yang semakin besar dapat memicu ketidakpuasan publik yang jika terus terakumulasi akan menciptakan keresahan yang pada akhirnya berpotensi memicu berbagai konflik. Salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan distribusi pendapatan adalah Indeks Gini.

Indeks Gini Kabupaten Kutai Kartanegara pada periode 2015 hingga 2023 menunjukkan variasi nilai yang fluktuatif. Penurunan Indeks Gini terjadi pada tahun 2016, 2019, 2021, dan 2022. Sementara peningkatan Indeks Gini terjadi pada tahun 2017, 2018, 2020, dan 2023. Nilai tertinggi tercatat pada tahun 2018 yakni sebesar 0,302 dan terendah pada tahun 2022 sebesar 0,269. Nilai terkini Indeks Gini tahun 2022 menunjukkan angka terendah sejak tahun 2015. Oleh karena itu, peluang untuk terus menurunkan angka tersebut dapat diupayakan oleh pemerintah sebagai langkah pemerataan pendapatan masyarakat. Jika dibandingkan dengan

Indeks Gini Provinsi Kalimantan Timur dan nasional, Indeks Gini Kabupaten Kutai Kartanegara lebih rendah. Artinya distribusi pendapatan di Kabupaten Kutai Kartanegara lebih merata dibandingkan dengan tingkat Provinsi Kalimantan Timur dan nasional.

Grafik 2.8

Indeks Gini di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dan Nasional, 2015 - 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015-2023

2.2.1.4. Angka Kemiskinan

Seseorang dikategorikan menjadi miskin jika pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal. Kemiskinan akan semakin meluas jika kesenjangan pendapatan antara kelompok penduduk kaya dan miskin semakin lebar. Upaya pemerataan merupakan usaha untuk mengatasi kemiskinan. Pengukuran kemiskinan dilakukan dengan menetapkan nilai standar kebutuhan minimum (baik makanan dan nonmakanan) yang harus dipenuhi seseorang agar dapat hidup layak. Nilai standar kebutuhan minimum tersebut dinamakan sebagai garis kemiskinan.

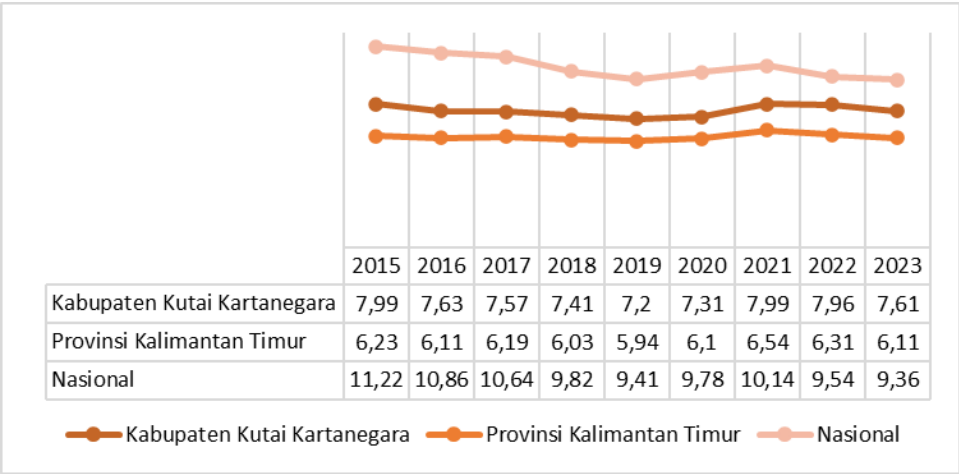
Kemiskinan merupakan salah satu indikator kunci kesejahteraan yang dihitung melalui konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan.

Perkembangan persentase penduduk miskin dari tahun 2015 hingga 2023 di Kabupaten Kutai Kartanegara cukup fluktuatif. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2015 hingga 2019 terus

menurun, dari 7,99 persen menjadi 7,20 persen. Namun, angka tersebut kembali naik pada tahun 2020 menjadi 7,31 persen dan mencapai 7,99 persen pada tahun 2021. Kenaikan ini terjadi akibat Pandemi Covid-19 yang berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi.

Persentase penduduk miskin kemudian kembali turun perlahan menjadi 7,96 persen pada tahun 2022. Selanjutnya pada tahun 2023, persentase penduduk miskin di Kabupaten Kutai Kartanegara turun menjadi 7,61 persen. Jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur, persentase penduduk miskin di Kabupaten Kutai Kartanegara selalu lebih tinggi. Namun, jika dibandingkan dengan tingkat nasional, persentase penduduk miskin Kabupaten Kutai Kartanegara selalu lebih rendah.

Grafik 2.9
Persentase Penduduk Miskin
di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dan Nasional,
2015-2023



2.2.1.5. Tingkat Pengangguran Terbuka

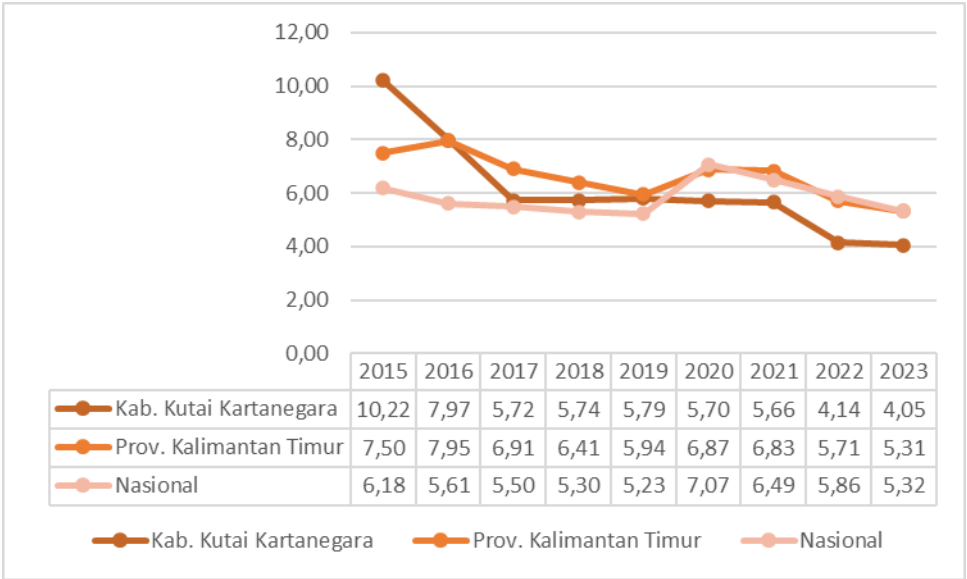
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencerminkan perbandingan antara jumlah pengangguran dengan total angkatan kerja. Nilai TPT menunjukkan besarnya jumlah tenaga kerja yang belum termanfaatkan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran mencakup penduduk yang tidak bekerja tetapi dalam status mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

Perkembangan TPT di Kabupaten Kutai Kartanegara pada periode 2015-2022 menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2015, nilai TPT Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 10,22 persen. Pada periode 2017-2021, nilai TPT

selalu berada di atas 5 persen, dan terus menurun hingga mencapai 4,14 persen pada tahun 2022. Jika dibandingkan dengan TPT Provinsi Kalimantan Timur, maka nilai TPT Kabupaten Kutai Kartanegara cenderung selalu lebih rendah, meskipun sempat lebih tinggi pada tahun 2015.

Selanjutnya, jika dibandingkan dengan nilai TPT nasional, TPT Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2015 lebih tinggi. Pada periode 2017 – 2019, nilainya hampir sama pada kisaran 5 persen. Angka TPT Kabupaten Kutai Kartanegara sempat lebih rendah dari nasional pada tahun 2020 kemudian lebih tinggi pada tahun 2021. Pada tahun 2023 angka TPT Kabupaten Kutai Kartanegara lebih rendah daripada TPT nasional.

Grafik 2.10
Tingkat Pengangguran Terbuka
di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dan Nasional,
2015-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015-2023

2.2.1.6. Indeks Pembangunan Manusia

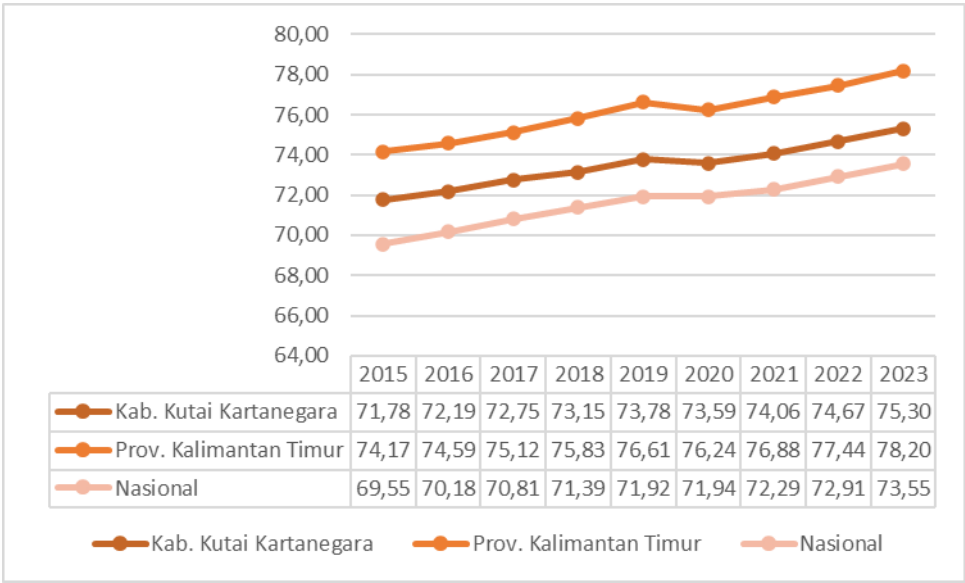
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencerminkan tingkat pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dalam aspek pendidikan, indeks ini diukur menggunakan indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Sementara itu, pada aspek Kesehatan, diukur dari indikator umur harapan hidup, dan pada aspek ekonomi, diukur dari indikator pengeluaran per kapita.

IPM mengasumsikan bahwa kemajuan ekonomi akan berdampak pada peningkatan pilihan individu untuk memperoleh pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. Hubungan antara ketiga aspek tersebut bersifat timbal balik, sehingga kemajuan dalam satu komponen akan berdampak pada komponen lainnya. Kelemahan dalam salah satu komponen IPM tidak bisa diimbangi dengan peningkatan komponen lainnya. Oleh karena itu, ketiga komponen IPM perlu ditingkatkan secara bersamaan.

IPM Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan peningkatan pada periode 2015 – 2022 meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2020. Pada tahun 2015, nilai IPM Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 71,78 dan meningkat menjadi 74,67 pada tahun 2022. Nilai tersebut berada di atas IPM nasional yang pada tahun 2022 adalah 72,91.

Namun, nilai IPM Kabupaten Kutai Kartanegara masih berada di bawah IPM Provinsi Kalimantan Timur, dimana pada tahun 2022 nilainya mencapai 77,44. Kemudian jika dibandingkan dengan IPM nasional, IPM Kabupaten Kutai Kartanegara selalu lebih tinggi dalam periode 2015-2023. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Grafik 2.11
Indeks Pembangunan Manusia
di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional,
2015-2023



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2015 – 2023

Selama periode 2015-2023 angka IPM Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan peningkatan. Berikut ini perkembangan indikator komponen IPM di Kabupaten Kutai Kartanegara pada 2015-2023.

Tabel 2.42
Komponen Penyusun Indeks Pembangunan Manusia
di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2015-2023

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Usia Harapan Hidup (tahun)	71,60	71,64	71,68	71,93	72,21	72,34	72,64	72,65	72,75
Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,25	13,26	13,56	13,57	13,58	13,59	13,60	13,63	13,64
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	8,68	8,71	8,83	8,84	9,10	9,22	9,23	9,24	9,26
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/ Kapita/ Tahun)	10,250	10.593	10.692	10.959	11.152	10.720	11.048	11.677	12,323
IPM	71,78	72,19	72,75	73,15	73,78	73,59	74,06	74,67	75,30

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024

Umur Harapan Hidup (UHH) adalah rata-rata usia yang mungkin dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir, dan mencerminkan harapan lama hidup penduduk suatu wilayah. Peningkatan UHH menandakan keberhasilan pembangunan di sektor Kesehatan, dimana hal tersebut mampu menurunkan risiko penyakit dan kematian, serta memperpanjang usia.

Peningkatan UHH Kabupaten Kutai Kartanegara dari Tahun 2015 hingga 2022 mencerminkan upaya pemerintah dalam meningkatkan layanan kesehatan dasar, termasuk infrastruktur kesehatan, sumber daya manusia di bidang kesehatan, dan kualitas layanan kesehatan, serta stabilitas sosial dan politik. Meskipun UHH Kabupaten Kutai Kartanegara lebih tinggi daripada UHH Nasional, namun masih di bawah UHH Provinsi Kalimantan Timur dengan perbedaan yang signifikan.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) menunjukkan lama pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan akan ditempuh oleh anak di masa depan. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia tujuh tahun ke atas. Di Kutai Kartanegara, terjadi peningkatan HLS dari Tahun 2015

sebesar 13,25 hingga mencapai 13,64 pada tahun 2023. Hal tersebut mencerminkan kemajuan dalam sistem pendidikan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dalam pembangunan sumber daya manusia.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas untuk menempuh seluruh jenjang pendidikan formal yang dijalani sejak masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir. Angka RLS Kutai Kartanegara terus meningkat dari tahun 2015 – 2023. Tren peningkatan tersebut menandakan bahwa penduduk Kutai Kartanegara semakin sadar akan pentingnya pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pengeluaran per Kapita Disesuaikan, atau istilah lainnya daya beli, adalah kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Semakin tinggi nilainya maka menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk semakin tinggi sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Pengeluaran per kapita disesuaikan Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki tren yang meningkat, yaitu dari 10,25 juta pada tahun 2015 hingga menjadi 11,67 juta pada tahun 2022, meskipun angka tersebut mengalami penurunan ketika krisis ekonomi tahun 2020 karena pandemi.

Komponen penyusun IPM yaitu indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) digunakan untuk menghitung besaran indeks pendidikan dan data untuk Kabupaten Kutai Kartanegara angkanya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Indeks pendidikan merupakan pencerminan hasil pembangunan di bidang pendidikan yang mempunyai kedudukan strategis, mengingat kualitas sumber daya manusia yang tercermin di dalamnya sangat menentukan produktivitas suatu daerah.

2.2.1.7. Indeks Perkembangan Harga

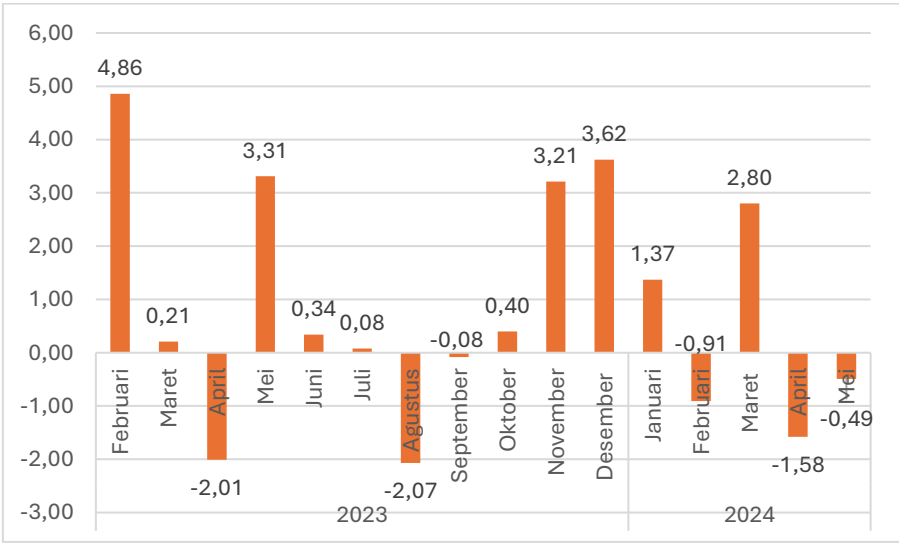
IPH merupakan indeks yang mengukur perubahan harga-harga 20 komoditas pangan yang memiliki bobot besar dalam IHK dan dapat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah daerah. IPH menggunakan bobot dari hasil pengeluaran di Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Jika ada komoditas IPH yang tidak ada di Susenas, maka untuk komoditas tersebut menggunakan bobot *sister city* IHK, yaitu bobot IHK kota/kabupaten yang

memiliki karakteristik konsumsi yang mirip dengan Kabupaten Kutai Kartanegara (BPS, 2024).

IPH memiliki beberapa keunggulan, seperti dapat dikendalikan dalam jangka pendek, dapat digunakan sebagai sarana evaluasi kinerja kepala daerah dalam pengendalian inflasi, dan mudah dihitung dan dipahami. 20 komoditas yang termasuk dalam penghitungan IPH adalah beras, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, cabe merah, cabe rawit, minyak goreng, gula pasir, bawang putih, daging sapi, tepung terigu, pisang, dan jeruk.

IPH diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga-harga pangan. IPH juga dapat menjadi salah satu indikator kesejahteraan masyarakat, karena pangan merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. IPH juga dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan makroekonomi yang berdampak pada inflasi.

Grafik 2.12
Indeks Perkembangan Harga
di Kabupaten Kutai Kartanegara, Feb 2023 - Mei 2024



Sumber : Kemendagri, 2024

Grafik di atas menggambarkan indeks perkembangan harga di Kabupaten Kutai Kartanegara dari Februari 2023 hingga Mei 2024. Pada tahun 2023, harga menunjukkan fluktuasi signifikan dengan kenaikan tertinggi terjadi pada Februari (4,86%) dan penurunan terbesar pada April (-2,01 persen). Kenaikan harga yang cukup tinggi juga terjadi pada Mei (3,31 persen), November (3,21 persen), dan Desember (3,62 persen).

Memasuki tahun 2024, indeks harga terus mengalami fluktuasi. Januari dan Februari menunjukkan kenaikan sebesar 1,37 persen dan 0,91 persen masing-masing, dengan lonjakan signifikan pada Maret (2,80 persen). Namun, tren ini berbalik dengan penurunan harga yang tajam pada April (-1,58 persen) dan Mei (-0,49 persen).

Secara keseluruhan, data menunjukkan adanya pola fluktuatif yang jelas dalam indeks harga dengan periode inflasi dan deflasi yang signifikan. Perubahan ini mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor musiman atau kebijakan ekonomi setempat yang mempengaruhi harga barang dan jasa di Kabupaten Kutai Kartanegara.

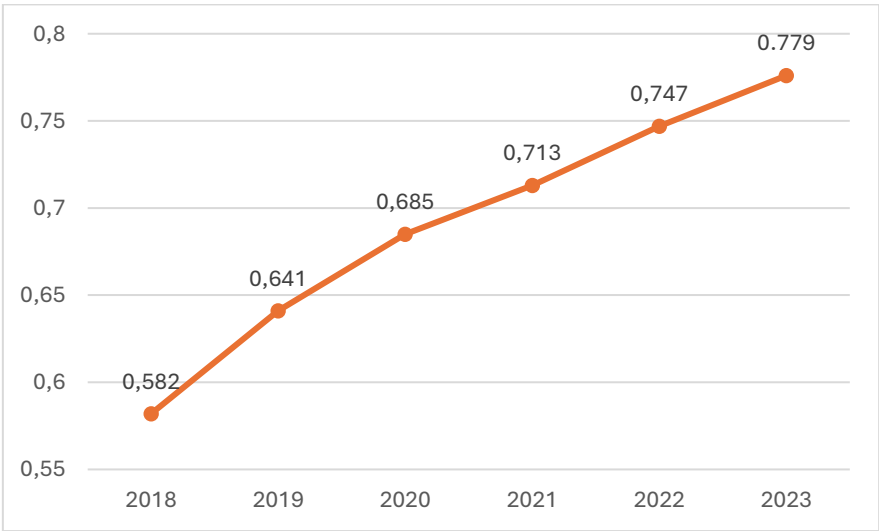
2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya

2.2.2.1. Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk menyejahterakan kehidupan desa.

Grafik 2.13

Indeks Desa Membangun di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2018 – 2023



Sumber : Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi, Peringkat Nilai Rata-rata Indeks Desa Membangun 2018 – 2023

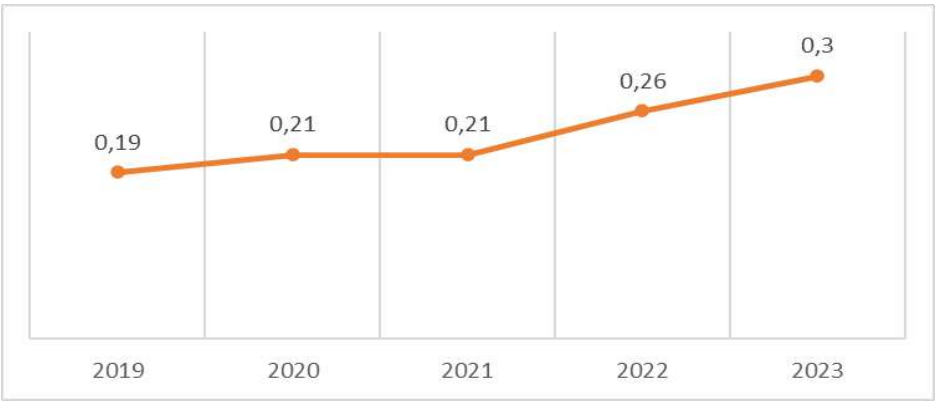
IDM Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami tren yang terus meningkat, pada 2018 yaitu 0,582 kemudian meningkat menjadi 0,779 pada 2023, atau selama lima tahun terakhir meningkat sebanyak 0,194 poin.

2.2.2.2. Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh pemerintah untuk mengukur kesehatan masyarakat. Indeks ini terdiri dari 12 indikator yang mencakup variabel kesehatan fisik, mental, sosial, dan lingkungan. Adapun 12 indikator tersebut yaitu keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB), ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan, bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap, bayi mendapatkan ASI eksklusif, balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan, penderita TB paru mendapatkan pengobatan sesuai standar, penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur, penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan, anggota keluarga tidak ada yang merokok, keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), keluarga mempunyai akses sarana air bersih, dan keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat.

. Grafik 2.14

Indeks Keluarga Sehat di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2019-2023



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara

Nilai IKS Kabupaten Kutai Kartanegara pada periode 2019-2023 cenderung meningkat. Pada tahun 2019 nilai IKS sebesar 0,19 naik menjadi 0,30 pada tahun 2023 atau meningkat sebesar 0,11 poin. Angka IKS Kutai Kartanegara stabil pada 2020 dan 2021 yaitu pada angka 0,21.

2.2.2.3. Kondisi Stunting, Tuberkulosis, dan Malaria

a) Prevalensi Status Gizi Balita Stunting

Tabel 2.43
Prevalensi Status Gizi Balita Stunting
di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2021 – 2023

Tahun	Persentase (%)
2021	26,40
2022	27,10
2023	17,60

Sumber : Survei Status Gizi Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia, 2024

Data prevalensi status gizi balita stunting di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan tren perubahan yang signifikan dari tahun 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, prevalensi stunting tercatat sebesar 26,40 persen berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI). Angka ini sedikit meningkat pada tahun 2022 menjadi 27,10 persen, masih berdasarkan SSGI, menunjukkan adanya peningkatan masalah stunting di wilayah tersebut.

Namun, pada tahun 2023, prevalensi stunting mengalami penurunan drastis menjadi 17,60 persen menurut Survei Kesehatan Indonesia (SKI). Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan yang signifikan dalam status gizi balita di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam setahun terakhir. Faktor-faktor yang mungkin berkontribusi terhadap penurunan ini bisa mencakup peningkatan intervensi kesehatan dan gizi, program pemerintah yang efektif, serta kesadaran masyarakat yang lebih baik mengenai pentingnya gizi anak.

b) Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis

Data cakupan penemuan kasus tuberkulosis di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan fluktuasi selama periode lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, tercatat cakupan penemuan mencapai 10.297 kasus, yang kemudian mengalami penurunan drastis menjadi 5.368 kasus pada tahun 2020. Meskipun terjadi sedikit peningkatan pada tahun 2021 dan 2022, yakni mencapai 5.662 dan 5.812 kasus secara berturut-turut, cakupan penemuan mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2023, mencapai 9.851 kasus. Fluktuasi ini mencerminkan tantangan dalam pengendalian dan penemuan kasus tuberkulosis di wilayah tersebut, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor seperti kebijakan kesehatan, program pencegahan, dan efektivitas sistem deteksi dini.

Tabel 2.44
Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis
Kabupaten Kutai Kartanegara, 2019 – 2023

Tahun	Cakupan penemuan
2019	10.297
2020	5.368
2021	5.662
2022	5.812
2023	9.851

Sumber : Dinas Kesehatan Kutai Kartanegara, 2024

Secara keseluruhan, meskipun terdapat variasi tahunan yang signifikan, peningkatan cakupan penemuan kasus tuberkulosis pada tahun 2023 memberikan harapan dalam upaya pengendalian penyakit ini di Kabupaten Kutai Kartanegara. Diperlukan upaya terus-menerus untuk meningkatkan efektivitas program pencegahan, pengobatan, serta kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini dan perawatan untuk mencapai tujuan eliminasi tuberkulosis di masa depan.

c) Malaria

Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan adanya fluktuasi dalam jumlah kasus positif malaria pada tahun 2020-2023 dengan kasus positif tertinggi terjadi di tahun 2020 (186 kasus) dengan jumlah kasus meninggal akibat malaria 0 (nol). Pada tahun 2021 Kabupaten Kutai Kartanegara mendapat sertifikasi eliminasi malaria dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK RI) yang menandakan bahwa di wilayah Kutai Kartanegara sudah tidak ditemukan lagi penderita dengan penularan setempat (kasus *indigenous*) selama tiga tahun berturut-turut dan telah dijamin adanya pelaksanaan surveilans yang baik.

Tabel 2.45

Jumlah Kasus Positif dan Meninggal Akibat Malaria (Kasus) serta *Case Fatality Rate (CFR)* Kabupaten Kutai Kartanegara, 2018 – 2023

Kasus Malaria	2020	2021	2022	2023
Positif	186	76	180	132
Meninggal	0	0	0	0
CFR	0	0	0	0

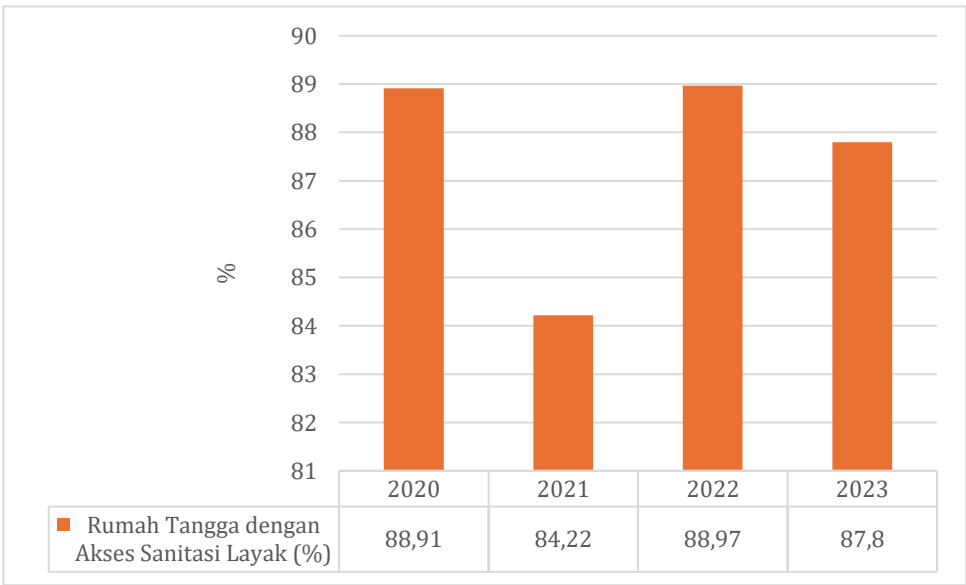
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara, 2023

2.2.2.4. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak

Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi layak mengalami fluktuasi dari tahun 2020 hingga 2023. Pada 2020, angkanya mencapai 88,91 persen dan kemudian menurun menjadi 84,22 pada tahun 2021. Angka tersebut kemudian naik kembali pada tahun 2022 mencapai 88,97 persen, yang merupakan angka tertinggi selama empat tahun terakhir. Pada 2023, angkanya kembali turun hingga mencapai 87,8 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa Akses Rumah tangga terhadap sanitasi layak masih perlu menjadi perhatian di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Grafik 2.15

Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak (%)
di Kutai Kartanegara, 2020-2023

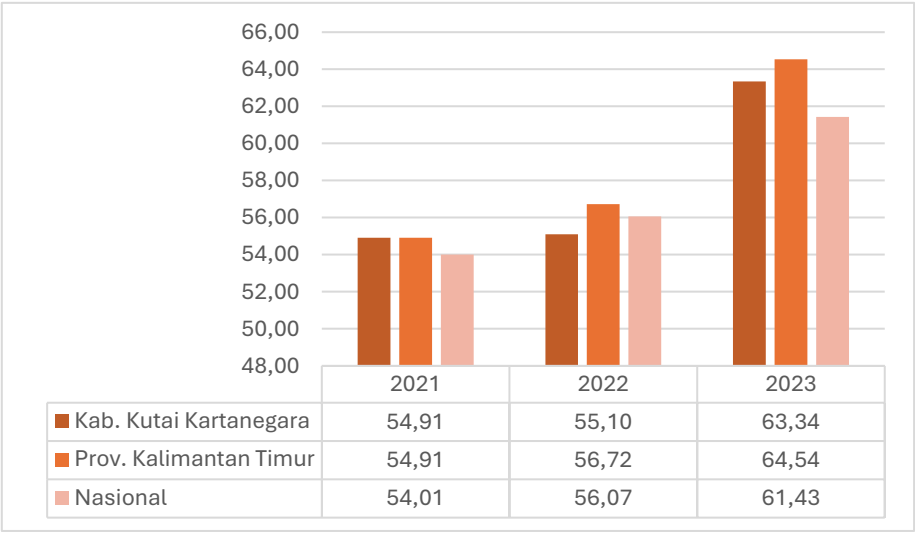


2.2.2.5. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga) merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketenteraman,

kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. i-Bangga merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas keluarga. Klasifikasi wilayah berdasarkan i-Bangga terbagi menjadi tiga status, yaitu tangguh, berkembang dan rentan.

Grafik 2.16
Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga)
di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dan Nasional,
2021-2023



Sumber: BKKBN, 2024

Nilai i-Bangga berkisar antara 0-100 dengan kategori kurang baik (rentan) apabila nilainya di bawah 40, cukup baik (berkembang) apabila nilainya antara 40-70, dan baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70. Pada tahun 2021, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Provinsi Kalimantan Timur memiliki nilai i-Bangga yang sama, yaitu 54,91. Nilai i-Bangga Kabupaten Kutai Kartanegara terus meningkat hingga pada tahun 2023 mencapai angka 63,34, dimana angka tersebut lebih tinggi dibandingkan angka nasional. Berdasarkan klasifikasi kategori i-Bangga, dapat disimpulkan bahwa kondisi pembangunan keluarga di Kabupaten Kutai Kartanegara secara umum cukup baik atau berkembang pada periode 2021 – 2023.

2.2.2.5. Ketimpangan Gender

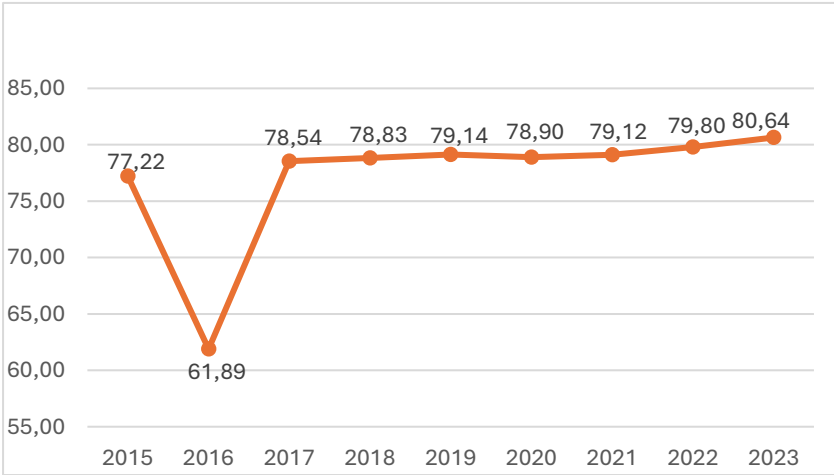
a) Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang menggambarkan perbandingan capaian antara IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Penghitungan IPG membutuhkan data IPM yang meliputi tiga komponen : umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Semakin mendekati angka 100, semakin kecil angka ketimpangan

pembangunan antara perempuan dan laki-laki. IPG Kabupaten Kutai Kartanegara dalam periode 2015-2023 cenderung meningkat, yakni sebesar 77,22 pada tahun 2015 menjadi 80,64 pada tahun 2023.

Grafik 2.17

Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2015-2023



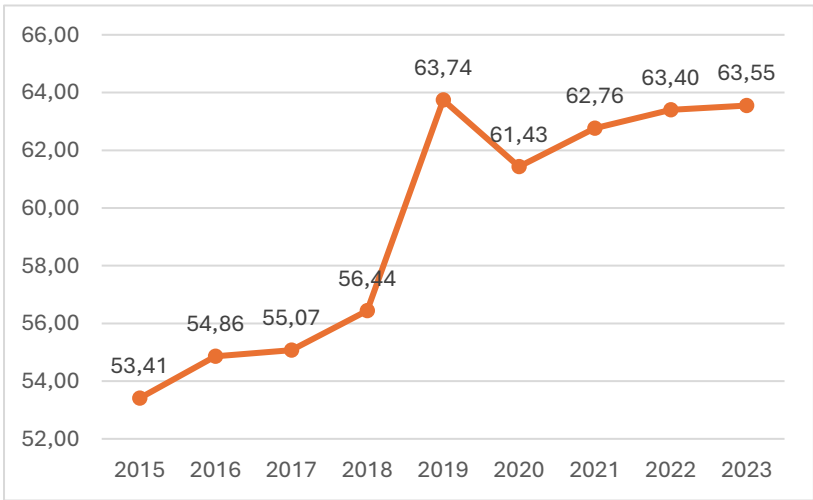
Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2024

b) Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tercapainya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan ekonomi. Indikator tersebut menunjukkan sejauh mana perempuan dapat berperan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG Kabupaten Kutai Kartanegara dalam periode 2015 – 2023 juga menunjukkan peningkatan, dari 53,41 pada tahun 2015 menjadi 63,55 pada tahun 2023.

Grafik 2.18

Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2015-2023



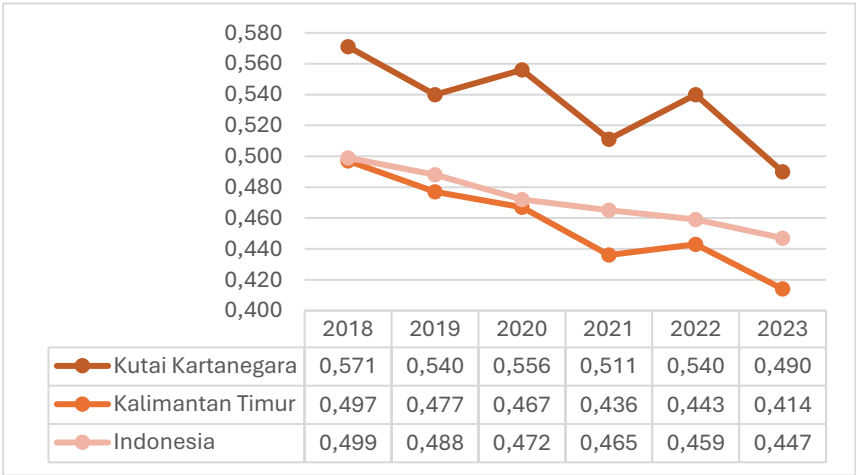
Sumber : BPS Kalimantan Timur, 2024

c) Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan ukuran untuk menilai sejauh mana ketidakoptimalan pembangunan manusia disebabkan oleh ketimpangan gender, dengan meninjau dari tiga aspek pembangunan manusia: kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi. Semakin kecil angka IKG, maka ketimpangan antara laki-laki dan perempuan semakin kecil, atau kesetaraan gender semakin meningkat.

Grafik 2.19

Indeks Ketimpangan Gender
di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional,
2018-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Nilai IKG Kabupaten Kutai Kartanegara dalam periode 2018-2023 mengalami fluktuasi; pada tahun 2018 nilainya 0,571 kemudian menurun menjadi 0,540 pada tahun 2019. Nilai tersebut kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 0,556, dan menurun lagi menjadi 0,511 pada 2021. Selanjutnya pada tahun 2022 nilai IKG Kabupaten Kutai Kartanegara kembali meningkat menjadi 0,540 dan menurun lagi menjadi 0,490 pada tahun 2023. Pada tahun 2023 nilai IKG Kabupaten Kutai Kartanegara lebih tinggi dibandingkan dengan nilai IKG Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2023, ketimpangan gender di Kabupaten Kutai Kartanegara lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Indonesia.

2.2.2.6. Organisasi Pemuda yang Aktif

Organisasi pemuda merupakan salah satu wadah bagi para pemuda untuk menyalurkan gagasan dan kreativitas. Aktivitas organisasi pemuda

dari seluruh organisasi pemuda menjadi salah satu indikator untuk melihat kondisi pemuda di suatu wilayah.

Tabel 2.46
Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif
di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2016-2023

Tahun	Organisasi Pemuda yang Aktif (%)
2016	19,61
2017	18,80
2018	20,60
2019	24,30
2020	26,80
2021	27,50
2022	43,90
2023	48,78

Sumber: RKPD 2025

Persentase organisasi pemuda aktif di Kabupaten Kutai Kartanegara pada periode 2016-2023 mengalami tren yang positif. Pada tahun 2016 angkanya sebesar 19,61 persen dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 48,78 persen pada tahun 2023.

2.2.2.7. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran mengenai kemajuan pembangunan kebudayaan. Indeks ini mencakup tujuh dimensi: pendidikan, ketahaann sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi, dan gender.

Tabel 2.47
Indeks Pembangunan Kebudayaan
di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dan Nasional,
2022-2023

Wilayah	2022	2023
Kabupaten Kutai Kartanegara	49,08	53,23
Provinsi Kalimantan Timur	54,81	N/A
Nasional	55,13	N/A

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara, 2023
Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi

Pada tahun 2022, IPK Kabupaten Kutai Kartanegara bernilai 49,08, sementara nilai IPK Provinsi Kalimantan Timur adalah 54,81 dan nilai nasional adalah 55,13. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2022, IPK Kabupaten Kutai Kartanegara lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan nasional. Kemudian pada tahun 2023, nilai IPK Kabupaten Kutai Kartanegara meningkat menjadi 53,23. Rincian dimensi pengukuran IPK Kabupaten Kutai Kartanegara disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.48
Dimensi Pengukur Indeks Pembangunan Kebudayaan
di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2022-2023

Dimensi	Nilai Indeks	
	2022	2023
Ekonomi Budaya	21,00	34,00
Pendidikan	74,25	72,23
Ketahanan Sosial Budaya	73,28	75,96
Warisan Budaya	58,92	67,43
Ekspresi Budaya	32,70	34,96
Budaya Literasi	36,60	39,00
Gender	46,84	49,00

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara, 2023

Berdasarkan tabel di atas, nilai indeks untuk masing-masing dimensi pada tahun 2022 – 2023 secara umum menunjukkan peningkatan. Namun, nilai indeks pada dimensi pendidikan justru mengalami penurunan, dari 74,25 pada tahun 2022 menjadi 72,23 pada tahun 2023. Nilai indeks tertinggi pada tahun 2023 terdapat pada dimensi ketahanan sosial budaya dengan nilai 73,28, sedangkan nilai indeks terendah terdapat pada dimensi ekonomi budaya dengan nilai 34,00.

Kebudayaan menjadi bagian penting dalam proses pembangunan daerah. Dalam rangka mengedepankan kearifan lokal daerah, Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi salah satu daerah yang memiliki sejarah dan keunikan budaya dan menjadi ikon kekayaan budaya daerah dan nasional. Upacara adat dan festival kebudayaan masih memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Ditambah dengan adanya ragam peninggalan sejarah dan purbakala meliputi masa prasejarah, periode klasik (Hindu), periode Islam, zaman kolonial, dan era kemerdekaan.

Untuk itu, Kutai Kartanegara terus mendorong upaya pelestarian dan penguatan nilai-nilai budaya dengan meningkatkan frekuensi penyelenggaraan festival seni dan budaya, serta meningkatkan ketersediaan sarana penyelenggaraan seni dan budaya daerah. Tabel berikut menunjukkan perkembangan seni dan budaya di Kutai Kartanegara periode 2016-2022.

Tabel 2.49
Perkembangan Kebudayaan di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2015 - 2023

No	Uraian	Tahun							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya (Kali)	76	76	78	78	3	2	15	23
2	Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni Dan Budaya (Unit)	18	18	18	2	4	4	4	20
3	Jumlah Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan (Unit)	37	37	37	37	37	37	95	12
4	Total Benda, Situs Dan Kawasan Yang Dimiliki Daerah (Unit)	37	39	39	39	39	39	39	95

Sumber : RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara 2025

Data di atas menunjukkan bahwa penyelenggaraan festival seni dan budaya selalu dilaksanakan setiap tahun. Setiap tahun dilaksanakan 76 hingga 78 kali festival seni dan budaya. Jumlah ini didukung dengan sarana penyelenggaraan seni dan budaya sebanyak 18 unit. Namun karena dampak Pandemi Covid-19, jumlah tersebut mengalami penurunan pada 2020-2021. Penyelenggaraan festival seni dan budaya turun drastis hanya dua hingga tiga kali setahun. Kemudian sarana penyelenggaraan seni dan budaya juga menurun menjadi dua hingga empat unit saja. Perkembangan kebudayaan baru menunjukkan normal kembali pada 2022.

2.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.3.1.1. PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan total nilai tambah dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah domestik

dalam periode tertentu, hasil dari aktivitas ekonomi, tanpa memperhatikan apakah faktor produksi berasal dari penduduk setempat atau luar wilayah (BPS 2016). Dengan kata lain, PDRB dapat mencerminkan kapabilitas suatu daerah dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan barang dan jasa.

Besarnya nilai PDRB terkait erat dengan penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, tenaga kerja, modal, teknologi, dan semangat berwirausaha masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, perkembangan kegiatan ekonomi di Kabupaten Kutai Kartanegara tercermin dalam PDRB, baik dalam nilai konstan maupun dalam nilai aktual.

Analisis ekonomi suatu wilayah melibatkan beberapa faktor, seperti PDRB dalam nilai konstan (riil) yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, PDRB dalam nilai aktual (nominal) yang mencerminkan kemampuan ekonomi wilayah dalam menghasilkan sumber daya, distribusi PDRB yang mengindikasikan struktur perekonomian atau peran berbagai kategori ekonomi di wilayah tersebut. Berikut disajikan data PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 2. 50
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)
Kabupaten Kutai Kartanegara, 2015-2023

Kategori/ Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10.757,61	10.980,44	11.624,59	12.421,27	13.160,99	13.240,22	13.375,80	13.633,69	14.030,43
B. Pertambangan dan Penggalian	89.214,91	86.491,42	86.332,81	86.632,22	89.446,17	84.234,44	86.427,05	89.018,35	92.756,96
C. Industri Pengolahan	3.458,15	3.755,36	3.934,14	4.181,71	4.377,52	4.222,77	4.267,10	4.393,60	4.478,95
D. Pengadaan Listrik dan Gas	42,54	46,46	56,44	64,43	70,47	79,17	80,34	84,20	98,66
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	33,30	35,65	39,05	40,20	42,22	43,70	45,86	51,60	57,40

Kategori/ Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
F. Konstruksi	6.747,13	6.488,53	6.679,14	7.279,64	7.637,64	7.331,43	7.683,19	8.573,18	9.897,62
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.361,19	3.470,08	3.672,01	3.913,54	4.148,12	4.219,35	4.380,72	4.612,65	4.965,95
H. Transportasi dan Pergudangan	908,13	967,15	1.026,75	1.097,94	1.161,27	1.159,28	1.198,73	1.331,48	1.481,12
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	215,18	229,49	258,83	278,39	295,89	294,48	301,18	324,02	367,11
J. Informasi dan Komunikasi	752,89	820,84	899,38	957,59	1.033,14	1.125,52	1.224,12	1.309,57	1.410,92
K. Jasa Keuangan	288,68	296,27	315,12	337,50	357,57	364,90	377,64	408,58	432,06
L. Real Estate	540,22	533,23	539,48	562,24	578,28	580,51	569,90	583,71	656,30
M,N. Jasa Perusahaan	32,50	31,87	31,27	32,65	33,64	32,39	32,81	34,66	38,95
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.628,51	1.620,68	1.595,66	1.603,34	1.651,76	1.589,09	1.621,72	1.726,42	1.843,72
P. Jasa Pendidikan	824,48	919,63	1.044,54	1.131,84	1.214,69	1.225,10	1.262,44	1.319,81	1.387,74
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	526,76	582,26	675,84	739,56	807,82	959,08	1.071,18	1.122,67	1.199,06
R,S,T,U. Jasa Lainnya	174,11	191,48	218,94	235,41	255,19	250,57	258,72	277,24	303,10
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	119.506,30	117.460,84	118.943,99	121.509,48	126.272,37	120.952,01	124.178,50	128.805,43	135.406,05

PDRB Atas Harga Konstran disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan

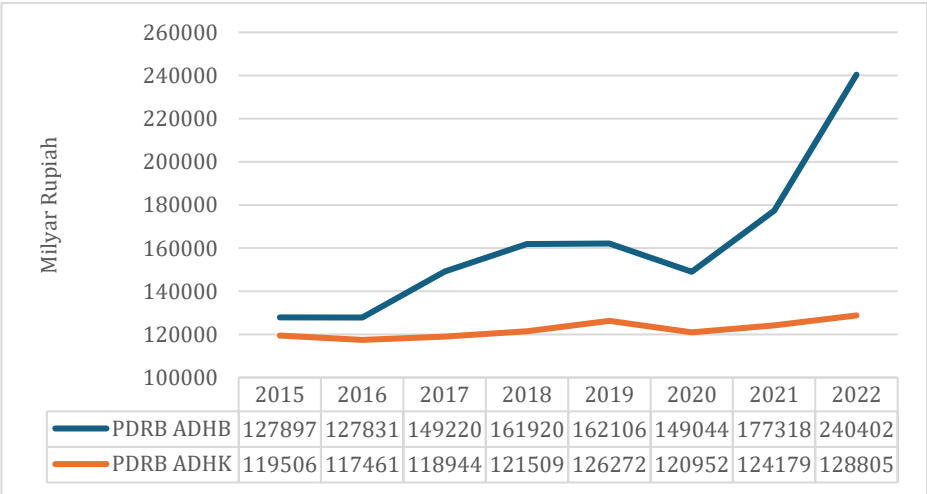
nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara. Nilai PDRB berdasarkan harga konstan di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023 mengalami pertumbuhan positif. Nilai tersebut mencapai 135,41 triliun rupiah, meningkat dari 128,80 triliun rupiah pada tahun 2022. Dengan kata lain, terjadi pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 sebesar 5,13 persen.

Tabel 2. 51
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)
Kabupaten Kutai Kartanegara, 2015-2023

Kategori/ Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	14.454,91	16.234,04	19.230,81	20.895,25	21.734,25	22.247,33	23.863,13	25.777,34	26.878,24
B. Pertambangan dan Penggalian	86.589,16	82.679,60	97.861,34	105.847,13	102.720,75	89.329,13	113.653,75	170.131,42	128.142,03
C. Industri Pengolahan	4.291,09	4.981,31	6.116,66	6.603,25	6.916,34	6.676,75	7.523,09	8.359,46	8.525,43
D. Pengadaan Listrik dan Gas	41,44	47,41	66,25	76,84	85,43	96,00	97,50	105,09	126,48
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	36,78	41,82	47,34	50,08	53,83	56,12	60,77	69,89	79,72
F. Konstruksi	10.483,52	10.516,77	11.268,75	12.375,01	13.247,95	12.721,13	13.336,68	15.255,92	18.207,33
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.346,09	4.776,95	5.252,41	5.816,26	6.210,62	6.330,78	6.576,44	7.483,25	8.342,08
H. Transportasi dan Pergudangan	1.211,32	1.327,78	1.446,93	1.595,19	1.747,08	1.784,25	1.875,13	2.196,87	2.543,58
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	290,34	335,87	407,16	470,83	509,50	510,99	522,96	563,23	650,77

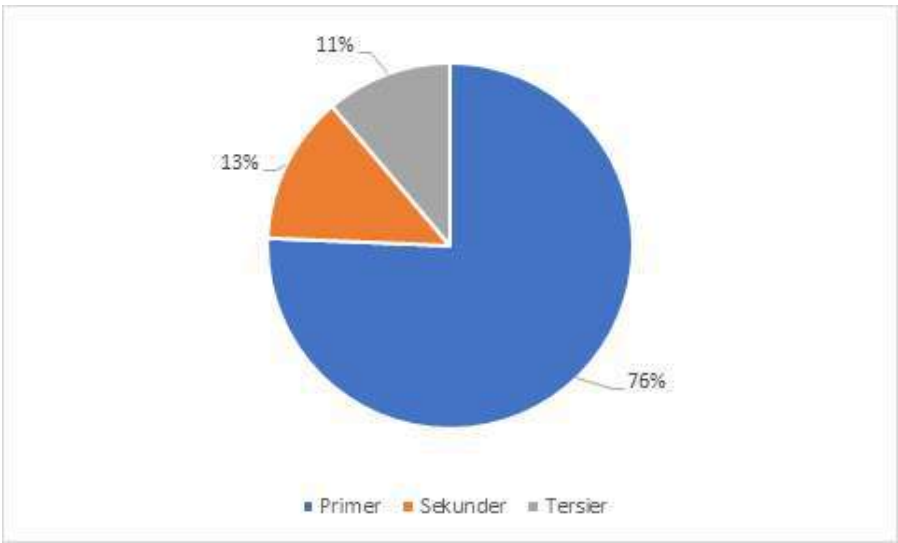
Kategori/ Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
J. Informasi dan Komunikasi	785,86	874,66	957,84	1.060,57	1.176,69	1.282,98	1.399,01	1.505,11	1.627,05
K. Jasa Keuangan	389,97	425,20	442,66	496,75	539,12	554,69	584,40	665,74	719,68
L. Real Estate	649,10	708,04	700,61	747,21	786,67	792,17	779,32	810,92	930,31
M,N. Jasa Perusahaan	44,85	45,87	45,49	50,57	53,20	51,58	52,28	55,32	64,05
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.225,64	2.338,29	2.460,86	2.539,68	2.679,30	2.619,63	2.674,16	2.854,43	3.062,29
P. Jasa Pendidikan	1.180,05	1.436,50	1.671,22	1.840,66	1.989,57	2.021,99	2.115,28	2.214,64	2.399,58
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	661,57	803,48	916,35	1.075,58	1.227,88	1.543,42	1.759,62	1.859,73	2.015,93
R,S,T,U. Jasa Lainnya	215,74	257,73	327,32	379,51	427,36	424,63	444,68	494,01	561,63
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	127.897,43	127.831,31	149.220,00	161.920,39	162.105,54	149.043,58	177.318,20	240.402,39	204.876,16

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai Produk Domestik *Regional Bruto* per kapita atau per satu orang penduduk. Pada tahun 2023, besarnya PDRB per kapita Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 270,72 juta rupiah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa secara ekonomi setiap penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara rata-rata mampu menciptakan nilai tambah sebesar 270,72 juta rupiah selama tahun 2023. Dibandingkan tahun 2022, angka tersebut turun sebesar 51,36 juta rupiah. Hal tersebut terjadi karena nilai nominal PDRB menurun sebesar 15 persen.



Sektor industri pengolahan merupakan salah satu sektor penggerak perekonomian atau pendapatan daerah. Perkembangan industri yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi membutuhkan lahan yang luas dan berkualitas, tenaga kerja tersedia, *the way of life* penduduk dalam pertanian, transfer teknologi dan pengembangan teknologi lainnya. Tidak dipungkiri, sektor industri menjadi motor penggerak perekonomian dan sektor industri pengolahan merupakan salah satu sektor yang penting untuk meningkatkan perekonomian. Berikut merupakan struktur ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2023.

Gambar 2.19
Struktur Ekonomi di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2023

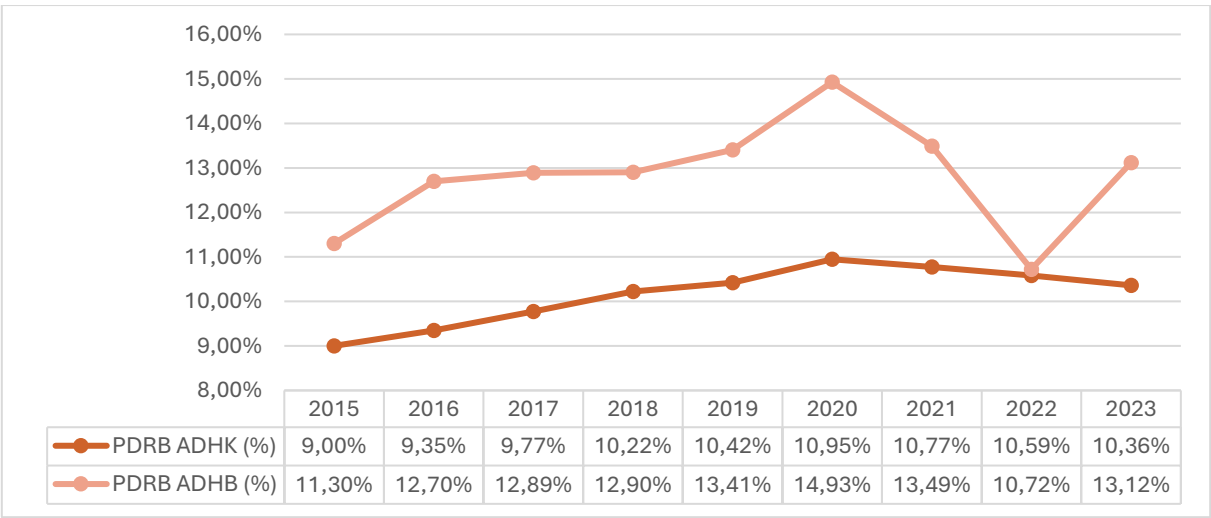


Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah), 2024

Dari Gambar di atas dapat dilihat bahwa struktur ekonomi di Kabupaten Kutai Kartanegara didominasi oleh sektor primer, yang dimana didalamnya meliputi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; serta sektor Pertambangan dan Penggalian. Namun, perbandingan kontribusi kedua sektor tersebut sangat tinggi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara jauh didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian dimana angkanya selalu berada di sekitar 60 hingga 70 persen. Sedangkan untuk sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan hanya berkontribusi sekitar 10 hingga 15 persen. Berikut detail dari kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2019 hingga 2023.

Berikut merupakan grafik produk domestik regional bruto ADHK dan ADHB menurut lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Apabila dilihat dari grafik berikut, nilainya fluktuatif, 2015-2020 mengalami peningkatan namun kembali menurun di 2021 hingga 2022 untuk PDRB ADHB dan hal yang sama untuk PDRB ADHK. Kemudian pada tahun 2023 kontribusinya mengalami peningkatan pada PDRB ADHB yakni mencapai 13,12 persen, tetapi kontribusi dalam PDRB ADHK menurun mencapai angka 10,36 persen.

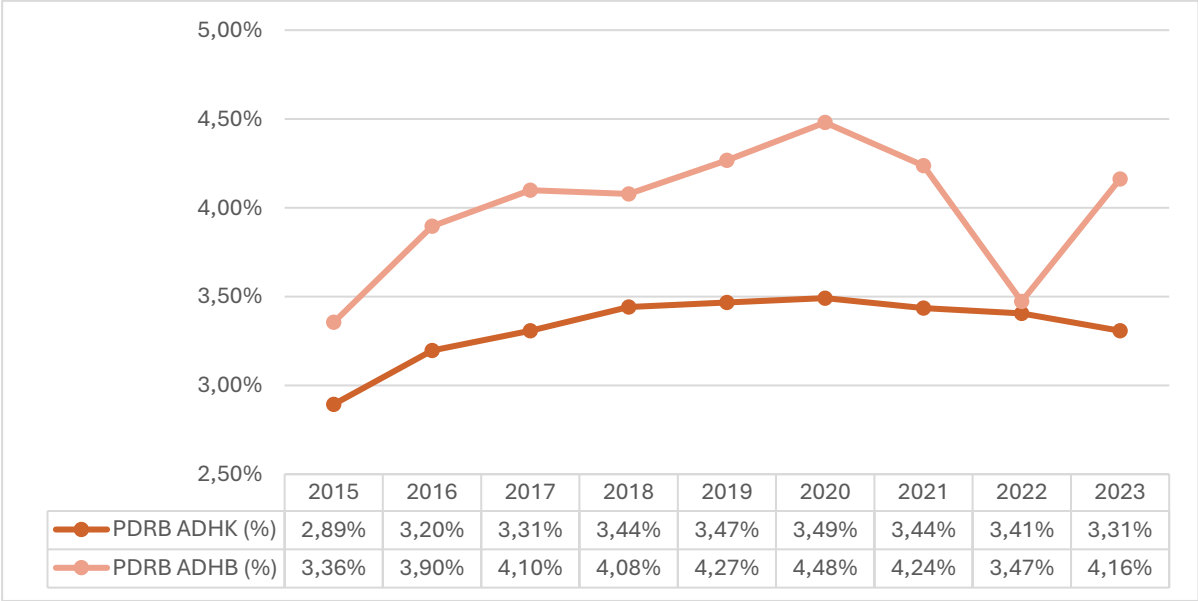
Grafik 2.20
Kontribusi PDRB Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2015-2023



Sumber : BPS Kabupaten Kutai Kartanegara, 2015 – 2023

Sektor industri pengolahan merupakan salah satu penggerak utama perekonomian dan pendapatan daerah. Perkembangan industri yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi membutuhkan lahan yang luas dan berkualitas, tenaga kerja yang tersedia, cara hidup penduduk dalam pertanian, transfer teknologi, dan pengembangan teknologi lainnya. Tidak dapat dipungkiri, sektor industri adalah motor penggerak perekonomian dan sektor industri pengolahan merupakan sektor penting untuk meningkatkan perekonomian.

Grafik 2.21
Kontribusi PDRB ADHK dan PDRB ADHB Lapangan Usaha Industri
Pengolahan di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2015-2023



Sumber : BPS Kabupaten Kutai Kartanegara, 2015 – 2023

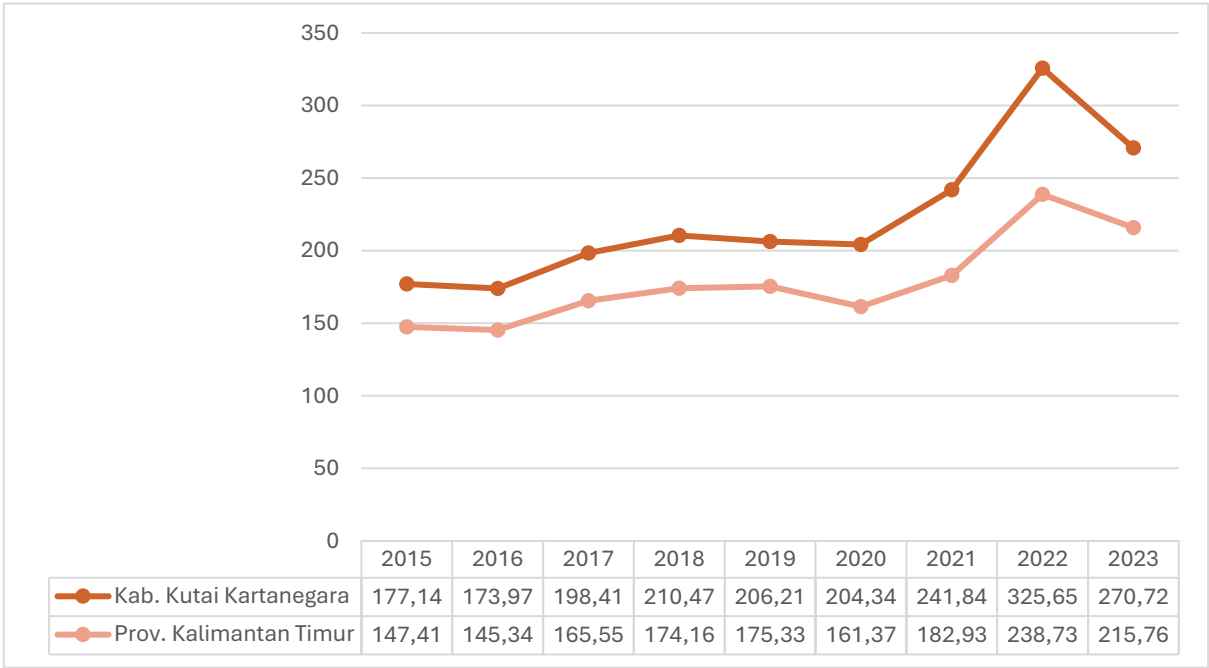
2.3.1.2. PDRB per Kapita

Pendapatan per kapita atau dikenal juga sebagai PDRB per kapita dihitung dengan membagi nilai PDRB berdasarkan harga berlaku pada tahun yang sama dengan jumlah penduduk pada periode tersebut. Pendapatan per kapita mencerminkan estimasi pendapatan rata-rata yang diterima setiap penduduk di suatu wilayah.

Untuk mengukur kesejahteraan penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam skala yang lebih luas, penyajian data PDRB per kapita dibandingkan dengan skala provinsi. Berdasarkan grafik berikut diketahui bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki nilai PDRB per kapita yang lebih tinggi yakni dalam rentang Rp173,97 juta hingga Rp325,65 juta.

Sementara itu, PDRB per kapita penduduk Provinsi Kalimantan Timur berada dalam rentang Rp145,34 juta hingga Rp238,73 juta. Hal tersebut menunjukkan bahwa dari segi PDRB per kapita, tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara lebih tinggi dibandingkan rata-rata penduduk di Provinsi Kalimantan Timur.

Grafik 2.22
PDRB Per Kapita
di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Provinsi Kalimantan Timur, 2015-2023



Sumber : BPS Kabupaten Kutai Kartanegara, 2015 – 2023

2.3.1.3. *Return on Assets (ROA)* BUMD

Return on Assets (ROA) adalah indikator yang digunakan untuk menilai seberapa efektif aset perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. ROA dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total aset perusahaan. Melalui analisis ROA, perusahaan dapat mengukur tingkat produktivitasnya dan membandingkannya dengan perusahaan lain. Informasi ini berguna dalam merancang strategi untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Berikut ini adalah data *ROA* dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Kutai Kartanegara untuk periode 2019 hingga 2023.

Tabel 2.52
ROA BUMD di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2019 – 2023

Tahun	Laba Bersih	Total Aset	ROA (%)
2019	31.414.397.926	501.289.647.601	6,27
2020	-9.712.365.395	548.084.298.154	-1,77
2021	-57.264.404.103	480.466.173.402	-11,92
2022	51.839.994.612	567.901.723.358	9,13
2023	78.685.315.262	616.447.112.823	12,76

Sumber : Bagian Perekonomian Daerah Setda Kabupaten Kutai
Kartanegara, 2024

Data ROA BUMD Kabupaten Kutai Kartanegara selama periode 2019 hingga 2023 menunjukkan adanya kinerja yang tidak stabil. Pada tahun 2019, BUMD mencatat ROA positif sebesar 6,27 persen. Namun, pada tahun 2020 dan 2021, terjadi penurunan drastis dengan ROA negatif masing-masing sebesar -1,77 persen dan -11,92 persen, yang mencerminkan kerugian besar dan masalah dalam efisiensi penggunaan aset perusahaan.

2.3.1.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah indikator ekonomi yang mengukur jumlah investasi dalam aset tetap yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi di suatu wilayah selama periode tertentu. Aset tetap ini meliputi berbagai jenis investasi fisik seperti bangunan, infrastruktur, mesin, peralatan, dan kendaraan. PMTB seringkali dinyatakan sebagai persentase dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang menggambarkan proporsi investasi tetap terhadap total output ekonomi di wilayah tersebut.

Tabel 2.53
Kontribusi P Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB
di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2019 – 2023

Tahun	PMTB	PDRB (dalam juta)	PMTB terhadap PDRB (%)
2019	38.738.259,21	162.105.543,95	23,90
2020	38.429.386,82	149.043.577,93	25,78
2021	41.566.630,93	177.416.584,16	23,43
2022	44.787.845,92	240.392.589,80	18,63
2023	49.503.005,78	204.876.164,54	24,16

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Kartanegara, 2024

Data PMTB Kabupaten Kutai Kartanegara dari 2019 hingga 2023 menunjukkan tren peningkatan, meskipun ada sedikit penurunan pada 2020 dari Rp38.738.259,21 juta menjadi Rp38.429.386,82 juta, kemungkinan akibat faktor eksternal seperti pandemi *Covid-19*. Namun, sejak 2021 hingga 2023, PMTB terus meningkat signifikan, dari Rp41.566.630,93 juta pada 2021, menjadi Rp44.787.845,92 juta pada 2022, dan mencapai Rp49.503.005,78 juta pada 2023. Peningkatan ini mencerminkan pemulihan ekonomi yang kuat dan peningkatan investasi di daerah tersebut.

2.3.1.5. Net Ekspor Barang dan Jasa

Net ekspor sebagai persentase dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah indikator yang mengukur kontribusi bersih perdagangan internasional terhadap total *output* ekonomi suatu wilayah atau negara. Ini dihitung dengan membandingkan selisih antara nilai ekspor dan impor dengan PDRB, kemudian dikalikan dengan 100 untuk mendapatkan persentase. Rasio ini mencerminkan seberapa besar peran perdagangan internasional dalam perekonomian suatu wilayah. Angka tersebut menunjukkan apakah ekonomi wilayah lebih berorientasi pada pasar domestik atau memiliki keterlibatan yang kuat dalam perdagangan global.

Tabel 2.54
Kontribusi PDRB Net Ekspor Barang dan Jasa
di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2019 – 2023

Tahun	Net Ekspor	PDRB (dalam juta)	Kontribusi PDRB Net Ekspor Barang dan Jasa (%)
2019	72.188.942,89	162.105.543,95	44,53
2020	67.335.035,18	149.043.577,93	45,18
2021	67.438.509,96	177.416.584,16	38,01
2022	68.306.163,73	240.392.589,80	28,41
2023	68.437.358,61	204.876.164,54	33,40

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara, 2024

Data kontribusi PDRB Net Ekspor Barang dan Jasa (%) PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan fluktuasi dengan tren penurunan dari 2019

hingga 2020, namun kemudian stabil dan sedikit meningkat dari 2020 hingga 2023. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2020, peningkatan dalam beberapa tahun terakhir mencerminkan adanya pemulihan dan stabilitas dalam kontribusi net ekspor terhadap PDRB. Hal ini menunjukkan kemampuan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mempertahankan dan sedikit meningkatkan daya saingnya di perdagangan internasional, yang merupakan faktor penting bagi pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut.

2.3.1.6. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Data rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara dari 2019 hingga 2023 menunjukkan adanya fluktuasi dalam kontribusi pajak daerah terhadap ekonomi secara keseluruhan. Pada 2019, rasio pajak daerah terhadap PDRB berada di angka 4,64 persen, mencerminkan kontribusi yang relatif rendah dibandingkan tahun-tahun berikutnya. Pada 2020, rasio ini meningkat tajam menjadi 7,41 persen, meskipun PDRB mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019, kemungkinan disebabkan oleh peningkatan upaya pemungutan pajak atau kenaikan tarif pajak. Namun, pada 2021, rasio tersebut menurun menjadi 6,48 persen, meskipun penerimaan pajak daerah meningkat, karena PDRB juga mengalami kenaikan signifikan.

Pada tahun 2022, rasio pajak daerah terhadap PDRB kembali turun menjadi 5,94 persen meskipun terjadi peningkatan tajam dalam PDRB, karena peningkatan penerimaan pajak daerah tidak cukup signifikan untuk mempertahankan rasio yang lebih tinggi. Namun, pada 2023, rasio naik sedikit menjadi 6,54 persen, meskipun penerimaan pajak daerah mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, seiring dengan penurunan PDRB. Secara keseluruhan, fluktuasi ini mencerminkan variasi dalam kontribusi pajak terhadap ekonomi daerah, yang mungkin disebabkan oleh perubahan kebijakan pajak, efisiensi dalam pemungutan pajak, dan perubahan struktur ekonomi daerah. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan peningkatan kontribusi pajak daerah terhadap PDRB, yang bisa mencerminkan pengelolaan pendapatan daerah yang lebih baik atau peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Tabel 2.55
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB di Kabupaten Kutai Kartanegara,
2019 – 2023

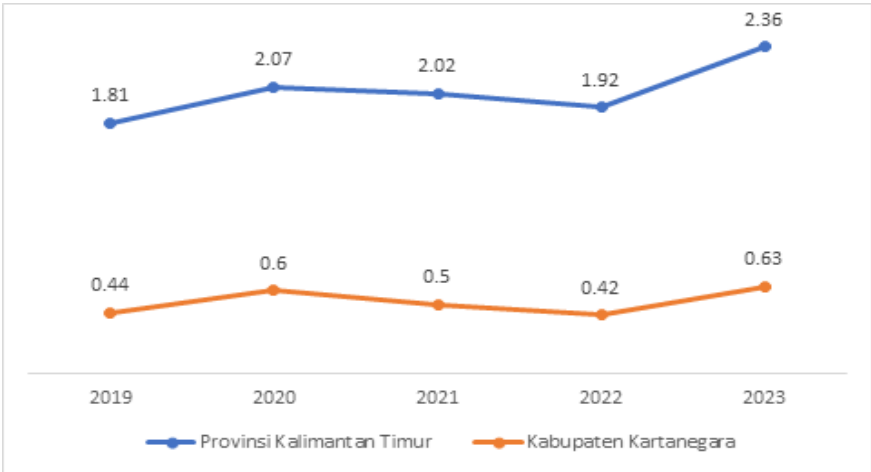
Tahun	Penerimaan Pajak Daerah (dalam juta)	PDRB (dalam juta)	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)
2019	75.150	162.105.543,95	4,64
2020	110.440	149.0435.77,93	7,41
2021	114.970	177.416.584,16	6,48
2022	142.750	240.392.589,80	5,94
2023	133.990	204.876.164,54	6,54

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

2.3.1.7. Rasio Dana Pihak Ketiga terhadap PDRB

Dana pihak ketiga mencerminkan total dana yang diterima dari sumber eksternal, seperti pemerintah pusat, badan internasional, atau lembaga swasta, untuk mendukung pembangunan dan investasi daerah. Berdasarkan gambar 2.28, baik Provinsi Kalimantan Timur maupun Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan peningkatan persentase dana pihak ketiga terhadap PDRB mereka dari tahun 2019 hingga 2023. Meskipun rasio Dana Pihak Ketiga Kabupaten Kutai Kartanegara lebih rendah dibandingkan dengan provinsi secara keseluruhan, tren kenaikan yang konsisten menandakan adanya usaha untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan sumber daya eksternal guna mendukung pembangunan dan investasi di daerah tersebut.

Grafik 2.23
Persentase Rasio Dana Pihak Ketiga di Kabupaten Kutai Kartanegara dan
Provinsi Kalimantan Timur, 2019 – 2023



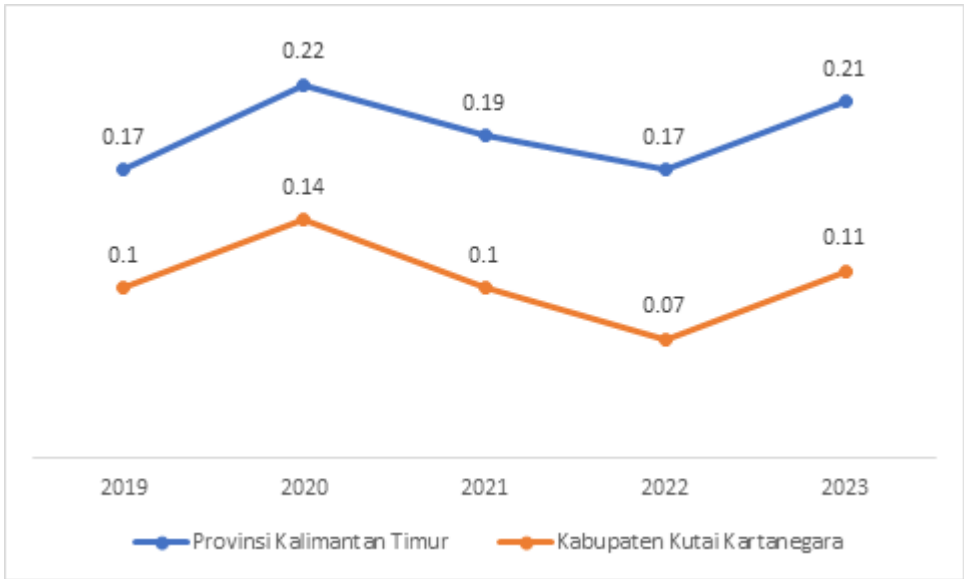
Sumber : Bank Indonesia, 2024

2.3.1.8. Rasio Kredit terhadap PDRB

Rasio kredit sebagai persentase dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan seberapa besar pinjaman yang diambil dibandingkan dengan aktivitas ekonomi lokal. Rasio ini memberikan gambaran tentang sejauh mana kredit digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi di daerah tersebut.

Grafik 2.24

Rasio Kredit terhadap PDRB di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Provinsi Kalimantan Timur, 2019 – 2023



Sumber : Bank Indonesia, 2024

Data ini menggambarkan strategi pemanfaatan kredit untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Walaupun rasio kredit Kabupaten Kutai Kartanegara lebih rendah dibandingkan dengan provinsi secara keseluruhan, peningkatan yang konsisten dalam penggunaan kredit menunjukkan upaya untuk memanfaatkan sumber pendanaan eksternal dalam mendukung investasi dan pembangunan infrastruktur di tingkat daerah. Rasio kredit yang moderat juga mencerminkan kehati-hatian dalam penggunaan kredit untuk mengelola risiko keuangan secara efektif dalam jangka panjang.

2.3.1.9. Indeks Ekonomi Inklusif

Indeks Ekonomi Inklusif mengukur pembangunan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan

masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Menganalisis capaian Indeks Ekonomi Inklusif di Kutai Kartanegara, terjadi fluktuasi yang cenderung menunjukkan tren meningkat dari tahun ke tahunnya. Namun, jika dibandingkan dengan capaian di level regional Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional, Kutai Kartanegara masih tertinggal dengan capaian yang lebih rendah. Pada tahun 2023, Indeks Ekonomi Inklusif Kutai Kartanegara hanya mencapai angka 5,76 yang lebih rendah dari capaian Provinsi Kalimantan Timur senilai 6,79 dan capaian nasional senilai 6,17.

Tabel 2.56

Indeks Ekonomi Inklusif Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dan Nasional, 2013-2023

Tahun	Kutai Kartanegara	Prov. Kalimantan Timur	Nasional
2013	5,05	5,54	5,11
2014	5,00	5,33	5,24
2015	5,05	5,72	5,42
2016	n.a.	n.a	n.a
2017	5,30	n.a	n.a
2018	n.a.	n.a.	n.a
2019	5,44	6,22	5,97
2020	4,65	n.a	n.a.
2021	5,53	n.a	n.a.
2022	n.a.	n.a	n.a.
2023	5,76	6,79	6,17

sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2024

Selain itu, indeks ekonomi inklusif ini memiliki tiga pilar yakni pilar 1 (pertumbuhan dan perkembangan perekonomian), pilar 2 (pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan), dan pilar 3 (perluasan akses dan kesempatan). Pada kondisi di Kutai Kartanegara, dari tahun ke tahun, capaian tertinggi berasal dari pilar 2 yakni pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, yang kemudian disusul dengan capaian pilar 3 terkait perluasan akses dan kesempatan, dan pilar 1 terkait pertumbuhan dan perkembangan perekonomian menyumbang capaian terendah. Hal ini menunjukkan bahwa Kutai Kartanegara memiliki capaian pemerataan dan

pengurangan kemiskinan yang baik, namun perlu diikuti dengan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian yang lebih baik.

Tabel 2.57
Indeks Ekonomi Inklusif Kabupaten Kutai Kartanegara per Pilar, 2013-2023

Tahun	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Indeks Ekonomi Inklusif
2013	4,40	5,94	5,71	5,05
2014	4,28	5,86	5,72	5
2015	4,29	5,97	5,67	5,05
2016	n.a.	6,21	5,74	n.a.
2017	4,66	6,36	5,64	5,3
2018	n.a.	6,41	5,66	n.a.
2019	4,77	6,43	5,77	5,44
2020	3,46	6,67	5,97	4,65
2021	4,84	6,51	6,18	5,53
2022	n.a.	6,45	n.a.	n.a.
2023	5,02	6,83	6,40	5,76

sumber: Bappenas

2.3.1.10. Rasio Kewirausahaan Daerah

Berdasarkan hasil perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kutai Kartanegara, rasio kewirausahaan Kutai Kartanegara di 2023 sebesar 1.43 persen yang merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Angka ini menunjukkan capaian yang masih cukup rendah di Kabupaten Kutai Kartanegara. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, angka tersebut juga merupakan paling terendah selama periode 2017 hingga 2023. Karenanya, dibutuhkan upaya serta target peningkatan rasio kewirausahaan di Kutai Kartanegara untuk mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat di Kutai Kartanegara.

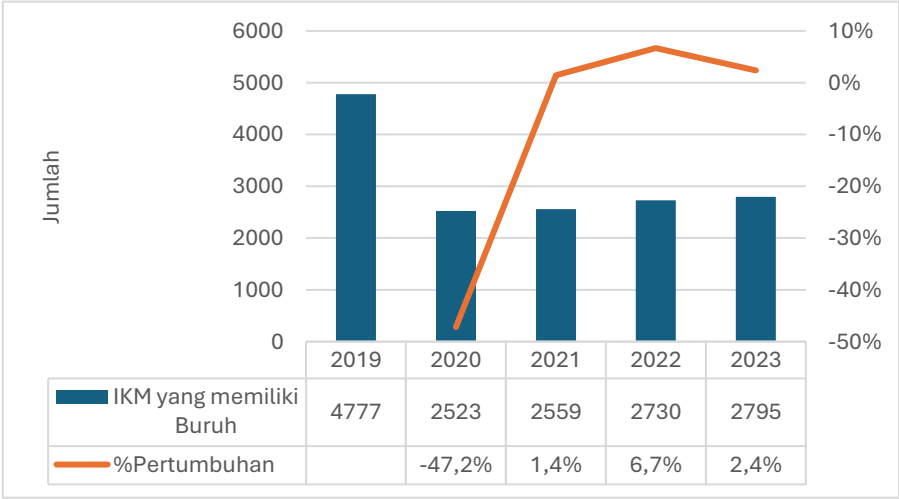
Tabel 2.58
Rasio Kewirausahaan Kabupaten Kutai Kartanegara, 2017-2023

Tahun	Berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar	Total angkatan kerja daerah	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)
2017	6621	340338	1.95
2018	10094	358411	2.82
2019	9983	374137	2.67
2020	8391	359866	2.33
2021	n.a.	n.a	n.a.
2022	11244	372271	3.02
2023	5319	371349	1.43

2.3.1.11. Industri Kecil dan Menengah (IKM) dibantu Buruh

Menelusur data Industri Kecil dan Menengah (IKM) dibantu buruh, tercatat pada tahun 2019 di Kutai Kartanegara memiliki jumlah tertinggi yakni mencapai 4777 usaha yang kemudian mengalami penurunan drastis di 2020 menjadi hanya sejumlah 2523 usaha yang dipengaruhi dampak pandemi. Meskipun begitu, terjadi pemulihan di tiap tahunnya sejak 2020 ke 2023 menjadi sejumlah 2795 usaha. Hal ini menunjukkan meski belum kembali ke kondisi semula, namun terjadi perbaikan yang terus diupayakan. Karenanya, dibutuhkan upaya yang lebih signifikan sehingga kondisi industri kecil dan menengah (IKM) di Kutai Kartanegara dapat kembali ke kondisi terbaiknya.

Grafik 2.25
Industri Kecil dan Menengah yang memiliki buruh
di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2019-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik

2.3.1.12. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Perhitungan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Kutai Kartanegara dihitung berdasarkan atas luasan wilayah daratannya. Data berikut menunjukkan perkembangan Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah ber-HPL/HGB (km²) di Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun 2016 hingga 2023.

Tabel 2.59
Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Kutai Kartanegara, 2016-2023

Tahun	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (km2)	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan
2016	14,97	58,68
2017	15,73	59,88
2018	16,85	62,17
2019	17,63	64,35
2020	18,03	65,81
2021	18,03	65,81
2022	18,03	65,81
2023	18,7	<i>n.a</i>

Sumber: RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara 2024

Rasio RTH ini meningkat setiap tahunnya, dari 14,97 km² pada tahun 2016 menjadi 18,70 km² pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam memperluas dan mempertahankan ruang terbuka hijau, yang penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem, mengurangi efek pemanasan global, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Stabilitas rasio RTH pada 18,03 km² dari tahun 2020 hingga 2022 menunjukkan bahwa, meskipun ada tantangan seperti urbanisasi dan perkembangan infrastruktur, Kabupaten Kutai Kartanegara mampu mempertahankan area hijau yang ada.

Selain itu, luasan RTH publik yang diharapkan mencapai 20 persen dari luas wilayah kota atau kawasan perkotaan juga menunjukkan tren peningkatan dari 58,68 km² pada tahun 2016 menjadi 65,81 km² pada tahun 2022. Pada tahun 2023, data tidak tersedia. Tren yang ada menunjukkan komitmen yang kuat terhadap target tersebut. Peningkatan RTH publik ini

penting untuk menyediakan area rekreasi, meningkatkan estetika kota, dan memberikan manfaat ekologi yang signifikan seperti penyerapan karbon dan perlindungan keanekaragaman hayati. Kesenambungan dalam peningkatan luasan RTH publik menunjukkan adanya kebijakan yang konsisten dan efektif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

2.3.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.3.2.1. Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Sampai 2022, tingkat kesesuaian dalam pemanfaatan ruang mencapai 99 persen. Angka ini menggambarkan bahwa dalam penggunaan ruang masih tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang berarti bahwa dalam penggunaan ruang belum melampaui kapasitas dan dukungan yang ada.

Hal ini juga mengindikasikan bahwa warga masih mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan menggambarkan keefektifan dalam mengendalikan tata ruang. Nilai kesesuaian ruang ini merupakan hasil dari kombinasi dari keterwujudan dan keselarasan dalam pemanfaatan ruang yang pada dasarnya terdiri dari aspek struktur ruang dan pola ruang. Skor ini muncul setelah dilakukan audit periodik terhadap kesesuaian tata ruang yang dilakukan setiap tahun.

Adapun penggunaan atau pemanfaatan lahan di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam hal kesesuaian terhadap RTRW dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.60
Kesesuaian Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Kutai Kartanegara,
2020-2022

Uraian	2020	2021	2022
Struktur Ruang	98	98	98
Pola Ruang	100	100	100
Rata-Rata Struktur Ruang dan Pola Ruang	99	99	99

Sumber : Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara, 2023

2.3.2.2. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan industri adalah wilayah yang secara khusus didedikasikan untuk kegiatan industri, dengan harapan adanya lembaga pengelola kawasan yang memberikan dukungan dan fasilitas kepada perusahaan yang ingin

menjalankan kegiatan usaha di wilayah tersebut. Penetapan peruntukan kawasan industri biasanya dilakukan dalam perencanaan yang mencakup periode sekitar 10 tahun.

Untuk mendukung pengembangan kawasan industri, beberapa langkah telah diambil seperti perbaikan akses jalan dan pengaturan regulasi yang memberikan kemudahan serta insentif untuk investasi. Meskipun beberapa proyek industri dari berbagai sektor telah berdiri, hingga saat ini belum ada entitas hukum yang menjadi pengelola resmi untuk kawasan industri ini. Berikut adalah daftar kawasan peruntukan industri sebagai berikut.

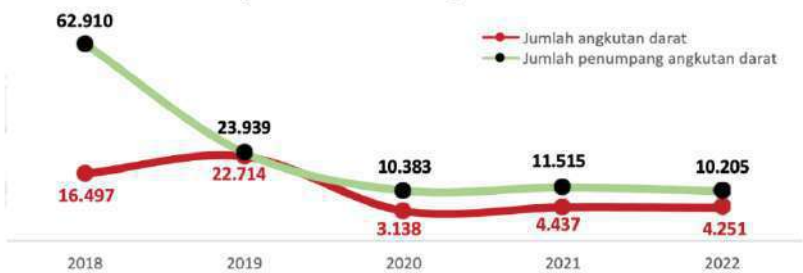
1. Kawasan Industri Petrokimia berbasis Migas dan Kondensat di Kota Bontang– Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Kawasan Industri Pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Kawasan industri perikanan/tambak, pertambangan, dan energi di wilayah pantai/pesisir yang meliputi enam kecamatan, yaitu Samboja, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Anggana, Muara Badak, dan Marangkayu. Serta wilayah hulu mencakup Kecamatan Muara Muntai.
4. Kawasan industri pertanian tanaman pangan, pariwisata, dan pertambangan batu bara. Kawasan ini masuk dalam wilayah tengah yang terdiri dari Kecamatan Muara Kaman, Sebulu, Tenggarong Seberang, Tenggarong, Loa Kulu, dan Loa Janan.

2.3.2.3. Jumlah Orang yang Terangkut di Terminal

Akses perhubungan di wilayah Kutai Kartanegara dapat dilalui dengan dua jalur transportasi, yaitu darat dan perairan. Dari kedua jalur tersebut, akses melalui darat menjadi pilihan masyarakat dengan mempertimbangkan biaya dan waktu tempuh. Ketertarikan tersebut menjadi daya dukung untuk memberikan akses untuk masyarakat dengan meningkatkan jumlah angkutan darat.

Grafik 2.26

Jumlah Angkutan Darat dan Orang yang Terangkut



Sumber : RKPD Kutai Kartanegara 2024

2.3.2.4. Kondisi Jalan

Panjang jalan di Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan atas status jalan terbagi atas jalan negara, jalan provinsi, dan jalan kabupaten. Panjang jalan kabupaten sampai pada 2020 mencapai 2.193,02 kilometer.

Jalan provinsi berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 622 Tahun 2018 tentang Jalan Provinsi di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sepanjang 174,28 kilometer. Jalan nasional berdasarkan Keputusan Menteri PUPR 290/2015 tentang Jalan Nasional yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sepanjang 360,90 kilometer.

Tabel 2.61
Panjang Jalan berdasarkan Status Jalan
di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2015-2020

Status Jalan	Panjang Jalan (Kilometer)							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jalan Negara	361,00	206,00	206,00	206,00	361,00	360,90	-	-
Jalan Provinsi	370,00	352,00	227,00	227,00	174,00	174,28	-	
Jalan Kabupaten	2559,00	2193,00	2193,00	2193,00	2193,00	2193,02	-	-

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara, 2023

Proporsi jalan untuk status jalan kabupaten terbagi dalam empat kondisi, yaitu baik, sedang, rusak ringan, dan rusak berat. Pada 2022, proporsi jalan dalam kondisi baik sebesar 23,933 persen, jalan dalam kondisi sedang sebesar 37,746 persen, jalan dalam kondisi rusak ringan sebesar 22,387 persen, dan jalan dalam kondisi berat sebesar 15,933 persen. Kondisi ini menjadi gambaran pelayanan infrastruktur dasar terkait konektivitas di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 2.62
Persentase Kondisi Jalan di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2022

Kondisi Jalan	Panjang Jalan (Kilometer)			Persentase (%)		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Baik	555,54	695,36	524,86	25,33	31,71	23,94
Sedang	834,8	566,09	827,79	38,07	25,82	37,75
Rusak Ringan	724,02	521,36	490,96	33,02	23.774	22,39
Rusak Berat	78,66	410,21	349,42	3,59	18,71	15,94

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara, 2023

Tingkat kemantapan jalan di Kabupaten Kutai Kartanegara nilainya fluktuatif. Pada 2018-2019, panjang jalan yang sudah dalam kondisi mantap naik sepanjang 36,31 Kilometer. Pada 2019-2021 mengalami penurunan dan kembali naik pada 2022 dan 2023

Tabel 2.63
Kondisi Jalan dalam Kondisi Mantap di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2018-2023

Uraian Indikator Jalan	Kemantapan Jalan					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota (%)	66,85	69,87	63,39	57,52	61,49	65,5
Jumlah Panjang Jalan Kewenangan Kab/Kota dalam Kondisi Mantap (kilometer)	1495,9	1532,3	1390,3	1261,4	1348,5	2193

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kutai Kartanegara, 2023

Tabel 2.64
Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan
di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2017-2023

Uraian Indikator Jalan	Capaian						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Panjang Jalan	2775,2	2775,2	2775,2	2775,2	2775,2	2775,2	2196,9
Jumlah Kendaraan	403.811	430.209	434.929	446.882	417.982	516.413	586.007
Rasio	0,00687	0,00645	0,00377	0,00427	0,00420	0,00308	0,00375

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kutai Kartanegara, 2023

2.3.2.5. Indeks Infrastruktur atau Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)

Secara umum, nilai IKLI komposit pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 79,15 dibandingkan dengan 2021 yang hanya 70,79. Beberapa sektor pada 2023 nilainya lebih rendah dibandingkan 2022, yaitu pada sektor jalan usaha tani, embung, irigasi, dan drainase.

Tabel 2.65
Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur di Kabupaten Kutai Kartanegara,
2022-2023

No	Sektor dan Sub-Sektor Pelayanan	Unsur IKLI					Nilai IKLI	
		U1	U2	U3	U4	U5	2023	2022
1	Pendidikan						92,78	77,62
	PAUD	18,28	17,97	18,16	18,35	18,35	91,10	-
	SD	18,98	18,76	18,90	19,04	19,06	94,74	-
	SLTP	18,81	18,76	18,84	18,99	18,91	94,32	-
	SLTA	18,12	18,12	18,25	18,29	18,20	90,97	-
2	Kesehatan						83,43	75,95
	Posyandu	18,35	18,14	18,42	18,57	18,56	92,04	-
	Pustu	16,94	16,85	16,71	16,73	16,82	84,05	-
	Puskesmas	18,39	18,36	18,32	18,30	18,22	91,58	-
	Klinik	14,67	14,59	14,60	14,61	14,46	72,93	-

No	Sektor dan Sub-Sektor Pelayanan	Unsur IKLI					Nilai IKLI	
		U1	U2	U3	U4	U5	2023	2022
	Rumah Sakit	15,26	15,35	15,31	15,40	15,26	76,56	-
3	Pekerjaan Umum						70,14	-
	Jalan Desa	15,74	14,80	15,25	15,44	15,38	76,61	74,73
	Jalan Usahatani	12,81	12,50	12,63	12,76	12,84	63,54	74,73
	Jalan ke Kecamatan	17,36	16,94	17,15	17,30	17,31	86,07	74,73
	Jalan ke Kabupaten	17,27	16,64	16,83	17,19	17,06	84,99	74,73
	Jembatan	16,17	15,95	16,12	16,18	16,21	80,62	74,73
	Embung	9,37	9,27	9,33	9,35	9,29	46,62	58,39
	Irigasi	10,74	10,44	10,48	10,49	10,40	52,54	58,39
4	Perumahan dan Permukiman						83,02	-
	Air Bersih	17,97	17,71	17,84	17,87	17,93	89,33	75,67
	Drainase	11,97	11,73	11,85	11,93	11,96	59,44	66,70
	Persampahan	14,73	14,58	14,64	14,66	14,51	73,12	68,58
	Listrik	20,12	20,06	20,03	20,07	20,10	100,00	-
	Telekomunikasi	18,63	18,42	18,51	18,62	18,63	92,81	-
5	Sektor Pendukung						66,13	-
	Pasar	16,06	15,72	16,01	16,12	16,34	80,25	72,84
	Pariwisata	14,45	14,40	14,41	14,43	14,48	72,17	66,67
	Bumdes	13,02	12,99	12,91	12,82	12,73	64,47	-
	Koperasi	9,71	9,53	9,52	9,60	9,29	47,63	-
	IKLI Komposit						79,15	70,79

Sumber : Dokumen IKLI Kutai Kartanegara, 2023

2.3.3. Fokus Fasilitas Iklim Berinvestasi

Dalam rangka meningkatkan iklim investasi di daerah, hal penting yang harus diperhatikan adalah penciptaan iklim kondusif yang mendukung investasi. Indikator yang berkaitan dengan iklim investasi, antara lain angka kriminalitas yang dilihat dari jumlah kejadian kejahatan dan jumlah demonstrasi.

2.3.3.1. Angka Kriminalitas

Jika dilihat dari kejadian pada 2017-2023, jumlah tindak kejahatan yang dilaporkan menunjukkan angka yang fluktuatif. Angka *crime rate* diharapkan terus menurun karena hal tersebut akan mempengaruhi iklim investasi, di mana orang akan merasa aman untuk berinvestasi di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara jika keamanannya cenderung terjamin.

Tabel 2.66
Tingkat Kriminalitas (*Crime Rate*) di Kabupaten Kutai Kartanegara,
2017-2023

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk	674.759	677.775	696.784	734.485	753.862	765.284	788.113
Jumlah Tindak Kejahatan Yang Dilaporkan (Crime Total)	1.057	606	619	460	241	430	646
Crime Rate/100.000 Penduduk	157	89	89	63	32	56	82

Sumber : Satpol PP 2020, Capil 2023

2.3.3.2. Jumlah Kegiatan Demonstrasi

Jumlah kegiatan demonstrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara bervariasi dari tahun ke tahun, mencerminkan dinamika sosial, ekonomi, dan politik di wilayah tersebut. Pada tahun 2012, tercatat total 109 kegiatan demonstrasi, dengan 93 di antaranya terkait isu politik, 16 isu ekonomi, dan tidak ada demonstrasi yang dilaporkan dalam kategori sosial. Tahun 2014, terjadi penurunan jumlah total kegiatan demonstrasi menjadi 100, dengan perincian 3 kegiatan terkait politik, 73 terkait ekonomi, dan 24 terkait isu sosial.

Tabel 2.67
Jumlah Kegiatan Demonstrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara 2012 - 2020

Jumlah Kegiatan Demonstrasi				
	Politik	Ekonomi	Sosial	Total
2012		93	16	109
2014	3	73	24	100
2016	2	21	24	47
2018	2	21	24	47
2019	9	21	43	73
2020	1	14	11	26

Sumber : BPS Kalimantan Timur

Pada tahun 2016 dan 2018, jumlah total kegiatan demonstrasi turun drastis menjadi 47, dengan masing-masing tahun mencatat 2 kegiatan terkait politik, 21 ekonomi, dan 24 isu sosial. Tahun 2019, terjadi peningkatan menjadi 73. Namun, pada tahun 2020, jumlah total kegiatan demonstrasi kembali menurun secara signifikan menjadi 26, dengan hanya 1 kegiatan terkait politik, 14 ekonomi, dan 11 isu sosial. Perubahan jumlah dan kategori kegiatan demonstrasi ini mencerminkan pergeseran perhatian dan kepedulian masyarakat terhadap isu-isu tertentu pada setiap periode tersebut.

2.3.3.3. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Indikator kinerja Trantibum (Ketentraman dan Ketertiban Umum) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai efektivitas pemerintah daerah dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta menegakkan peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada). Indikator ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat hidup dalam lingkungan yang aman dan teratur, serta hukum dan peraturan yang berlaku diterapkan dengan baik.

Data mengenai indikator kinerja Trantibum di Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan tren stabil dalam penanganan gangguan ketertiban umum. Persentase penyelesaian gangguan Trantibum mencapai 100 persen setiap tahun dalam periode tersebut, menunjukkan bahwa pemerintah daerah secara konsisten berhasil menangani seluruh gangguan ketertiban umum yang terjadi. Di sisi lain, terdapat peningkatan yang signifikan dalam penegakan Perda dan Perkada selama periode yang sama. Pada tahun 2019, hanya 1 persen dari Perda dan Perkada yang ditegakkan. Angka ini meningkat menjadi 3,70 persen pada tahun 2020, melonjak tajam menjadi 22,03 persen pada tahun 2021, terus naik menjadi 34,69 persen pada tahun 2022, dan mencapai 75 persen pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan upaya yang semakin efektif dari pemerintah daerah dalam menegakkan peraturan dan hukum, yang berkontribusi pada peningkatan ketertiban dan kepatuhan hukum di masyarakat.

Tabel 2.68
Indikator Kinerja Trantibum di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2019 – 2023

No	Indikator Kinerja Trantibum	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan	100	100	100	100	100
2	Persentase Perda dan Perkada Yang Ditegakkan	1,00	3,70	22,03	34,69	75,00

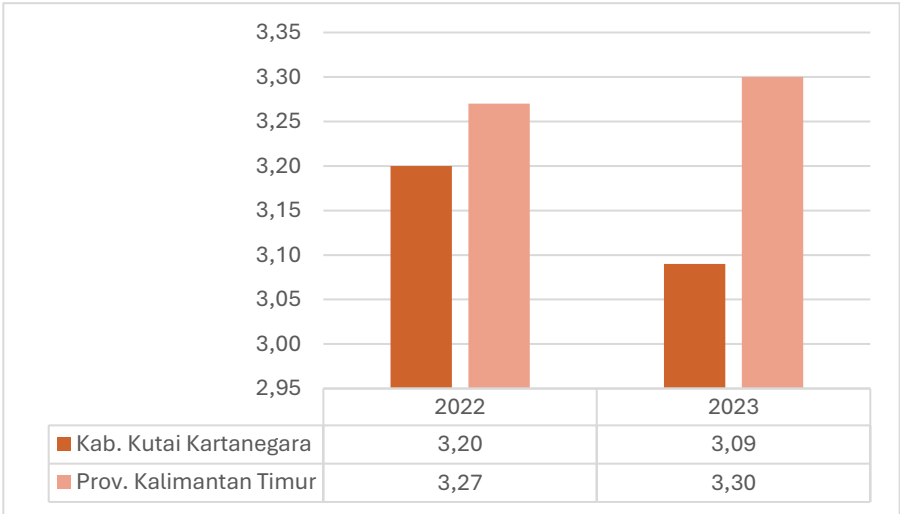
Sumber : RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara 2025

2.3.3.4. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh suatu ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapato merefleksikan tingkat produktivitas daerah.

Dari grafik di bawah ini dapat dilihat bahwa IDSD Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2022 – 2023 selalu di bawah angka IDSD Provinsi Kalimantan Timur. IDSD Kabupaten Kutai Kartanegara juga mengalami penurunan dari tahun 2022 senilai 3,20 turun menjadi 3,09 pada tahun 2023. Berkebalikan dengan hal tersebut, IDSD Provinsi Kalimantan Timur justru meningkat dari nilai 3,27 pada tahun 2022 menjadi 3,30 pada tahun 2023.

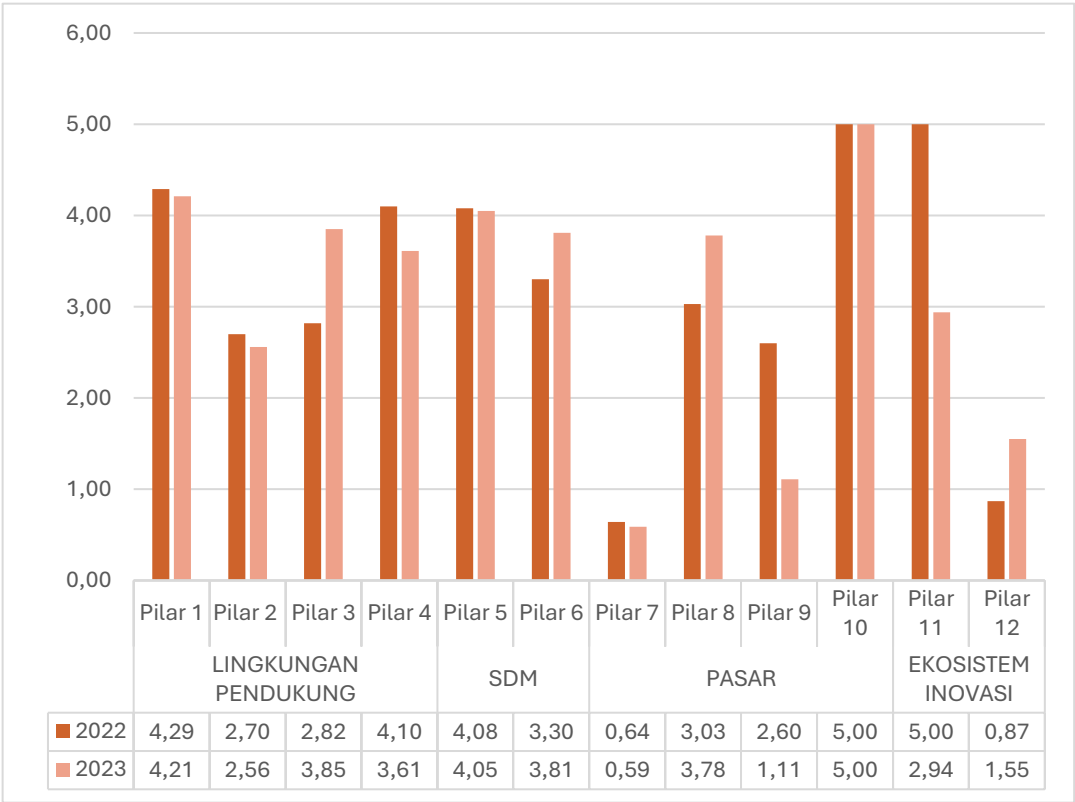
Grafik 2.27
Indeks Daya Saing Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2022 – 2023



Sumber : Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2024

Kerangka penyusunan IDSD terdiri dari empat komponen pembentuk, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Berikut rincian lengkap dari seluruh nilai pilar pada masing-masing komponen IDSD Kutai Kartanegara.

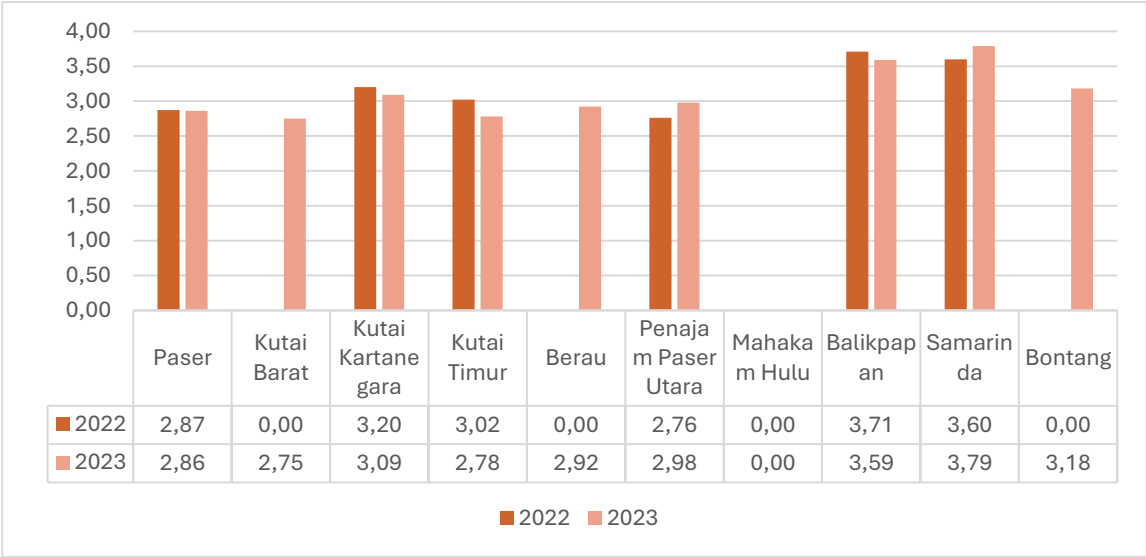
Grafik 2.28
Pilar Indeks Daya Saing Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara,
2022 – 2023



Keterangan:			
Pilar 1	: Instansi	Pilar 7	: Pasar Produk
Pilar 2	: Infrastruktur	Pilar 8	: Pasar Tenaga Kerja
Pilar 3	: Adopsi TIK	Pilar 9	: Sistem Keuangan
Pilar 4	: Stabilitas Ekonomi Makro	Pilar 10	: Ukuran Pasar
Pilar 5	: Kesehatan	Pilar 11	: Dinamisme Bisnis
Pilar 6	: Keterampilan	Pilar 12	: Kapabilitas Inovasi

Sumber : Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2024

Grafik 2.29
Indeks Daya Saing Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2022 – 2023



Sumber : Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2024

2.3.3.5. Jumlah Kegiatan Demonstrasi

Data jumlah demonstrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan puncak aktivitas pada 2012 dengan 109 kegiatan, terutama dipicu oleh isu ekonomi. Setelah itu, jumlah demonstrasi menurun, mencapai 100 kegiatan pada 2014, dan stabil di angka 47 pada 2016 dan 2018, dengan fokus pada isu ekonomi dan sosial. Pada 2019, jumlahnya meningkat lagi menjadi 73 kegiatan, didominasi oleh isu sosial, namun turun drastis menjadi 26 pada 2020. Fluktuasi ini menunjukkan perubahan fokus demonstrasi yang dipengaruhi isu sosial-ekonomi di daerah tersebut.

Tabel 2.69
Jumlah Kegiatan Demonstrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2012-2020

Tahun	Politik	Ekonomi	Sosial	Total
2012		93	16	109
2014	3	73	24	100
2016	2	21	24	47
2018	2	21	24	47
2019	9	21	43	73
2020	1	14	11	26

Sumber: Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Timur

2.3.3.6. Persentase Kehadiran Pemilu

Data persentase kehadiran pemilih di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan tren peningkatan pada Pemilu Legislatif dan Presiden dari 68,46 persen pada 2014 menjadi 81,24 persen pada 2019, dan mencapai 83,24 persen pada 2024. Pemilihan Gubernur juga mengalami kenaikan partisipasi, dari 53,97 persen pada 2013 menjadi 60,44 persen pada 2018. Sementara itu, kehadiran pemilih dalam Pemilihan Bupati sedikit menurun dari 58,93 persen pada 2015 menjadi 57 persen pada 2020. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan peningkatan antusiasme masyarakat dalam pemilihan umum di tingkat legislatif dan presiden, sementara partisipasi untuk pemilihan kepala daerah cenderung stabil.

Tabel 2.70

Persentase Kehadiran Pemilu Kabupaten Kutai Kartanegara

Legistatif & Presiden		Gubernur		Bupati	
tahun	%	tahun	%	tahun	%
2014	68,46	2013	53,97	2015	58,93
2019	81,24	2018	60,44	2020	57
2024	83,24				

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2.3.3.7. Persentase Rumah Tangga yang tidak merasa khawatir dengan keamanan saat berjalan kaki sendirian di malam hari

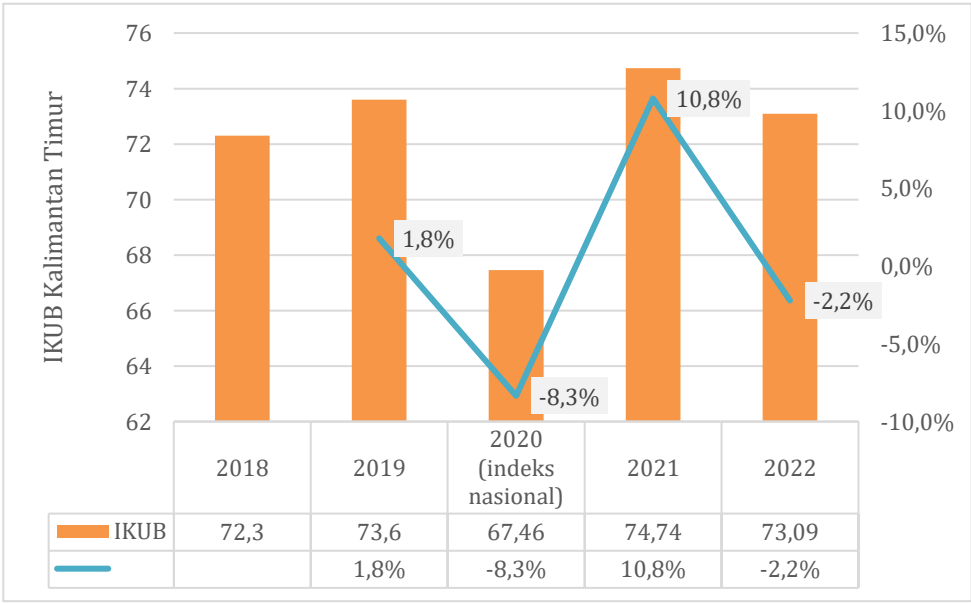
Berdasarkan komponen penyusun Indeks Pembangunan Kebudayaan di Kutai Kartanegara, persentase rumah tangga yang tidak merasa khawatir dengan keamanan saat berjalan kaki sendirian di malam hari dalam setahun terakhir pada tahun 2023 mencapai angka 21.24 persen. Angka ini menunjukkan masih rendahnya rasa aman rumah tangga di Kutai Kartanegara yang perlu dibenahi.

2.3.3.8. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Data Indeks Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan tren yang fluktuatif dari 2018 hingga 2022. Pada 2018 hingga 2019, indeks mengalami peningkatan dari 72,3 menjadi 73,6, mencerminkan perbaikan dalam kerukunan umat beragama. Namun, pada 2020, indeks mencatat penurunan tajam ke 67,46 yang merupakan data nasional, bukan provinsi, sehingga tidak mencerminkan kondisi spesifik di Kalimantan Timur. Pada 2021, indeks kembali meningkat signifikan ke 74,74, menunjukkan

pemulihan, dan pada 2022 tercatat sedikit menurun ke 73,09. Data untuk 2023 tidak tersedia. Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan tingkat kerukunan di Kalimantan Timur yang relatif tinggi dan stabil, dengan pengecualian pada data 2020 yang bersifat nasional.

Grafik 2.30
Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Provinsi Kalimantan Timur,
2018-2022



2.3.4. Fokus Sumber Daya Manusia

2.3.4.1. Rasio Ketergantungan Penduduk

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan fokus yang sangat penting dalam proses pembangunan suatu wilayah karena memiliki peran krusial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. SDM yang berkualitas adalah SDM yang fokus, mandiri, memiliki kualitas baik secara fisik maupun mental, dan memiliki potensi untuk menjadi model berharga dalam mengelola sumber daya yang ada, mengoptimalkan potensi yang dimiliki, serta mengatasi berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi.

Pembangunan SDM di Kabupaten Kutai Kartanegara bertujuan untuk mempersiapkan SDM yang terampil, inovatif, kompetitif, dan disiplin. Langkah ini diambil untuk mempercepat laju pembangunan di daerah tersebut. Indikator perkembangan pembangunan SDM dapat dilihat dari tingkat ketergantungan penduduk di suatu wilayah, yang mencerminkan sejauh mana penduduk produktif mendukung pembangunan serta seberapa besar beban yang harus ditanggung oleh populasi yang tidak produktif.

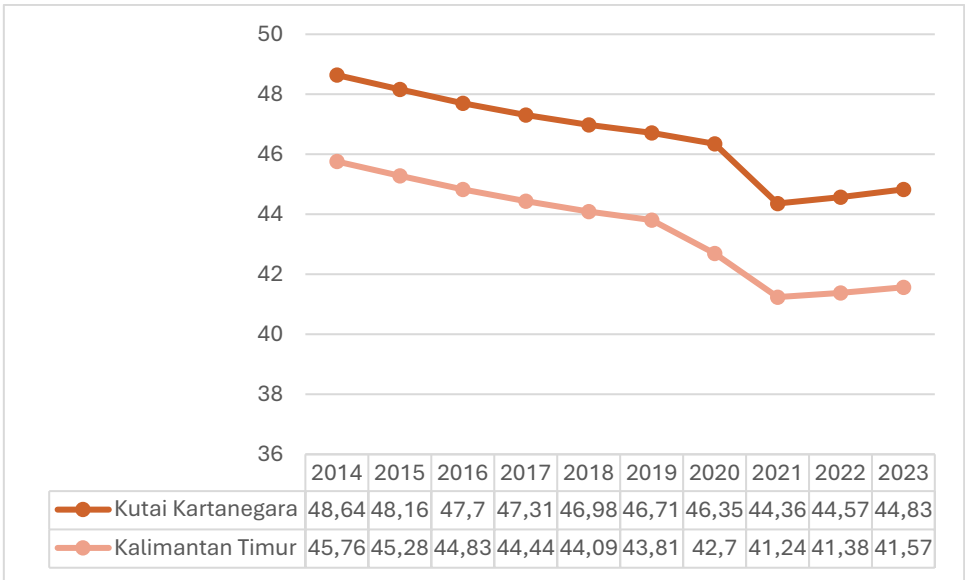
Dengan fokus pada pengembangan SDM yang unggul, Kabupaten Kutai Kartanegara berupaya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menghadapi tantangan yang ada. Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kemampuan menjadi prioritas penting dalam memajukan daerah.

Penurunan tingkat ketergantungan penduduk dari tahun ke tahun menunjukkan tren positif dalam komposisi usia penduduk. Meskipun demikian, Kabupaten Kutai Kartanegara masih memerlukan waktu yang cukup lama untuk mencapai kondisi bonus demografi. Bonus demografi terjadi ketika proporsi penduduk usia produktif dalam suatu wilayah sangat tinggi. Rasio ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan 64 tahun ke atas) dengan penduduk usia produktif (15-64 tahun).

Pada tahun 2022, tingkat ketergantungan di Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 44,57 persen, meningkat dari 44,36 persen pada tahun sebelumnya. BPS juga memproyeksikan bahwa rasio ketergantungan akan meningkat sebesar 1 hingga 2 persen pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2022. Data ini menunjukkan bahwa rata-rata setiap 100 penduduk usia produktif di Kabupaten Kutai Kartanegara harus menanggung sekitar 44 orang penduduk usia tidak produktif.

Namun, perlu diingat bahwa angka ini diasumsikan berdasarkan asumsi bahwa setiap penduduk usia 15-64 tahun benar-benar dapat berkontribusi secara produktif secara ekonomi. Jika penduduk usia produktif tidak dapat diberdayakan secara ekonomi dan menghadapi pengangguran, maka kondisi tersebut dapat menimbulkan masalah seperti kesenjangan sosial dan kerawanan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk mengoptimalkan potensi usia produktif menjadi salah satu fokus penting dalam pembangunan untuk mencapai bonus demografi yang lebih optimal.

Grafik 2.31
Rasio Ketergantungan Menurut Kelompok Usia
di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2018-2023



Sumber : BPS Kabupaten Kutai Kartanegara, 2024

Grafik di bawah menunjukkan tren indeks pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun 2015 hingga 2023. Indeks pendidikan ini adalah salah satu indikator penting yang digunakan untuk menilai kualitas sumber daya manusia (SDM) di wilayah tersebut. Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan perkembangan yang positif dalam indeks pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara, yang mencerminkan komitmen dan usaha yang berkelanjutan dalam meningkatkan sektor pendidikan.

2.3.4.2. Perkembangan Indeks Pendidikan, Kesehatan, Pendapatan

Indikator lain yang juga penting yakni sumber daya pengajar dalam pendidikan. Rasio antara jumlah guru dan murid, baik di tingkat pendidikan dasar maupun sekolah menengah, sangat dipengaruhi oleh jumlah guru di satuan pendidikan dan pertumbuhan penduduk di wilayah tersebut.

Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2008 tentang Guru, standar ideal rasio murid-guru adalah 1:20 untuk SD, 1:20 untuk SMP, 1:20 untuk SMA, dan 1:25 untuk SMK. Rata-rata rasio di Kabupaten Kutai Kartanegara dari setiap tingkat pendidikan sudah termasuk dalam kondisi ideal. Lebih lanjut data mengenai rasio guru dan murid sebagai berikut.

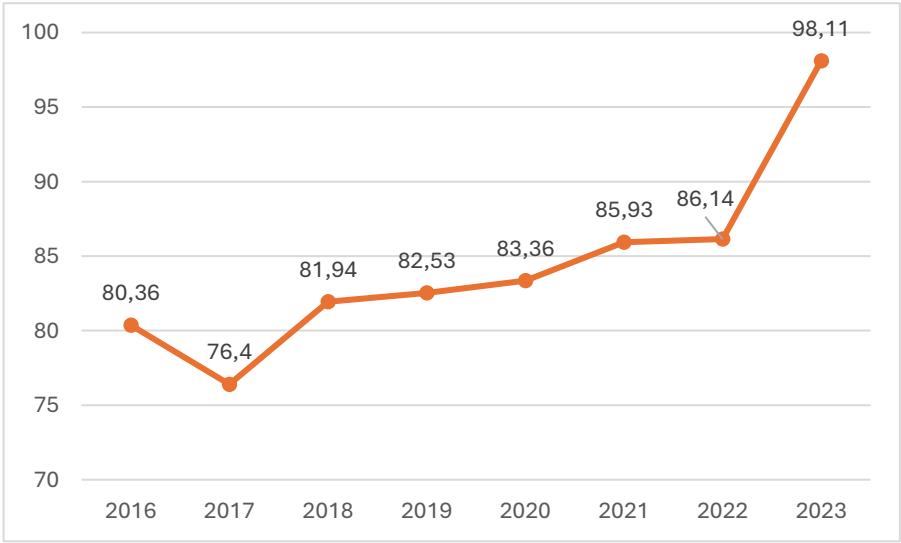
Tabel 2.71
Rasio Guru dan Murid di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2016 - 2022

Uraian	Tahun							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rasio guru/murid sekolah dasar	01:16	01:14	01:17	01:16	01:16	01:16	01:16	01:16
Rasio guru/murid pendidikan menengah	01:15	01:16	01:18	01:17	01:16	01:17	01:16	01:16

Sumber : RKPD 2023, 2024

Agar terwujud pembelajaran yang sesuai dengan yang diharapkan, maka guru harus memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai. Misalnya, dalam kurikulum 2013 tentang standar kualifikasi kompetensi guru SMP/ MTS tahun 2007, guru SMP/ MTS atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum Diploma empat (D- IV) atau Sarjana (S1) dengan program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

Grafik 2.32
Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Pendidikan
di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2016 – 2023



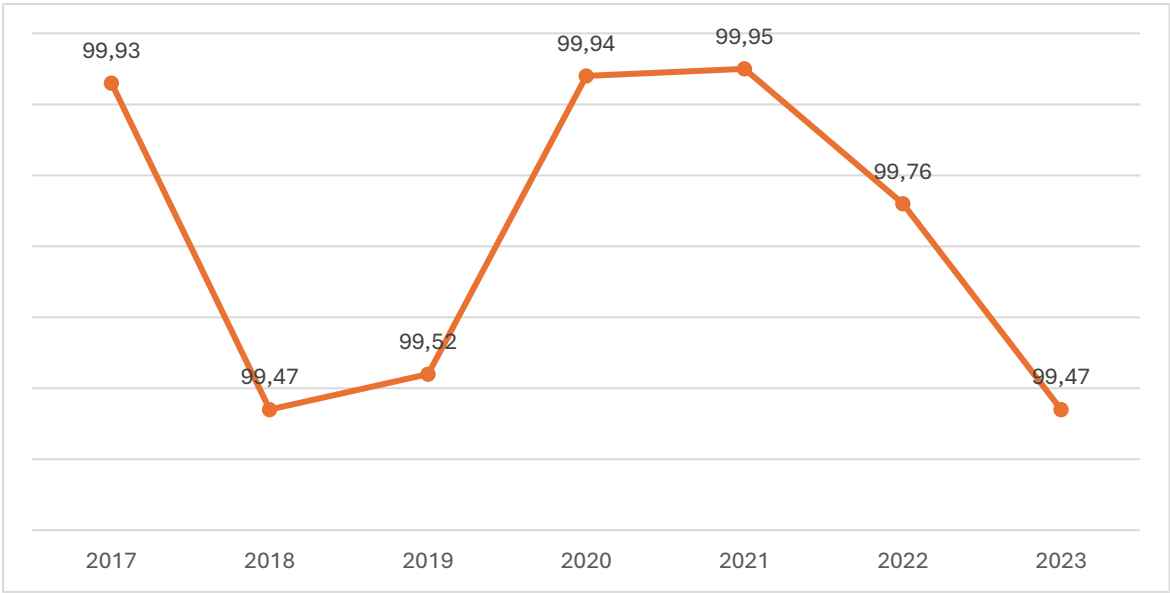
Sumber : RKPD 2023, 2024

Rata-rata setiap tahun sudah terdapat 80 persen guru yang memenuhi kualifikasi. Melihat dari tahun 2016 dengan kondisi awal di 80,36 persen guru telah memenuhi kualifikasi pendidikan. Selama tujuh tahun terjadi peningkatan persentase menjadi sejumlah 98,11 persen guru telah memenuhi kualifikasi pendidikan. Berikut ini merupakan persentase guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan.

Selain itu kemampuan membaca menjadi faktor penting dalam mengukur kualitas pendidikan di suatu daerah. Dalam hal ini, angka melek huruf (literasi) menjadi salah satu indikator untuk melihat seberapa besar jumlah penduduk dalam memahami bacaan atau huruf.

Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang di baca/ ditulisnya. Data di bawah merupakan data Angka Melek Huruf di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Grafik 2.33
Angka Melek Huruf di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2017 - 2023



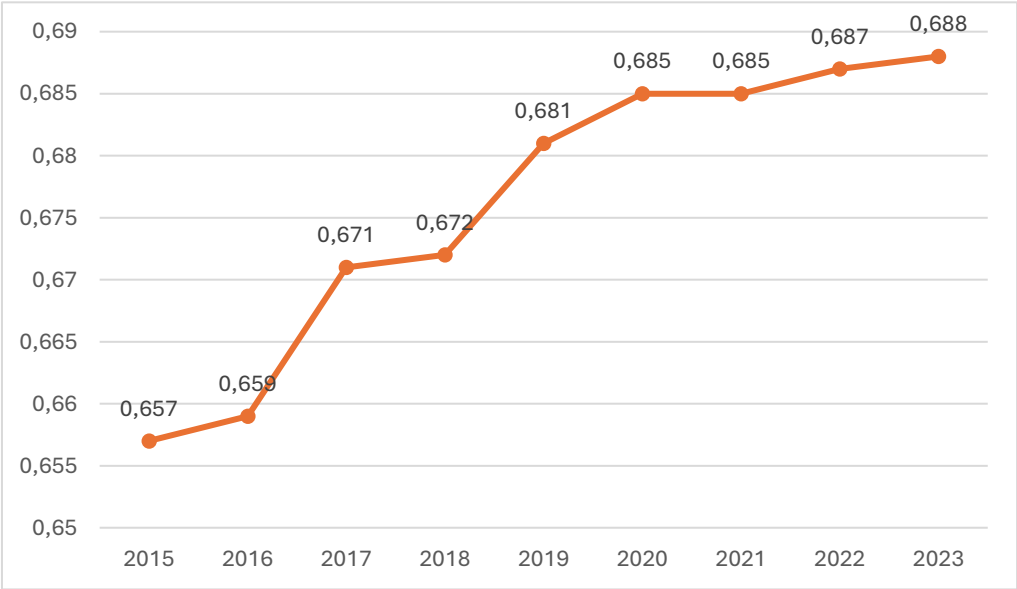
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

Data di atas menunjukkan bahwa ketercapaian angka melek huruf setiap tahunnya telah mencapai di atas 99 persen. Sejak tahun 2017 diketahui capaian angka melek huruf di Kabupaten Kutai Kartanegara selalu di atas 99 persen. Kenaikan dan penurunan setiap tahunnya hanya berkisar pada nol koma. Artinya sekitar 99 persen penduduk di Kabupaten Kutai

Kartanegara yang berumur 15 tahun ke atas dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya.

Tingkat melek huruf yang tinggi menunjukkan adanya sistem pendidikan dasar yang efektif dan atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajaran.

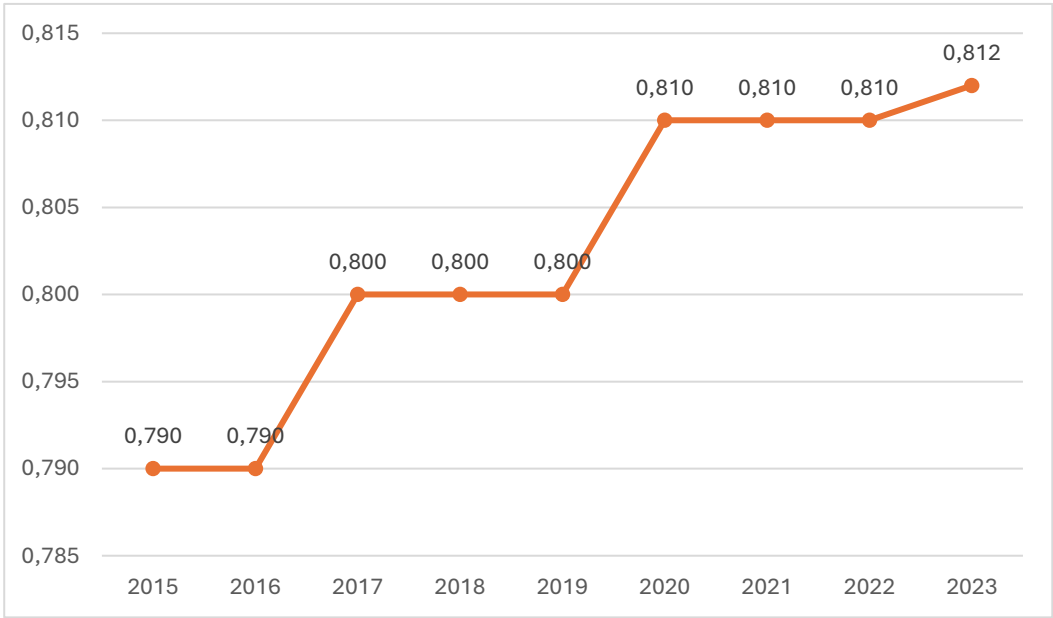
Grafik 2.34
Perkembangan Indeks Pendidikan
di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2015-2023



Sumber : BPS Kabupaten Kutai Kartanegara, diolah

Indeks kesehatan merupakan suatu variabel yang membantu menganalisis atau mengukur status kesehatan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pembangunan kesehatan. Indeks kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara dihitung menggunakan indikator Usia Harapan Hidup (UHH). Angkanya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

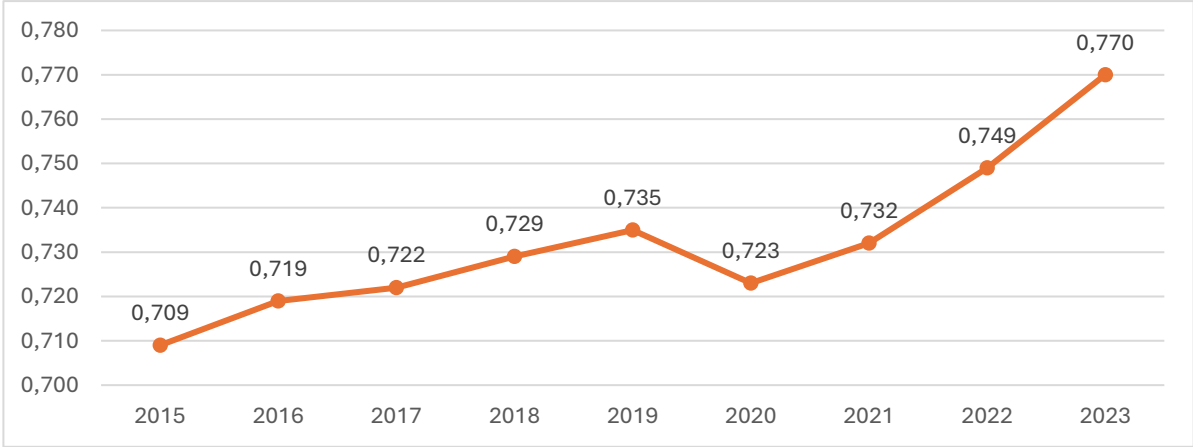
Grafik 2.35
Perkembangan Indeks Kesehatan
di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2015-2023



Sumber : BPS Kabupaten Kutai Kartanegara, diolah

Indeks pendapatan merupakan salah satu indeks penyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dihitung dari Pengeluaran per Kapita disesuaikan atau daya beli masyarakat. Indeks Pendapatan Kabupaten Kutai Kartanegara dari 2015-2023 cenderung memiliki tren yang positif meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 akibat pandemi. Peningkatan ini mencerminkan upaya efektif dalam pembangunan ekonomi daerah.

Grafik 2.36
Indeks Pendapatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2015-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik. diolah

2.3.4.3. Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni, dan Angka Putus Sekolah

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah, dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi APK, semakin banyak anak usia sekolah atau anak di luar usia sekolah yang bersekolah di jenjang tersebut. APK berguna untuk mengetahui jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu. Berikut adalah kondisi APK di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 2.72
Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan
di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2019 - 2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
APK SD	103,95	102,00	100,97	100,82	104,05
APK SMP	96,69	96,69	94,80	103,82	103,39
APK SMA	97,48	95,80	97,22	95,93	88,90

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024; Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2020 – 2024

Data Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tabel 2.44 di Kabupaten Kutai Kartanegara dari 2019 hingga 2023 menunjukkan variasi di setiap jenjang pendidikan. APK SD fluktuatif, dimana menurun secara bertahap dari 103,95 persen pada 2019 menjadi 100,82 persen pada 2022, kemudian naik kembali pada 2023 mencapai 104,05 persen. menandakan tantangan dalam mempertahankan pendaftaran di jenjang ini. Sementara itu, APK SMP juga fluktuatif dimana pada 2023 angkanya mencapai 103,39. Untuk APK SMA trennya cenderung menurun dimana pada tahun 2021 angkanya 97,22 turun menjadi 88,90 pada 2023.

Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur persentase siswa usia sekolah tertentu yang bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikannya. Semakin tinggi APM, semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan tertentu, dengan nilai ideal 100 persen. APM berguna untuk mengetahui jumlah anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang yang sesuai. Berikut adalah data APM di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 2.73
Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan
di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2019 – 2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
APM SD	96,65	96,72	96,41	97,27	97,12
APM SMP	85,89	86,19	85,94	87,79	87,06
APM SMA	74,77	75,1	75,45	75,12	97,12

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024; Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2020 – 2024

Data Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan tren yang fluktuatif untuk tingkat SD dan SMP dari 2019 hingga 2023. Di tingkat SMA, APM justru cenderung meningkat dimana pada tahun 2019 angkanya hanya 74,77 persen meningkat menjadi 97,12 persen pada 2023.

Meskipun terdapat penurunan di tingkat SD dan SMP, APM di Kabupaten Kutai Kartanegara tetap relatif tinggi dibandingkan dengan beberapa daerah lain di Indonesia. Meskipun demikian, perlu perhatian khusus untuk memahami penyebab penurunan ini dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan kembali tingkat partisipasi pendidikan masyarakat. Faktor-faktor seperti aksesibilitas, kualitas pendidikan, dan dukungan masyarakat perlu dievaluasi lebih lanjut untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam meningkatkan APM di masa mendatang.

APM di bawah 100 persen mencerminkan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan pada usia tertentu, serta kecenderungan orang tua mengirim anak-anak mereka ke sekolah di luar kabupaten karena alasan pekerjaan atau pertimbangan pendidikan. Selain APM, Angka Putus Sekolah (APS) juga penting sebagai indikator kinerja pendidikan. APS mengukur proporsi anak yang tidak melanjutkan atau tidak menyelesaikan jenjang SD, SMP, dan SMA.

Tabel 2.74
Angka Putus Sekolah (APS)
Kabupaten Kutai Kartanegara, 2019 – 2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	65	194	248	479	176
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	68	145	26	154	41

Sumber: RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara 2025

Data Angka Putus Sekolah (APS) untuk tingkat pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan fluktuasi yang signifikan dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tingkat SD/MI, APS mengalami peningkatan drastis dari 65 pada tahun 2019 menjadi 479 pada tahun 2022, sebelum kemudian turun menjadi 89 pada tahun 2023. Di sisi lain, APS untuk tingkat SMP/MTs juga mengalami fluktuasi, dengan nilai tertinggi tercatat pada tahun 2020 (194) dan kemudian menurun secara bertahap hingga mencapai 62 pada tahun 2023.

Penurunan APS pada tahun 2023 menunjukkan adanya upaya yang berhasil dalam menanggulangi angka putus sekolah di Kabupaten Kutai Kartanegara, meskipun tantangan yang signifikan masih ada dalam mempertahankan tingkat partisipasi dan kelulusan siswa. Evaluasi terus menerus terhadap faktor-faktor seperti aksesibilitas pendidikan, kualitas pengajaran, serta dukungan masyarakat diperlukan untuk memastikan penurunan APS yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas pendidikan di masa depan.

2.3.4.4. Perkembangan Angka Literasi/Numerasi

Data mengenai persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen nasional di Kabupaten Kutai Kartanegara dari 2021 hingga 2023 menunjukkan perkembangan positif dalam literasi membaca dan numerasi. Untuk literasi membaca, terdapat peningkatan yang konsisten baik di tingkat Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP) setiap tahunnya. Di tingkat SD, persentase meningkat dari 58,33 persen pada tahun 2021 menjadi 65,34 persen pada

tahun 2022, dan mencapai 70,68 persen pada tahun 2023. Di tingkat SMP, persentase naik dari 60,33 persen pada tahun 2021 menjadi 72,48 persen pada tahun 2022, dan sedikit meningkat menjadi 73,34 persen pada tahun 2023.

Tabel 2.75
Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Literasi dan Numerasi Tingkat SD dan SMP di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2021 – 2023

Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:	2021	2022	2023
i) Literasi Membaca			
SD	58,33	65,34	70,68
SMP	60,33	72,48	73,34
ii) Numerasi			
SD	52,99	50,32	58,85
SMP	56,33	47,60	72,79

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Kartanegara, 2024

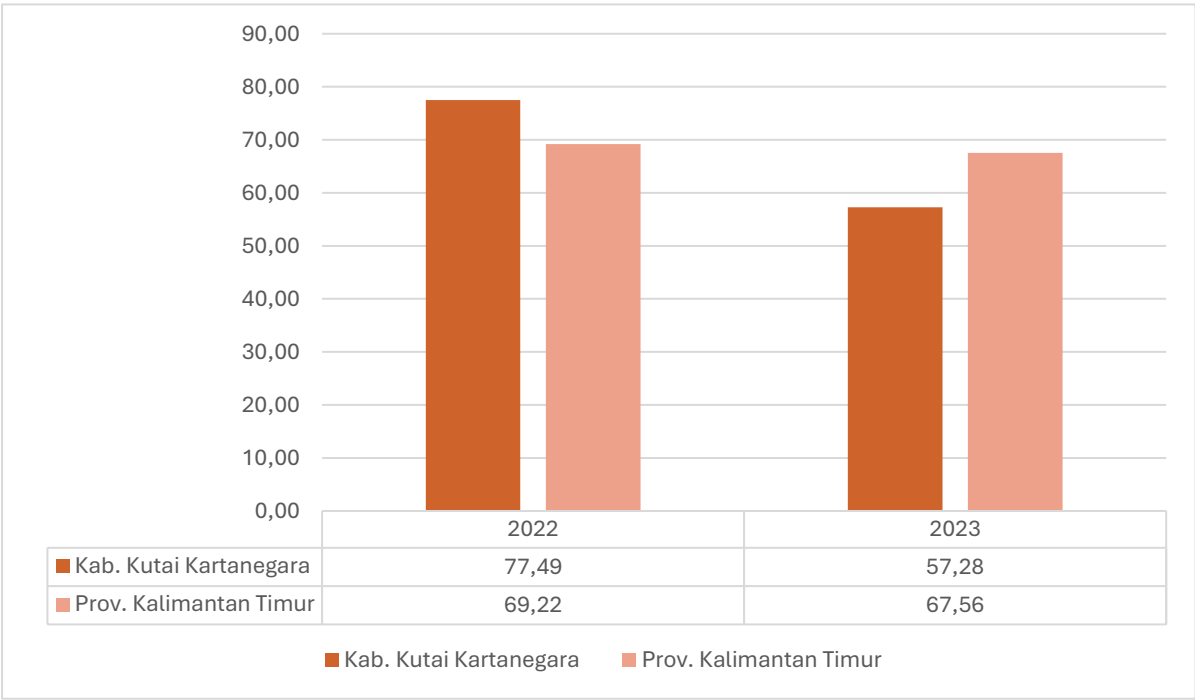
Namun untuk numerasi, terdapat fluktuasi dalam persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum. Di tingkat SD, persentase ini menurun dari 52,99 persen pada tahun 2021 menjadi 50,32 persen pada tahun 2022, namun kemudian meningkat kembali menjadi 58,85 persen pada tahun 2023. Sementara itu, di tingkat SMP, penurunan lebih signifikan terjadi dari 56,33 persen pada tahun 2021 menjadi 47,6 persen pada tahun 2022, tetapi meningkat drastis mencapai 72,79 persen pada tahun 2023. Peningkatan yang konsisten dalam literasi membaca menunjukkan keberhasilan upaya pendidikan dalam meningkatkan kemampuan membaca di sekolah-sekolah Kabupaten Kutai Kartanegara. Meski ada tantangan dalam numerasi, terutama pada tahun 2022, upaya pemulihan yang kuat terlihat pada tahun 2023 dengan peningkatan signifikan, khususnya di tingkat SMP. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan kemajuan positif dalam kompetensi literasi dan numerasi di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan perhatian khusus diperlukan untuk mempertahankan dan meningkatkan tren positif tersebut, terutama dalam bidang numerasi.

2.3.4.5. Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas sumber daya manusia. Yaitu “sangat rendah” (09,9 – 29,9), “rendah” (30 - 49,9), “sedang” (50 - 79,9), “tinggi” (80-89,9), dan “sangat tinggi” (90-100). Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2022 memiliki IPLM sebesar 77,49 dan turun menjadi 57,28 pada tahun 2023. Angka IPLM Kutai Kartanegara dalam dua tahun tersebut masuk dalam kategori “sedang”.

Grafik 2.37

Grafik Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)
di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Provinsi Kalimantan Timur,
2022 – 2023



Sumber : Bappenas Republik Indonesia, 2023

2.3.4.6. Indeks Literasi Digital

Data Indeks Literasi Digital menunjukkan kinerja Provinsi Kalimantan Timur dibandingkan dengan indeks nasional untuk tahun 2021 dan 2022. Dalam pilar *Digital Skills*, Kalimantan Timur mengalami penurunan dari 3,84 di 2021 menjadi 3,55 di 2022, meskipun masih tetap di atas rata-rata nasional yang naik dari 3,44 menjadi 3,52. Pada pilar *Digital Ethics*, Kalimantan Timur justru mencatat peningkatan signifikan dari 3,41 di 2021 menjadi 3,9 di 2022, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang juga

mengalami kenaikan dari 3,53 menjadi 3,68. Pilar *Digital Safety* menunjukkan peningkatan kecil di Kalimantan Timur dari 3,13 di 2021 menjadi 3,17 di 2022, yang sedikit lebih tinggi daripada rata-rata nasional yang naik dari 3,10 ke 3,12.

Tabel 2.76
Indeks Literasi Digital Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional, 2021-2022

Pilar	Provinsi Kalimantan Tiimur		Indonesia	
	2021	2022	2021	2022
Digital Skills	3,84	3,55	3,44	3,52
Digital Ethics	3,41	3,9	3,53	3,68
Digital Safety	3,13	3,17	3,10	3,12
Digital Culture	4,08	3,86	3,90	3,84
Indeks Literasi Digital	3,62	3,62	3,49	3,54

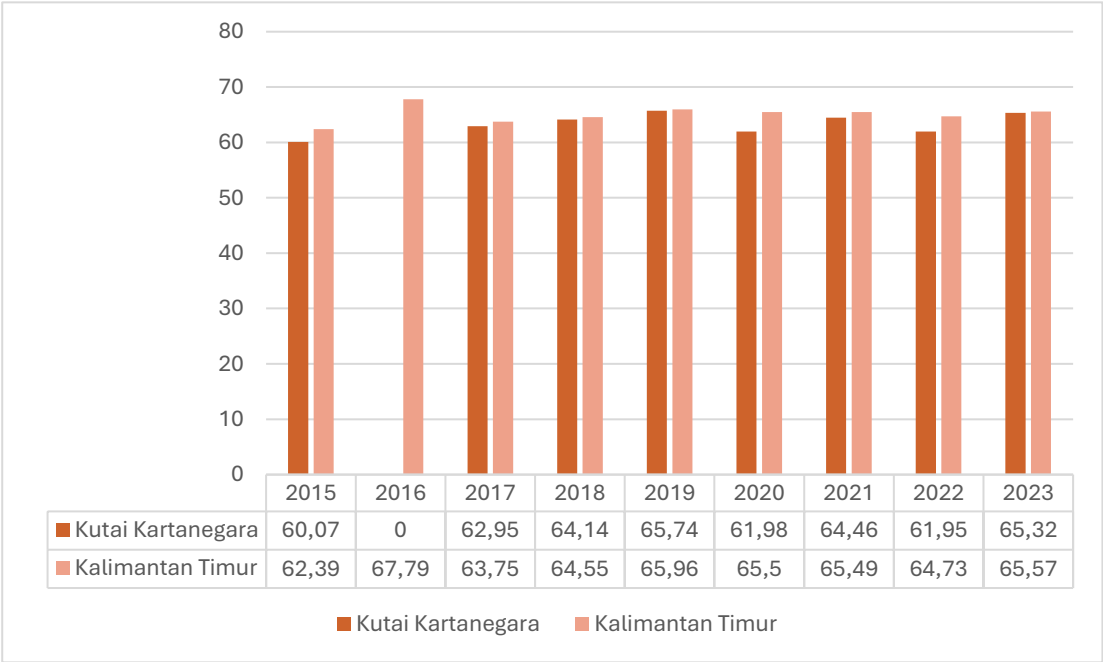
Sementara itu, dalam *Digital Culture*, terjadi sedikit penurunan di Kalimantan Timur dari 4,08 di 2021 menjadi 3,86 di 2022, meskipun tetap lebih tinggi daripada rata-rata nasional yang turun dari 3,90 ke 3,84. Secara keseluruhan, Indeks Literasi Digital Kalimantan Timur stagnan di angka 3,62 pada 2021 dan 2022, lebih tinggi daripada indeks nasional yang naik tipis dari 3,49 menjadi 3,54. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada fluktuasi di beberapa pilar, Kalimantan Timur secara konsisten memiliki indeks literasi digital yang relatif lebih baik dibandingkan rata-rata nasional.

2.3.4.7. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja/TPAK

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari. Angka TPAK digunakan sebagai dasar untuk mengetahui penduduk yang aktif bekerja ataupun mencari pekerjaan.

Semakin tinggi nilai TPAK, maka semakin besar bagian dari penduduk usia kerja yang sesungguhnya terlibat atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif. BPS mengelompokkan nilai TPAK menjadi tiga yaitu “tinggi” ($TPAK \geq 70$), “sedang” ($50 < TPAK < 70$), dan “rendah” ($TPAK \leq 50$).

Grafik 2.38
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Provinsi Kalimantan Timur,
2015 - 2023



Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

Grafik tersebut menunjukkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2015 hingga 2023. TPAK adalah indikator yang menggambarkan persentase jumlah penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, baik bekerja maupun mencari pekerjaan. Data menunjukkan bahwa TPAK Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami fluktuasi selama periode tersebut, dengan peningkatan dari 60,07 persen pada tahun 2015 menjadi 65,32 persen pada tahun 2023. Tidak ada data yang tercatat untuk tahun 2016. Setelah mencapai puncak di 65,74 persen pada tahun 2019, TPAK mengalami sedikit penurunan pada tahun 2020 menjadi 61,98 persen kemungkinan besar dipengaruhi oleh pandemi *COVID-19*, sebelum kembali meningkat secara bertahap hingga 2023.

Secara komparatif, TPAK Provinsi Kalimantan Timur cenderung lebih tinggi daripada Kabupaten Kutai Kartanegara selama periode yang sama. TPAK Kalimantan Timur juga mengalami fluktuasi, dengan nilai tertinggi tercatat pada tahun 2016 sebesar 67,79 persen dan nilai terendah pada tahun 2020 sebesar 65,5 persen. Tren TPAK di Kalimantan Timur menunjukkan pola yang relatif stabil, dengan sedikit penurunan pada tahun 2020 dan peningkatan kembali pada tahun-tahun berikutnya, mencapai

65,57 persen pada tahun 2023. Perbedaan TPAK antara Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kalimantan Timur mengindikasikan variasi dalam dinamika ekonomi dan partisipasi tenaga kerja di tingkat kabupaten dan provinsi. Faktor-faktor seperti ketersediaan lapangan kerja, program pengembangan keterampilan, dan kondisi ekonomi lokal dapat berkontribusi terhadap perbedaan ini.

2.4 Aspek Pelayanan Umum

2.4.1. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur. Dalam perkembangannya reformasi birokrasi dijadikan standar bagi sebuah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk menilai aspek tata kelola organisasi secara umum.

Indeks Reformasi Birokrasi dapat diartikan sebagai sebuah indeks yang digunakan untuk mengukur keberhasilan reformasi birokrasi pada suatu instansi pemerintah. Selain itu Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah, yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Semakin tinggi nilai Indeks Reformasi Birokrasi, maka semakin efektif dan efisien pengelolaan tata pemerintahan, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi dapat dibedakan dalam 7(tujuh) kategori yaitu:

Tabel 2.77

Kategori Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi

Range Nilai	Kategori	Keterangan
> 90 - 100	AA	Istimewa
> 80 - 90	A	Memuaskan
> 70 - 80	BB	Sangat Baik
> 60 - 70	B	Baik
> 50 - 60	C	Cukup Memadai
> 30 - 50	C-	Kurang
> 0 - 30	D	Sangat Kurang

Sumber: Kemenpan RB

Perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kalimantan Timur cenderung tidak banyak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Rata-rata sejak tahun 2015 di Kabupaten Kutai Kartanegara selalu mendapatkan kategori nilai B (Baik). Hal yang sama juga terjadi di Provinsi Kalimantan Timur di mana sejak tahun 2019 selalu mendapatkan kategori B (Baik) di dalam capaian Indeks Reformasi Birokrasi. Adapun secara penilaian, sejak tahun 2019 skor Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Kalimantan Timur selalu lebih tinggi jika dibandingkan dengan skor Nilai Reformasi Birokrasi Kabupaten Kutai Kartanegara. Data di bawah ini merupakan data perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2.78
Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)
di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Provinsi Kalimantan Timur, 2015-2022

Tahun	IRB			
	Kabupaten Kutai Kartanegara	Keterangan	Provinsi Kalimantan Timur	Keterangan
2015	50,48	B (Baik)	-	-
2016	66,78	B (Baik)	-	-
2017	0	-	-	-
2018	66,77	B (Baik)	-	-
2019	60,95	B (Baik)	68	B (Baik)
2020	61,09	B (Baik)	68	B (Baik)
2021	61,29	B (Baik)	67	B (Baik)
2022	62,74	B (Baik)	67	B (Baik)

Sumber: Kemenpan RB

Beberapa data tersebut dapat menggambarkan bahwa tingkat reformasi birokrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam kondisi perkembangan cukup baik. Namun dalam kaitannya dengan tata kelola pemerintahan secara umum Indeks Reformasi Birokrasi tersebut dapat dijadikan acuan pengembangan Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi lebih baik. Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi dapat ditingkatkan sejalan dengan perbaikan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Kutai Kartanegara secara umum.

2.4.2. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.

Penyusunan indikator Indeks Pelayanan Publik dihasilkan melalui persilangan antara 6 prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik (keadilan, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, berdaya guna, dan aksesibilitas) dengan 6 aspek penilaian kinerja instansi terhadap pelayanan publik (kebijakan pelayanan, sarana prasarana, konsultasi dan pengaduan, profesionalisme SDM, sistem informasi pelayanan publik, dan inovasi pelayanan).

Nilai akhir Indeks Pelayanan Publik dapat dianalisis dan dilakukan penyimpulan mengenai kondisi pelayanan publik di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Nilai akhir ini dijadikan dasar perbaikan pelayanan dimana Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dapat melihat aspek mana yang sudah baik dan aspek mana yang masih membutuhkan perbaikan. Capaian Indeks Pelayanan Publik dapat dibedakan dalam 9 (sembilan) kategori yaitu:

Tabel 2.79
Kategori Penilaian Indeks Pelayanan Publik

Range Nilai	Kategori	Keterangan
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
3,51 – 4,00	B	Baik
3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)
2,51 – 3,00	C	Cukup
2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)
1,51 – 2,00	D	Buruk
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
0 – 1,00	F	Gagal

Sumber: Kemenpan RB

Berdasarkan Kemenpan RB, menunjukkan bahwa Indeks Pelayanan Publik Nasional cenderung meningkat dari tahun 2020 hingga 2022. Terjadi peningkatan di tahun 2019 dengan nilai 3,63 yang menyebabkan kategori naik satu peringkat dari B- (Baik Dengan Catatan) menjadi B (Baik). Peningkatan terus berlanjut hingga tahun 2022 dengan nilai akhir 3,87 B (Baik). Kemudian diketahui sejak tahun 2020 rata-rata capaian Indeks Pelayanan Publik Provinsi Kalimantan timur berada pada kategori B- (Baik Dengan Catatan) dan B (Baik). Dengan ini sejak tahun 2020 rentang nilai Indeks Pelayanan Publik Provinsi Kalimantan Timur berada pada rentang 3,25 hingga 4,00. Data di bawah merupakan perkembangan Indeks Pelayanan Publik di Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 2.80
Indeks Pelayanan Publik Tingkat
di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dan Nasional,
2020-2023

Tahun	Kabupaten Kutai Kartanegara	Keterangan	Provinsi Kalimantan Timur	Keterangan	Nasional	Keterangan
2020	4,09	A- (Sangat Baik)	3,25	B- (Baik Dengan Catatan)	3,84	B (Baik)
2021	4,59	A (Pelayanan Prima)	3,90	B (Baik)	3,79	B (Baik)
2022	4,56	A (Pelayanan Prima)	4,00	B (Baik)	3,87	B (Baik)
2023	4,24	A- (Sangat Baik)	4,00	B (Baik)	n.a.	n.a.

Sumber: Kemenpan RB

Sementara itu Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki perkembangan Indeks Pelayanan Publik yang sangat positif jika dibandingkan dengan tingkat nasional dan provinsi. Dari data di atas diketahui bahwa rata-rata capaian Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Kutai Kartanegara setiap tahunnya selalu di atas Indeks Pelayanan Publik Nasional dan Indeks Pelayanan Publik Provinsi Kalimantan Timur.

Sejak tahun 2020 capaian Indeks Pelayanan Publik di Kabupaten Kutai Kartanegara cukup fluktuatif dan cenderung baik. Pada tahun 2020 Indeks Pelayanan Publik di Kabupaten Kutai Kartanegara berada pada nilai 4,09 (A,

Sangat Baik). Kemudian meningkat pada tahun 2021 dengan nilai 4,59 (A, Pelayanan Prima) dan tahun 2022 dengan nilai 4,56 (A, Pelayanan Prima). Namun terjadi sedikit penurunan pada 2023 dengan nilai 4,24 (A-, Sangat Baik). Rata-rata sejak 2020 hingga 2023 capaian Indeks Pelayanan Publik di Kabupaten Kutai Kartanegara pada kategori A (Pelayanan Prima) dan A- (Sangat Baik).

Beberapa data tersebut dapat menggambarkan bahwa tingkat pelayanan publik di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam kondisi perkembangan yang sangat baik setiap tahunnya. Nilai Indeks Pelayanan Publik yang selalu di kategori A (Pelayanan Prima) dan A- (Sangat Baik) menunjukkan bahwa kinerja di Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi sudah dalam kondisi prima.

2.4.3. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah adalah alat pengukuran yang digunakan untuk menilai tingkat inovasi dan kemajuan di suatu daerah, seperti negara bagian, provinsi, atau kota. Tujuan dari indeks ini adalah untuk mengukur sejauh mana suatu daerah telah berhasil dalam mengembangkan inovasi dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, pendidikan, teknologi, lingkungan, dan pelayanan publik. Indeks Inovasi Daerah membantu pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memahami dan mempromosikan inovasi dalam pembangunan daerah.

Indeks Inovasi Daerah memiliki nilai 0-100 dengan beberapa predikat kategori, nilai 0 menjadi terendah dengan kategori “Tidak Dapat Dinilai”. Nilai 0,01-34,99 masuk ke dalam kategori “Kurang Inovatif”. Nilai 35,00-60,00 masuk ke dalam kategori “Inovatif”. Serta rentang nilai 60,01-100,00 masuk ke dalam kategori “Sangat Inovatif”. Nilai dan predikat inilah yang digunakan sebagai rujukan sudah berhasilnya sebuah daerah mengembangkan inovasi di berbagai aspek di wilayahnya.

Berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri, Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki kondisi perkembangan yang baik. Pada 2019 indeks inovasi Kutai Kartanegara terkategori “sangat inovatif”, namun 2020 menurun menjadi “kurang inovatif”. Kemudian pada 2021-2023 meningkat kembali menjadi “inovatif”. Metodologi dalam penilaian Indeks Inovasi Daerah pada tahun 2019 dan 2020 diketahui berbeda dilihat dari rentang nilai akhir indeks. Kemudian pada tahun berikutnya diketahui

Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami kenaikan dengan rincian 2021 (41,38 predikat Inovatif), 2022 (55,53 predikat Inovatif), dan 2023 (58,53 predikat Inovatif).

Sementara untuk tingkat Provinsi Kalimantan Timur nilai Indeks Inovasi Daerah tiap tahunnya kadang berada di atas dan di bawah nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Namun dalam hal predikat, setiap tahunnya memiliki kesamaan khususnya sejak tahun 2021 Kabupaten Kutai Kartanegara dan Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan predikat “Inovatif” dalam hal Indeks Inovasi Daerah. Berikut adalah tabel Indeks Inovasi Daerah Kutai Kartanegara dan Provinsi Kalimantan Timur periode 2019-2022. Data di bawah merupakan capaian Indeks Inovasi Daerah tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara dan Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2.81
Indeks Inovasi Daerah
di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Provinsi Kalimantan Timur, 2019-2023

Tahun	Indeks Inovasi Daerah Kutai Kartanegara	Keterangan	Indeks Inovasi Daerah Kalimantan Timur	Keterangan
2019	4.970	Sangat Inovatif	190	Kurang Inovatif
2020	140	Kurang Inovatif	51	Kurang Inovatif
2021	41,38	Inovatif	44,19	Inovatif
2022	55,53	Inovatif	50,17	Inovatif
2023	58,53	Inovatif	-	-

Sumber: SK Menteri Dalam Negeri

Beberapa data tersebut dapat menggambarkan bahwa perkembangan inovasi di Kabupaten Kutai Kartanegara sudah sangat baik dan mampu bersaing dengan Provinsi Kalimantan Timur. Baiknya perkembangan Indeks Inovasi Daerah ini memberikan sebuah harapan tentang kemajuan inovasi di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, pendidikan, teknologi, lingkungan, dan pelayanan publik.

2.4.4. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Akhir tahun 2023 pemerintah mengeluarkan Perpres No 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Perpres No 82 Tahun 2023 ini dibentuk dengan semangat mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya dengan sistem pemerintahan terpadu berbasis elektronik. Perpres ini berperan sebagai dasar hukum penggunaan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam berbagai bidang. Mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, hingga layanan kepolisian yang terintegrasi. Perum Peruri berperan sebagai penanggungjawab penyelenggaraan aplikasi SPBE prioritas dalam Perpres ini didukung oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Hal tersebut merupakan tindak lanjut dalam rangka mendukung standarisasi kinerja pemerintah yang sebelumnya sudah ada yaitu Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah langkah revolusioner dalam transformasi birokrasi tradisional menuju ke efisiensi, transparansi, dan partisipasi yang lebih besar dari masyarakat. Sistem pemerintahan berbasis elektronik, juga dikenal sebagai *e-government*, merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk menyediakan layanan publik, memfasilitasi interaksi antara pemerintah dan warga, serta mengelola berbagai proses administratif dengan lebih efisien.

Sementara itu dalam menilai penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di suatu daerah muncul penilaian yaitu Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE di instansi pusat maupun pemerintah daerah, yang meliputi tingkat kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan berbasis elektronik. Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik ini dinilai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik memiliki beberapa tingkatan predikat yang dijadikan indikator perkembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di suatu daerah. Ada lima predikat yang diberikan kepada instansi pusat maupun instansi daerah yaitu memuaskan, sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Di bawah ini merupakan rentang nilai dan predikat dari Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Tabel 2.82
Kategori Penilaian Indeks SPBE

Range Nilai	Predikat
4,2 – 5,0	Memuaskan
3,5 – 4,2	Sangat Baik
2,6 – 3,5	Baik
1,8 – 2,6	Cukup
< 1,8	Kurang

Sumber: Kemenpan RB

Secara nasional Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sejak tahun 2019 berada dalam predikat yang sama yaitu “Cukup”. Secara rinci dapat diketahui bahwa Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik berada pada rentang 2,18 hingga 2,34. Berikut ini merupakan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik tingkat nasional.

Tabel 2.83
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tingkat Nasional, 2018-
2022

Tahun	Indeks SPBE Nasional	Keterangan
2019	2,18	Cukup
2020	2,26	Cukup
2021	2,24	Cukup
2022	2,34	Cukup
2023	2,54	Cukup

Sumber: Kemenpan RB

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki perkembangan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang cenderung naik turun sejak 2019. Pada 2019 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mencapai 2,21 (Cukup). Selanjutnya naik pada tahun 2020 (2,97 dengan predikat baik) dan tahun 2021 (2,48 dengan predikat baik). Sementara pada tahun 2022 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Kutai Kartanegara turun menjadi 1,94 dengan predikat “Cukup”. Data berikut merupakan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Kutai Kartanegara dan Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2.84
Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)
di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Provinsi Kalimantan Timur, 2019-2022

Tahun	Indeks SPBE Kabupaten Kutai Kartanegara	Keterangan	Indeks SPBE Provinsi Kalimantan Timur	Keterangan
2019	2.21	Cukup	3,04	Baik
2020	2.97	Baik	3,14	Baik
2021	2.48	Baik	2,22	Cukup
2022	1.94	Cukup	2,122	Cukup

Sumber: data.kaltimprov.go.id & 1data.menpan.go.id

Beberapa data tersebut dapat menggambarkan bahwa perkembangan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Kabupaten Kutai Kartanegara sudah sangat baik dan mampu bersaing dengan Provinsi Kalimantan Timur. Hal yang bisa dilakukan dalam upaya meningkatkan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik yaitu dengan mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta pelayanan publik berkualitas dan terpercaya. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam layanan administrasi pemerintahan juga dapat dilakukan demi terwujudnya Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik yang baik.

2.4.5. Jumlah ASN

Data jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun 2015 hingga 2023 menunjukkan tren penurunan yang konsisten. Pada tahun 2015, jumlah ASN tercatat sebanyak 16.529. Namun, pada tahun 2016, jumlah tersebut turun menjadi 16.126, menandakan pengurangan sekitar 403 ASN.

Tabel 2.85 Jumlah ASN
di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2015 - 2023

Tahun	Jumlah ASN
2015	16.529
2016	16.126
2017	14.915

Tahun	Jumlah ASN
2018	14.494
2019	14.015
2020	13.514
2021	13,487
2022	12,63
2023	12,63

Sumber : Kutai Kartanegara dalam Angka 2016-2024

Penurunan jumlah ASN terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2017, jumlah ASN berkurang cukup signifikan menjadi 14.915. Tren penurunan ini tetap berlanjut hingga tahun 2018 dengan jumlah ASN sebesar 14.494 dan tahun 2019 sebanyak 14.015. Pada tahun 2020, jumlah ASN turun lebih lanjut menjadi 13.514, menunjukkan penurunan yang konsisten setiap tahunnya.

Pada tahun 2021, jumlah ASN sedikit menurun menjadi 13.487, dan pada tahun 2022 jumlah ASN mencapai 12.63. Jumlah ini tetap stabil hingga tahun 2023. Penurunan yang berkelanjutan ini dapat menunjukkan berbagai faktor seperti pensiun, moratorium penerimaan ASN baru, atau efisiensi dalam birokrasi pemerintah daerah. Penurunan jumlah ASN ini mungkin juga mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam melakukan reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.

2.4.6. Jumlah Temuan BPK

Berikut disajikan data yang mencakup jumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun 2016 hingga 2022, serta persentase tindak lanjut terhadap temuan-temuan tersebut. Pada tahun 2016, jumlah temuan BPK tercatat sebanyak 1307, yang kemudian menurun menjadi 1143 pada tahun 2017. Pada tahun 2018, jumlah temuan kembali meningkat menjadi 1297, diikuti oleh peningkatan lebih lanjut pada tahun 2019 dan 2020 dengan jumlah masing-masing 1436 dan 1462 temuan. Puncak jumlah temuan terjadi pada tahun 2021 dengan 1530 temuan, sebelum akhirnya turun drastis menjadi 611 pada tahun 2022. Pada tahun 2023, jumlah temuan sedikit meningkat menjadi 640.

Tabel 2.86
Jumlah Temuan BPK dan Tindak Lanjut Temuan
di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2017 - 2022

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah temuan BPK	1307	1143	1297	1436	1462	1530	611	640
Persentase tindak lanjut temuan (%)	61,81	76,12	69,78	70,75	74,69	86,67	89,37	89,22
Hasil opini BPK	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara 2024

Sementara itu, persentase tindak lanjut temuan menunjukkan pola yang relatif meningkat. Pada tahun 2016, hanya 61,81 persen temuan yang ditindaklanjuti. Persentase ini meningkat signifikan menjadi 76,12 persen pada tahun 2017, namun sedikit menurun menjadi 69,78 persen pada tahun 2018. Pada tahun 2019, persentase tindak lanjut kembali meningkat menjadi 70,75 persen dan terus naik menjadi 74,69 persen pada tahun 2020. Peningkatan yang paling signifikan terlihat pada tahun 2021 dan 2022, di mana persentase tindak lanjut mencapai 86,67 persen dan 89,37 persen.

Interpretasi dari data ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah temuan BPK mengalami fluktuasi dan mencapai puncaknya pada tahun 2021, ada upaya yang konsisten dan semakin kuat dalam menindaklanjuti temuan-temuan tersebut. Peningkatan persentase tindak lanjut dari 61,81 persen pada tahun 2016 menjadi 89,22 persen pada tahun 2023 mencerminkan peningkatan efektivitas dan keseriusan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menangani rekomendasi dan temuan BPK. Hal ini menunjukkan komitmen yang lebih besar terhadap transparansi, akuntabilitas, dan perbaikan tata kelola pemerintahan di wilayah tersebut yang juga ditunjukkan dari hasil WTP dari opini BPK sejak tahun 2018 hingga 2023.

2.5 Evaluasi Hasil RPJPD 2005 – 2025

Dalam penyusunan RPJPD 2025-2045, analisis hasil evaluasi RPJPD periode sebelumnya (2005-2025) dibutuhkan sebagai acuan dasar bagi perencanaan ke depan. Temuan-temuan pada Evaluasi RPJPD 2005-2025

memberikan kesimpulan yang perlu ditindaklanjuti dalam RPJPD periode selanjutnya (2025-2045).

Berdasarkan Dokumen Evaluasi RPJPD 2005-2025, setidaknya terdapat tujuh kesimpulan umum terhadap pelaksanaan RPJPD 2005-2025 sebagai berikut.

- 1). Penyusunan RPJPD 2005-2025 ditujukan untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 600.2.1/1570/SJ tahun 2023 dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif.
- 2). Kinerja pembangunan pada setiap periode RPJMD menunjukkan bahwa nilai capaian tertinggi diraih pada periode 2011-2015. Di sisi lain, nilai terendah dicapai pada periode 2005-2010.
- 3). Perlu upaya peningkatan kinerja pada periode terakhir (2020-2025) agar mencapai nilai rata-rata capaian “sangat tinggi” (90 persen). Hal ini dikarenakan pencapaian pada dua tahun terakhir hanya menunjukkan angka capaian 86,23 persen.
- 4). Capaian kinerja pembangunan jangka panjang (dalam konteks misi) menunjukkan bahwa misi pertama meraih kinerja terendah. Di sisi lain, capaian tertinggi diraih oleh misi kedua tentang kemandirian.
- 5). Predikat kinerja RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana disinggung pada kesimpulan sebelumnya, termasuk dalam predikat “tinggi” (83,97 persen).
- 6). Salah satu faktor pendorong yang disimpulkan dalam evaluasi dua puluh tahun terakhir tersebut adalah adanya partisipasi masyarakat yang tinggi. Selain itu, juga dipengaruhi oleh faktor fokus pada pencapaian target pembangunan yang diraih oleh setiap OPD.
- 7). Faktor penghambat yang dapat dipetakan adalah ketidaksamaan pola kinerja antara periode pemerintahan setiap periode lima tahunan. Akhirnya, perbedaan kinerja tersebut menimbulkan perbedaan pencapaian di masing-masing periode.

Berdasarkan hasil Evaluasi RPJPD 2005-2025 tersebut, maka dapat diberikan beberapa catatan atas tindak lanjut kesimpulan tersebut sebagai mana poin-poin berikut ini.

- 1). Diperlukan konsistensi tema pembangunan antara mandat dari dokumen RPJPD dengan RPJMD lima tahunan, sehingga penilaian antara misi pada masing-masing periode dapat saling terintegrasi.
- 2). Kinerja masing-masing periode pemerintahan harus konsisten, agar ada kesesuaian dalam pemenuhan target yang telah ditetapkan, baik dalam

RPJPD maupun RPJMD. Secara khusus harus ada penekanan pada setiap kinerja Tim Perencanaan dan Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) di setiap sektor.

- 3). Capaian kinerja pada periode ke empat perlu ditingkatkan, karena belum mencapai target yang telah ditetapkan di dalam RPJMD 2021-2026.
- 4). Perlu diberikan apresiasi kepada sektor-sektor yang telah mencapai target kinerja jangka panjang. Hal ini mencakup sektor pertanian, industri, dan pariwisata. Selain itu, diperlukan pencermatan ulang untuk sektor-sektor yang masih belum mampu mencapai target yang ditetapkan, misalnya sektor pemerintahan.

Selain keempat arahan tindak lanjut di atas, secara khusus juga terdapat rekomendasi yang perlu menjadi acuan di bidang reformasi birokrasi dan tata kelola kelembagaan, bidang transformasi ekonomi, serta bidang pengembangan sektor ekonomi unggulan.

Untuk mengatasi tantangan dalam administrasi publik dan pelayanan masyarakat, terdapat beberapa rekomendasi yang saling terkait. Pertama, meningkatkan pemahaman aparatur tentang prinsip-prinsip *good governance* melalui pendidikan dan pelatihan. Hal ini akan memberikan landasan yang kuat dalam memperbaiki kualitas administrasi publik dan meningkatkan transparansi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik.

Selanjutnya, fasilitas publik yang kurang memadai perlu diperbaiki, hal ini akan mendukung keterjangkauan administrasi publik dan kualitas pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Dengan demikian, ketersediaan fasilitas yang memadai sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan.

Selain itu, solusi terkait adalah peningkatan kebebasan pers dan partisipasi politik. Mengeliminasi pembatasan yang tidak perlu dan mempromosikan kebebasan berekspresi serta akses yang berimbang terhadap informasi akan mendukung pengembangan lembaga-lembaga demokrasi yang kuat. Peningkatan partisipasi politik melalui program edukasi dan kampanye kesadaran politik juga akan membantu memperkuat demokrasi.

Dalam konteks informasi publik dan reformasi birokrasi, solusi yang terkait adalah memperbaiki pengumpulan (*collecting*) informasi yang kredibel dan membatasi pembatasan penyebaran informasi. Dukungan informasi yang jujur dan berimbang akan mendorong penguatan demokrasi. Sementara itu, komitmen pimpinan dalam reformasi birokrasi akan menjadi teladan dan mengarahkan konsep reformasi secara keseluruhan. Di sisi lain, perlu untuk

mengubah budaya birokrasi yang masih hierarkis dan struktural, agar pelayanan publik menjadi lebih responsif dan efisien.

Terakhir, tentang integritas penegak hukum. Kesadaran hukum masyarakat, ketimpangan ekonomi, dan ketidakadilan sosial adalah variabel yang saling terkait. Peningkatan integritas penegak hukum dan kesadaran hukum masyarakat akan membantu membangun dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap otoritas yang berwenang. Sementara itu, untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dan ketidaksetaraan sosial, akan menurunkan tensi ketegangan dalam masyarakat dan menciptakan kondisi masyarakat yang lebih stabil.

Berikut disajikan detail hasil evaluasi periode lima tahunan terkait dengan capaian arah kebijakan pada RPJPD Kutai Kartanegara 2005-2025.

Tabel 2.87
Hasil Evaluasi Periode Lima Tahunan terkait dengan
Capaian Arah Kebijakan pada RPJPD Kutai Kartanegara 2005-2025

Periodeisasi/Visi/Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Data Capaian	Target Capaian	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Pembulatan Capaian (%)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
			Awal Tahun Perencanaan	Akhir Tahun Perencanaan				Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Periodeisasi-2005-2010										
Visi :Terselenggaranya Pemerintahan Kabupaten yang Baik dan Bersih Berlandaskan Asas Keadila, Kesetaraan, Keragaman dan Demokrasi menuju terbentuknya masyarakat yang berkualitas, Maju,Mandiri dan Sejahtera										
Misi 1 : Pemberdayaan pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif) dan penegakan supremasi hukum	Tujuan :	Mewujudkan pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara yang baik, bersih, bertanggung jawab (profesional), taat asas (peraturan dan perundangan),menjunjung kesetaraan dan demokrasi.								
	sasaran	Mengembangkan sistem manajemen pemerintahan	Opini BPK terhadap LKPD Kukar	WDP	WTP	Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer)	0	0	-Belum memadainya kapasitas SDM dalam bidang pengelolaan keuangan daerah	

Periodeisasi/Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Pembulatan Capaian (%)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
									Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		yang lebih responsif, baik, bertanggung jawab, taat asas (peraturan perundang-undangan), menjunjung kesetaraan dan demokrasi agar terwujud pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance).							terutama terkait dengan aspek penatusahaan dan pelaporan keuangan daerah -Cepatnya perubahan yang terjadi dalam regulasi pengelolaan keuangan daerah sehingga seringkali daerah kurang responsif dalam mengantisipasi perubahan tersebut -Tidakadanya kesamaan struktur organisasi di tingkat Provinsi, Kabupaten hingga Kecamatan yang mengakibatkan terputusnya garis komando, sehingga sering terjadinya kesalahpahaman		

[illegible]

Periodeisasi/Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Pembulatan Capaian (%)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
				Faktor Penghambat	Faktor Pendorong						
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		diperbaharui (<i>nonrenewable resources</i>) kepada sumberdaya alam yang dapat diperbaharui (<i>renewable resources</i>).									
	sasaran	Pemerataan dan pertumbuhan ekonomi	Laju pertumbuhan sektor pertanian	n/a	0.52	3.37	648.08	100	Meningkatnya laju degradasi lingkungan yang meliputi sumber daya air, hutan dan lahan	Melaksanakan koordinasi lintas sektoral guna penanganan masalah degradasi lahan pertanian	Sangat Tinggi
			Laju pertumbuhan sektor industri	n/a	3.68	5.07	137.77	100		Penguatan sektor ekonomi informal, khususnya UMKM dan koperasi	Sangat Tinggi
			Laju pertumbuhan sektor perdagangan	n/a	8.1	11.61	143.33	100			Sangat Tinggi

Periodeisasi/Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Pembulatan Capaian (%)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
									Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah	n/a	3.375	4.19	124.15	100			Sangat Tinggi
			Rasio Gini	0.29	0.195	0.22	87.18	87.18	Kapasitas SDM yang masih rendah.	Program bantuan sosial yang dilaksanakan pemerintah daerah.	Tinggi
Misi 3 : Pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian sosial dan kemandirian ekonomi	Tujuan :	Menciptakan masyarakat yang berkualitas, maju, mandiri dan sejahtera									
	sasaran	Meningkatkan kapasitas SDM yang berkualitas dan meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintahan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71.27	72.81	72.89	100.11	100	- Masih rendahnya tingkat pendidikan, tergambar pada RLS dan HLS di Kukar '- Kondisi Geografis yang luas, menyebabkan akses anak usia sekolah dalam mendapat pendidikan formal kurang.	- keberhasilan pelaksanaan Program Peningkatan kesehatan dalam mendukung capaian derajat kesehatan, pembangunan Puskesmas, pelayanan	Sangat Tinggi

Periodeisasi/Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Pembulatan Capaian (%)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
									Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
									'- Masih banyak anak usia sekolah yang memilih bekerja daripada bersekolah, khususnya di daerah pedalaman yang banyak daerah pertambangan dan perkebunan	kesehatan di seluruh kabupaten, serta promosi PHBS - kontribusi PDRB sektor migas meningkatkan pendapatan daerah dan memberikan efek pada peningkatan pendapatan masyarakat	
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	n/a	74.12	67.65	91.27	91.27	-Perlu adanya pemberian bantuan dana modal usaha bagi para pencari kerja	-Pelaksanaan kegiatan Teknologi Tepat Guna dan Pelatihan	Sangat Tinggi
			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	n/a	7.53	11.53	46.88	46.88	atau tenaga pengagur yang telah dilatih agar dapat mengembangkan usaha mandiri mereka	Keterampilan bagi Pencari Kerja	Sangat Rendah
			Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	67.5	67.94	71.41	105.11	100	Belum tersedia secara merata dan lengkapnya sarana prasarana Kesehatan	- Penerapan pola hidup sehat yang membaik dan Semakin baiknya	Sangat Tinggi

[illegible]

Periodeisasi/Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Pembulatan Capaian (%)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
									Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Sasaran	Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya (%)	n.a	100	100	100	100	-	- Adanya program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan, program pelayanan administrasi perkantoran, serta program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.	Sangat Tinggi
		Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah	Tidak Memberikan Pendapat	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	100	100	-	- Adanya program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan daerah - - Meningkatnya kapasitas SDM dalam bidang pengelolaan keuangan daerah terutama terkait dengan aspek penatusahaan dan	Sangat Tinggi

Periodeisasi/Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Pembulatan Capaian (%)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
									Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										pelaporan keuangan daerah	
		Menurunnya tingkat pelanggaran hukum	Tingkat Pelanggaran Disiplin Pegawai (%)	9	2	2	100	100		- Adanya program peningkatan disiplin aparatur	Sangat Tinggi
		Meningkatnya tertib administrasi pemerintah dan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	100	100		- Memperbaiki sistem pelayanan dengan menetapkan Standar Pelayanan. - Peningkatan dan Perbaikan Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas Pelayanan - Peningkatan Jumlah dan Penataan penempatan personil Pelaksana	Sangat Tinggi
		Meningkatnya kerjasama pemerintah	Cakupan penanganan kamtibmas (%)	100	100	100	100	100	-	Peningkatan kesadaran masyarakat dan	Sangat Tinggi

Periodeisasi/Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Pembulatan Capaian (%)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
									Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		dengan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara								pemerintah serta peningkatan kepercayaan satu sama lain dalam menjaga ketertiban dan keamanan.	
		Meningkatnya kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana	Tingkat waktu tanggap (jam)	12	12	12	100	100	-	Peningkatan kesadaran dan pengetahuan, baik pemerintah maupun masyarakat terkait dengan mitigasi bencana.	Sangat Tinggi
		Meningkatnya kualitas manajemen pembangunan serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	Penilaian LAKIP	D	A	A	100	100	-	Adanya berbagai program, yaitu: - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Program Peningkatan Sarana dan	Sangat Tinggi

Periodeisasi/Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Pembulatan Capaian (%)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
									Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		pembangunan daerah								Prasarana Aparatur - Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH - Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa	

[illegible]

Periodeisasi/Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Pembulatan Capaian (%)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
									Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Sasaran	Meningkatnya mutu dan daya saing pendidikan serta pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan	Angka Melek Huruf (%)	96.87	98.98	98.98	100	100	- Kesadaran penduduk pada beberapa wilayah yang lebih menganggap bahwa bekerja lebih penting daripada pendidikan	- Adanya upaya untuk memberantas buta aksara dengan mengalokasikan anggaran keaksaraan fungsional untuk melaksanakan kejar paket A,B dan C	Sangat Tinggi
		Meningkatnya kualitas dan pemberdayaan masyarakat dalam perluasan pelayanan kesehatan serta pencegahan terhadap penyakit	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	67.93	68.49	71.6	104.5408089	100	- Kondisi geografis daerah merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pelayanan kesehatan masyarakat sulit untuk diakses secara merata di seluruh wilayah. - Belum tersedia secara merata dan lengkapnya sarana prasarana Kesehatan maupun SDM	- Penerapan pola hidup sehat yang membaik dan Semakin baiknya tingkat gizi masyarakat - Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan	Sangat Tinggi

Periodeisasi/Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Pembulatan Capaian (%)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
									Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
									Kesehatan di seluruh unit- unit layanan Kesehatan masyarakat		
		Meningkatnya ketersediaan sarana dan tenaga pelayanan kesehatan	Rasio Puskesmas dan jaringannya per satuan penduduk	0.3	0.5	0.55	110	100	-	- Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas kesehatan	Sangat Tinggi
		Meningkatnya tata kelola pelayanan kesehatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap unit layanan kesehatan	n.a	Baik	Baik	100	100	-	Pelaksanaan survei kepuasan pelanggan secara berkala, pemberian pemahaman terhadap pelaksanaan SOP, peningkatan layanan penyakit yang berkaitan dengan program global (MDG's), pelaksanaan pelayanan kebidanan yang berkualitas.	Sangat Tinggi

Periodeisasi/Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Pembulatan Capaian (%)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
									Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Menurunnya angka kemiskinan	Persentase penduduk miskin (%)	8.73	4.36	7.99	16.74	16.74311927	- Banyak penduduk yang mengalami penurunan pendapatan akibat dari dampak ekonomi global dan nasional	- Pemberian bantuan sosial bagi para penduduk miskin dan yang membutuhkan	Sangat Rendah
		Meningkatnya kualitas pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2	2	2	100	100	- sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelayanan KB masih kurang, alat kontrasepsi yang dijual belikan secara bebas dan bukan ditempat pelayanan kesehatan	- Mengajak dan meningkatkan peranserta masyarakat dalam penggerakan program KB - memberdayakan kader kesehatan, promosi dan pendataan - melakukan dan meningkatkan pelayanan KB paska persalinan serta penjangkaran akseptor KB	Sangat Tinggi
		Meningkatnya keberdayaan dan peran serta	LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat)	0	129	237	183.7209302	100			Sangat Tinggi

Periodeisasi/Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Pembulatan Capaian (%)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
									Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		masyarakat dalam pembangunan	Berprestasi (kelompok)								
		Meningkatnya wawasan seni dan budaya masyarakat serta peran serta masyarakat dalam melestarikan kebudayaan	Cakupan Fasilitasi Seni (%)	5	10	10	100	100	-	-Pemeliharaan benda situs cagar budaya - Penyelenggaraan festival seni budaya daerah - Adanya program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya dan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Sangat Tinggi
		Meningkatnya prestasi dan kreativitas pemuda dan olahraga	Jumlah prestasi tingkat nasional dan internasional	150	250	250	100	100	-	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.	Sangat Tinggi

Periodeisasi/Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Pembulatan Capaian (%)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
									Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		ekonomi kerakyatan									
	Sasaran	Meningkatnya perluasan kesempatan memperoleh pekerjaan	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	11.53	3.79	10.22	-69.65699208	0	- Kabupaten Kutai Kartangegara merupakan daerah terbuka yang diminati oleh para pencari kerja dari luar daerah, sehingga terjadi daya saing antara pekerja dalam daerah dan luar daerah untuk mencari pekerjaan	- Penyelenggaraan Pelatihan Peningkatan Kapasiltas Pemuda dalam berwisausaha yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga sebanyak 148 peserta, berupa Pelatihan Kewirausahaan Pemuda, Sekam Sharing, Pelatihan Penguatan Usaha dan Homesharing - Workshop penumbuhan minat wirausaha dan pelatihan penguatan usaha ditujukan untuk wirausaha muda	Sangat Rendah

Periodeisasi/Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Pembulatan Capaian (%)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
									Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										pemula, serta melakukan pendampingan melalui klinik WPM (Wirausaha Pemuda Mandiri) dalam mencari solusi dan peluang usaha yang dihadapi pemuda.	
		Optimalisasi kualitas dan peran BUMD, koperasi dan UMKM	Persentase koperasi aktif	61.27	97.73	97.73	100	100	-	- Adanya program peningkatan pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah (Identifikasi UKM Baru/Wira usaha baru) melalui koperasi - Terbangunnya usaha koperasi disemua tingkat kepengurusan	Sangat Tinggi

Periodeisasi/Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Pembulatan Capaian (%)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
									Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										yang mempunyai jejaring pengembangan usaha, pemasaran, distribusi, barang dan jasa, untuk meningkatkan hasil usaha demi kesejahteraan anggota.	
Misi 4 : Meningkatkan sumber-sumber pendapatan dan pengembangan potensi serta daya saing agribisnis, industri dan pariwisata	Tujuan	Meningkatkan ketahanan pangan melalui pengembangan potensi pertanian dalam arti luas dan kelautan perikanan yang didukung daya saing perdagangan, industri dan pariwisata daerah									
	Sasaran	Optimalisasi pemanfaatan	Persentase pertumbuhan							- Menggali potensi pajak dan retribusi	

Periodeisasi/Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Pembulatan Capaian (%)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
									Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		sumber-sumber pendapatan	pendapatan (%):							sesuai dengan Undang-Undang	Sangat Tinggi
			- Pajak	-30	103	103	100	100	-	dan Perda yang berlaku.	
			- Retribusi	-60	5	6	120	100	-	- Pendataan pajak	
			- Bagi hasil	50	10	10	100	100		- Pendataan pajak dan obyek retribusi - Penyediaan surat ketetapan pajak Daerah dan	
		Meningkatnya ketersediaan pangan	Ketersediaan pangan utama (%)	134	145	145	100	100	-	- Ketersediaan (Produksi) pangan utama cukup baik dan stabil - Distribusi / akses pangan utama yang baik -Kebijakan Pemerintah daerah dalam menjaga dan mendukung disparitas harga	Sangat Tinggi
		Meningkatnya produktivitas sektor pertanian dalam arti luas	Kontribusi sektor pertanian terhadap	7649525	13098234	10,757,614	82.13026581	82.13026581	-	Hampir 36 produksi padi Kalimantan Timur dihasilkan oleh	Tinggi

Periodeisasi/Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Pembulatan Capaian (%)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
									Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			PDRB (dlm juta rp)							Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain tanaman padi, ubi kayu juga merupakan komoditi unggulan yang dikembangkan oleh penduduk Kutai Kartanegara.	Sangat Tinggi
		Meningkatnya produksi tangkap nelayan dan perikanan budidaya	Produksi perikanan (ton)	120303.9	210535.3	210535.3	100	100	-	Terdapat komoditi andalan dengan nilai ekonomi yang cukup tinggi yang sudah dikembangkan dan dibudidayakan oleh masyarakat Kutai Kartanegara antara lain udang windu, kepiting, ikan patin, ikan betutu, serta berbagai macam jenis ikan tawar lainnya.	

Periodeisasi/Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Pembulatan Capaian (%)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
									Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Berkembangnya dan meningkatnya daya saing potensi perdagangan dan perindustrian	- Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (dlm juta rp)	1260109	2707133	3,458,151	127.7421833	100	-	Meningkatnya produksi kelapa sawit serta industri pengolahan kelapa sawit (CPO) cukup berperan dalam laju pertumbuhan ekonomi yang terjadi Kutai Kartanegara.	Sangat Tinggi
			- Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (dml juta rp)	2823709	6957452	3,361,189	48.31063297	48.31063297	- Kualitas produk lokal yang belum mampu bersaing di pasar global maupun nasional apalagi dibandingkan dengan produk- produk impor. Upaya yang telah dilakukan melalui peningkatan mutu produk. - Masih lemahnya pelaku usaha dalam membaca peluang pasar. Solusi yang		Sangat Rendah

[illegible]

Periodeisasi/Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Pembulatan Capaian (%)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
									Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		ekonomi dan sosial yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat.									
	Sasaran	Meningkatnya kualitas sarana prasarana pendukung aktivitas ekonomi	- Proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik (%)	10.45	13.74	13.74	100	100	Faktor alam yang tidak bisa diprediksi sebelumnya	Membuka keterisolasian di wilayah Kecamatan Tabang – Kembang Janggut – Kenohan sampai ke Kecamatan Kota Bangun dimana selama ini daerah tersebut hanya bisa diakses dari sungai belayan dan memerlukan biaya tinggi karena harus menggunakan kendaraan air, dalam kegiatan multy years tersebut panjang	Sangat Tinggi

Periodeisasi/Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Pembulatan Capaian (%)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
									Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										akses jalan sepanjang ± 178 km, dan beberapa jembatan beton.	
			Irigasi dalam kondisi baik (%)	39.06	74.55	74.55	100	100	- Kurang optimalnya tingkat layanan irigasi sebagai alat pendistribusian air ke areal persawahan yang disebabkan rusaknya saluran pembawa dan meningkatnya sedimen. - Kondisi sungai dan saluran pembuangan tidak dapat menampung debit air pada waktu curah hujan tinggi sehingga perlunya pengelolaan DAS secara lebih terpadu dan konseptual agar fungsi sumber air dapat dipertahankan	Pemenuhan alokasi dana untuk kegiatan tahun jamak (multiyears) bidang infrastruktur jalan dan jembatan, perhubungan, irigasi, pengairan, pendidikan dan kesehatan.	Sangat Tinggi

Periodeisasi/Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Pembulatan Capaian (%)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
									Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Rumah tangga pengguna air bersih (%)	35	60	60	100	100		Meningkatnya infrastruktur pelayanan dasar melalui pembangunan jaringan listrik, pengadaan mesin pembangkit listrik, pembangunan jaringan telekomunikasi desa, pembangunan jaringan air bersih desa.	Sangat Tinggi
			Persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik (%)	48 (159.757 KK)	65	65	100	100		Meningkatnya infrastruktur pelayanan dasar melalui pembangunan jaringan listrik, pengadaan mesin pembangkit listrik, pembangunan jaringan	Sangat Tinggi

Periodeisasi/Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Pembulatan Capaian (%)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
									Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										telekomunikasi desa, pembangunan jaringan air bersih desa.	
Misi 6: Menetapkan penyelenggaraan pembangunan berwawasan lingkungan dan pelestarian sumber daya alam	Tujuan	Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang baik dan terpadu sesuai penataan ruang dengan mengembangkan kearifan lokal									
	Sasaran	Meningkatnya pencegahan pencemaran lingkungan/peru sakan lingkungan serta pertumbuhan sektor kehutanan	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal (%)	100	100	100	100	100		- Pengembangan pelaksanaan Amdal bagi perusahaan yang memberikan dampak besar dan penting serta pengembangan UKL/UPL bagi perusahaan-	Sangat Tinggi

Periodeisasi/Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Pembulatan Capaian (%)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
									Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										perusahaan yang tidak wajib Amdal. - Monitoring RKL/RPL ke perusahaan-perusahaan yang berbeda dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, serta memberikan teguran dan arahan dalam rangka pembinaan. - Melibatkan masyarakat dalam pembahasasn Dokumen Amdal. - Melaksanakan kegiatan Peringatan Hari Lingkungan Hidup serta mengikuti Pameran Lingkungan di Jakarta. - Mengikuti	

Periodeisasi/Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Pembulatan Capaian (%)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
									Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										Program Bangun Praja yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2009/2010 untuk kategori kota kecil.	
		Meningkatnya kualitas penataan ruang	Informasi Tata Ruang	Belum Ada	Ada	Ada	100	100		- Menyiapkan pranata pelaksanaan penataan ruang. - Pembangunan infrastruktur berbasis penataan ruang untuk mendukung pusat-pusat produksi.	Sangat Tinggi
		Meningkatnya potensi dan konservasi sumber daya hutan	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (%)	0,64% (536 Ha)	7,04% (5.928 Ha)	7,04% (5.928 Ha)	100	100		Adanya program rehabilitasi hutan dan lahan	Sangat Tinggi

Periodeisasi/Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Pembulatan Capaian (%)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
									Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Misi 7 :Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan	Tujuan	Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan dan perlindungan anak									
	Sasaran	Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	60.07	65	72.22	111.1076923	100		Angka harapan hidup perempuan lebih meningkat	Sangat Tinggi
			Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)	55	90	90	100	100		Adanya program dan bertambahnya kegiatan yang dilakukan oleh Badan KB, PP dan PA serta makin maksimalnya lembaga P2TP2A dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga banyak masyarakat melaporkan tentang kekerasan	Sangat Tinggi

Periodeisasi/Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Data Capaian	Target Capaian	Realisasi Akhir	Capaian Kinerja	Pembulatan	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Capaian		Keterangan
				Awal Tahun Perencanaan	Akhir Tahun Perencanaan				Periode	RPJMD	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										perempuan dan anak dilembaga tersebut dan adanya kerjasama dengan pihak pihak terkait dalam penanganan kasus kekerasan	
Rata-Rata Capaian Kinerja Periode 2010-2015								90.95			
Predikat Kinerja								Sangat Tinggi			
Periodeisasi 2016-2021											
Visi: TERWUJUDNYA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA, DAN BERKEADILAN											
Misi 1 : Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat	Tujuan	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dan melayani	Indeks Reformasi birokrasi	66.78	n/a	70.2					
	Sasaran	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Predikat Akuntabilitas Kinerja	n/a	81.00	65.6	80.99	80.99	- Belum optimalnya pelaksanaan dan pengintegrasian penggunaan aplikasi SIMRAL ddengan	- Pemanfaatan aplikasi manajemen kinerja sudah optimal dalam proses monitoring	Tinggi

Periodeisasi/Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Pembulatan Capaian (%)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
				Faktor Penghambat	Faktor Pendorong						
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
									aplikasi internal di Kabupaten Kutai Kartanegara - Masih terdapat ketidak selarasan pada dokumen perencanaan tingkat kabupaten dengan dokumen perencanaan tingkat kabupaten dengan dokumen perencanaan tingkat perangkat daerah - Pencapaian kinerja perangkat daerah tidak seluruhnya berkontribusi terhadap capaian kinerja pemerintah daerah - Pemanfaatan aplikasi manajemen kinerja belum optimal, baik dalam proses pengintegrasian sistem	dan evaluasi terutama dalam upaya meningkatkan kualitas pengumpulan data kinerja - Dalam upaya peningkatan SDM yang menangani SAKIP telah dilakukan melalui Diklat LKjIP dengan bekerjasama dengan pihak Universitas Gajah Mada	

Periodeisasi/Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Pembulatan Capaian (%)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
									Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
									maupun sebagai sarana monitoring dan evaluasi, serta belum adanya pelaksanaan pemberian rewards and punishment atas capaian kinerja - Kurang optimalnya Diklat LKjIP yang bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada karena kendala Covid-19 sehingga terlaksana secara daring sehingga terkendala teknis.		
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks Persepsi Korupsi	5.75	6.90	6.37	92.32	92.32	- Peran program pengendalian korupsi yang memerlukan banyak dukungan dan koordinasi dari banyak pemangku kepentingan baik di internal dan eksternal pemerintah Kabupaten	- Adanya identifikasi titik rawan korupsi baik di tingkat pusat maupun daerah - Adanya pernyataan dan penandatanganan Komitmen	Sangat Tinggi

Periodeisasi/Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Pembulatan Capaian (%)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
									Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
									Kutai Kartanegara - Koordinasi dan sosialisasi kepada stakeholder masih rendah sehingga kesadaran anti korupsi juga masih rendah	Pemberantasan Korupsi Terintegrasi oleh Kepala Daerah - Penyusunan dan Penetapan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah - Adanya monitoring dan Evaluasi Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi.	
		Meningkatnya pelayanan publik pemerintahan daerah	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Komponen Penilaian RB)	n/a	8.75	9.18	104.91	100	- Kondisi geografis Kabupaten Kutai Kartanegara yang sangat luas dan belum meratanya kualitas jaringan di setiap wilayah menjadi	- Adanya komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan meluncurkan program prioritas	Sangat Tinggi

Periodeisasi/Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Pembulatan Capaian (%)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
									Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
									penghambat dalam penerapan pelayanan publik secara online - Belum meratanya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait pemanfaatan layanan online - Masih terbatasnya pengetahuan dari perangkat daerah tentang bagaimana bentuk, cara membuat dan menyusun serta menerapkan standar pelayanan - Kebiasaan perangkat daerah yang sudah terbentuk lama terkadang tidak sesuai dengan standar pelayanan, sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan	yaitu Program Disapa (Program Digitalisasi Pelayanan) - Adanya inovasi berupa pelayanan online dalam upaya menghadirkan pelayanan yang murah, mudah, dan cepat kepada maysarakat selama pandemi Covid-19	

Periodeisasi/Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Data Capaian	Target Capaian	Realisasi Akhir	Capaian Kinerja	Pembulatan	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Capaian		Keterangan
				Awal Tahun Perencanaan	Akhir Tahun Perencanaan				Periode	RPJMD	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Misi 2 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkompeten	Tujuan :	Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing dan berakhlak mulia	IPM	72.19	n/a	73.75		0			
	Sasaran	Meningkatnya Kualitas Pendidikan mayarakat	Rata-Rata Lama Sekolah	8.68	9.41	9.23	98.09	98.09	- Kesadaran penduduk di wilayah tertentu yang lebih mementingkan bekerja dan cari uang (pada daerah-daerah perkebunan sawit dan kampung nelayan) dari pada bersekolah - Belum akuratnya data pendidikan penduduk pada dokumen kependudukan (Kartu keluarga tidak pernah diupdate riwayat pendidikannya - Kondisi geografis sebagian wilayah	- Sudah tersedianya lembaga pendidikan jenjang pada setiap desa - Berdirinya sanggar kegiatan belajar (SKB) baru di 8 kecamatan sebagai upaya pengentasan putus sekolah - Adanya pembebasan biaya pendidikan sampai jenjang pendidikan menengah (SMA) - Adanya beasiswa bagi mahasiswa	Sangat Tinggi
			Harapan Lama Sekolah	13.25	13.91	13.6	97.77	97.77			Sangat Tinggi

Periodeisasi/Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Pembulatan Capaian (%)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
									Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
									Kutai Kartanegara sulit dijangkau	Kutai Kartanegara dalam upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia - Semakin terbukanya akses jalan sehingga memudahkan warga untuk menempuh pendidikan	Sangat Tinggi
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	71.6	71.83	72.64	101.13	100	- Kondisi geografis Kabupaten Kutai Kartanegara, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pelayanan kesehatan masyarakat sulit untuk diakses secara merata di seluruh wilayah. - Belum tersedia secara merata dan lengkap sarana	- Semakin baiknya tingkat gizi masyarakat, serta penerapan pola hidup sehat membuat peningkatan status kesehatan masyarakat - Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, berupa sarana dan	

Periodeisasi/Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Pembulatan Capaian (%)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
									Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
									prasarana Kesehatan maupun SDM Kesehatan di seluruh unit- unit layanan Kesehatan masyarakat	prasarana kesehatan baik di Rumah sakit sampai dengan puskesmas yang tersebar di kecamatan, kelurahan dan desa	
		Menurunkan jumlah pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	n/a	4.96	5.66	85.89	85.89	- Pandemi COVID-19, yang berimbas melemahnya kondisi perekonomian nasional dan daerah dan menurunnya volumen produksi pertambangan batu bara, sehingga terdapat beberapa kebijakan efisiensi yang dilakukan oleh perusahaan yang mengakibatkan meningkatnya pemutusan hubungan kerja.	- Penyelenggaraan Pelatihan Peningkatan Kapasiltas Pemuda dalam berwisausaha yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga sebanyak 148 peserta, berupa Pelatihan Kewirausahaan Pemuda, Sekam Sharing, Pelatihan Penguatan Usaha dan Homesharing - Workshop	Tinggi

Periodeisasi/Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Pembulatan Capaian (%)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
									Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
									- Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan daerah terbuka yang diminati oleh para pencari kerja dari luar daerah, sehingga pendataan terhadap angkatan kerja Kabupaten Kutai Kartanegara senantiasa meningkat yang tidak hanya dari penduduk lokal namun juga dari pendatang.	penumbuhan minat wirausaha dan pelatihan penguatan usaha ditujukan untuk wirausaha muda pemula, serta melakukan pendampingan melalui klinik WPM (Wirausaha Pemuda Mandiri) dalam mencari solusi dan peluang usaha yang dihadapi pemuda.	
		Meningkatnya pengentasan kemiskinan	Persentase Tingkat Kemiskinan	7.63	6.63	7.99	79.49	79.49	- Penurunan pendapatan yang dialami oleh hampir seluruh lapisan masyarakat. - Program-program kurang mengarah pada akar permasalahan	- Pemberian bantuan sosial bagi para penduduk miskin - Pemberian bantuan Sosial bagi penyandang disabilitas	Tinggi

Periodeisasi/Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Pembulatan Capaian (%)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
									Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
									kemiskinan Kabupaten Kutai Kartanegara terlebih saat ini perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami goncangan oleh karena menurunnya produksi komoditas migas dan batu bara.		
Misi 3 : Meningkatkan Pembiayaan Pembangunan Daerah	Tujuan :	Meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui daya tarik investasi	Derajat Otonomi Fiskal	6.08%	n/a	11.34%					
	Sasaran	Meningkatnya daya saing investasi daerah	Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA & PMDN)	1.52	1.98	2.01	101.52	100	-	- Kutai Kartanegara memiliki posisi strategis sebagai bagian dari Ibu Kota Negara Baru - Potensi sumberdaya alam yang dimiliki Kabupaten Kutai	Sangat Tinggi

Periodeisasi/Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Pembulatan Capaian (%)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
									Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										Kartanegara mendorong meningkatnya pertumbuhan investasi, baik dari sektor pertambangan dan perkebunan - Ketersediaan sarana prasarana, dalam menjalankan usaha turut meningkatkan pertumbuhan investasi - Regulasi dibidang investasi, stabilitas politik, dan kondisi sosial budaya merupakan faktor pendorong iklim investasi di Kabupaten Kutai Kartanegara. - Pelayanan	

Periodeisasi/Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Pembulatan Capaian (%)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
									Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dalam menerbitkan izin usaha oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) dalam mendukung kemudahan berinvestasi di Kab. Kutai Kartanegara	
		Meningkatnya kemandirian pembiayaan pembangunan	Tingkat Pertumbuhan PAD	-15.69	10.61	56.97	536.95	100	-	- Melakukan Pemetaan dan pengaturan sumber- sumber penerimaan daerah dan berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah - Membangun interaksi dan kerjasama dengan pihak-pihak yang dapat	Sangat Tinggi

Periodeisasi/Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Pembulatan Capaian (%)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
									Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										meningkatkan pendapatan daerah - Membangun sarana prasarana yang berorientasi kepada pendapatan daerah - Melakukan pengembangan sistem administrasi pajak daerah, melalui inovasi pajak online "Si Pajol Batijak".	
Misi 4 : Meningkatkan Pengelolaan Pertanian dan Pariwisata untuk percepatan Transformasi	Tujuan :	Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis sektor unggulan daerah	LPE (Non Migas dan Batu Bara)	1.73	n/a	6.11					
Struktur Ekonomi Daerah	Sasaran	Meningkatnya produktivitas, tata kelola dan pertumbuhan	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	2.34	7.16	1.06	14.80	14.80	- Sektor pertanian yang dimiliki Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki	- Adanya Sungai Mahakam yang menjadi salah satu	Sangat Rendah

Periodeisasi/Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Pembulatan Capaian (%)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
									Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		sektor pertanian dalam arti luas							potensi yang sangat besar, namun belum mendapat perhatian yang maksimal, sehingga hasil yang diperoleh masih rendah, harus ada fokus apa yang akan pemerintah lakukan untuk meningkatkan PDRB sektor pertanian, dengan melibatkan semua komponen baik pemerintah maupun masyarakat - Potensi sektor pertambangan yang dimiliki Kabupaten Kutai Kartanegara, masih merupakan magnet terbesar jika dibandingkan dengan sektor pertanian. - Adanya alih fungsi	pemasok air untuk pertanian	

Periodeisasi/Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Pembulatan Capaian (%)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
									Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
									lahan pertanian terutama di wilayah perkotaan juga mempengaruhi pertumbuhan sektor pertanian, serta masih besarnya lahan pertanian yang sementara tidak diusahakan. - Regenerasi pelaku usaha bidang pertanian yang rendah, karena pelaku usaha pertanian masih di dominasi generasi tuan dan masih rendahnya minat generasi muda untuk berusaha di sektor pertanian. - Belum adanya sistem irigasi yang terintegrasi dengan baik		

Periodeisasi/Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Pembulatan Capaian (%)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
									Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Meningkatnya daya dukung sektor pariwisata dan budaya daerah	Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	6.65	7.97	2.72	34.13	34	Kondisi pandemi Covid-19 dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berimpas pada sektor pariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara	- Pembangunan infrastruktur yang mulai digalakkan untuk mendukung aksesibilitas wilayah dan sebagai upaya pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa - Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan akan menjadi salah satu destinasi wisata penduduk IKN	Sangat Rendah
		Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat	Indeks Gini	0.27	0.269	0.283	94.80	94.80	- Kondisi pandemi Covid-19 dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mempengaruhi besarnya pendapatan terutama untuk kelompok menengah	- Meningkatnya persentase pengeluaran/ daya beli kelompok penduduk 40% terbawah. - Kenaikan angka kemiskinan diupayakan	Sangat Tinggi

Periodeisasi/Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Pembulatan Capaian (%)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
									Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
									kebawah yang tidak memiliki penghasilan tetap.	dikendalikan dengan adanya program perlindungan sosial pemerintah yang digulirkan selama masa pandemi Covid-19.	
Misi 5: Meningkatkan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Menuju Daya Saing Daerah	Tujuan :	Menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah	Indeks Kesenjangan Wilayah/Indeks Williamson (Non Migas)	0.33		0.26					
		Meningkatnya aksesibilitas antar dan inter wilayah	Cakupan aksesibilitas antar wilayah	77.8	77	82.69	107.39	100	- Wilayah Kutai Kartanegara yang sangat luas, menyulitkan untuk pemerataan pembangunan, terutama di peningkatan kualitas infrastruktur jalan	- Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan seperti fasilitas penerangan jalan umum secara umum meningkat.	Sangat Tinggi
Misi 6 : Meningkatkan Pengelolaan Sumber	Tujuan :	Meningkatkan daya saing	Indeks Kualitas	67.79		69.67					

Periodeisasi/Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Pembulatan Capaian (%)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
									Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Daya Alam yang berkelanjuta dan Berwawasan Lingkungan		potensi SDA yang berkelanjutan	Lingkungan Hidup								
	Sasaran	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Status pencemaran air sungai	49.5	56.78	52.98	93.31	93.31	- Adanya aktivitas manusia di sekitar sungai dari buangan kotoran manusia/ hewan, limbah rumah tangga misalnya pembuangan sampah organik dan pembuangan sisa sabun dan limbah rumah tangga lainnya - pengawasan terhadap pola perilaku masyarakat yang bermukim di bantaran sungai masih sangat sulit dilaksanakan	- Adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah untuk menganggulangi pencemaran air sungai	Sangat Tinggi
			Status pencemaran udara	76.63	95.48	91.69	96.03	96.03	- Kebakaran hutan yang sering terjadi pada musim kemarau	- Adanya kegiatan sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Sangat Tinggi

Periodeisasi/Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Pembulatan Capaian (%)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
									Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										(KARHUTLAH) dan Penanaman Pohon	
			Tutupan Lahan	59.99	59.99	70.89	118.17	100	- Adanya alih fungsi lahan yang menyebabkan penurunan tutupan lahan	- Adanya program- program peneingkatan kualitas lingkungan hidup, seperti diantaranya program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI) - Memperbanyak Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik, seperti taman kota, taman keanekaragaman hayati, dan penanaman tanaman perindang	Sangat Tinggi

Periodeisasi/Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Pembulatan Capaian (%)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
									Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										jalan yang efektif menyerap polutan udara	
Misi 7 : Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan serta penguatan perlindungan anak	Tujuan :	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	77.88%		80.09%					
		Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	n/a	63.9	62.76	98.22	98.22	- Kurang efisiennya penggunaan sumber daya anggaran untuk mewujudkan program-program pemberdayaan gender, seperti program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, program perlindungan perempuan, program penemuan hak anak (PHA), serta program perlindungan khusus anak. - Adanya diskriminasi	- Adanya peraturan daerah Nomor 22 tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan dengan tujuan untuk memberikan acuan dalam menyusun strategi dengan memerhatikan kesetaraan gender	Sangat Tinggi

Periodeisasi/Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Data Capaian	Target Capaian	Realisasi Akhir	Capaian Kinerja	Pembulatan	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Capaian		Keterangan
				Awal Tahun Perencanaan	Akhir Tahun Perencanaan				Periode	RPJMD	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
									gender dalam pasar tenaga kerja		
Rata-Rata Capaian Kinerja Periode 2016-2021								86.99			
Predikat Kinerja								Tinggi			
Periodeisasi-2021-2026											
Visi : MEWUJUDKAN MASYARAKAT KUTAI KARTANEGARA YANG SEJAHTERA DAN BERBAHAGIA											
Misi 1 :Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani	Tujuan :	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani									
		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	NILAI SAKIP	66.35	66.89	67.4	100.76	100		- Dukungan Kebijakan penyediaan dana untuk realisasi anggaran - Komitmen dari seluruh stakeholder dalam rangka pelaksanaan	Sangat Tinggi

Periodeisasi/Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Pembulatan Capaian (%)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
									Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										Reformasi Birokrasi - Perbaikan mekanisme dan proses perencanaan pembangunan yang berorientasi pada hasil - Semakin meningkatnya kapabilitas APIP	
		Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks Persepsi Anti Korupsi	8.17	6.25	8.38	134.08	100		- Identifikasi titik rawan korupsi baik di tingkat pusat maupun daerah; - Pernyataan dan Penandatanganan Komitmen Pemberantasan Korupsi Terintegrasi oleh Kepala Daerah; - Penyusunan dan Penetapan Rencana Aksi Pemberantasan	Sangat Tinggi

Periodeisasi/Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Pembulatan Capaian (%)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
									Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah; dan - Monitoring dan Evaluasi Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi.	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	9.07	8.85	9.81	110.85	100		- Adanya komitmen dan atensi dari kepala daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan meluncurkan program prioritas yaitu Program Disapa (Program Digitalisasi Pelayanan). - Masih terbatasnya pengetahuan dari perangkat daerah	Sangat Tinggi

Periodeisasi/Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Pembulatan Capaian (%)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
									Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										tentang bagaimana bentuk, cara membuat dan menyusun serta menerapkan standar pelayanan. - Kebiasaan perangkat daerah yang sudah terbentuk lama terkadang tidak sesuai dengan standar pelayanan, sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan.	
Misi 2 : Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya	Tujuan :	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing									
	Sasaran	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Ketahanan Sosial	Indeks Pendidikan	0.685	0.69	0.687	99.13	99.13	- Kondisi geografis sebagian wilayah Kutai Kartanegara yang sulit dijangkau,	- Sudah tersedianya lembaga pendidikan jenjang	Sangat Tinggi

Periodeisasi/Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Pembulatan Capaian (%)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
									Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		dan Pelestarian Kebudayaan							juga mempengaruhi masyarakat dalam mengakses pendidikan. - Masih rendahnya kesadaran penduduk di wilayah tertentu terutama pada wilayah perkebunan dan kampung nelayan untuk bersekolah/ kuliah, masyarakat lebih mementingkan bekerja dan mencari uang untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.	pada setiap desa - Adanya pembebasan biaya pendidikan sampai jenjang pendidikan menengah dan adanya beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa Kutai Kartanegara dalam upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia	
			Indeks Pembangunan Kebudayaan	n.a	50.00	47.42	94.84	94.84	Penurunan minat terhadap kebudayaan asli setempat.	- Terkait pembangunan kebudayaan adanya prioritas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam	Sangat Tinggi

Periodeisasi/Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Pembulatan Capaian (%)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
									Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										meningkatkan kualitas pembangunan kebudayaan. Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki banyak warisan budaya tak benda yang sudah ditetapkan secara nasional. - Situasi kerukunan umat beragama, suku, ras, dan golongan di wilayah ini juga sangat baik, bahkan belum pernah terjadi konflik yang eskalatif. - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat mendorong	

Periodeisasi/Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Pembulatan Capaian (%)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
									Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										lahirnya pelaku seni yang menjadikan kesenian sebagai sumber penghasilan utama dengan memberi pelatihan, sponsorship, publikasi, hingga promosi. - Peningkatan minat baca dengan menyediakan beragam buku bacaan, pustakawan, dan sarana prasarana penunjang di tiap perpustakaan kecamatan, kelurahan, dan desa.	
		Meningkatnya Kualitas Layanan	Indeks Kesehatan	0.81	0.81	0.81	99.86	99.86	- Kondisi geografis Kabupaten Kutai	- Perbaikan sarana prasarana	Sangat Tinggi

Periodeisasi/Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Pembulatan Capaian (%)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
									Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Kesehatan Masyarakat							Kartanegara, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pelayanan kesehatan masyarakat susah untuk diakses secara merata di seluruh wilayah. - Belum tersedia secara merata dan lengkapnya sarana prasarana Kesehatan maupun SDM Kesehatan di seluruh unit- unit layanan Kesehatan masyarakat	Kesehatan dengan membangun dan memperbaiki kondisi Bangunan Puskesmas di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. - Kunjungan Dokter Spesialis ke Puskesmas- puskesmas di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. - Menambahkan indikator kinerja tambahan terlaksananya koordinasi konvergensi penurunan stunting di kabupaten, dan indikator kinerja	

[illegible]

Periodeisasi/Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Pembulatan Capaian (%)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
									Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		kesejahteraan masyarakat									
	Sasaran	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat	Indeks Gini	0.283	0.29	0.269	107.24	100	- Kesempatan yang tidak sama bagi masyarakat untuk mengakses pendidikan dan kesehatan. - Pasar tenaga kerja yang tidak seimbang, yakni pekerja informal bergaji sangat minim, sedangkan pekerja formal memiliki gaji 'selangit'. - Distribusi kekayaan yang tidak merata.	- Pengentasan kemiskinan ekstrem, salah satunya melalui inovasi Rumah Besar - Penanggulangan Kemiskinan - Pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi di luar panti	Sangat Tinggi
			Indeks Desa Membangun	0.713	0.705	0.7465	105.89	100	- Sebagian kecil kepala desa yang enggan meningkat/berubah status desanya	- Tersedianya pendamping desa baik dari Kementerian Desa	Sangat Tinggi

Periodeisasi/Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Pembulatan Capaian (%)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
									Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
									dikarenakan ada ketakutan pengurangan anggaran desa. - Kondisi geografik Kabupaten Kutai Kartanegara yang sangat luas juga mempengaruhi pemerataan pembangunan seperti masih minimnya akses internet, layanan Kesehatan bagi desa- desa tertinggal. - Kurangnya pemahaman Kepala Desa tentang Teknis Pengisian Form kuisioner penilaian indeks desa membangun terutama terkait dengan kondisi sarana prasarana yang dimiliki desa.	dan Kabupaten - Adanya kesadaran pemerintah desa terkait prestasi kinerja pemerintah desa dalam pencapain status desa. - Adanya reward yang diberikan oleh pemerintah pusat bagi desa	

Periodeisasi/Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Data Capaian	Target Capaian	Realisasi Akhir	Capaian Kinerja	Pembulatan	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Capaian		Keterangan
				Awal Tahun Perencanaan	Akhir Tahun Perencanaan				Periode	RPJMD	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Menurunnya pengangguran di masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka	5.66	4.94	4.14	116.19	100	- Pandemi COVID-19, yang berimbas melemahnya kondisi perekonomian nasional dan daerah dan menurunnya volumen produksi pertambangan batu bara, sehingga terdapat beberapa kebijakan efisiensi yang dilakukan oleh perusahaan yang mengakibatkan meningkatnya pemutusan hubungan kerja. - Kabupaten Kutai Kartangegara merupakan daerah terbuka yang diminati oleh para pencari kerja dari luar daerah, sehingga pendataan terhadap angkatan	- Pendanaan yang memadai untuk pelaksanaan workshop dengan metode full cost, menjadi faktor yang menarik antusias minat peserta pelatihan. - Kerjasama yang dibangun dengan balai-balai pelatihan yang terakreditasi dan instruktur berpengalaman. - Biaya pelatihan berbasis kompetensi relatif cukup tinggi, sehingga belum maksimal dilaksanakan sesuai dengan	Sangat Tinggi

Periodeisasi/Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Pembulatan Capaian (%)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
									Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
									kerja Kabupaten Kutai Kartanegara senantiasa meningkat yang tidak hanya dari penduduk lokal namun pula dari pendatang.	kebutuhan ketenagakerjaan.	
			PDRB Per Kapita	241.7	187.21	254.5	135.94	100	- Peranan komponen konsumsi rumah tangga di PDRB yang tercatat relatif kecil dengan kontribusi rata-rata kurang dari 10 persen dalam 10 tahun terakhir. - Pandemi Covid-19 yang melemahkan aktivitas perekonomian Indonesia pada umumnya dan kabupaten Kutai Kartanegara pada khususnya	Berkembangnya berbagai sektor yang berperan dalam peningkatan PDRB per kapita.	Sangat Tinggi

Periodeisasi/Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Data Capaian	Target Capaian	Realisasi Akhir	Capaian Kinerja	Pembulatan	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Capaian		Keterangan
				Awal Tahun Perencanaan	Akhir Tahun Perencanaan				Periode	RPJMD	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Misi 3 : MEMPERKUAT PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS PERTANIAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Tujuan :	Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Terbaru									
		Meningkatnya pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan daerah	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.02	5.69	1.91	33.57	33.57	- Adanya alih fungsi lahan pertanian terutama di wilayah perkotaan juga mempengaruhi pertumbuhan sektor pertanian, serta masih besarnya lahan pertanian yang sementara tidak diusahakan. - Regenerasi pelaku usaha bidang pertanian yang rendah, karena pelaku usaha pertanian masih di dominasi generasi tuan dan masih rendahnya minat generasi muda	Produksi sebagian besar komoditas pertanian, perkebunan dan perikanan di Kabupaten Kutai Kartanegara lebih tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur.	Sangat Rendah

Periodeisasi/Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Pembulatan Capaian (%)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
									Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
									untuk berusaha di sektor pertanian.		
		Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	2.72	2.34	3.74	159.83	100	Pandemi Covid-19.	Semakin tingginya kesadaran kelompok masyarakat dalam upaya mengembangkan potensi lingkungannya menjadi objek wisata.	Sangat Tinggi
		Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	6.23	6.11	6.96	113.91	100		- Ktersediaan tenaga kerja yang dimiliki - Terbukanya kesempatan bagi mereka untuk berkreasi didukung dengan kemajuan teknologi yang dimiliki, kemudahan dalam akses komunikasi	Sangat Tinggi

Periodeisasi/Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Pembulatan Capaian (%)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
									Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										- Perkembangan media sosial	
		Meningkatnya daya saing investasi daerah	Tingkat Pertumbuhan Investasi	1.69	1.71	90.63	5300	100		- Kutai Kartanegara memiliki posisi strategis sebagai salah satu bagian dari Ibu Kota Negara baru, dengan bentangan daratan dan perairan yang menyimpan berbagai potensi sumber daya alam, serta alur Sungai Mahakam yang menjadi poros ekonomi - Potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Kutai Kartanegara mendorong meningkatnya pertumbuhan	Sangat Tinggi

Periodeisasi/Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Pembulatan Capaian (%)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
									Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										investasi, baik dari sektor pertambangan dan perkebunan - Ketersediaan sarana prasarana, dalam menjalankan usaha turut meningkatkan pertumbuhan investasi - Regulasi di bidang investasi, stabilitas politik, dan kondisi sosial budaya. - Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dalam menerbitkan izin usaha oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) dalam mendukung	

Periodeisasi/Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Pembulatan Capaian (%)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
									Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										kemudahan berinvestasi di Kabupaten Kutai Kartanegara	
Misi 4: MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR DAN KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH	Tujuan :	Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur dan Penataan Wilayah									
		Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air bersih	Cakupan Layanan Air Bersih	70.85	89.32	76.67	85.84	85.84	Kondisi geografis Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi faktor utama yang memperngaruhi capaian sasaran ini, terlalu luasnya wilayah menghambat pemerataan pembangunan serta peningkatan pelayanan terhadap cakupan layanan air bersih dan penyediaan rumah layak huni	Adanya program RBPk Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan berpengaruh terhadap capaian sasaran meningkatkan kualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air bersih.	Tinggi

Periodeisasi/Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Pembulatan Capaian (%)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
									Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Persentase Rumah Layak Huni	92.76	90.35	93.39	103.36	100	Kondisi geografis Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi faktor utama yang memperngaruhi capaian sasaran ini, terlalu luasnya wilayah menghambat pemerataan pembangunan serta peningkatan pelayanan terhadap cakupan layanan air bersih dan penyediaan rumah layak huni	Adanya program RBPK Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan berpengaruh terhadap capaian sasaran meningkatkan kualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air bersih.	Sangat Tinggi
		Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah	Indeks Aksesibilitas Wilayah	73.75	84.18	75.65	89.87	89.87	Wilayah Kutai Kartanegara yang sangat luas, menyulitkan untuk pemerataan pembangunan, terutama di peningkatan kualitas infrastruktur jalan	Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan seperti fasilitas penerangan jalan umum secara umum mengalami peningkatan	Tinggi

Periodeisasi/Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Pembulatan Capaian (%)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
									Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Misi 4: MENINGKATKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Tujuan :	Meningkatkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan									
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71.76	73.14	71.77	98.13	98.13	- Tidak terpenuhinya target pada Indeks Kualitas Air - Metode perhitungan air permukaan menggunakan perhitungan Indeks Pencemaran lebih diperketat lagi berdasarkan surat dari KLHK No. S.318/PPKL/SET/RE N.0/12/2020 - Pola Hidup masyarakat di bantaran sungai yang menyebabkan Parameter Fecal Colidorm masih diatas baku mutu hal ini disebabkan karena	Peningkatan kesadaran, pengetahuan, serta pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan lingkungan hidup	Sangat Tinggi

Periodeisasi/Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Pembulatan Capaian (%)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
									Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
									kondisi sungai yang masih banyak aktivitas manusia yang menghasilkan limbah domestik - Belum adanya IPAL Domestik Komunal di Wilayah Perkotaan (Tenggarong) - Belum adanya pengolahan air limbah dari usaha kecil		
		Meningkatnya ketahanan bencana daerah	Indeks Risiko Bencana	119.16	108.55	120.96	88.57	88.57	- Belum optimalnya pelaksanaan identifikasi kemampuan individu, masyarakat, lembaga pemerintah atau non pemerintah dan aktor lain dalam menangani ancaman dengan sumber daya tersedia untuk melakukan tindakan pencegahan, mitigasi, dan	Peningkatan kesadaran, pengetahuan, serta pemanfaatan teknologi dalam mitigasi bencana	Tinggi

Periodeisasi/Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Pembulatan Capaian (%)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
									Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
									mempersiapkan penanganan darurat, serta menangani kerentanan yang ada dengan kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat di daerah rawan bencana. - Lemahnya upaya koordinasi, integrasi, dan sinkroniasi dokumen Rencana Penanggulangan Bencana pada Renstra dan atau rencana kerja (Renja) OPD terkait.		
Rata-Rata Capaian Kinerja Periode 2021-2026								86,23			
Predikat Kinerja								Tinggi			

2.5. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

Salah satu variabel penting yang berkontribusi besar terhadap pembentukan kebijakan masa depan adalah kondisi demografi. Data terkait kondisi demografi menjadi salah satu variabel utama dalam perencanaan pembangunan, karena data tersebut menjadi dasar untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan dan sekaligus sebagai acuan pokok dalam pembangunan di masa yang akan datang. Proyeksi jumlah penduduk dalam menggambarkan kondisi demografi ini pun dilakukan untuk kemudian menjadi acuan dasar dalam penentuan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik yang dibutuhkan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara.

2.6.1 Proyeksi Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara

Pada segmen ini akan dijelaskan data mengenai i) proyeksi total penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara, ii) proyeksi jenis kelamin dan rasionya, iii) proyeksi penduduk berdasarkan rentang umur, iv) proyeksi komposisi penduduk dan rasio ketergantungan, dan v) proyeksi kepadatan penduduk.

Proyeksi penduduk ini menerapkan metode komponen kohort dengan pendekatan deterministik yang menghasilkan estimasi titik, serta dihitung dengan aplikasi Rural Urban Projection (RUP). Metode ini menggunakan beberapa asumsi untuk memproyeksikan penduduk di masa depan, seperti asumsi kelahiran dengan menggunakan indikator *Total Fertility Rate (TFR)*, asumsi kematian dengan menggunakan indikator *Infant Mortality Rate (IMR)* dan Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir, serta migrasi dengan menggunakan indikator *Age-Specific Net Migration Rate (ASNMR)*. *TFR*, *IMR*, dan penduduk dasar yang disusun berdasarkan umur dan jenis kelamin bersumber dari penduduk hasil SP2020. Hasil analisis proyeksi atas jumlah penduduk Kutai Kartanegara dapat dilihat sebagaimana urian berikut ini.

2.6.1.1 Proyeksi Total Penduduk

Pada tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara tercatat sejumlah 788.113 jiwa. Jumlah penduduk ini diproyeksikan akan mencapai 845.621 jiwa pada awal periode 2025 dan mencapai angka lebih dari satu juta jiwa yakni 1.068.530 jiwa di periode 2030. Angka ini akan terus meningkat hingga akhir periode RPJPD pada 2045. Peningkatan pertumbuhan cenderung lebih tinggi di awal periode, dengan persentase

pertumbuhan tertinggi sebesar 26,36 persen (2030). Jumlah penduduk terus tumbuh, tetapi dengan akselerasi yang menurun, sampai pada akhir proyeksi masih terjadi pertumbuhan jumlah penduduk sebesar 5,85 persen (2045) dan diprediksi jumlah penduduk absolut akan mencapai 1.355.845 jiwa.

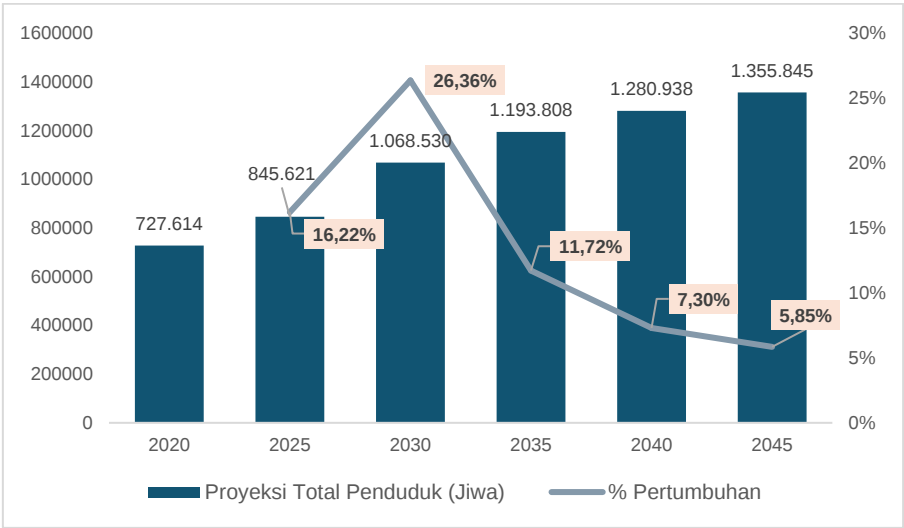
Tabel 2.88
Proyeksi Penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2025-2045

Penduduk Tahun 2023 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
	2025	2030	2035	2040	2045
788.113	845.621	1.068.530	1.193.808	1.280.938	1.355.845

Sumber: Kutai Kartanegara dalam angka 2023 dan Badan Pusat Statistik, 2023

Grafik berikut menunjukkan ilustrasi proyeksi pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Grafik 2.39
Proyeksi Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2025-2045



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

2.6.1.2 Proyeksi Jenis Kelamin dan Rasionya

Kondisi eksisting yang terjadi di Kutai Kartanegara pada tahun 2023 menunjukkan rasio jenis kelamin berada di atas 100 persen (108,27%). Artinya, jumlah penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Meskipun laju pertumbuhan penduduk perempuan lebih tinggi, namun jumlah absolut penduduk laki-laki-yang juga meningkat-masih berada di atas jumlah penduduk perempuan.

Hasil proyeksi pada tahun 2045 menunjukkan bahwa angka rasio jenis kelamin penduduk sebesar 102,51 persen. Artinya, terdapat 102 laki-laki untuk setiap 100 perempuan di Kabupaten Kutai Kartanegara pada 2045 nanti.

Secara ringkas, proyeksi pertumbuhan penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.89
Proyeksi Penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara
berdasarkan Jenis Kelamin dan Rasionya, 2025-2045

Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2022 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Laki-laki (jiwa)	384.005	438.024	549.526	610.575	651.750	686.330
Perempuan (jiwa)	354.184	407.597	519.004	583.233	629.188	669.515
Sex Ratio (%)	108,42	107,46	105,88	104,69	103,59	102,51

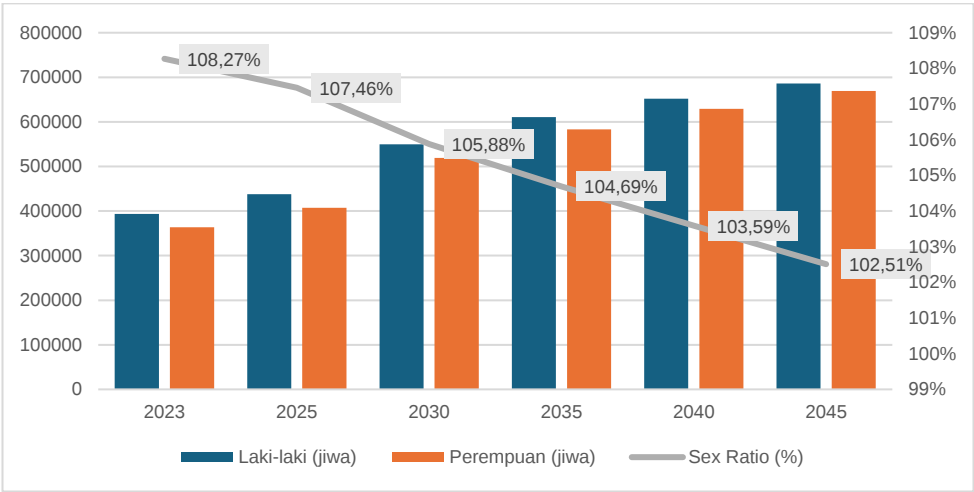
Sumber: Kutai Kartanegara dalam angka 2023 dan Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan analisis pertumbuhannya, rasio jenis kelamin penduduk Kutai Kartanegara menunjukkan tren menurun sejak awal hingga akhir periode (2025-2045). Perbandingan proyeksi pertumbuhan penduduk per jenis kelamin juga tetap konsisten sebagaimana ditunjukkan dalam diagram di bawah. Pada 2045, jumlah penduduk per jenis kelamin diproyeksikan sebanyak 686.330 laki-laki dan 669.515 perempuan.

Meskipun pada akhir periode RPJPD (2045) masih terjadi rasio jenis kelamin di atas 100 persen, data tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kemungkinan terjadinya perubahan komposisi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelaminnya pada periode berikutnya.

Grafik di bawah ini mengilustrasikan kondisi proyeksi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelaminnya beserta *sex ratio* di Kabupaten Kutai Kartanegara pada periode 2025- 2045.

Grafik 2.40
Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin
di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2025-2045



Sumber: Kutai Kartanegara dalam angka 2023 dan Badan Pusat Statistik, 2023

2.6.1.3 Proyeksi Penduduk Berdasarkan Rentang Umur

Proyeksi jumlah penduduk berdasarkan rentang umur bertujuan untuk menganalisis berbagai keperluan, di antaranya: usia produktif dan nonproduktif, penduduk usia sekolah, bekerja, dan karakteristik penduduk berdasar kelompok umur lainnya. Hasil analisis jumlah penduduk berdasar kelompok umur di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.90
Proyeksi Penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara
Menurut Kelompok Umur, 2020-2045

Tahun/ Kel. Umur	2020	2025	2030	2035	2040	2045
0-4	64361	62838	85662	97791	93624	87816
5-9	64700	69180	68490	87142	98800	94631
10-14	67872	68170	79896	72414	88913	100627
15-19	66072	72367	77058	82910	74018	90512

Tahun/ Kel. Umur	2020	2025	2030	2035	2040	2045
20-24	62268	77866	90801	83241	86624	77750
25-29	59057	77104	107926	101250	88715	92227
30-34	58591	70862	106133	118017	105950	93703
35-39	57241	65821	90858	112890	120703	108877
40-44	54462	61662	78038	94593	113987	121819
45-49	48179	56884	69355	80083	94799	114060
50-54	39166	49193	61125	69896	79440	93977
55-59	30275	39070	51031	60410	68310	77673
60-64	21847	29234	38938	49078	57709	65319
65-69	14397	20117	27607	35936	45212	53285
70-74	9491	12451	17772	23884	31176	39415
75+	9635	12802	17840	24273	32958	44154
Total	727614	845621	1068530	1193808	1280938	1355845

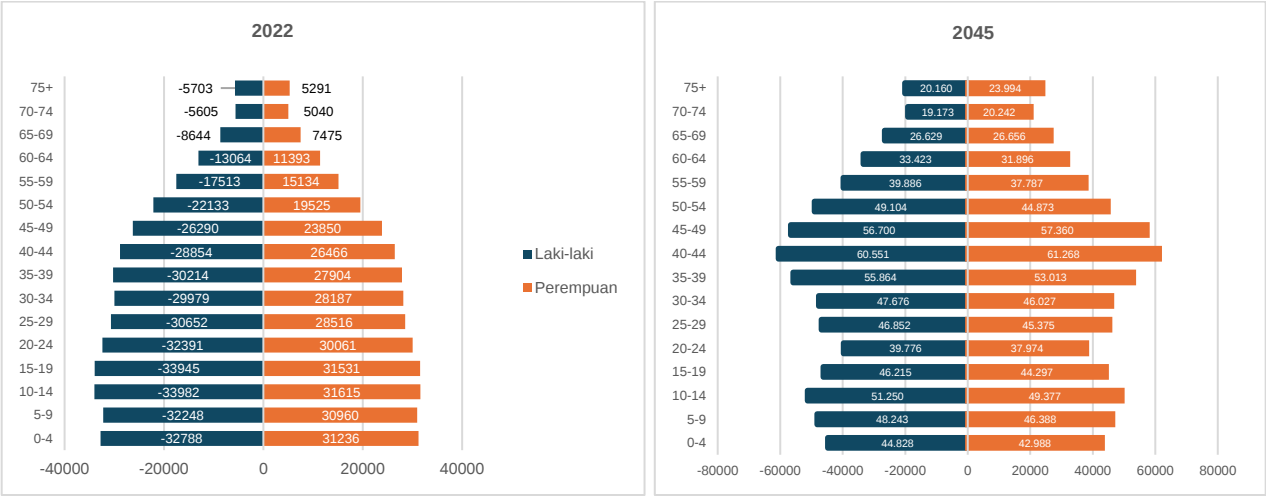
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2023

Data jumlah penduduk dikelompokkan berdasarkan usia dan jenis kelamin, yang kemudian direpresentasikan dalam piramida penduduk seperti terlihat pada gambar di bawah. Piramida tersebut mencerminkan pertumbuhan penduduk yang relatif rendah. Dalam piramida penduduk kategori dewasa, angka kelahiran (natalitas) dan angka kematian (mortalitas) cenderung seimbang, menghasilkan keseimbangan antara jumlah penduduk muda dan tua.

Analisis perbandingan piramida penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara didasarkan pada realisasi 2022 dan proyeksi 2045 ditunjukkan pada grafik di bawah ini. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan pada proporsi penduduk usia nonproduktif (0-14 dan <65). Meskipun demikian, penduduk usia produktif masih mendominasi pada akhir periode 2045. Hal tersebut menunjukkan bahwa meski terjadi peningkatan penduduk anak-anak dan lansia, penduduk usia produktif tetap dapat menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Grafik 2.41

Piramida Proyeksi Penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020 dan 2045



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023, diolah.

2.6.1.4 Proyeksi Komposisi Penduduk dan *Dependency Ratio*

Komposisi penduduk berdasarkan usia produktif (15-64 tahun), usia muda (0-14 tahun), dan usia tua (di atas 65 tahun) dapat digunakan untuk menganalisis rasio ketergantungan (*dependency ratio*) di Kabupaten Kutai Kartanegara. Ketiga komposisi penduduk tersebut terus mengalami peningkatan hingga 2045 dengan jumlah penduduk usia muda diprediksi mencapai 192.829 jiwa, usia tua 37.758 jiwa, dan usia produktif 507.602 jiwa.

Tabel 2.91

Proyeksi Penduduk berdasar Komposisi dan *Dependency Ratio*
Kabupaten Kutai Kartanegara, 2025-2045

Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2022 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
0-14	192.192	200.188	234,048	257,347	281,337	283,074
15-64	568,487	600.063	771.263	852.368	890.255	935.917
65+	27.434	45.370	63.219	84.093	109.346	136.854
Dependency Ratio (%)	38,63	40,92	38,54	40,06	43,88	44,87

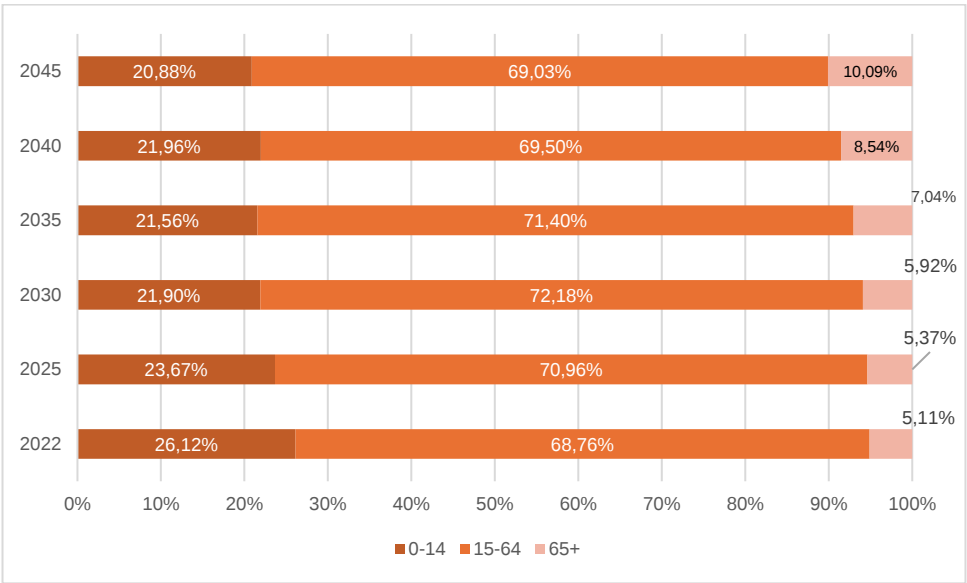
Sumber: Kutai Kartanegara dalam angka 2023 dan 2024, Badan Pusat Statistik, 2023, diolah.

Gambaran komposisi penduduk usia tua, usia muda, dan usia produktif di Kabupaten Kutai Kartanegara disajikan pada gambar di bawah ini. Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa telah terjadi pergeseran proporsi penduduk usia nonproduktif dan menurunnya proporsi penduduk produktif.

Prediksi pada 2025, terdapat 70,96 persen penduduk usia produktif, kemudian proporsinya menurun hingga 69,03 persen terhadap jumlah total penduduk Kutai Kartanegara di tahun 2045. Penduduk usia muda diprediksi akan cenderung mengalami penurunan proporsi terhadap total penduduk yakni 23,67 persen (2025) menjadi 20,88 persen (2045). Sebaliknya, penduduk usia tua justru diprediksi akan mengalami peningkatan proporsi dari total penduduk yakni 5,37 persen (2025) menjadi 10,09 persen (2045). Gambaran proporsi jumlah penduduk tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Grafik 2.42

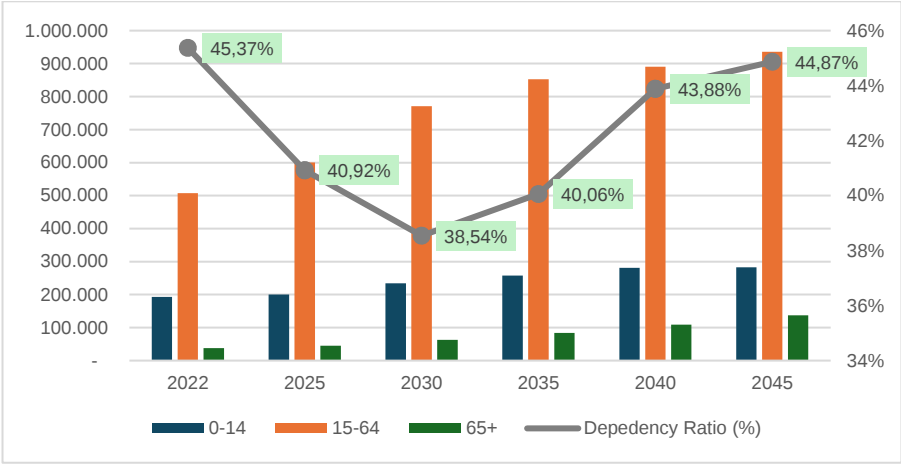
Proyeksi Komposisi Penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2025-2045



Sumber: Kutai Kartanegara dalam angka 2023 dan Badan Pusat Statistik, 2023, diolah.

Terjadinya perubahan proporsi penduduk tersebut tentunya berdampak pada berfluktuasinya rasio ketergantungan (*dependency ratio*) di Kutai Kartanegara. Pada kondisi eksisting di tahun 2022, tingkat rasio ketergantungan tercatat cukup tinggi yakni sebesar 45,37 persen. Angka rasio ketergantungan ini diprediksi menurun menjadi 40,92 persen (2025) dan 38,54 persen (2030), kemudian kembali mengalami tren peningkatan mencapai angka 44,87 persen (2045).

Grafik 2.43
Proyeksi Komposisi Penduduk dan Angka Ketergantungan
Kabupaten Kutai Kartanegara, 2025-2045



Sumber: Kutai Kartanegara dalam angka 2023 dan Badan Pusat Statistik, 2023, diolah.

Meskipun angka ketergantungan di Kabupaten Kutai Kartanegara cenderung kembali mengalami tren meningkat hingga akhir periode (2045), namun angka usia produktif masih menempati proporsi terbesar. Hal ini memberikan indikasi positif dalam menunjang produktivitas yang memacu pertumbuhan di Kabupaten Kutai Kartanegara melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia yang tepat.

Bonus demografi atau kondisi ketika penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibanding dengan usia nonproduktif (0-14 tahun dan di atas 65 tahun) dengan proporsi lebih dari 60 persen dari jumlah penduduk total diprediksi masih akan terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara hingga 2045.

Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa masih terdapat berbagai kesempatan bagi Kabupaten Kutai Kartanegara untuk terus mengembangkan SDM, terutama dalam hal ketenagakerjaan, yang berdampak pada pertumbuhan hingga akhir periode perencanaan jangka panjang (2045).

Dengan demikian, manfaat bonus demografi tersebut dapat dimanfaatkan dan berdampak positif. Untuk itu, diperlukannya fokus pada empat pilar: Keluarga Berencana (KB) sebagai upaya untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk, Pendidikan, Kesehatan, dan Ketenagakerjaan.

2.6.1.5 Proyeksi Kepadatan Penduduk

Selanjutnya, analisis diarahkan pada isu kepadatan penduduk, yang bersumber dari proyeksi pertumbuhan penduduk. Dari analisis tersebut diketahui bahwa sampai dengan 2045 kepadatan penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara diperkirakan akan terus meningkat. Angka kepadatan penduduk tertinggi terjadi pada 2045 (50,38 jiwa per kilometer persegi).

Tabel 2.92

Proyeksi Kepadatan Penduduk

Keterangan	Proyeksi				
	2025	2030	2035	2040	2045
Luas Wilayah Kutai Kartanegara (Km ²)	26.909,93				
Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)	31,42	39,71	44,36	47,60	50,38

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara, diolah.

2.6.2 Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Dasar

Sarana dan prasarana dasar digunakan dalam rangka untuk mewujudkan pembangunan kewilayahan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang merata dan berkeadilan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Proyeksi sarana dan prasarana juga digunakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Kutai Kartanegara agar menjadi lebih baik. Pemenuhan kebutuhan dasar dilakukan dengan melihat proyeksi jumlah penduduk, kondisi riil kebutuhan, dan kriteria cakupan pelayanan berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Bagian ini memberikan penjelasan terkait i) proyeksi kebutuhan rumah, ii) proyeksi kebutuhan air bersih terpenuhi, iii) proyeksi kebutuhan listrik, iv) proyeksi timbulan sampah ditangani, v) proyeksi fasilitas kesehatan, dan vi) proyeksi fasilitas pendidikan.

Hasil proyeksi sarana dan prasarana yang dilakukan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk periode 2025- 2045 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.93
Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana
di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2025-2045

Uraian	Kondisi 2022	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (Jiwa)	738.209	845.621	1.068.530	1.193.808	1.280.938	1.355.845
Proyeksi Kebutuhan Rumah (Unit)	185.433	206.915	251.497	276.553	293.979	308.960
Proyeksi Kebutuhan Air Bersih terpenuhi (%)	76,68	79,91	84,42	89,20	94,24	100
Proyeksi Kebutuhan Listrik (Kwh)	579.600.679	643.407.045	825.919.679	931.189.222	1.005.574.246	1.069.651.339
Total Timbulan Sampah (ton/tahun)	114.524,75	115.486,02	151.733,97	174.231,00	190.914,07	205.536,36
Proyeksi Fasilitas Kesehatan						
Rumah Sakit (Unit)	3	3	3	3	3	3
Puskesmas (Unit)	32	33	35	36	36	37
Puskesmas Pembantu (Unit)	174	175	178	180	181	182
Proyeksi Fasilitas Pendidikan						
Sekolah TK/RA	387/24	388/25	388/25	393/28	395/29	388/29
SD/MI	479/38	480/39	480/39	482/41	483/42	482/41
SMP/MTs	155/53	155/53	157/55	156/54	158/56	159/57
SMA/MA/SMK	52/18/44	53/19/45	54/20/46	54/20/46	53/19/45	55/21/47

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS); Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara; Perusahaan Listrik Negara (PLN) Kabupaten Kutai Kartanegara; Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Kutai Kartanegara; Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara; Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara; diolah.

a) Proyeksi Kebutuhan Rumah

Kebutuhan sarana dan prasarana dasar yang merata dan berkeadilan menjadi salah satu perwujudan pembangunan wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana dihitung dengan memperhatikan proyeksi jumlah penduduk dan cakupan pelayanan berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI). Asumsi dasar lingkungan perumahan sesuai SNI menyatakan bahwa jumlah penghuni rumah rata-rata sejumlah lima orang. Oleh karena itu, sampai dengan akhir 2045, proyeksi kebutuhan rumah di Kutai Kartanegara diprediksi akan mencapai 308.960 unit.

b) Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Terpenuhi

Kebutuhan air bersih di Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan pada data yang diperoleh dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pada 2022 telah terpenuhi sebesar 76,68 persen, yang kemudian diproyeksikan dengan target yang meningkat pada periode-periode berikutnya.

Angka historis pemenuhan kebutuhan air bersih sejak 2018 hingga 2022 dijadikan sebagai dasar perhitungan proyeksi dengan pola *exponential*. Hasilnya didapat proyeksi kebutuhan air bersih ditargetkan dapat terpenuhi seluruhnya di Kutai Kartanegara pada akhir periode 2045.

c) Proyeksi Kebutuhan Listrik

Kebutuhan listrik di Kabupaten Kutai Kartanegara dianalisis menggunakan data penggunaan listrik dalam satuan *kilowatt hour* (Kwh) yang didapat dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) Kabupaten Kutai Kartanegara.

Selain itu, data historis serta pertimbangan akan kebutuhan listrik per penduduk yang disesuaikan dengan SNI juga mendasari perhitungan. Dari proyeksi yang dilakukan, didapatkan angka kebutuhan listrik di Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 1.069.651.339 Kwh (2045).

d) Proyeksi Timbulan Sampah

Timbulan sampah di Kutai Kartanegara tercatat sejumlah 114.524,75 (2022). Proyeksi timbulan sampah Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan dengan penyesuaian dengan kondisi historis

timbulan sampah yang dihasilkan per penduduk, pertumbuhan jumlah penduduk serta pengembangan yang direncanakan dalam membangun wilayah. Hasil proyeksi memprediksi di akhir periode 2045 terdapat sejumlah 205,536.36 ton timbulan sampah.

e) Proyeksi Fasilitas Kesehatan

Fasilitas kesehatan adalah kebutuhan dasar yang krusial. Proyeksi atas pemenuhan fasilitas kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan dengan mempertimbangkan pertumbuhan penduduk, historis riil kebutuhan fasilitas, serta standar kebutuhan yang tercantum dalam SNI, yaitu sebesar 0,008 m² per jiwa (Puskesmas), 0,006 m² per jiwa (Puskesmas Pembantu), serta luas lahan minimal untuk Puskesmas 1.000 m² dan 300 m² untuk Puskesmas Pembantu.

Berdasarkan standar tersebut, kemudian didapatkan proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan sampai akhir 2045 sebagai berikut: Rumah Sakit (tiga unit), Puskesmas (37 unit), dan Puskesmas Pembantu (182 unit).

f) Proyeksi Fasilitas Pendidikan

Terdapat empat tingkatan fasilitas pendidikan di Kutai Kartanegara, masing-masing TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK. Setiap fasilitas pendidikan diproyeksikan dengan cara menyesuaikan jumlah penduduk per kelompok usia sekolah, dengan cara mengacu pada standar SNI, maupun analisis data kebutuhan historisnya.

Kebutuhan sarana pendidikan dan pembelajaran berdasar SNI ditetapkan sebesar 0,28 m² per jiwa (TK/RA), 1,25 m² per jiwa (SD/MI), 1,88 m² per jiwa (SMP/MTs), dan 2,6 m² per jiwa (SMA/MA/SMK). Luas lahan minimal seluas 500 m² ditambah ruang terbuka/bermain ±700 m² (TK/RA), 2.000 m² (SD/MI), 9.000 m² (SMP/MTs), 12.500 m² (SMA/MA/SMK). Selain itu masih ditambah ±3.000-7.000 m² ruang terbuka/bermain untuk TK/RA, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK.

Berdasarkan standar tersebut, maka didapatkan hasil proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tersaji pada Tabel 2. di atas. ***

2.7 Pusat-Pusat Pertumbuhan Wilayah dan Indikasi Program/Proyek Strategis yang Dapat Mempengaruhi Daerah

Berdasarkan pada bab sebelumnya telah diketahui bahwa terdapat tren peningkatan pertumbuhan penduduk yang diiringi dengan meningkatnya

kebutuhan sarana prasarana dasar. Oleh karena itu, untuk memenuhi meningkatnya kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut diperlukan arah pengembangan pusat-pusat daerah, sebagai area pertumbuhan.

Pada bagian ini disajikan narasi pusat-pusat pertumbuhan wilayah beserta program/proyek strategis yang dapat mempengaruhi perkembangan daerah. Selain itu, pada bagian ini juga dijelaskan arah kebijakan pembangunan wilayah dan sarana berdasarkan arahan sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2025-2045.

2.7.1. Analisis Pusat-Pusat Pertumbuhan Wilayah

Mengacu pada arah pemanfaatan ruang dalam tabel teknis Perda RTRW Tahun 2023-2041 (Bab VI), pusat pertumbuhan permukiman wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara terbagi menjadi tiga klasifikasi sebagai berikut:

- a. Perwujudan struktur ruang;
- b. Perwujudan pola ruang; dan
- c. Perwujudan kawasan strategis kabupaten.

Dalam memahami ketiga klasifikasi yang cukup kompleks tersebut, poin-poin berikut merupakan rincian dari setiap bagian.

A. Perwujudan Struktur Ruang

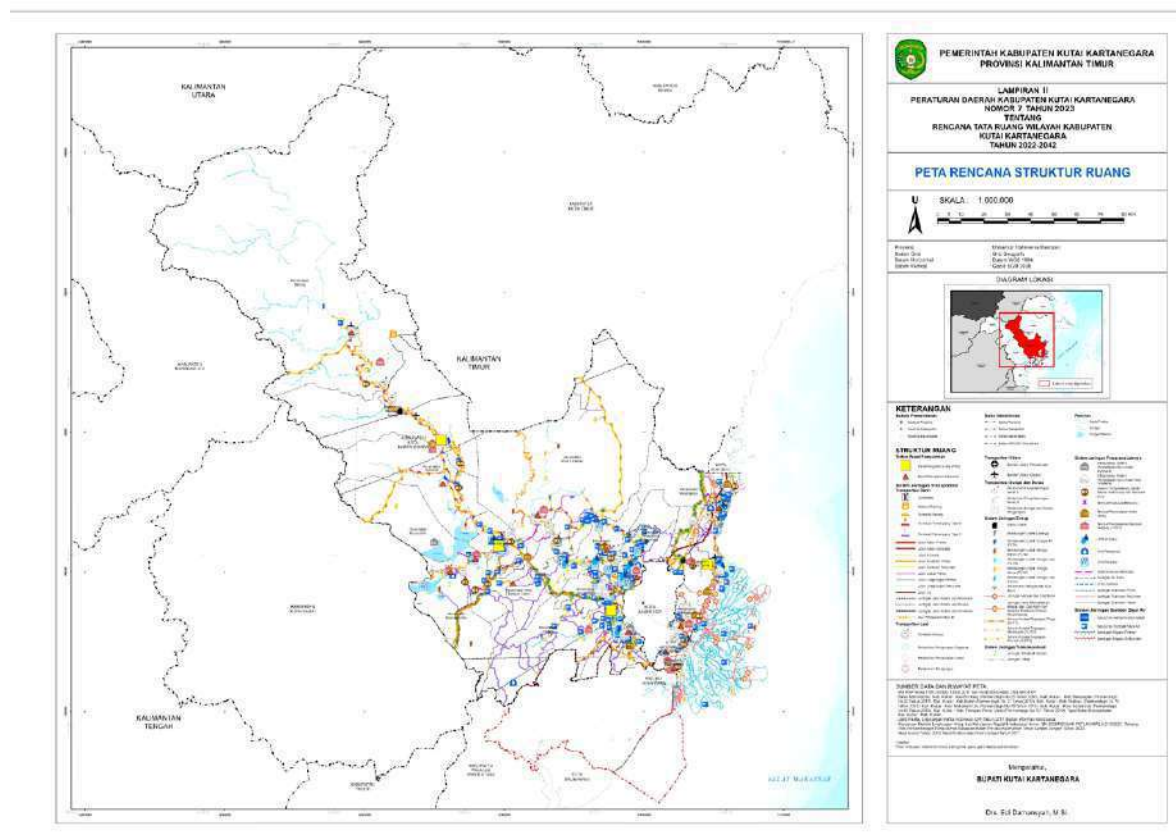
- a. Sistem Pemukiman:
 1. Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 2. Perwujudan sistem pusat permukiman berupa Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
 3. Perwujudan pusat Kota Tenggarong (PKN).
- b. Sistem jaringan transportasi:
 1. Sistem jaringan jalan;
 2. Sistem jaringan kereta api;
 3. Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
 4. Sistem transportasi laut; dan
 5. Sistem bandara umum dan khusus.
- c. Sistem jaringan energi:
 1. Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 2. Jaringan infrastruktur dan ketenagalistrikan.
- d. Sistem Jaringan telekomunikasi:
 1. Sistem jaringan tetap; dan
 2. Sistem jaringan bergerak

- e. Sistem Jaringan Sumber Daya Air:
 - 1. Sistem jaringan irigasi;
 - 2. Sistem pengendalian banjir; dan
 - 3. Bangunan Sumber Daya Air
- f. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya:
 - 1. Sistem jaringan air minum;
 - 2. Sistem pengelolaan air limbah;
 - 3. Sistem pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - 4. Sistem jaringan persampahan;
 - 5. Sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - 6. Sistem jaringan drainase.

Rencana struktur ruang wilayah Daerah tersebut digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Perda 7/2023 Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut.

Gambar 2.20

Peta Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, 2023



B. Perwujudan Pola Ruang

- a. Kawasan Peruntukan lindung;
 - 1. Badan Air (BA);
 - 2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - a) Kawasan Hutan Lindung (HL); dan
 - b) Kawasan Lindung Gambut (LG).
 - 3. Kawasan Konservasi;
 - a) Kawasan Suaka Alam (KSA);
 - b) Kawasan Pelestarian Alam (KPA); dan
 - c) Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KWP).
 - 4. Kawasan Ekosistem Mangrove (EM)
- b. Kawasan Peruntukan Budaya;
 - 1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi (KHP); dan
 - 2. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK)
- c. Kawasan Pertanian;
 - 1. Kawasan Tanaman Pangan;
 - 2. Kawasan Hortikultura; dan
 - 3. Kawasan Perkebunan.
- d. Kawasan Perikanan;
- e. Kawasan Pertambangan dan Energi;
- f. Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
- g. Kawasan Pariwisata;
- h. Kawasan Permukiman;
 - 1. Kawasan Permukiman Perkotaan (PK);
 - 2. Kawasan Permukiman Perdesaan (PD);
 - 3. Kawasan Transportasi (KR); dan
 - 4. Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK).

Pada perwujudan pola ruang di kabupaten Kutai Kartanegara ini, penggunaan lahan pada kelompok Kawasan Peruntukkan Lindung memiliki total seluas 420.557 ha dan Kawasan Peruntukkan Budi Daya seluas 2.108.647, yang secara lengkap disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.94
Rencana Pola Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara, 2023-2042

No	Nama Unsur	Orde 1	Nama Objek	Luas (ha)
1	Kawasan Peruntukkan Lindung	Badan Air	Badan Air	37.537
		Kawasan Ekosistem Mangrove	Kawasan Ekosistem Mangrove	4.075
		Kawasan Konservasi	Cagar Alam	31.961
			Cagar Alam/Kawasan Perkebunan	87
			Kawasan Konservasi Perairan	42.569
			Taman Nasional	40.602
		Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahnya	Kawasan Hutan Lindung	203.617
			Kawasan Hutan Lindung/Kawasan Perkebunan	4.033
			Kawasan Lindung Gambut	56.096
	Luasan Kawasan Lindung			420.577
2	Kawasan Peruntukkan Budi Daya	Kawasan Hutan Produksi	Kawasan Hutan Produksi Tetap	1.206.079
			Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Perikanan Budi Daya	68
			Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Perkebunan	74.386
			Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Permukiman Pedesaan	61
			Kawasan Hutan Produksi Tetap/Taman Hutan Raya	3.314
			Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi	4.04
			Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Perkebunan	13.228
			Kawasan Pariwisata	1.192
		Kawasan Perikanan	Kawasan Perikanan Budi Daya	15.096
		Kawasan Permukiman	Kawasan Permukiman Perdesaan	26.672

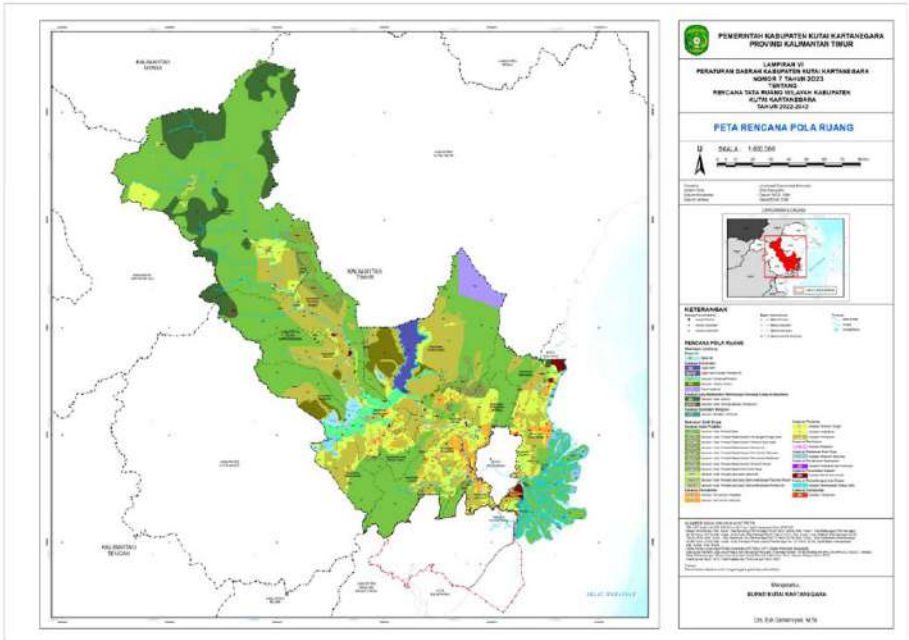
No	Nama Unsur	Orde 1	Nama Objek	Luas (ha)
			Kawasan Permukiman Perkotaan	45.999
		Kawasan Pertanian	Kawasan Hortikultura	10.013
			Kawasan Perkebunan	467.42
			Kawasan Tanaman Pangan	216.904
			Kawasan Tanaman Pangan (KP2B)	12.404
		Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Kawasan Petahanan dan Keamanan	21
		Kawasan Transportasi	Kawasan Transportasi	500
		Kawasan Peruntukkan Industri	Kawasan Peruntukkan Industri	10.662
		Kawasan Pertambangan dan Energi	Kawasan Pembangkit Tenaga Listrik	587
	Luasan Kawasan Budidaya			2.108.647
	TOTAL LUASAN			2.529.224

Sumber: RTRW Kutai Kartanegara 2023-2042

Pola Rencana Tata Ruang tersebut dituangkan ke dalam Peta Rencana Pola Ruang sebagai lampiran pada Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

Gambar 2.21

Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara, 2023



Sumber : RTRW 2023 - 2042 Kabupaten Kutai Kartanegara

C. Perwujudan Kawasan Strategis

Kawasan Strategi Nasional (KSN) dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi di Kawasan Sanga-Sanga dan Muara Jawa.

1. Kawasan Strategis Provinsi:

- a. kawasan strategis dari sudut pertumbuhan ekonomi berupa kawasan peruntukkan industri di Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
- b. kawasan strategis dari kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa Danau Kaskade Mahakam dan Kawasan Delta Mahakam.

2. Kawasan Strategis Kabupaten

- a. Kawasan Strategis Kabupaten dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi meliputi:
 - 1) Kawasan strategis Kekembangan di Kecamatan Kenohan, Kembang janggut dan Kecamatan Tabang;
 - 2) Kawasan strategis Mitra IKN (Ibu Kota Negara);
 - 3) Kawasan strategis perikanan terpadu Muara Badak;
 - 4) Kawasan strategis Pertanian Terpadu Kota Bangun; dan
 - 5) Kawasan strategis Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loakulu.
- b. Kawasan Strategis Kabupaten dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya berupa:
 - 1) Kawasan Museum Mulawarman;
 - 2) Kawasan strategis Muara Kaman;
 - 3) Kawasan strategis desa adat dan budaya Lekak Kidau, Kedang Ipil dan Sungai Bawang; dan
 - 4) Kawasan Strategis Provinsi: Danau Kaskade Mahakam.
- c. Kawasan Strategis Kabupaten dari Sudut Kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yaitu, Kawasan Strategis Konservasi Pesut di Kecamatan Kota Bangun, Kecamatan Muara Muntai, Kecamatan Muara Kaman, dan Kecamatan Muara Wis.
- d. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi di Kabupaten Kutai Kartanegara tidak daitetapkan. Pada PermenATR No 11 Tahun 2021 penetapan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, berdasarkan pada kriteria berikut;

Penjelasan lebih detail mengenai fokus tahapan, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan lokasi pelaksanaan program strategis yang akan dilaksanakan, dituangkan dengan lengkap dalam Bab VI Arah Pemanfaatan Ruang Perda RTRW Kutai Kartanegara 2023-2042.

2.7.2. Analisis Proyek atau Program Strategis yang Berdampak pada Pembangunan Wilayah KLHS Kutai Kartanegara 2025-2045

Berkaitan dengan pembangunan wilayah dalam jangka panjang, sesuai dengan Permendagri 86/2017 dan Pedoman Umum pembentukan RPJPD, setidaknya terdapat dua program strategis daerah yang berdampak pada kebijakan daerah dalam jangka panjang.

Kedua program tersebut adalah RTRW 2023-2042 sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya dan KLHS Kutai Kartanegara 2025-2045. Dokumen KLHS ini ditujukan untuk melakukan evaluasi kebijakan berdasarkan tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah dilakukan sekaligus merumuskan arah kebijakan yang perlu dilakukan. Segmen ini difokuskan untuk memaparkan arah kebijakan yang diberikan KLHS yang menjadi bahan pertimbangan perumusan isu strategis dan arah kebijakan RPJPD dalam 20 tahun ke depan sebagaimana dijelaskan pada bab selanjutnya. Arah penyesuaian kebijakan ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.95

Program Tindak Lanjut KLHS Arahan Penyesuaian untuk Indikator TPB yang Memerlukan Upaya Tambahan

No.	TPB	No. Indikator	Deskripsi Indikator dan Isu Strategis dari Indikator yang Perlu Upaya Tambahan	Jasa Lingkungan Hidup DDDT-LH yang Terkait	Indeks Jasa Lingkungan Hidup Rendah dan Sangat Rendah (Ha)	Arahan Penyesuaian Upaya Tambahan
1	01	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	P1 Penyedia Air		Penentuan sumber air baku harus dilakukan melalui kajian yang matang terkait kuantitas dan kualitas air baku
				R4 Pengatur Air		Perlindungan daerah resapan air pada sub Daerah Aliran Sungai yang menjadi sumber air baku yang dikonsumsi masyarakat
2	01	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	P1 Penyedia Air		Penentuan sumber air baku harus dilakukan melalui kajian yang matang terkait kuantitas dan kualitas air baku
				R5 Pemurnian Air dan Pengolahan Limbah		Pengaturan pembuangan limbah domestik melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik dan peningkatan kualitas air limbahnya

No.	TPB	No. Indikator	Deskripsi Indikator dan Isu Strategis dari Indikator yang Perlu Upaya Tambahan	Jasa Lingkungan Hidup DDDT-LH yang Terkait	Indeks Jasa Lingkungan Hidup Rendah dan Sangat Rendah (Ha)	Arahan Penyesuaian Upaya Tambahan
3	06	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.			Penentuan sumber air baku harus dilakukan melalui kajian yang matang terkait kuantitas dan kualitas air baku
Isu Strategis: Peningkatan sanitasi dan distribusi air bersih bagi masyarakat						
4	01	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	R3A Pencegahan dan Perlindungan Bencana: Banjir		Peningkatan upaya rehabilitasi lahan kritis pada area eks tambang oleh pengelola ijin usaha berbasis lahan
5	13	13.1.2*		R3B Pencegahan dan Perlindungan Bencana: Longsor		Pemantauan dan perlindungan kawasan dengan risiko longsor tinggi untuk meminimalkan kejadian bencana longsor
				R3C Pencegahan dan Perlindungan Bencana: Kebakaran Hutan dan Lahan		

No.	TPB	No. Indikator	Deskripsi Indikator dan Isu Strategis dari Indikator yang Perlu Upaya Tambahan	Jasa Lingkungan Hidup DDDT-LH yang Terkait	Indeks Jasa Lingkungan Hidup Rendah dan Sangat Rendah (Ha)	Arahan Penyesuaian Upaya Tambahan
Isu Strategis: Pencegahan dan penanggulangan bencana alam banjir, kebakaran permukiman penduduk, hutan dan lahan, serta tanah longsor						
6	02	2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai;dan tingkat konsumsi ikan.	P2 Penyedia Pangan		Perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan ekstensifikasi lahan pertanian melalui perbaikan kondisi lahan dan fasilitasi peningkatan produksi pertanian tanaman pangan
						Peningkatan produksi perikanan budidaya dengan upaya perlindungan lingkungan melalui pola Silvo-Fishery (Wanamina) dan Perhutanan Sosial (Kemitraan Lingkungan)
7	02	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	P3 Penyedia Serat, Bahan Bakar dan Material Lain		Peningkatan efisiensi pemanfaatan lahan yang tidak bervegetasi sebagai lahan pertanian dan perkebunan
				R4 Pengaturan Air		Pengkajian, penetapan dan

No.	TPB	No. Indikator	Deskripsi Indikator dan Isu Strategis dari Indikator yang Perlu Upaya Tambahan	Jasa Lingkungan Hidup DDDT-LH yang Terkait	Indeks Jasa Lingkungan Hidup Rendah dan Sangat Rendah (Ha)	Arahan Penyesuaian Upaya Tambahan
						perlindungan daerah resapan air yang krusial bagi sumber air baku dan air yang digunakan pada lahan pertanian
				R6 Pengaturan Penyerbukan Alami		Peningkatan proporsi tanaman berkayu pada lahan pertanian menuju pola Agroforestry (Wanatani)
				R7 Pengendalian Hama		Pemulihan kondisi biologis dan fisik kawasan lindung, konservasi dan area bernilai konservasi tinggi yang saling terhubung.
				S2 Pembentukan dan Regenerasi Tanah		Peningkatan upaya rehabilitasi lahan kritis pada area eks tambang oleh pengelola ijin usaha berbasis lahan dan pengembalian kondisi tanah dengan menggunakan teknologi pembenah tanah yang sesuai dengan karakteristik wilayah
				S4 Siklus Hara		Pengendalian penggunaan

No.	TPB	No. Indikator	Deskripsi Indikator dan Isu Strategis dari Indikator yang Perlu Upaya Tambahan	Jasa Lingkungan Hidup DDDT-LH yang Terkait	Indeks Jasa Lingkungan Hidup Rendah dan Sangat Rendah (Ha)	Arahan Penyesuaian Upaya Tambahan
						pestisida, pupuk non organik dan bahan kimia lain dalam pengelolaan lahan pertanian tanaman pangan
8	08	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	P1 Penyedia Air		Penentuan sumber air baku harus dilakukan melalui kajian yang matang terkait kuantitas dan kualitas air baku di sekitar daerah tujuan wisata
				C1 Estetika (Apresiasi Pemandangan Alam)		Perencanaan penggunaan lahan yang matang untuk memastikan obyek wisata dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pengunjung
				C2 Rekreasi (Peluang Kegiatan Pariwisata dan Rekreasi)		Eksplorasi daerah tujuan wisata baru dan pengembangan daerah tujuan wisata yang sudah ada dengan mempertimbangkan kondisi daya dukung terhadap aktivitas wisata massal
				C3 Warisan Budaya dan Identitas (Rasa Tempat dan Milik)		Mempertimbangkan kelestarian warisan budaya dan identitas masyarakat di tempat tujuan wisata

No.	TPB	No. Indikator	Deskripsi Indikator dan Isu Strategis dari Indikator yang Perlu Upaya Tambahan	Jasa Lingkungan Hidup DDDT-LH yang Terkait	Indeks Jasa Lingkungan Hidup Rendah dan Sangat Rendah (Ha)	Arahan Penyesuaian Upaya Tambahan
9	08	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	P1 Penyedia Air		Penentuan sumber air baku harus dilakukan melalui kajian yang matang terkait kuantitas dan kualitas air baku di sekitar daerah tujuan wisata
				C1 Estetika (Apresiasi Pemandangan Alam)		Perencanaan penggunaan lahan yang matang untuk memastikan obyek wisata dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pengunjung
				C2 Rekreasi (Peluang Kegiatan Pariwisata dan Rekreasi)		Eksplorasi daerah tujuan wisata baru dan pengembangan daerah tujuan wisata yang sudah ada dengan mempertimbangkan kondisi daya dukung terhadap aktivitas wisata massal
				C3 Warisan Budaya dan Identitas (Rasa Tempat dan Milik)		Mempertimbangkan kelestarian warisan budaya dan identitas masyarakat di tempat tujuan wisata
Isu Strategis: Peningkatan kepariwisataan						
10	09	9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	P1 Penyedia Air		Penentuan sumber air baku harus dilakukan melalui kajian yang

No.	TPB	No. Indikator	Deskripsi Indikator dan Isu Strategis dari Indikator yang Perlu Upaya Tambahan	Jasa Lingkungan Hidup DDDT-LH yang Terkait	Indeks Jasa Lingkungan Hidup Rendah dan Sangat Rendah (Ha)	Arahan Penyesuaian Upaya Tambahan
						matang terkait kuantitas dan kualitas air baku
				R1 Kualitas Udara		Pengaturan dan pemantauan emisi dari kapal yang beraktivitas di dermaga penyeberangan
11	09	9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	R1 Kualitas Udara		Pengaturan dan pemantauan emisi dari kapal yang beraktivitas di pelabuhan strategis
12	09	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	P1 Penyedia Air		Penentuan sumber air baku harus dilakukan melalui kajian yang matang terkait kuantitas dan kualitas air baku
				R5 Pemurnian Air dan Pengolahan Limbah		Pengaturan pembuangan limbah domestik melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah Industri dan pemantauan kualitas air limbah yang dibuang ke badan air
Isu Strategis: Peningkatan fasilitas pelabuhan						

No.	TPB	No. Indikator	Deskripsi Indikator dan Isu Strategis dari Indikator yang Perlu Upaya Tambahan	Jasa Lingkungan Hidup DDDT-LH yang Terkait	Indeks Jasa Lingkungan Hidup Rendah dan Sangat Rendah (Ha)	Arahan Penyesuaian Upaya Tambahan
			Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.			Rehabilitasi lahan kritis agar selalu memperhatikan potensi penyediaan bibit, tenaga kerja dan peran lain dari masyarakat di sekitar lokasi penanaman kembali
Isu Strategis: Rehabilitasi lahan kritis dan penanganan satwa langka / Pelestarian keanekaragaman hayati						

Sumber: KLHS RPJPD Kutai Kartanegara 2025-2045

Adapun tentang teknis arah kebijakan KLHS RPJPD dapat ditinjau melalui tabel berikut ini.

Tabel 2.96
Arah Kebijakan KLHS RPJPD Kutai Kartanegara, 2025-2045

No	Isu Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
1	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat: Air dan Sanitasi	Pemenuhan kebutuhan dasar (air, sanitasi, pendidikan, kesehatan) dengan integrasi antarsektor	1. Pemenuhan kebutuhan air dan sanitasi 2. Integrasi antar OPD dalam perencanaan dan pelaksanaan pemenuhan kebutuhan air dan sanitasi
2	Pendidikan	Peningkatan Angka Partisipasi Kasar	Peningkatan layanan pendidikan menuju 100% tuntas pendidikan
3	Ketahanan dan Produksi Pangan	Mewujudkan pangan yang berdaulat (food sovereignty) dan mandiri (food resilience)	1. Pengembangan kembali lahan pangan produktif 2. Diversifikasi produk pangan dan pengembangan industri turunan kelapa sawit 3. Perlindungan lahan pangan berkelanjutan (LP2B) 4. Perlindungan kawasan produktif penangkapan dan budidaya ikan air tawar 5. Penyempurnaan distribusi pangan
4	Penanggulangan Kekerasan Seksual	Perlindungan perempuan dan anak	1. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak 2. Penyiapan perangkat dan fasilitas 3. Perlindungan dan pemulihan korban
5	Pengendalian Penduduk dan Layanan Kesehatan	Penyediaan layanan kesehatan	1. Pemenuhan fasilitas kesehatan 2. Penerapan teknologi tepat guna dalam pemenuhan sanitasi lingkungan
		Pengendalian penduduk	1. Peningkatan pelayanan pendistribusian KB dan tenaga kesehatan 2. Peningkatan edukasi KB
6	Pengurangan Risiko, Penanggulangan Kejadian, dan Pemulihan Bencana	Penanggulangan Bencana	1. Koordinasi antarOPD dan penetapan status bencana 2. Pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pasca bencana

No	Isu Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
7	Rehabilitasi Lahan Kritis dan Satwa Langka	Pemulihan Kondisi Lingkungan	1. Pemulihan Ekosistem Penting dan Lahan Kritis 2. Konservasi satwa langka endemik
8	Penyediaan Infrastruktur Telekomunikasi dan ATM	Pemenuhan infrastruktur	1. Pemerataan sarana komunikasi bergerak 2. Peningkatan layanan keuangan
9	Peningkatan Fasilitas Kepelabuhanan	Peningkatan aksesibilitas	1. Fasilitasi lalu lintas perairan antarwilayah 2. Fasilitasi lalu lintas darat antarwilayah
10	Pendapatan Masyarakat	Peningkatan Perekonomian	1. Peningkatan kesempatan kerja 2. Peningkatan layanan penyaluran kredit usaha
11	Peningkatan Kepariwisata	Peningkatan Kepariwisata	1. Revitalisasi pariwisata 2. Pengembangan destinasi wisata
12	Tata Kelola Keuangan Daerah	Tata Kelola Pemerintahan	1. Efisiensi keuangan daerah 2. Peningkatan penerimaan daerah
13	Pengarusutamaan Gender	Pengarusutamaan Gender	1. Peningkatan pemahaman tentang kesetaraan gender 2. Penyelarasan rencana pembangunan menuju responsif gender 3. Penyiapan calon pemimpin atau legislatif perempuan

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2045

2.7.3. Kebijakan Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana sesuai Wilayah Berdasarkan UU RPJPN 2025-2045

Sesuai dengan RPJPN 2025-2045, pembangunan arah kebijakan wilayah Kalimantan berpotensi sebagai pusat aglomerasi pengembangan ekonomi baru masa depan. Seiring dengan eksistensi Ibu Kota Nusantara, pembangunan wilayah Kalimantan diarahkan sebagai “*Superhub* Ekonomi Nusantara” dengan lima arah pembangunan yang dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 2.97

Arah Pembangunan Kalimantan berdasarkan RPJPN 2025-2045

No	Arah Pembangunan Wilayah
1	Pembangunan sumber daya manusia unggul yang menjadi salah satu kunci transformasi sosial dan ekonomi di Wilayah Kalimantan yang didukung dengan peningkatan layanan kesehatan, pendidikan keilmuan maupun pendidikan karakter, serta keterampilan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan kegiatan ekonomi masa depan di Wilayah Kalimantan.
2	Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan meningkatkan interaksi antarwilayah, terutama antara Ibu Kota Nusantara dengan daerah mitra sebagai <i>superhub</i> ekonomi, pengembangan hilirisasi industri berbasis sektor ekonomi potensial yang bernilai tambah dan berkelanjutan, serta pengembangan destinasi wisata potensial dengan mengoptimalkan mitra dan tenaga kerja lokal.
3	Pembangunan sarana prasarana untuk menumbuhkan efek berganda pembangunan ekonomi di Wilayah Kalimantan dalam mewujudkan konsep <i>superhub</i> ekonomi serta meningkatkan infrastruktur konektivitas, ketenagalistrikan dan digital, serta pemerataan infrastruktur dasar di daerah-daerah afirmasi 3TP.
4	Penguatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung akselerasi pembangunan Wilayah Kalimantan dan penguatan stabilitas pertahanan dan keamanan untuk menjamin kedaulatan negara di kawasan perbatasan negara dan kawasan Ibu Kota Nusantara, serta penuntasan RDTR kabupaten/kota dan perencanaan ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, terutama mitigasi risiko pada wilayah perkotaan dan perdesaan
5	Peningkatan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi sebagai modal dasar untuk mendukung pembangunan yang merata dan inklusif.

Sumber: RPJPN 2025-2045.

Arah kebijakan wilayah Kalimantan berdasarkan kelima prioritas sebagaimana tabel di atas meliputi berbagai transformasi yang dilakukan mencakup arah kebijakan transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola. Transformasi sosial dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.98
Arah Kebijakan Transformasi Sosial Wilayah Kalimantan

No	Arah Transformasi Sosial
i	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat;
ii	Penuntasan stunting dan percepatan eliminasi malaria melalui pendekatan integrasi multisektor dan rekayasa lingkungan habitat vektor;
iii	Perkuatan pemenuhan tenaga medis dan Kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif dan afirmasi pendayagunaan tenaga medis dan kesehatan dari masyarakat lokal terutama di daerah afirmasi 3TP;
iv	Penyediaan layanan kesehatan lanjutan dan diversifikasi spesialisasi keahlian medis, didukung teknologi untuk memperluas jangkauan layanan khususnya ke daerah afirmasi seperti layanan telemedicine untuk penduduk di daerah perbatasan ;
v	Pengembangan pelayanan kesehatan modern di wilayah IKN;
vi	Wajib PAUD 1 tahun dan sekolah 12 tahun untuk meningkatkan rata-rata Lama kualitas antarsatuan sekolah dan kualitasnya:
vii	Pemerataan pendidikan dan antardaerah untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat kebhkerjaan tinggi;
viii	Percepatan peningkatan partisipasi Pendidikan tinggi dan pengembangan maupun pembukaan baru perguruan tinggi serta pengadaan prodi Perguruan Tinggi (STEAM) yang sesuai dengan komoditas unggulan wilayah;
ix	Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif, serta peningkatan proporsi dosen kualifikasi Strata-3;
x	Pengembangan maupun pembukaan baru perguruan tinggi dan program studi berstandar internasional berbasis riset dan bidang keilmuan khusus sesuai klaster ekonomi potensial masa depan melalui kemitraan bersama perguruan tinggi global:
xi	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi untuk menyediakan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman sesuai potensi terutama perkebunan, pertambangan, industri dan pariwisata, serta keterkaitan dengan DUDI yang dikembangkan melalui skema education to employment dan pembentukan Center of Excellence di IKN;
xii	Pembangunan sekolah baru dan perguruan tinggi yang berkualitas berbasis riset dan bidang keilmuan khusus sesuai klaster ekonomi potensial masa depan melalui kemitraan bersama perguruan tinggi global dalam pembangunan IKN;
xiii	Penyediaan afirmasi akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk perbatasan dan terpencil dengan mengembangkan sistem

No	Arah Transformasi Sosial
	pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK, penyediaan asrama siswa dan guru, dan penguatan sekolah terbuka;
xiv	Pengentasan kemiskinan ekstrem pada daerah afirmasi 3TP di seluruh Wilayah terutama Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara melalui perlindungan sosial adaptif,
xv	Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal melalui antara lain penyediaan insentif jaminan ketenagakerjaan bagi usia pekerja, perlindungan dan keamanan ekonomi untuk penduduk lansia, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas.

Sumber: RPJPN 2025-2045.

Selanjutnya, arah kebijakan transformasi ekonomi wilayah Kalimantan diarahkan pada pembangunan klaster umum, klaster ketenagalistrikan, dan klaster pembangunan ekosistem digital. Mengenai hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.99

Arah Transformasi Ekonomi Wilayah Kalimantan

No	Arah Transformasi Ekonomi
i	Pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara bersama daerah mitra sebagai <i>superhub</i> ekonomi yang menggerakkan aktivitas ekonomi maju dan berdaya saing
ii	Pengembangan pusat-pusat industri di berbagai wilayah Kalimantan melalui (i) hilirisasi komoditi unggulan Kalimantan (kelapa sawit, batu bara, migas, dan hasil hutan), dan (ii) berbasis teknologi tinggi dan berkelanjutan seperti industri oleochemicals, petrochemicals, industri farmasi maju, industri kendaraan listrik dan bioteknologi;
iii	Pengembangan industri hijau bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan seperti biokimia pangan, herbal, dan nutrisi untuk meningkatkan nilai tambah dan kompleksitas industri;
iv	Percepatan hilirisasi pengembangan industri strategis berbasis sektor ekonomi eksisting yang ditingkatkan seperti petrokimia dan oleokimia;
v	Pengembangan basis sektor-sektor ekonomi baru yang didorong berbagai pengembangan inovasi seperti biosimilar dan vaksin, protein nabati, dan energi terbarukan;

No	Arah Transformasi Ekonomi
vi	Pengembangan kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, dan berkelanjutan termasuk food estate untuk pemenuhan konsumsi pangan dan gizi, penguatan cadangan pangan nasional, dan peningkatan kesejahteraan petani;
vii	Pengembangan destinasi wisata potensial, antara lain penetapan destinasi super prioritas, pengembangan <i>eco-tourism</i> kelas dunia berbasis budaya dan aset alam (termasuk menjadi global geopark) dengan pelibatan mitra lokal untuk meningkatkan nilai tambah pariwisata dan penyerapan tenaga kerja seperti ekowisata kelas dunia yang berbasis aset alam, wisata kebugaran dengan identitas khas wilayah, serta destinasi MICE dan perkotaan;
viii	Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional dengan Asia Timur dan Pasifik;
ix	Penyediaan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman antara lain melalui up-skilling dan re-skilling sesuai kebutuhan kegiatan ekonomi masa depan yang dikembangkan melalui skema education to employment;
x	Pembangunan perkotaan yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan;
xi	Pengembangan kawasan perkotaan, termasuk Wilayah Metropolitan, yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
Klaster Pembangunan Ketenagalistrikan	
i	Pengembangan grid skala kecil terisolasi (isolated mini grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas;
ii	Penyediaan listrik Ibu Kota Nusantara yang hijau, cerdas, dan berkelanjutan;
iii	Pengembangan jaringan listrik cerdas (smart grid) untuk mendukung peningkatan keandalan dan dekarbonisasi pasokan tenaga listrik;
iv	Pengembangan pasokan listrik terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi primer (Sungai Kayan) serta batu bara dan gas;
v	Mendorong pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik di wilayah Kalimantan (termasuk mempertimbangkan pembangunan PLTN) sebagai pasokan di wilayah Kalimantan maupun antarpulau;
vi	Mengembangkan interkoneksi antarwilayah (transmisi interkoneksi ke Sistem Jawa Sumatra) untuk evakuasi daya listrik terbarukan dan peningkatan keandalan (termasuk upaya pemenuhan kebutuhan tenaga listrik di Ibu Kota Nusantara, diperlukan pembangunan jaringan transmisi 500 kV untuk mengevakuasi daya dari PLTA di Kalimantan Utara);
Klaster Pembangunan Ekosistem Digital	
i	Penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh

No	Arah Transformasi Ekonomi
	pelosok (utamanya di kawasan Ibu Kota Nusantara) serta kawasan industri dan pertambangan;
ii	Peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis; serta
iii	Peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).

Sumber: RPJPN 2025-2045

Terakhir, transformasi tata kelola bertujuan untuk menguatkan tata kelola pemerintahan. Transformasi tata kelola pemerintahan di Wilayah Kalimantan diarahkan melalui kebijakan-kebijakan sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.100

Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Wilayah Kalimantan

No	Arah Transformasi Tata Kelola
i	Optimasi regulasi, termasuk proses praregulasi yang memadai di daerah;
ii	Meningkatkan partisipasi masyarakat sipil yang bermakna termasuk pelibatan masyarakat suku asli Kalimantan;
iii	Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat;
iv	Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah;
v	Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital;
vi	Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi; transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital;
vii	Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi.

Sumber: RPJPN 2025-2045

Ketiga transformasi di atas didasari oleh landasan-landasan penguatan supremasi hukum, stabilitas, kepemimpinan Indonesia; ketahanan sosial budaya dan ekologi; serta ketahanan sumber daya air terpadu. Ketiga landasan tersebut terlihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.101
Landasan Transformasi Wilayah Kalimantan

No	Landasan Transformasi
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	
i	Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal dan lintas batas;
ii	Penyelesaian permasalahan Outstanding Boundary Problems (OBP) di Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara;
iii	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, dana jasa ekosistem dan pasar karbon, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional;
iv	Penguatan pengendalian inflasi daerah.
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	
i	Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antaretnis dan agama;
ii	Peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat di Wilayah Kalimantan;
iii	Perlindungan masyarakat lokal dan promosi budaya melalui pengembangan area pusat budaya sebagai destinasi wisata bernilai ekonomi tinggi;
iv	Pengembangan nilai-nilai luhur budaya lokal serta kearifan lokal dalam berbagai aktivitas sosial serta pendidikan karakter khususnya generasi muda;
v	Penyediaan ruang publik yang inklusif sebagai wahana interaksi sosial antarwarga dan ekspresi budaya;
vi	Pengembangan diversifikasi pangan
vii	Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan, khususnya tambang serta penghambatan laju deforestasi;
viii	Rehabilitasi dan pemanfaatan lahan pasca tambang;
ix	Pelestarian bentang alam (sungai, gunung, bukit, dan hutan) yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal;

No	Landasan Transformasi
x	Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan daratan dan bakau serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (home range) dan konektivitas spesies yang dilindungi di antaranya Orang Utan Borneo dan Gajah Kalimantan;
xi	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana;
xii	Peningkatan mitigasi struktural dan nonstruktural dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan iklim;
xiii	Pengembangan solusi berbasis alam (natural based solution) untuk pengendalian bencana seperti banjir dan kebakaran hutan;
xiv	Peningkatan ketangguhan, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana;
xv	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal;
xvi	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang
xvii	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan; serta
xviii	Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan Wilayah Kalimantan.
Ketahanan Sumber Daya Air Terpadu	
i	Pembangunan bendungan yang diprioritaskan terintegrasi dengan Pengembangan Kawasan;
ii	Pembangunan irigasi baru terutama pada sawah tadah hujan eksisting dan area dengan kategori lahan sesuai sepenuhnya;
iii	Pengembangan natural based solution untuk pengendalian banjir;
iv	Pengembangan area yang didedikasikan sebagai retarding basin;
v	Pembangunan check dam pengendali aliran sedimen untuk menjamin keberlanjutan fungsi sungai sebagai alur pelayaran;
vi	Perlindungan IKN dari banjir kala ulang 100 tahun.

Sumber: RPJPN 2025-2045

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Permasalahan adalah situasi atau kondisi yang melibatkan suatu tantangan atau masalah yang perlu diatasi atau diselesaikan. Permasalahan dapat muncul dalam berbagai bidang kehidupan, baik itu dalam konteks pribadi, sosial, ekonomi, atau ilmiah. Umumnya, permasalahan melibatkan ketidaksesuaian antara keadaan yang diharapkan atau diinginkan (*expected*) dengan keadaan yang sebenarnya (*existing*).

3.1 Permasalahan

Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai entitas pemerintahan yang dinamis dan beragam, kini memasuki era baru pembangunan berkelanjutan. Subbab ini secara khusus akan membahas berbagai permasalahan yang dikenali sebagai tantangan kunci (*key challenges*) dalam perjalanan pembangunan. Melihat kondisi Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana telah diuraikan pada Bab 2 diidentifikasi sejumlah isu kritis yang segera memerlukan perhatian dan tindakan terkoordinasi, dari semua pemangku kepentingan. Temuan permasalahan dirumuskan dalam permasalahan utama sebagai berikut:

1. Kerusakan Lingkungan dan Praktik Pembangunan yang Tidak Berkelanjutan

Kerusakan lingkungan dan praktik pembangunan yang tidak berkelanjutan di Kabupaten Kutai Kartanegara mencerminkan tantangan multidimensi yang menggabungkan isu ekologi, ekonomi, dan sosial. Eksploitasi sumber daya alam yang meningkat, yang terutama didorong oleh proyek-proyek strategis, telah menimbulkan konsekuensi serius terhadap keseimbangan lingkungan. Situasi ini menunjukkan adanya ketidakharmonisan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan, yang pada akhirnya berpotensi merugikan masyarakat dan ekosistem setempat.

Dampak dari kerusakan lingkungan ini tidak hanya terbatas pada pencemaran air dan udara tetapi juga mencakup masalah pengelolaan sampah. Pertumbuhan ekonomi yang cepat sering kali tidak diikuti dengan peningkatan infrastruktur dan sistem pengelolaan lingkungan yang memadai. Hal ini tercermin dari penanganan sampah yang tidak konsisten, dimana persentase penanganan sampah yang berhasil sempat meningkat namun kemudian menurun drastis. Kondisi ini mencerminkan kurangnya efektivitas

dalam manajemen limbah, yang merupakan komponen penting dalam menjaga kualitas lingkungan.

Di sisi lain, penurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menandakan bahwa upaya perlindungan lingkungan yang ada saat ini belum mencukupi untuk menanggulangi dampak negatif dari aktivitas ekonomi yang berlangsung. Fluktuasi IKLH ini menjadi alarm bagi pemerintah dan masyarakat untuk segera mengadopsi strategi yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Perlu adanya upaya yang lebih terkoordinasi dan terpadu dalam menjaga kualitas lingkungan, yang meliputi peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan penerapan teknologi yang ramah lingkungan.

Selanjutnya, kualitas air dan udara yang menurun menggarisbawahi perlunya perhatian lebih pada isu pencemaran. Peningkatan beban pencemaran di sungai dan udara menunjukkan bahwa dampak lingkungan dari pembangunan telah melampaui kapasitas daya dukung alam. Ini bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga masalah kesehatan publik, mengingat bahwa air dan udara yang tercemar dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan bagi masyarakat.

Pada akhirnya, tantangan ini menyerukan adopsi pendekatan pembangunan yang holistik, di mana kebijakan ekonomi dan pembangunan harus sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan. Pemerintah, bersama dengan pemangku kepentingan lainnya, harus memprioritaskan pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tetapi juga mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial. Integrasi kebijakan lingkungan yang efektif, penegakan hukum lingkungan, serta partisipasi aktif masyarakat dan sektor swasta, menjadi kunci dalam menciptakan masa depan yang berkelanjutan dan inklusif untuk Kabupaten Kutai Kartanegara.

Melalui respons yang komprehensif dan berkelanjutan terhadap tantangan lingkungan ini, Kutai Kartanegara tidak hanya akan melindungi ekosistemnya tetapi juga membentuk dasar yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang inklusif dan bertanggung jawab. Kesadaran ini penting tidak hanya bagi Kabupaten Kutai Kartanegara, tetapi juga sebagai contoh bagi wilayah lain dalam membangun harmoni antara manusia dan alam.

Dengan menghadapi permasalahan yang serius terkait dengan kerusakan lingkungan dan praktik pembangunan yang tidak berkelanjutan (*unsustainable development*) serta berkembangnya proyek-proyek strategis

dan meningkatnya eksploitasi sumber daya alam, wilayah ini menderita berbagai eksternalitas negatif, termasuk di antaranya pencemaran dan kerusakan lingkungan, yang mengancam daya dukung dan produktivitas alam. Kerusakan lingkungan dan praktik pembangunan yang tidak berkelanjutan dapat disimpulkan dalam poin-poin sebagai berikut.

- a) Eksploitasi Sumber Daya Alam dan Dampak Negatif pada Kondisi Sosial maupun Lingkungan. Proyek-proyek strategis di Kabupaten Kutai Kartanegara memerlukan pemanfaatan sumber daya alam yang semakin meningkat, yang berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti pencemaran dan kerusakan lingkungan. Situasi ini dapat mengancam daya dukung, kapasitas ketahanan, dan produktivitas lingkungan hidup, yang pada akhirnya dapat menjadi beban bagi masyarakat.
- b) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Tren IKLH di Kabupaten Kutai Kartanegara pada 2016-2019 tampak meningkat, namun mengalami penurunan di 2020 menjadi 68,76. Meskipun kembali terjadi tren peningkatan pada 2021 (71,76), 2022 (71,77), 2023 (72,41), kondisi ini menunjukkan adanya fluktuasi kualitas lingkungan yang perlu diperhatikan. Faktor-faktor seperti peningkatan beban pencemaran sungai dan pembatasan kemampuan daya tampung lingkungan berkontribusi terhadap perubahan ini.
- c) Persentase Timbulan Sampah Yang dikurangi Melalui 3R (%). Terjadi peningkatan volume sampah di Kabupaten Kutai Kartanegara tiap tahunnya hingga memuncak di tahun 2023 (474.337 ribu m³). Hal ini dibersamai dengan meningkatnya timbulan sampah yang dikurangi melalui 3R dengan capaian tertinggi di tahun 2023 (20,35% dari total timbulan sampah). Meskipun begitu, capaian ini belum memenuhi standar minimal yang ditentukan secara nasional sebesar 30% di tahun 2025. Karenanya, diperlukan fokus pembangunan yang mengakomodir peningkatan kualitas manajemen pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.
- d) Kualitas Air dan Udara. Terdapat kecenderungan peningkatan beban pencemaran di sungai, yang memerlukan penanganan atas kualitas air secara luas. Meskipun capaian indeks kualitas udara masih dalam kategori baik, namun terjadi tren penurunan dari tahun sebelumnya. Hal tersebut menandakan adanya kebutuhan atas peningkatan upaya menjaga kualitas udara.

- e) Luas Lahan Kritis. Lebih dari setengah wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara berstatus Agak Kritis, tepatnya 52,04 persen atau seluas 1.316.168,42 Ha. Lahan Kritis di Kabupaten ini terindikasi sebesar 10,69 persen atau seluas 270.417,13 Ha. Kondisi lahan kritis ini menunjukkan degradasi lingkungan yang masih terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara hingga menurunkan kualitas tanahnya yang menjadi penghambat pertumbuhan tanaman serta cenderung lebih rentan terhadap erosi, kekeringan, dan kerusakan lingkungan lainnya.
- f) Konflik agraria yang masih kerap terjadi. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat Kalimantan Timur sebagai provinsi dengan konflik agraria terluas di Indonesia sepanjang 2023 yakni mencapai 251.259 hektare luas lahan, 12 konflik, dengan korban terdampak sebanyak 3.885 KK yang berada di 11 desa. Penyebab konflik agraria ini utamanya disebabkan oleh pembangunan infrastruktur yang tidak berkelanjutan sebanyak 5 konflik (251.259,3 hektar), tambang batu bara sebanyak 3 konflik (11.000 hektar), perkebunan (256,7 hektar), properti (83,6 hektar), fasilitas militer (6 hektar), dan kehutanan. Di Kutai Kartanegara sendiri, konflik agraria/kasus sengketa pertanahan tercatat oleh Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara terjadi sebanyak 29 pengaduan kasus di 2023 dengan tren meningkat sejak tahun 2021. Persebaran wilayah terjadinya kasus terbanyak di Kecamatan Muara Kaman, Loa Kulu, dan Tenggarong Seberang.

Permasalahan ini menyoroti kebutuhan mendesak untuk strategi pembangunan yang lebih berkelanjutan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kebijakan lingkungan yang efektif, peningkatan pengelolaan sumber daya alam, penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan, serta partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan, hingga upaya reforma agraria akan menjadi kunci dalam mengatasi tantangan ini. Tanpa perubahan yang signifikan dalam pendekatan terhadap pembangunan dan pengelolaan lingkungan, maka kerusakan yang terjadi akan mengandung konsekuensi dampak jangka panjang. Baik dampak pada ekosistem maupun kesejahteraan masyarakat setempat.

Hal ini perlu diawasi dan diantisipasi agar pembangunan di Kutai Kartanegara dapat berkontribusi pada peningkatan ekonomi tanpa menimbulkan kerugian terhadap lingkungan pun juga berdampak baik pada kehidupan masyarakat. Berbagai upaya dalam penerapan pembangunan

berkelanjutan ini dapat diintegrasikan melalui berbagai skema pembangunan ramah lingkungan didukung dengan upaya-upaya pembiayaan inovatif daerah dalam pelaksanaannya.

2. Ketimpangan dalam Pendidikan dan Kesehatan

Ketimpangan dalam pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara menandai isu penting dalam konteks pembangunan sosial yang inklusif. Meskipun terdapat peningkatan dalam beberapa indikator kunci seperti Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Usia Harapan Hidup (UHH), realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan, baik dalam akses maupun kualitas layanan di kedua sektor ini. Disparitas ini menciptakan tantangan dalam memastikan kesetaraan dan keadilan sosial bagi semua lapisan masyarakat.

Dalam sektor pendidikan, walaupun HLS di Kutai Kartanegara telah meningkat, masih terdapat ruang yang signifikan untuk perbaikan, terutama dalam hal akses dan kualitas pendidikan. Ketimpangan ini terutama dirasakan oleh anak-anak usia sekolah di wilayah terpencil dan komunitas marginal. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam sistem pendidikan, agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, tidak terhambat oleh faktor geografis atau ekonomi.

Di sektor kesehatan, peningkatan UHH mengindikasikan kemajuan, namun belum sepenuhnya mencerminkan kualitas layanan kesehatan yang merata. Masih terdapat perbedaan signifikan dalam aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan antara berbagai kelompok sosial-ekonomi di Kutai Kartanegara. Faktor-faktor seperti ketersediaan fasilitas, tenaga medis yang kompeten, dan ketersediaan obat-obatan menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan standar layanan kesehatan.

Ketimpangan ini bukan hanya berakar pada isu sumber daya, tetapi juga pada kebijakan dan praktik pengelolaan pendidikan dan kesehatan yang ada. Meskipun telah ada usaha peningkatan dalam kedua sektor ini, masih diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan terpadu untuk mengatasi ketimpangan. Upaya ini meliputi peningkatan investasi di daerah-daerah yang kurang terlayani, pengembangan program-program yang ditargetkan untuk komunitas marginal, dan penguatan sistem penilaian dan akuntabilitas untuk memastikan kualitas layanan.

Untuk mencapai kesetaraan dalam pendidikan dan kesehatan, diperlukan kerja sama dan komitmen dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga pendidikan, fasilitas kesehatan, dan masyarakat sipil. Pemberdayaan komunitas lokal melalui pendekatan partisipatif dalam perencanaan dan pengelolaan layanan pendidikan dan kesehatan juga merupakan kunci untuk menangani masalah ini secara efektif.

Mengatasi ketimpangan dalam pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara tidak hanya akan memberikan dampak positif bagi masyarakat saat ini tetapi juga akan berkontribusi pada pembangunan manusia yang berkelanjutan di masa depan. Investasi dalam pendidikan dan kesehatan merupakan dasar yang kuat untuk membangun masyarakat yang lebih sejahtera, berpengetahuan, dan sehat, yang pada gilirannya akan mendukung pembangunan ekonomi dan sosial yang lebih luas. Capaian yang menunjukkan pelayanan pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai berikut:

a) Pendidikan (HLS dan RLS)

1. Harapan Lama Sekolah di Kutai Kartanegara meningkat dari 13,25 tahun (2015) menjadi 13,64 tahun (2024). Meskipun terdapat peningkatan, namun angka tersebut sekaligus juga menunjukkan masih adanya ruang (*space*) untuk dilakukan perbaikan dalam sistem pendidikan, terutama dalam hal akses dan kualitas, yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak.
2. Rata-Rata Lama Sekolah juga meningkat dari 8,68 tahun (2015) menjadi 9,26 tahun (2023). Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Namun demikian, masih terdapat potensi untuk terus meningkatkan durasi pendidikan formal yang diperoleh masyarakat.

b) Kesehatan (Usia Harapan Hidup)

Usia Harapan Hidup meningkat dari 71,60 tahun (2015) menjadi 72,75 tahun (2023). Hal ini menunjukkan adanya kemajuan dalam sektor kesehatan. Namun demikian, angka tersebut masih lebih rendah jika dibandingkan dengan UHH Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini menandakan bahwa masih terdapat ruang untuk melakukan perbaikan di sektor kesehatan.

c) Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah di Kabupaten Kutai Kartanegara cenderung memiliki tren yang meningkat hingga tahun 2022 (SD 479; SMP 154). Kemudian terjadi penurunan pada tahun 2023 (SD 89; SMP 62). Hal ini perlu menjadi fokus Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menurunkan angka putus sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan di setiap jenjang.

Ketimpangan dalam pendidikan dan kesehatan di Kutai Kartanegara merupakan refleksi dari tantangan yang lebih luas dalam pembangunan sosial yang inklusif. Mengatasi tantangan ini memerlukan pendekatan yang komprehensif, inovatif, dan berkelanjutan, yang tidak hanya fokus pada peningkatan akses, tetapi juga pada peningkatan kualitas layanan dan kesetaraan dalam distribusi sumber daya. Dengan demikian, langkah-langkah strategis yang diambil hari ini akan menentukan kualitas hidup dan kemajuan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara di masa depan.

3. Risiko Instabilitas Sosial dan Politik

Risiko instabilitas sosial dan politik di Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan isu yang mendalam dan multifaset, yang dipicu oleh berbagai faktor ekonomi, sosial, dan politik. Dinamika ini, yang kian meningkat, menandai adanya ketegangan dalam struktur sosial dan politik yang bisa berujung pada ketidakstabilan jika tidak ditangani dengan bijak. Salah satu penyebab utama dari instabilitas ini adalah ketidaksetaraan ekonomi yang semakin meningkat, yang menciptakan jurang antara berbagai kelompok sosial dan ekonomi.

Ketidaksetaraan ekonomi di Kutai Kartanegara tercermin dari pertumbuhan yang tidak merata, di mana kelompok masyarakat berpendapatan rendah mengalami kenaikan pendapatan yang lambat, sementara kelompok berpendapatan tinggi menikmati pertumbuhan yang lebih cepat. Situasi ini bukan hanya menimbulkan masalah ekonomi tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakpuasan sosial dan politik. Ketidaksetaraan yang semakin melebar ini bisa mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi, serta meningkatkan potensi konflik sosial.

Selain ketidaksetaraan ekonomi, praktik demokrasi yang menghadapi tantangan juga berkontribusi terhadap risiko instabilitas. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah unjuk rasa dan demonstrasi, yang mencerminkan

ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dan kondisi sosial ekonomi. Tema demonstrasi yang mencakup aspek politik, ekonomi, dan sosial menunjukkan keberagaman isu yang menjadi kekhawatiran publik.

Indikator ketidakpuasan ini, yang tercermin dari tren unjuk rasa yang meningkat, merupakan sinyal penting akan adanya instabilitas sosial dan politik. Ini menjadi panggilan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk segera bertindak dalam mengatasi akar masalah yang menyebabkan ketidakpuasan. Diperlukan dialog yang lebih intensif dan inklusif antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun kepercayaan dan mencari solusi bersama atas isu-isu yang dihadapi.

Untuk mengurangi risiko instabilitas sosial dan politik, pendekatan yang komprehensif dan terpadu sangat diperlukan. Hal ini mencakup peningkatan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi, serta memastikan bahwa aspirasi semua kelompok masyarakat didengar dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Pemerintah perlu berfokus pada strategi yang mengurangi ketidaksetaraan ekonomi dan memperkuat praktik demokrasi yang sehat.

Dinamika sosial dan politik di Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditandai dengan meningkatnya risiko instabilitas. Isu utama yang berkontribusi terhadap situasi ini adalah ketidaksetaraan ekonomi yang semakin meningkat dan tantangan dalam praktik demokrasi. Dapat dijelaskan bahwa risiko instabilitas sosial dan politik di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

a) Pertumbuhan Ekonomi Tidak Merata

Terdapat ketidaksetaraan ekonomi yang signifikan, di mana kelompok masyarakat berpendapatan rendah mengalami pertumbuhan yang lebih lambat atau bahkan cenderung menurun, sementara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi mengalami pertumbuhan yang lebih cepat.

b) Dampak Sosial dan Politik

Ketidaksetaraan tersebut berpotensi menyebabkan ketidakpuasan sosial dan politik yang dapat mengarah pada meningkatnya tingkat instabilitas.

c) Tren Demonstrasi

Ketidaksetaraan ekonomi yang signifikan, di mana kelompok masyarakat berpendapatan rendah mengalami pertumbuhan yang lebih lambat atau bahkan cenderung menurun, sementara kelompok

masyarakat berpendapatan tinggi mengalami pertumbuhan yang lebih cepat. Ketidaksetaraan tersebut berpotensi menyebabkan ketidakpuasan sosial dan politik yang dapat mengarah pada meningkatnya tingkat instabilitas.

Peningkatan jumlah kegiatan demonstrasi baik terkait aspek politik, ekonomi, maupun sosial yang terjadi di tahun 2019 (73 kasus) dari tahun sebelumnya di 2018 (47 kasus) menjadi salah satu indikator ketidakpuasan sosial dan politik di tengah masyarakat, yang dapat diinterpretasikan sebagai tengara akan adanya instabilitas. Meski terjadi penurunan kasus kejadian demonstrasi di tahun 2020 (26 kasus), namun hal ini tetap perlu menjadi fokus dalam pengelolaan stabilitas sosial politik yang lebih kokoh di Kabupaten Kutai Kartanegara.

d) Indikator Ketidakpuasan

Kenaikan jumlah unjuk rasa merupakan salah satu indikator ketidakpuasan sosial dan politik di tengah masyarakat, yang dapat diinterpretasikan sebagai tengara akan adanya instabilitas.

Situasi tersebut menyoroti adanya kebutuhan mendesak untuk segera diambil tindakan dan kebijakan yang lebih inklusif yang bertujuan untuk mengurangi tingkat ketidaksetaraan, dan meningkatkan intensitas dialog antara pemerintah dan masyarakat. Diperlukan pendekatan yang komprehensif untuk mengatasi akar masalah ketidakpuasan ini, yang meliputi peningkatan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi, serta memastikan bahwa aspirasi semua kelompok masyarakat selalu didengar dan dipertimbangkan dalam setiap proses pengambilan keputusan.

4. Kolaborasi Pembangunan yang Belum Optimal

Kolaborasi dalam pembangunan merupakan kunci penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Di Kabupaten Kutai Kartanegara, meskipun telah ada kemajuan signifikan dalam beberapa aspek pembangunan, masih terdapat ruang untuk peningkatan dalam hal kolaborasi antar sektor dan organisasi perangkat daerah (OPD). Ini mencakup tidak hanya peningkatan koordinasi dan komunikasi antara berbagai OPD, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat sipil dan sektor swasta.

Salah satu tantangan utama dalam kolaborasi pembangunan di Kutai Kartanegara adalah koordinasi yang kurang efektif antara berbagai OPD. Ini sering kali mengakibatkan duplikasi usaha dan sumber daya, serta kurangnya keselarasan dalam implementasi kebijakan dan program pembangunan. Diperlukan pendekatan yang lebih terpadu dan terkoordinasi untuk memastikan bahwa semua upaya pembangunan saling mendukung dan berkontribusi secara efektif terhadap tujuan bersama.

Pengawasan dan indikator kinerja juga menjadi aspek penting dalam kolaborasi pembangunan yang optimal. Data terbaru menunjukkan adanya peningkatan dalam jumlah temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang menandakan perlunya peningkatan dalam pengawasan dan manajemen kinerja. Meskipun ada penurunan signifikan dalam temuan BPK pada tahun 2022, masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam hal pengawasan dan pengelolaan kinerja di berbagai sektor.

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan salah satu fondasi kebijakan bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan teknologi informasi. Namun, capaian skor yang rendah di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan bahwa kebijakan SPBE belum cukup komprehensif atau masih kurang sesuai dengan standar nasional. Hal ini menuntut tindakan komprehensif untuk meningkatkan kualitas kebijakan, tata kelola, layanan, dan manajemen SPBE.

Selain itu, pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia juga menjadi komponen penting dalam kolaborasi pembangunan. Terjadi penurunan dalam jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dari 2015-2023, menunjukkan adanya kebutuhan untuk peningkatan pelatihan dan pendidikan bagi pegawai ASN. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pegawai pemerintah memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mendukung implementasi pembangunan yang efektif.

Manajemen keuangan merupakan aspek kritis lainnya dalam kolaborasi pembangunan. Meskipun Kabupaten Kutai Kartanegara telah berhasil mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK sejak 2018 hingga 2022, tetap diperlukan pengelolaan yang lebih ketat dan transparan untuk memastikan penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Melalui kolaborasi yang lebih erat dan terpadu di antara berbagai sektor dan OPD, serta peningkatan manajemen sumber daya manusia dan keuangan, Kutai Kartanegara dapat mencapai pembangunan yang lebih optimal dan berkelanjutan.

Kabupaten Kutai Kartanegara telah meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan. Tantangan dalam indeks SPBE dan pengawasan kinerja menunjukkan bahwa upaya kolaboratif harus diperkuat untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Oleh karena itu, kolaborasi yang lebih erat antara OPD, pihak terkait, dan masyarakat, dapat menjadi kunci dalam merancang dan mengimplementasikan langkah-langkah holistik guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Data berikut ini menunjukkan beberapa permasalahan dalam hal efisiensi dan efektivitas organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Kutai Kartanegara. Poin-poin penting tersebut adalah sebagai berikut:

a) Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Daerah

Meskipun telah dibangun aplikasi seperti *E-Pantau* dan *E-Sakip* untuk meningkatkan koordinasi, monitoring, dan evaluasi, tetapi masih ada kebutuhan untuk sistem yang lebih efektif dan efisien dalam hal koordinasi, terutama mengingat banyaknya jumlah OPD dengan fungsi dan kewenangan yang berbeda-beda.

b) Pengawasan dan Indikator Kinerja

Data terbaru menunjukkan adanya tren peningkatan dalam hal jumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari tahun ke tahun, meskipun ada penurunan signifikan pada 2022. Hal tersebut menandakan bahwa masih ada ruang untuk melakukan perbaikan dalam hal pengawasan dan pengelolaan kinerja. Sementara itu, persentase tindak lanjut atas temuan BPK menunjukkan tren positif, namun masih juga perlu peningkatan.

Jumlah temuan BPK menunjukkan tren naik turun (fluktuatif) dari tahun ke tahun. Mulai dari 1.307 temuan (2016), sempat menurun pada 2017, namun kembali meningkat pada tahun-tahun berikutnya, sebelum turun dengan signifikan menjadi 611 temuan (2022).

c) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

SPBE adalah fondasi kebijakan bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan teknologi informasi. Capaian skor yang rendah (1,3) menunjukkan bahwa kebijakan SPBE di Kabupaten Kutai Kartanegara belum cukup komprehensif atau masih kurang sesuai dengan standar nasional. Hal ini bisa disebabkan karena

ketidakcukupan dalam perencanaan strategis, atau bisa juga karena kekurangan dalam hal regulasi yang mendukung SPBE.

Tata kelola yang efektif adalah kunci untuk suksesnya implementasi SPBE. Skor 1,5 mengindikasikan bahwa masih terdapat kekurangan dalam pengaturan, pengawasan, dan evaluasi SPBE. Masalah-masalah seperti koordinasi yang kurang efektif antardepartemen, ketiadaan standardisasi proses, atau kekurangan sumber daya manusia yang terampil bisa menjadi faktor penyebabnya.

Angka ini adalah area skor terendah, yang mencerminkan kinerja pelayanan publik berbasis elektronik. Skor 1,0 menandakan bahwa layanan yang disediakan melalui SPBE masih sangat terbatas, tidak mudah diakses masyarakat, atau tidak efektif. Hal ini bisa disebabkan karena infrastruktur teknologi informasi yang tidak memadai, aplikasi atau sistem yang tidak *user friendly*, atau minimnya integrasi antarlayanan.

Manajemen SPBE mencakup cara pengelolaan sumber daya, proyek, dan proses terkait SPBE. Skor 2,71 meskipun lebih tinggi dari aspek lainnya, tetap menunjukkan ruang untuk peningkatan. Hal ini mungkin menunjukkan adanya masalah dalam pengelolaan proyek, pengendalian kualitas, atau kurangnya pelatihan bagi staf yang bertugas dalam operasional SPBE.

Indeks SPBE merupakan agregasi dari keseluruhan aspek di atas. Skor 1,94 (2022) menggambarkan bahwa secara keseluruhan Kabupaten Kutai Kartanegara menghadapi tantangan signifikan dalam menerapkan SPBE secara efektif. Hal ini menuntut tindakan komprehensif untuk meningkatkan kualitas kebijakan, tata kelola, layanan, dan manajemen SPBE.

d) Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia

Terjadi penurunan dalam jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dari 2015-2022, hal menunjukkan adanya kebutuhan untuk peningkatan pelatihan dan pendidikan bagi pegawai ASN. Rata-rata durasi (jam) pelatihan yang diikuti oleh ASN cenderung meningkat, namun persentase ASN yang mengikuti pelatihan formal masih relatif rendah.

e) Manajemen Keuangan

Kabupaten Kutai Kartanegara telah mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK sejak 2018, yang menunjukkan peningkatan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Namun, untuk terus mempertahankan dan meningkatkan standar ini diperlukan pengelolaan yang lebih ketat dan transparan.

5. Ketergantungan Ekonomi yang Tinggi pada Sektor Ekstraktif

Ketergantungan ekonomi yang tinggi pada sektor ekstraktif di Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan tantangan signifikan yang dihadapi dalam konteks pembangunan ekonomi jangka panjang. Sektor ekstraktif, yang meliputi pertambangan batu bara dan minyak bumi, telah menjadi tulang punggung ekonomi lokal selama beberapa dekade. Meskipun kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah melalui bagi hasil sumber daya alam dan penciptaan lapangan kerja sangat signifikan, ketergantungan yang berlebihan pada sektor ini menimbulkan sejumlah risiko dan tantangan.

Salah satu risiko utama dari ketergantungan pada sektor ekstraktif adalah volatilitas harga komoditas global. Fluktuasi harga batu bara dan minyak bumi dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi lokal yang serius. Ketika harga komoditas menurun, dampaknya terhadap pendapatan daerah dan lapangan kerja bisa sangat signifikan. Hal ini menunjukkan perlunya diversifikasi ekonomi untuk mengurangi risiko yang terkait dengan fluktuasi pasar global.

Selain risiko ekonomi, ketergantungan pada sektor ekstraktif juga memiliki dampak lingkungan yang besar. Eksploitasi sumber daya alam secara intensif sering kali menyebabkan kerusakan lingkungan, termasuk deforestasi, pencemaran air, dan kerusakan ekosistem. Ini tidak hanya merugikan lingkungan tetapi juga berpotensi merusak kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat lokal jangka panjang.

Ketergantungan ekonomi pada sektor ekstraktif juga menciptakan tantangan dalam pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Banyak infrastruktur dan proyek pembangunan di Kutai Kartanegara didanai atau didorong oleh industri ekstraktif. Ketika terjadi penurunan dalam sektor ini, hal tersebut dapat mempengaruhi kemampuan daerah untuk mendanai proyek-proyek pembangunan lainnya.

Lebih lanjut, ketergantungan pada sektor ekstraktif cenderung menciptakan struktur ekonomi yang monostruktur, di mana pembangunan ekonomi sangat bergantung pada satu sektor. Hal ini membuat ekonomi daerah rentan terhadap perubahan dalam industri tersebut dan mengurangi kemampuan untuk menyerap shock ekonomi. Keberlanjutan ekonomi jangka panjang menjadi pertanyaan besar dalam kondisi seperti ini.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan strategi diversifikasi ekonomi yang kuat di Kutai Kartanegara. Ini melibatkan pengembangan sektor-sektor lain seperti pertanian, pariwisata, dan manufaktur berkelanjutan, serta investasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk membangun tenaga kerja yang terampil dalam berbagai bidang. Diversifikasi ekonomi tidak hanya akan mengurangi risiko yang terkait dengan sektor ekstraktif tetapi juga membuka peluang baru untuk pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan. Melalui pendekatan yang lebih seimbang dan beragam, Kutai Kartanegara dapat membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat dan tahan terhadap perubahan pasar global. Penjelasan spesifik yang menunjukkan ketergantungan ekonomi yang tinggi pada sektor ekstraktif adalah sebagai berikut.

1) Sumber Pendapatan Utama

Sektor ekstraktif, khususnya pertambangan batu bara dan minyak bumi, merupakan kontributor utama terhadap Pendapatan Daerah melalui Pendapatan Transfer bagi hasil sumber daya alam Kutai Kartanegara. Kutai Kartanegara.

2) Tenaga Kerja Sektor Ekstraktif

Mayoritas masyarakat Kutai Kartanegara bergantung pada lapangan kerja yang disediakan oleh sektor ekstraktif.

3) Dampak Sosial Ekonomi

Ketergantungan tersebut menciptakan risiko sosial ekonomi apabila terjadi penurunan aktivitas atau penutupan operasional pertambangan batu bara dan ekstraksi minyak bumi.

4) Pembangunan Berbasis Sumber Daya

Sebagian infrastruktur dan proyek pembangunan di Kutai Kartanegara didanai atau didorong oleh keberadaan industri ekstraktif.

5) Risiko Monostruktur Ekonomi

Ketergantungan pada pendapatan dan pembangunan yang berasal dari satu sektor menyebabkan struktur ekonomi yang homogen dan rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global.

6) Keberlanjutan Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya alam seperti batu bara dan minyak bumi adalah terbatas dan berisiko habis jika terus dieksploitasi tanpa adanya pengelolaan yang berkelanjutan.

7) Ancaman Ekonomi Jangka Panjang

Ketergantungan yang berkepanjangan pada sumber daya alam yang menipis dapat menyebabkan kesulitan ekonomi serius ketika sumber daya tersebut habis atau tidak lagi ekonomis untuk dieksploitasi.

Dalam mengatasi ketergantungan ekonomi pada sektor ekstraktif membutuhkan pendekatan jangka panjang dan komitmen dari semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, industri, dan masyarakat. Kerjasama dan inovasi akan menjadi kunci dalam menciptakan ekonomi yang lebih beragam, berkelanjutan, dan tangguh di Kutai Kartanegara. Selain itu, pembiayaan inovatif daerah juga perlu diintegrasikan dalam mewujudkan upaya ini. Dengan mengurangi ketergantungan pada sektor ekstraktif, daerah ini dapat membangun fondasi yang lebih kuat untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan jangka panjang.

6. Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah

Ketimpangan pembangunan antarwilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu tantangan utama dalam upaya mencapai pembangunan yang inklusif dan merata. Wilayah ini, dengan karakteristik geografisnya yang beragam, menghadapi masalah distribusi pembangunan yang tidak seimbang, dimana beberapa wilayah menikmati kemajuan yang lebih cepat dibandingkan dengan wilayah lain yang tertinggal. Ketimpangan ini mencerminkan adanya disparitas dalam akses terhadap sumber daya, infrastruktur, dan layanan publik.

Salah satu manifestasi dari ketimpangan pembangunan antarwilayah ini adalah perbedaan signifikan dalam kualitas dan ketersediaan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sarana irigasi, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan. Wilayah-wilayah yang lebih terpencil dan terisolasi sering kali menghadapi keterbatasan dalam akses ke infrastruktur dasar yang berkualitas, yang mempengaruhi kualitas hidup dan peluang ekonomi bagi penduduk di daerah tersebut.

Distribusi pendapatan yang tidak merata juga menjadi aspek penting dari ketimpangan ini. Kelompok masyarakat berpendapatan rendah di beberapa wilayah lebih rentan terhadap kemiskinan dan keterbatasan ekonomi, sedangkan kelompok berpendapatan tinggi di wilayah lain menikmati akses yang lebih baik terhadap peluang ekonomi. Indeks Gini yang fluktuatif di Kutai Kartanegara menunjukkan variasi tingkat ketidaksetaraan ekonomi ini dari waktu ke waktu.

Faktor geografis juga memainkan peran penting dalam ketimpangan pembangunan ini. Karakteristik geografis yang beragam di Kutai Kartanegara menimbulkan tantangan tersendiri dalam distribusi dan pemerataan pembangunan, terutama di daerah pedesaan. Ini mengakibatkan beberapa wilayah lebih sulit diakses dan mendapatkan manfaat dari program pembangunan dibandingkan dengan wilayah lain yang lebih terhubung dan terintegrasi.

Untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antarwilayah, diperlukan pendekatan yang holistik dan terkoordinasi dari pemerintah daerah. Ini termasuk alokasi sumber daya yang lebih seimbang, peningkatan investasi dalam infrastruktur dan layanan di wilayah yang kurang berkembang, serta pengembangan program yang dirancang khusus untuk mengatasi kebutuhan spesifik wilayah tertentu.

Pendekatan yang inklusif dan partisipatif juga penting dalam menangani masalah ini. Pemberdayaan masyarakat lokal dan pemangku kepentingan di setiap wilayah untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan dapat membantu memastikan bahwa pembangunan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka. Dengan demikian, Kutai Kartanegara dapat bergerak menuju tujuan pembangunan yang lebih merata dan inklusif, dimana setiap wilayah dan komunitasnya memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan sejahtera.

Ketimpangan pembangunan antarwilayah merupakan isu krusial yang dihadapi oleh banyak daerah, termasuk Kabupaten Kutai Kartanegara. Masalah ini tercermin dalam berbagai dimensi, seperti distribusi pendapatan yang tidak merata dan tantangan geografis yang unik. Beberapa masalah utama yang telah diidentifikasi adalah sebagai berikut.

- 1) Ketidakmerataan distribusi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan rendah, telah menimbulkan ketidaksetaraan ekonomi dan kemiskinan. Indeks Gini yang fluktuatif menunjukkan variasi tingkat ketidaksetaraan ekonomi tersebut.

Ketidaksetaraan ekonomi menjadi masalah penting, yang diukur menggunakan Rasio Gini. Indeks Rasio Gini di Kabupaten Kutai Kartanegara dari 2015-2023 menunjukkan angka yang fluktuatif. Indeks tertinggi tercatat pada 2018 (0,302) dan terendah pada 2022 (0,269) yang kemudian meningkat di tahun 2023 (0,284). Fluktuasi ini

mencerminkan perubahan tingkat ketidaksetaraan ekonomi dari waktu ke waktu.

- 2) Karakteristik geografis Kabupaten Kutai Kartanegara yang beragam juga menimbulkan kesulitan dalam pemerataan pembangunan, terutama di daerah perdesaan.

7. Ketersediaan Infrastruktur yang Belum Optimal

Ketersediaan infrastruktur yang belum optimal di Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu isu krusial dalam konteks pembangunan regional. Infrastruktur yang memadai merupakan salah satu pilar utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, di Kutai Kartanegara, terdapat beberapa hambatan dan tantangan yang menghambat pengembangan infrastruktur yang efisien dan efektif.

Salah satu aspek penting dari masalah infrastruktur ini adalah kondisi jalan dan jembatan. Meskipun ada proporsi jalan yang berada dalam kondisi baik, sebagian besar jalan di wilayah ini masih dalam kondisi yang kurang memadai, termasuk jalan rusak ringan dan berat. Kondisi ini tidak hanya menghambat mobilitas dan transportasi tetapi juga berpengaruh negatif terhadap efisiensi ekonomi dan akses masyarakat ke layanan dasar. Jembatan, yang juga merupakan komponen kritis dalam infrastruktur transportasi, terutama di wilayah yang banyak memiliki sungai atau kanal, menghadapi tantangan yang serupa dalam hal kualitas dan ketersediaan.

Selanjutnya, kondisi sarana irigasi yang mengalami penurunan kualitas secara signifikan berdampak besar terhadap sektor pertanian. Penurunan ini menurunkan tingkat efisiensi dalam pengelolaan air untuk kebutuhan irigasi, yang penting untuk produktivitas pertanian. Mengingat peran penting sektor pertanian dalam ekonomi lokal, penurunan ini bisa memiliki dampak jangka panjang yang serius pada pendapatan dan kesejahteraan petani.

Masalah lainnya adalah ketersediaan sarana air bersih dan sanitasi. Meskipun ada peningkatan dalam rasio rumah tangga yang menggunakan air bersih, masih terdapat kebutuhan yang besar untuk meningkatkan infrastruktur yang terkait dengan penyediaan air bersih dan fasilitas sanitasi yang memadai. Ketersediaan air bersih dan sanitasi yang baik adalah kunci untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat.

Pembangunan infrastruktur lainnya, seperti gedung kantor, sarana pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur telekomunikasi, juga sangat penting. Infrastruktur ini mendukung kegiatan ekonomi dan membantu

meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, di Kutai Kartanegara, pengembangan infrastruktur ini masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk keterbatasan dana dan sumber daya.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan investasi yang lebih besar dan perencanaan yang lebih efektif dari pemerintah daerah. Kerja sama dengan sektor swasta dan pihak-pihak terkait lainnya dapat menjadi cara untuk meningkatkan investasi dalam infrastruktur. Selain itu, penerapan teknologi baru dan praktik pengelolaan yang lebih efisien juga dapat membantu mengatasi tantangan infrastruktur di Kutai Kartanegara. Melalui pendekatan yang komprehensif dan terpadu, Kutai Kartanegara dapat bergerak menuju pengembangan infrastruktur yang lebih optimal, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Permasalahan utama yang teridentifikasi adalah yang berkaitan dengan belum optimalnya ketersediaan infrastruktur sebagai pendukung kegiatan ekonomi meliputi hal-hal sebagai berikut:

1) Kondisi Jalan dan Jembatan:

Jalan: Terdapat proporsi jalan dalam kondisi baik, sedang, rusak ringan, dan rusak berat. Pada 2022, jalan dalam kondisi baik hanya 23,93 persen, sedangkan jalan rusak ringan dan berat masing-masing 22,39 persen dan 15,93 persen. Hal ini menunjukkan bahwa hampir 40 persen kondisi jalan di Kabupaten Kutai Kartanegara tidak berada dalam kondisi yang baik. Tentu saja hal ini akan menghambat konektivitas dan efisiensi sektor transportasi.

Jembatan: Meskipun tercatat dalam kondisi baik, kualitas dan ketersediaan jembatan merupakan faktor penting dalam infrastruktur transportasi, khususnya di daerah yang memiliki banyak sungai atau kanal.

2) Sarana Irigasi:

Pada 2022, terjadi penurunan drastis dalam kondisi sarana irigasi yang baik, dari 78,17 persen menjadi hanya 46,06 persen. Hal ini berdampak signifikan pada sektor pertanian, menurunkan tingkat efisiensi dalam hal pengelolaan air untuk kebutuhan irigasi.

3) Sarana Air Bersih dan Sanitasi:

Meskipun terjadi peningkatan dalam angka rasio rumah tangga yang menggunakan air bersih, tetapi tetap ada kebutuhan untuk meningkatkan infrastruktur yang berkaitan dengan penyediaan air bersih dan fasilitas sanitasi yang memadai.

4) Ketersediaan Infrastruktur lainnya:

Pembangunan infrastruktur lain seperti gedung kantor, sarana pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur telekomunikasi juga menjadi faktor penting dalam mendukung kegiatan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

8. Tergerusnya Nilai Budaya Lokal dan Ketidaksetaraan Sosial

Tergerusnya nilai budaya lokal dan ketidaksetaraan sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara mencerminkan isu kompleks yang mengancam identitas kultural dan kohesi sosial di wilayah ini. Dinamika modernisasi dan globalisasi telah membawa perubahan signifikan, yang seringkali menyebabkan nilai-nilai dan tradisi lokal tersisihkan. Ketika nilai budaya lokal mulai terkikis, tidak hanya warisan budaya yang terancam, tetapi juga identitas dan kekayaan kultural yang menjadi fondasi komunitas.

Penggerusan nilai budaya ini dapat terlihat dari penurunan frekuensi dan skala penyelenggaraan festival seni dan budaya, yang telah menjadi bagian penting dari kehidupan sosial di Kutai Kartanegara. Pandemi COVID-19 telah mempercepat tren ini, menyebabkan penurunan signifikan dalam kegiatan budaya. Ketika festival dan acara budaya berkurang, kesempatan bagi masyarakat untuk berkumpul, merayakan, dan memelihara warisan budayanya menjadi terbatas. Ini tidak hanya merugikan dari segi pelestarian budaya tetapi juga mengurangi kohesi dan kebersamaan dalam masyarakat.

Di samping erosi nilai budaya, Kutai Kartanegara juga menghadapi masalah ketidaksetaraan sosial, yang diperparah oleh ketidaksetaraan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata antara kelompok pendapatan tinggi dan rendah telah menciptakan jurang sosial yang signifikan. Ini berdampak pada akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Ketika sebagian masyarakat merasa ditinggalkan atau tidak terwakili, hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan ketegangan sosial.

Ketidaksetaraan ini juga mempengaruhi cara masyarakat berinteraksi dengan dan menghargai budaya lokal. Kelompok masyarakat yang merasa terpinggirkan mungkin merasa terputus dari warisan budaya lokal atau merasa bahwa budaya mereka tidak dihargai. Hal ini dapat memperburuk penggerusan nilai budaya, menciptakan lingkaran setan antara kehilangan budaya dan ketidaksetaraan sosial.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya terpadu dari pemerintah daerah, lembaga budaya, dan masyarakat sipil. Ini termasuk pembiayaan dan dukungan untuk acara budaya, serta inisiatif yang dirancang untuk mempromosikan dan merayakan keanekaragaman budaya Kutai Kartanegara. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan budaya lokal mereka adalah kunci untuk memelihara identitas dan warisan kultural.

Selain itu, upaya untuk mengatasi ketidaksetaraan sosial harus ditingkatkan. Ini termasuk investasi dalam pendidikan dan pelatihan, pengembangan ekonomi inklusif, dan kebijakan yang ditujukan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Dengan menangani ketidaksetaraan sosial, Kutai Kartanegara tidak hanya akan memperkuat kohesi sosial tetapi juga memberikan fondasi yang lebih kuat untuk pelestarian dan pengembangan budaya lokal.

Melalui langkah-langkah ini, Kutai Kartanegara dapat menjaga kekayaan budayanya sambil membangun masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Pelestarian nilai budaya lokal dan penanganan ketidaksetaraan sosial merupakan dua hal yang saling terkait dan penting dalam membangun masa depan yang harmonis dan sejahtera bagi semua warga Kutai Kartanegara. Berikut adalah faktor permasalahan yang teridentifikasi.

1) Ketidaksetaraan Ekonomi, Pertumbuhan Berbeda antara Kelompok Ekonomi dan Dampak Sosial dan Politik

Ketidaksetaraan terjadi ketika kelompok masyarakat berpendapatan rendah mengalami pertumbuhan yang lambat, sementara kelompok berpendapatan tinggi tumbuh lebih cepat. Dampak sosial dan politik ini dapat menyebabkan ketidakpuasan sosial dan politik. Hal ini juga menandakan adanya masalah yang lebih berat dalam struktur sosioekonomi.

2) Penggerusan Nilai Budaya Lokal

Dampak pandemi Covid-19 terhadap Festival Budaya, telah menurunkan frekuensi penyelenggaraan festival seni dan budaya dari rata-rata 76-78 kali per tahun menjadi hanya 2-3 kali pada 2020- 2021. Jumlah sarana penyelenggaraan juga turun dari 18 unit menjadi hanya 2-4 unit.

Ketidaksetaraan sosial dan erosi nilai budaya lokal adalah dua masalah yang saling terkait dan berdampak signifikan terhadap struktur sosial dan identitas budaya masyarakat. Ketidaksetaraan ekonomi mencerminkan kesenjangan yang mendalam dan berpotensi menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik. Sementara itu, penurunan kegiatan budaya akibat pandemi menunjukkan risiko kehilangan warisan dan nilai budaya yang penting bagi identitas masyarakat.

Kedua isu tersebut memerlukan perhatian serius dan tindakan strategis dari pihak-pihak terkait untuk memastikan keseimbangan dan keberlanjutan sosial serta budaya dalam masyarakat. Solusi yang inklusif, berkelanjutan, dan menghargai keragaman budaya menjadi kunci dalam mengatasi permasalahan ini.

3.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan masalah atau tantangan yang signifikan, yang berdampak luas dan jangka panjang terhadap suatu entitas, seperti organisasi, negara, atau masyarakat. Karakteristik utama dari isu strategis adalah sifatnya yang kompleks dan multidimensional yang seringkali mempengaruhi berbagai aspek. Isu strategis tidak hanya menghadirkan tantangan, tetapi juga peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kemajuan dan inovasi.

Mengatasi isu strategis membutuhkan pendekatan yang terstruktur dan strategis. Hal ini melibatkan identifikasi masalah secara menyeluruh, analisis dampak potensial, dan perumusan rencana yang efektif. Rencana ini harus mencakup pengaturan sumber daya, penetapan prioritas, dan implementasi tindakan yang terukur. Penting juga untuk memiliki fleksibilitas dalam rencana tersebut, mengingat dinamika lingkungan yang cepat berubah.

Dalam sebuah entitas, isu strategis memerlukan pengambilan keputusan pada tingkat tertinggi. Keputusan ini harus didasarkan pada data dan analisis komprehensif, dengan mempertimbangkan berbagai perspektif dan kepentingan. Setelah keputusan diambil, implementasi yang efektif adalah kunci, yang melibatkan pemantauan berkelanjutan dan penyesuaian tindakan sesuai dengan perkembangan situasi. Proses ini memastikan bahwa isu strategis ditangani dengan cara yang efisien dan efektif, mengarah pada hasil yang berkelanjutan.

3.2.1. Isu Strategis Global

Isu strategis global adalah masalah atau tantangan yang berdampak secara luas dan melintasi batas-batas negara, mempengaruhi masyarakat internasional dalam skala besar. Sifatnya yang global telah menuntut perhatian dan tindakan yang melampaui kemampuan satu negara atau wilayah, memerlukan kerjasama dan koordinasi antarnegara serta organisasi internasional.

Kerjasama ini tidak hanya penting untuk menangani masalah yang timbul, tetapi juga untuk mencegah munculnya masalah serupa di masa depan, menjaga stabilitas dan keberlanjutan bagi generasi mendatang. Berikut ini merupakan isu global yang perlu perhatian.

1) Pertanian Presisi dan Pengelolaan Pangan

Menghadapi tantangan global dalam peningkatan produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan populasi dunia yang diperkirakan akan mencapai 9,1 miliar jiwa pada 2050. Menggunakan inovasi teknologi pertanian dan data geospasial untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan pertanian.

2) Dampak Perubahan Iklim pada Ketahanan Pangan

Mengatasi tantangan perubahan iklim dan dampaknya pada ketahanan pangan global. Perlunya teknologi dan inovasi dalam pengelolaan sumber daya alam untuk menghadapi tantangan ini.

3) Konstelasi kerjasama antarnegara memainkan peran krusial dalam mempengaruhi rantai pasok dan distribusi logistik global.

Menghadapi tantangan global dalam kerjasama antarnegara yang berpengaruh pada rantai pasok dan distribusi logistik global, perlu disikapi dengan hubungan bilateral maupun multilateral antarnegara.

3.2.2. Isu Strategis Nasional

Isu strategis nasional menandakan bahwa masalah atau tantangan yang berpengaruh khusus pada skala negara. Isu ini berkaitan dengan berbagai aspek yang mempengaruhi negara secara keseluruhan, dan tidak hanya mencakup aspek internal, tapi juga cara negara tersebut berinteraksi dengan dunia luar. Isu semacam ini membutuhkan perhatian dan intervensi langsung dari pemerintah, serta kerja sama antarlembaga pemerintahan yang berbeda.

Dampak dari isu strategis nasional sangat luas dan mendasar, berpotensi mengubah jalannya pembangunan dan kebijakan negara. Oleh

karena itu, isu strategis nasional memegang peranan penting dalam menentukan arah dan kemajuan negara dan daerah khususnya Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berikut ini adalah isu-isu nasional yang perlu perhatian di tingkat nasional yang akan berpengaruh terhadap kebijakan Kabupaten Kutai Kartanegara.

1. Pemanfaatan Informasi Geospasial dalam Pembangunan Berkelanjutan dan Ekonomi Digital

a. Strategi Nasional untuk Pengembangan Ekonomi Digital dan Ketahanan Pangan

Mengoptimalkan penggunaan informasi geospasial untuk berbagai keperluan, termasuk pembangunan berkelanjutan, peningkatan ketahanan pangan, dan pengembangan ekonomi digital;

b. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Menangani perlunya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara efektif dan berkelanjutan, khususnya di Indonesia sebagai negara dengan sumber daya alam yang kaya.

2. Pembangunan Infrastruktur Nasional

Pemerintah Indonesia menaruh perhatian besar pada pembangunan infrastruktur, khususnya layanan dasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan sebagai bukti atas kehadiran negara. Infrastruktur berperan besar dalam pembangunan wilayah, di mana kualitas dan kuantitas infrastruktur berpengaruh terhadap dimensi pembangunan lain seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Ketersediaan infrastruktur yang andal tidak hanya menjadi penggerak sektor ekonomi, tetapi juga berpengaruh terhadap dimensi pembangunan lain seperti pendidikan, sosial, aksesibilitas wilayah, dan lainnya.

3. Energi Terbarukan dan Emisi Karbon

Demi menjamin keamanan energi jangka panjang dan mendatang, melakukan transisi menuju energi terbarukan untuk mengurangi emisi karbon dan melawan perubahan iklim.

4. Kemiskinan

Menanggulangi kemiskinan dengan pendekatan inklusif yang berfokus pada akses ke layanan dasar, kesempatan ekonomi dan pendidikan.

5. Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan

Memperkuat sistem pendidikan dan kesehatan untuk memastikan akses yang merata dan berkualitas bagi semua lapisan masyarakat.

3.2.3. Isu Strategis Regional

Kutai Kartanegara adalah salah satu kabupaten terbesar di Kalimantan Timur, memiliki peran penting dalam ekonomi regional. Di sisi lain, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai entitas yang lebih besar, berusaha mengimbangi kebutuhan pembangunan ekonomi dengan kelestarian lingkungan.

Isu seperti pembagian alokasi sumber daya, pengelolaan dampak lingkungan, dan pembangunan infrastruktur menjadi topik utama dalam hubungan antara kabupaten dan provinsi. Masalah lain yang sering muncul adalah koordinasi antarpemerintah kabupaten dan provinsi dalam proyek-proyek besar, seperti pembangunan jalan dan fasilitas umum, yang sering kali memerlukan penyeimbangan antara kepentingan lokal dan regional.

Kedua pihak harus bekerja sama untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan dapat tercapai tanpa mengorbankan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Beberapa isu strategis regional yang perlu diperhatikan oleh Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

1. Pertanian dan Ketahanan Pangan di Kutai Kartanegara dan Kalimantan Timur

a. Provinsi Kalimantan Timur

Menanggapi kondisi ekonomi dan ketahanan pangan yang rendah di Kalimantan Timur, termasuk peningkatan efisiensi dan produksi pangan.

b. Kabupaten Kutai Kartanegara

Mengatasi tantangan di sektor agro dan pangan, termasuk peningkatan akses kepada input pertanian dan pengembangan teknologi pertanian yang efisien.

Upaya ini juga merupakan sinkronisasi kawasan penyangga lingkungan dan pendukung ketahanan pangan IKN di wilayah Kutai Kartanegara, yang meliputi sebagian Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Loa Janan, dan Kecamatan Sanga-sanga sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022. Selain itu, terdapat pula sebagian wilayah yang telah keluar dari wilayah Kutai Kartanegara dan masuk ke wilayah delineasi IKN yakni

Kecamatan Muara Jawa dan Kecamatan Samboja yang juga ditetapkan sebagai kawasan penyangga lingkungan dan pendukung ketahanan pangan IKN.

2. Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Berkelanjutan

Pendekatan ESG di IKN. Menggunakan informasi geospasial untuk mendukung pengembangan Ibu Kota Negara (IKN) dengan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG), menciptakan kota yang berkelanjutan dan berorientasi pada lingkungan.

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) ini juga menjadi isu strategis yang menjadi potensi bagi pengembangan Kabupaten Kutai Kartanegara yang semakin pesat dengan pembangunan yang akan semakin masif di Kalimantan Timur khususnya di wilayah-wilayah penyangga IKN seperti Kutai Kartanegara. Selain itu, pembangunan IKN ini juga memberikan tanggungjawab kepada Kutai Kartanegara sesuai mandat nasional pada Perpres Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara sebagai pusat pangan yang berperan sebagai penyangga lingkungan dan pendukung ketahanan pangan, permukiman perkotaan yang mencakup cadangan lahan perluasan kota dan pelayanan perkotaan skala lokal, serta pariwisata yang mengutamakan keunggulan budaya Kutai Kartanegara.

3. Penyelenggaraan Infrastruktur Jalan

Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki kewenangan atas penyelenggaraan infrastruktur jalan, termasuk jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota. Kewenangan ini meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.

4. Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang

Kementerian PUPR memfasilitasi penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), yang memuat ketentuan program rencana, ketentuan pengendalian pengembangan lingkungan antarkawasan bangunan dan lingkungan. Ini penting untuk pengembangan wilayah seperti Kabupaten Kutai Kartanegara. Pemanfaatan ruang di Kabupaten Kutai Kartanegara ini juga memiliki muatan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) yang dilaksanakan melalui kewenangan vertikal. Hal ini agar selaras dengan keterwujudan arahan zonasi baik struktur maupun pola ruang yang ada di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

5. Pembangunan Jalan dan Prasarana Transportasi

Infrastruktur jalan, termasuk jembatan dan prasarana transportasi lainnya, merupakan komponen penting dalam pembangunan infrastruktur di daerah. Ini mencakup segala bagian jalan, bangunan penghubung, bangunan pelengkap, dan perlengkapannya, yang diperuntukkan bagi kelancaran lalu-lintas.

3.2.4. Isu Strategis Daerah

Isu strategis daerah adalah masalah atau tantangan yang khusus terjadi dan berdampak di Kabupaten Kutai Kartanegara. Isu ini terkait erat dengan kebutuhan, sumber daya, dan kondisi spesifik wilayah tersebut. Isu strategis daerah memerlukan penanganan pemerintah daerah, berpengaruh langsung pada penduduk dan pembangunan wilayah tersebut.

Berdasarkan rumusan permasalahan utama pada Subbab 3.1. dapat teridentifikasi isu strategis yang akan dihadapi Kabupaten Kutai Kartanegara dalam jangka panjang, sebagai berikut.

- a) Pembangunan yang berwawasan lingkungan untuk mengatasi kerusakan lingkungan dan praktik pembangunan yang tidak berkelanjutan.

Pembangunan berwawasan lingkungan di Kutai Kartanegara bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Ini penting karena pembangunan yang tidak mempertimbangkan aspek lingkungan dapat menyebabkan kerusakan jangka panjang, seperti polusi, kerusakan habitat, dan perubahan iklim. Sehingga perlu strategi pengelolaan sumber daya alam yang menekankan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Hal ini bisa mencakup kebijakan yang mengatur pemanfaatan sumber daya seperti air, hutan, dan mineral, dengan cara yang meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan memastikan keberlanjutan untuk generasi mendatang.

Salah satu fokus utama pembangunan berwawasan lingkungan adalah mitigasi dampak negatif dari aktivitas manusia. Ini dapat mencakup berbagai kegiatan seperti reboisasi, pengolahan limbah, dan penggunaan energi terbarukan. Tujuannya adalah untuk mengurangi emisi karbon, mencegah pencemaran, dan menjaga kualitas lingkungan. Di samping itu rehabilitasi area yang rusak dan konservasi ekosistem alami sangat penting. Ini bisa melibatkan restorasi habitat yang rusak,

perlindungan area konservasi, dan upaya untuk mempertahankan keanekaragaman hayati. Program semacam ini membantu dalam memulihkan lingkungan yang telah rusak oleh kegiatan ekstraktif atau pembangunan.

Pembangunan berwawasan lingkungan di Kutai Kartanegara mungkin diarahkan ke prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, yang tidak hanya mempertimbangkan faktor ekonomi tetapi juga sosial dan lingkungan. Ini berarti bahwa setiap keputusan pembangunan harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kehidupan warga dan kelestarian lingkungan.

Pembangunan berwawasan lingkungan juga memerlukan keterlibatan aktif dari masyarakat lokal dan pemangku kepentingan lainnya. Pendidikan lingkungan, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan kesadaran publik tentang isu-isu lingkungan adalah kunci keberhasilan.

Untuk memastikan efektivitas pembangunan berwawasan lingkungan, monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan sangat penting. Hal ini memungkinkan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk menilai dampak dari berbagai kebijakan dan proyek, serta melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Selain itu, dalam upaya mendukung pembangunan yang berkelanjutan, utamanya dalam pelestarian lingkungan, Kutai Kartanegara juga dapat berkontribusi pada transisi menuju energi terbarukan. Hal ini sekaligus menjadi implementasi optimalisasi wilayah Kutai Kartanegara yang memiliki potensi energi terbarukan tertinggi di Kalimantan Timur, utamanya pada potensi tenaga surya, tenaga angin, dan PLTS terapung.

- b) Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan serta kesehatan, terutama di wilayah terpencil, dengan fokus pada peningkatan akses dan kualitas layanan secara merata.

Salah satu fokus utama adalah membangun dan memperbaiki infrastruktur pendidikan, terutama di wilayah terpencil. Ini mencakup pembangunan sekolah baru, perbaikan fasilitas yang ada, dan penyediaan peralatan serta materi pendidikan yang memadai. Implementasi teknologi dalam proses belajar mengajar menjadi penting, terutama untuk meningkatkan akses pendidikan di wilayah terpencil.

Penggunaan teknologi digital dapat membantu mengatasi hambatan geografis dan sumber daya guru.

Di samping itu, pengembangan kurikulum dan program pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal, dengan fokus pada kemampuan yang relevan dengan pasar kerja lokal dan nasional.

Selanjutnya dalam mengembangkan dan meningkatkan fasilitas kesehatan, seperti puskesmas dan rumah sakit, khususnya di daerah terpencil, untuk memastikan akses yang lebih baik ke layanan kesehatan. Memastikan akses layanan kesehatan termasuk distribusi sumber daya kesehatan yang merata, tenaga medis, obat-obatan, dan peralatan.

Selain itu, melaksanakan program-program yang berfokus pada kesehatan preventif dan promotif, termasuk kampanye edukasi kesehatan, vaksinasi, dan program kesehatan masyarakat.

Untuk meningkatkan efektivitas dan jangkauan layanan Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara perlu mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, swasta, dan organisasi non-pemerintah.

- c) Mengatasi ketidaksetaraan dan memperkuat lembaga demokrasi dengan tujuan untuk penguatan pembangunan layanan dan informasi publik secara berkeadilan.

Mengatasi ketidaksetaraan dan memperkuat lembaga demokrasi adalah dua sisi dari satu mata uang yang sama dalam mewujudkan pembangunan layanan dan informasi publik secara berkeadilan. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur, seperti jalan dan transportasi, serta peningkatan fasilitas umum, tidak hanya meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas di daerah terpencil tetapi juga memicu pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memberikan peluang ekonomi yang merata bagi semua lapisan masyarakat. Pendidikan berkualitas dan pelatihan kerja yang relevan dengan kebutuhan industri lokal adalah kunci untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja, sehingga mereka dapat memanfaatkan peluang ekonomi yang muncul. Dalam hal kesejahteraan sosial, fokus pada peningkatan akses layanan bagi kelompok miskin dan rentan membantu mengurangi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, sambil mempromosikan pengembangan sumber daya manusia yang lebih luas.

Di sisi lain, penguatan demokrasi melalui partisipasi publik aktif dan pendidikan demokrasi menciptakan fondasi yang kuat untuk pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Partisipasi publik yang kuat dalam pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan kepentingan mereka diwakili, sementara pendidikan demokrasi membangun pemahaman dan apresiasi yang lebih dalam terhadap nilai-nilai demokratis, seperti toleransi dan dialog. Pendekatan terintegrasi ini, yang menggabungkan pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesejahteraan sosial, dan penguatan demokrasi, adalah kunci untuk mencapai pembangunan layanan dan informasi publik yang berkeadilan di Kutai Kartanegara. Ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup warga, tetapi juga memperkuat fondasi demokrasi dan pembangunan berkelanjutan di daerah tersebut.

- d) Memperbaiki tata kelola untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi, dengan fokus pada pembangunan pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, transparan, adaptif, dan kolaboratif melalui sinergitas dan kesinambungan pembangunan berbasis digital.

Kabupaten Kutai Kartanegara di Indonesia tengah menghadapi tantangan strategis dalam memperbaiki tata kelola untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Fokus utama dari upaya ini adalah pada pembangunan pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, transparan, adaptif, dan kolaboratif. Ini mencakup peningkatan kualitas layanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, penggunaan sumber daya yang lebih efektif, pengurangan birokrasi, dan peningkatan transparansi dalam pengelolaan dana dan keputusan publik. Selain itu, penting untuk menjaga sinergitas dan kesinambungan melalui adopsi pendekatan adaptif dan kolaboratif, termasuk integrasi teknologi digital, untuk menjawab perubahan zaman dan meningkatkan aksesibilitas serta efisiensi layanan publik. Pendekatan holistik dan partisipatif, yang melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan warga, adalah kunci untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih responsif, efisien, dan akuntabel, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kutai Kartanegara.

Langkah-langkah ini diharapkan tidak hanya mengoptimalkan proses administratif, tetapi juga meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan. Dengan transparansi yang lebih besar, masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi dan berpartisipasi dalam dialog publik, sehingga memastikan bahwa suara mereka didengar dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Digitalisasi layanan publik juga berperan penting dalam memudahkan akses warga terhadap berbagai layanan, mulai dari perizinan hingga layanan sosial, yang semuanya bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih inklusif dan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat.

Di samping itu, penguatan kerjasama antar-lembaga dan dengan sektor swasta dapat memacu inovasi dan efisiensi, membuka peluang baru dalam pengembangan infrastruktur dan layanan publik. Dengan demikian, Kutai Kartanegara dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik dan modern, sesuai dengan tuntutan dan tantangan zaman.

Pendekatan ini, yang mengutamakan kepentingan masyarakat dan mengadopsi teknologi terkini, tidak hanya akan memperkuat fondasi pemerintahan Kutai Kartanegara, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, Kutai Kartanegara berada pada jalur yang tepat menuju masa depan yang lebih cerah, dimana pemerintahan yang efisien, transparan, dan partisipatif bukan hanya sebuah cita-cita, tetapi menjadi kenyataan yang dirasakan manfaatnya oleh setiap warganya.

- e) Diversifikasi ekonomi dan pengembangan sektor nonekstraktif, khususnya pembangunan ekonomi terbarukan seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan yang produktif dan berorientasi hulu-hilir.

Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur menghadapi tantangan strategis dalam diversifikasi ekonominya, khususnya dalam mengurangi ketergantungan pada sektor ekstraktif seperti pertambangan. Fokus utama adalah pada pengembangan sektor nonekstraktif seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan, yang tidak hanya meningkatkan ketahanan pangan lokal tetapi juga membuka potensi ekspor. Pentingnya pendekatan hulu-hilir dalam sektor-sektor ini tidak dapat diabaikan, yang berarti memperhatikan semua aspek dari

produksi hingga distribusi, untuk menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja. Selain itu, pembangunan ekonomi terbarukan, seperti bioenergi dari limbah pertanian dan perkebunan, menawarkan solusi berkelanjutan yang mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Keberhasilan ini memerlukan kebijakan pemerintah yang mendukung, investasi yang tepat, keterlibatan masyarakat lokal, serta kepedulian yang kuat terhadap pelestarian lingkungan. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, Kutai Kartanegara dapat mencapai diversifikasi ekonomi yang efektif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

Menghadapi tantangan ini, Kutai Kartanegara harus memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, termasuk fasilitas pengolahan dan distribusi, serta memperkuat sistem logistik. Pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja lokal menjadi kunci untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk berpartisipasi secara efektif dalam ekonomi baru ini. Kebijakan pemerintah yang mendukung, seperti insentif untuk investasi dan inovasi di sektor non ekstraktif, akan menjadi faktor penting dalam menarik investasi dan mengembangkan sektor-sektor ini. Selain itu, keterlibatan masyarakat dan pemberdayaan menjadi faktor penting. Ini berarti memberikan akses kepada masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan memastikan bahwa mereka mendapatkan manfaat yang adil dari sumber daya alam yang ada. Keterlibatan masyarakat juga penting dalam pelestarian lingkungan, memastikan bahwa pengembangan ekonomi tidak mengorbankan keberlanjutan lingkungan.

Dengan cara ini, Kutai Kartanegara tidak hanya dapat mengurangi ketergantungan pada sektor ekstraktif tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ini akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih sehat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan memastikan keberlanjutan sumber daya alam untuk generasi mendatang.

- f) Mendorong pembangunan regional yang merata, dengan peningkatan investasi di wilayah terpencil dan interkonektivitas yang sesuai dengan karakteristik wilayah.

Kabupaten Kutai Kartanegara tengah menghadapi tantangan strategis dalam mendorong pembangunan regional yang merata, dengan fokus utama pada peningkatan investasi di wilayah terpencil dan peningkatan interkonektivitas sesuai dengan karakteristik geografisnya. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antara daerah perkotaan dan pedesaan melalui penarikan investasi pada infrastruktur dasar, pendidikan, dan kesehatan. Penting juga untuk mengembangkan interkonektivitas yang tidak hanya terbatas pada transportasi darat, tetapi juga meliputi transportasi sungai dan udara, agar wilayah terpencil dapat terhubung dengan efektif. Di samping itu, pembangunan berkelanjutan yang mengutamakan perlindungan lingkungan, pemberdayaan masyarakat lokal, serta kerjasama antar sektor, termasuk pemanfaatan teknologi dan inovasi, menjadi aspek penting dalam strategi pembangunan ini.

Strategi pembangunan ini untuk mencapai keseimbangan dan inklusivitas, dengan memastikan bahwa setiap wilayah, terutama yang terpencil, mendapat manfaat yang setara dari pembangunan, serta menjamin bahwa pembangunan tersebut berlangsung secara berkelanjutan dan harmonis dengan lingkungan serta kebutuhan masyarakat setempat.

- g) Pengembangan kualitas infrastruktur yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan ramah lingkungan, serta penyediaan infrastruktur berkualitas berbasis fungsi keruangan.

Pengembangan infrastruktur di Kabupaten Kutai Kartanegara menuntut pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan, dengan fokus pada kesesuaian dengan karakteristik geografis dan sosial-ekonomi wilayah. Inisiatif ini harus ramah lingkungan, menggunakan teknologi inovatif dan material berkelanjutan untuk meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Penting juga untuk memastikan infrastruktur berkualitas yang disesuaikan dengan fungsi keruangan, yang mencakup pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan sosial. Partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan infrastruktur adalah kunci untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencapai solusi yang berkelanjutan. Kesimpulannya, pengembangan infrastruktur di Kutai Kartanegara harus memadukan keharmonisan dengan alam, inovasi teknologi, dan kebutuhan

masyarakat untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

- h) Pelestarian sosial dan budaya lokal, dengan pengembangan dan pelestarian budaya daerah yang harmoni dan terintegrasi dengan pengembangan pariwisata daerah.

Kabupaten Kutai Kartanegara berada di persimpangan penting antara pelestarian warisan budaya lokal dan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Warisan budaya daerah ini, yang meliputi bahasa, adat istiadat, musik, tarian, dan seni, memerlukan upaya konservasi yang cermat untuk memastikan hal ini tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang di era modern. Termasuk strategi edukasi yang komprehensif, yang menjangkau generasi muda dan masyarakat luas, untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga warisan budaya. Pengembangan pariwisata harus diintegrasikan dengan upaya pelestarian, memastikan bahwa kunjungan wisata merayakan dan menghormati kekayaan budaya lokal, bukan menggantikannya. Hal ini mencakup pengembangan paket wisata yang menampilkan elemen budaya unik dari Kutai Kartanegara, seperti festival adat dan kunjungan ke situs-situs budaya penting.

Penting juga untuk melibatkan masyarakat adat dan tokoh lokal dalam proses ini, memastikan bahwa upaya pelestarian dan pengembangan berjalan sejalan dengan tradisi dan pengetahuan lokal. Penggunaan teknologi, seperti dokumentasi digital dan media sosial, dapat menjadi alat yang berharga dalam upaya ini, memungkinkan warisan budaya Kutai Kartanegara untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan mencatat tradisi untuk generasi mendatang. Namun, semua inisiatif ini harus menyeimbangkan kebutuhan pembangunan infrastruktur pariwisata dengan pelestarian lingkungan dan budaya. Pembangunan ekonomi melalui pariwisata harus berkelanjutan, memastikan bahwa keuntungan dari sektor ini dirasakan oleh masyarakat lokal tanpa merusak warisan budaya yang mereka banggakan.

Dengan pendekatan terintegrasi ini, Kutai Kartanegara tidak hanya akan mempertahankan kekayaan budaya dan sosialnya tetapi juga mengembangkan pariwisata yang menghargai dan mempromosikan warisan uniknya, menciptakan model pelestarian budaya dan pengembangan pariwisata yang seimbang dan berkelanjutan.

3.3 Keselarasan Isu Strategis KLHS dan RPJPD Kutai Kartanegara 2025-2045

Penyusunan isu-isu strategis RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2045 ini juga memperhatikan keselarasannya dengan isu-isu yang disusun pada dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2045. Masing-masing isu strategis pada KLHS diintegrasikan pada isu-isu strategis RPJPD dan dipetakan sebagai berikut:

Grafik 3.1
Keselarasan Isu Strategis KLHS dan RPJPD
Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2045

Isu Strategis KLHS RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2045	Isu Strategis RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2045
7. Rehabilitasi Lahan Kritis dan Satwa Langka	1. Pembangunan yang berwawasan lingkungan untuk mengatasi kerusakan lingkungan dan praktik pembangunan yang tidak berkelanjutan.
1. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat: Air dan Sanitasi	2. Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan serta kesehatan, terutama di wilayah terpencil, dengan fokus pada peningkatan akses dan kualitas layanan secara merata.
2. Pendidikan	
5. Pengendalian Penduduk dan Layanan Kesehatan	
4. Penanggulangan Kekerasan Seksual	3. Mengatasi ketidaksetaraan dan memperkuat lembaga demokrasi dengan tujuan untuk penguatan pembangunan layanan dan informasi publik secara berkeadilan.
13. Pengarusutamaan Gender	4. Memperbaiki tata kelola untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi, dengan fokus pada pembangunan pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, transparan, adaptif, dan kolaboratif melalui sinergitas dan kesinambungan pembangunan berbasis digital.
	5. Diversifikasi ekonomi dan pengembangan sektor nonekstraktif, khususnya pembangunan ekonomi terbarukan seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan yang produktif dan berorientasi hulu-hilir.
3. Ketahanan dan Produksi Pangan	6. Mendorong pembangunan regional yang merata, dengan peningkatan investasi di wilayah terpencil dan interkoneksi yang sesuai dengan karakteristik wilayah.
10. Pendapatan Masyarakat	
12. Tata Kelola Keuangan Daerah	
6. Pengurangan Risiko, Penanggulangan Kejadian, dan Pemulihan Bencana	7. Pengembangan kualitas infrastruktur yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan ramah lingkungan, serta penyediaan infrastruktur berkualitas berbasis fungsi keruangan.
8. Penyediaan Infrastruktur Telekomunikasi dan ATM	
9. Peningkatan Fasilitas Kepelabuhanan	
11. Peningkatan Kepariwisata	8. Pelestarian sosial dan budaya lokal, dengan pengembangan dan pelestarian budaya daerah yang harmoni dan terintegrasi dengan pengembangan pariwisata daerah.

BAB IV

VISI DAN MISI

Perjalanan menuju Kukar Maju Tangguh Berbudaya 2045 merupakan serangkaian strategi yang terstruktur secara sistematis dalam rangka mencapai cita-cita Kabupaten Kutai Kartanegara dalam 20 tahun ke depan untuk menyokong Indonesia Emas 2045. Cita-cita besar bangsa Indonesia yang termaktub dalam RPJPN 2025–2045 dimaknai dan dijadikan landasan oleh Kabupaten Kutai Kartanegara dalam merumuskan arah pembangunan jangka panjang yang mencerminkan semangat menuju perayaan 100 tahun Indonesia sebagai negara yang merdeka. Kerangka pikir ini yang kemudian menjadi motor penggerak dan penentu arah bagi dokumen perencanaan daerah, khususnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang mendapatkan mandat nasional sebagai daerah mitra Ibu Kota Nusantara (IKN).

Penyusunan RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara 2025–2045 mengacu pada RPJPN 2025–2045 yang didasari oleh Visi Abadi Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945. Proses tersebut melahirkan visi nasional bertajuk “Indonesia Emas 2045: Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan” yang kemudian tidak secara mentah diturunkan pada daerah, namun tetap mempertimbangkan kondisi lokal yang berbasis pada jati diri Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai daerah kaya nilai historis dan berkebudayaan. Hal ini dibuktikan dengan peninggalan Kerajaan Kutai Martadipura yang menjadi kerajaan Hindu tertua di Indonesia dan Kerajaan Kutai Kartanegara yang kemudian dikenal sebagai Kesultanan Kutai Kartanegara pasca masuknya Islam secara luas pada abad ke-17. Adapun kesultanan ini kini dihidupkan kembali untuk mewariskan sejarah dan budaya di dalamnya.

Selain identitas historis daerah, terdapat faktor eksternal seperti megatren global, isu nasional, hingga isu regional yang berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan pembangunan. Hal ini juga diperhitungkan bersama dengan dinamika internal Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan modal dan potensi risiko yang dimiliki, sehingga dapat mewujudkan cita-cita yang diusung secara tepat sasaran dan tepat waktu.

Visi daerah selanjutnya dijabarkan ke dalam empat sasaran visi yang menggambarkan unsur vital pencapaian pembangunan. Keempat sasaran yang disusun juga berlandaskan pada lima sasaran Visi Indonesia untuk

memastikan adanya keselarasan ketercapaian pembangunan dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Adapun empat sasaran utama tersebut ialah peningkatan pendapatan per kapita, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, peningkatan daya saing sumber daya manusia, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Guna mencapai Visi Indonesia Emas 2045, maka ditetapkan 8 (delapan) misi (agenda) pembangunan yang merupakan serapan dari langkah nasional dalam melakukan perubahan pendekatan pembangunan. Delapan misi tersebut tersusun atas 3 (tiga) upaya transformasi, 2 (dua) landasan transformasi, dan 3 (tiga) kerangka implementasi.

Pemilihan upaya transformasi dilakukan mengingat langkah reformasi dinilai tidak cukup untuk mewujudkan pembangunan yang menyeluruh di segala aspek. Transformasi sendiri bertujuan agar pembangunan yang kompetitif didukung oleh produktivitas tinggi yang inklusif dan berkelanjutan dapat terwujud. Upaya transformasi difokuskan pada transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola. Ketiga aspek transformasi tersebut menjadi tiga misi pertama Kabupaten Kutai Kartanegara sekaligus sebagai bagian dari kelompok transformasi.

Proses transformasi dapat berjalan optimal apabila didukung oleh kuatnya landasan demokrasi dan stabilitas ekonomi daerah, sehingga bisa terwujud kondisi Kabupaten Kutai Kartanegara yang kondusif beserta diplomasi yang tangguh, khususnya sebagai salah satu daerah mitra IKN. Kualitas demokrasi yang baik akan menguatkan hak-hak masyarakat yang hidup dan menghidupi negara demokrasi melalui kepastian hukum dan keadilan. Selain itu, demokrasi substansial hendaknya menghasilkan pemerintahan yang efektif dan responsif untuk mendukung pembangunan yang tepat sasaran. Stabilitas ekonomi, di sisi lain, mencakup fiskal daerah, moneter, dan sektor keuangan akan mengoptimalkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui sektor keuangan yang bisa mendukung akses masyarakat dan usaha kecil menengah terhadap layanan keuangan serta mendorong pertumbuhan inklusif. Kestabilan fondasi di atas esensial untuk pembangunan berkelanjutan yang strategis terhadap investasi melalui alokasi sumber daya yang efektif dan efisien.

Manifestasi pembangunan berkelanjutan hendaknya disertai dengan jaminan terhadap kesejahteraan masyarakat melalui ketahanan dalam

bidang sosial budaya dan ekologi. Dibutuhkan integrasi pembangunan manusia, baik level individu, keluarga, maupun masyarakat dalam mengelola sumber daya lingkungan secara bijaksana agar dapat menciptakan sinergitas ketahanan sosial budaya dan ekologi.

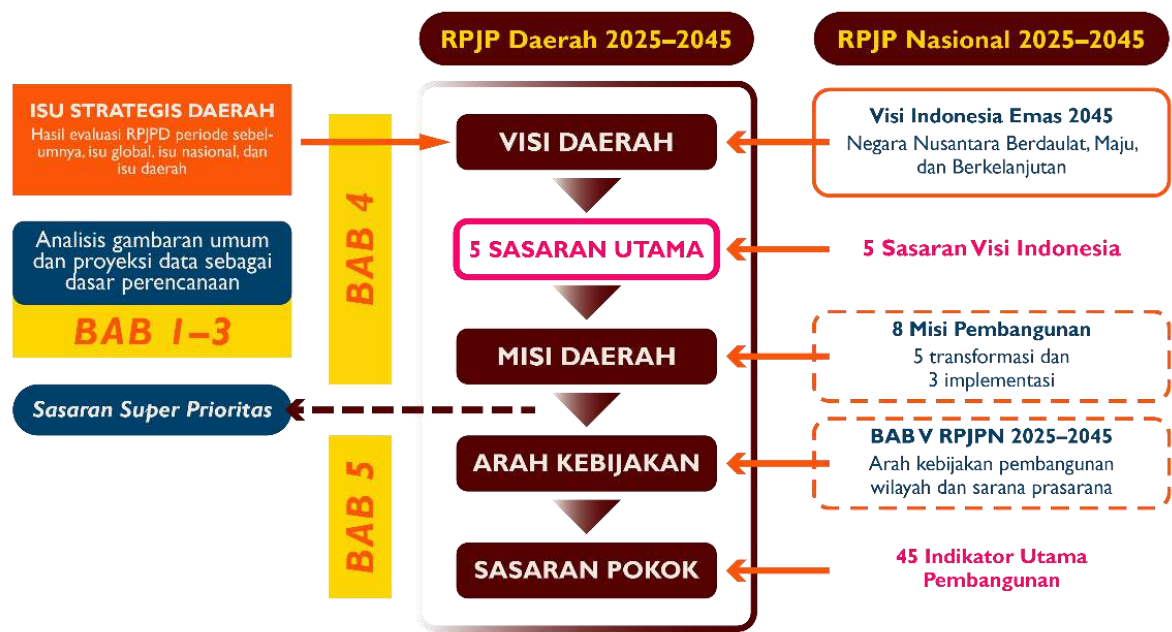
Adapun transformasi yang dicanangkan membutuhkan kerangka implementasi yang kuat, yakni melalui pembangunan wilayah yang didukung oleh prasarana dan sarana yang dilakukan secara bertahap. Oleh sebab itu, perlu adanya kesinambungan pembangunan agar seluruh tahapan bisa terlaksana secara optimal.

Pemerataan pembangunan kewilayahan melalui peningkatan konektivitas dan integrasi regional dimaksudkan untuk menekan kesenjangan antarwilayah dan kelompok pendapatan, sekaligus memperkuat akses pelayanan untuk kelompok rentan. Upaya ini dilakukan untuk mencapai pertumbuhan daerah yang inklusif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat tanpa ada yang merasa tertinggal. Bentuk prasarana dan sarana yang disiapkan dapat berupa logistik, konektivitas, ketenagalistrikan, teknologi, informasi dan komunikasi, dan sebagainya. Pembangunan yang dilaksanakan juga harus memperhatikan kondisi masyarakat dan lingkungan agar sesuai dengan karakteristik Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam rangka merealisasikan kesinambungan pembangunan, maka harus ada kaidah pelaksanaan untuk menjaga kolaborasi antar pemangku kepentingan melalui komunikasi dan transparansi yang baik, juga disertai dengan manajemen pembangunan berbasis risiko. Tidak hanya itu, dibutuhkan dukungan pembiayaan yang memadai dan inovatif agar dapat mendukung pengembangan investasi pada sektor infrastruktur, pendidikan, dan inovasi.

Seluruh rangkaian misi yang terdiri atas tiga misi transformasi, dua landasan transformasi, dan tiga kerangka implementasi kemudian dijabarkan ke dalam arah kebijakan pembangunan. Arah kebijakan yang diusung pada hakikatnya turut menunjukkan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan yang saat ini dikerangkai dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Adapun arah kebijakan tersebut diukur menggunakan indikator-indikator utama pembangunan.

Gambar 4.1
Kerangka Berpikir Penyusunan



4.1 Visi

Visi daerah digagas setelah mempertimbangkan secara matang posisi Kabupaten Kutai Kartanegara dalam peta perencanaan nasional, mandat provinsi, hingga nilai historis yang dimiliki oleh daerah yang identik dengan Sungai Mahakam ini. Demikian pula dengan modal dasar maupun pengaruh eksternal yang kemudian diterjemahkan menjadi sebuah cita-cita jangka panjang sebagai KUKAR MAJU TANGGUH BERBUDAYA 2045: Pusat Pangan, Pariwisata, Industri Hijau, Sejahtera dan Berkelanjutan.

Kukar Maju

Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu daerah dengan potensi perekonomian tertinggi di Indonesia. Hal ini harus mampu di optimalkan untuk kepentingan masyarakat Kukar. Oleh karena itu, dalam rangka menuju kemajuan Kukar dalam dua puluh tahun kedepan, maka makna Kukar Maju diadopsi sebagai representasi dari masyarakat Kukar yang memiliki pendapatan tinggi setara dengan negara maju, Sumber daya manusia yang terampil dan berdaya saing tingkat nasional, karena ditopang oleh bonus demografi sampai 2045, ditambah potensi migrasi tenaga terampil akibat dampak dari keberadaan IKN.

Kukar Tangguh

Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu daerah penopang pertumbuhan ekonomi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur serta penopang perekonomian nasional yang dapat diandalkan. Kukar Tangguh merupakan representasi dari wilayah yang memiliki ketangguhan ekonomi yang diwujudkan dengan kondisi perekonomian stabil dan kuat karena adanya pergeseran struktur ekonomi menuju perekonomian yang tidak hanya mengandalkan sumber daya alam ekstraktif, melainkan perekonomian non ekstraktif, yang lebih bersih dan berkelanjutan. Kutai Kartanegara sebagai daerah yang tangguh juga memiliki resistensi terhadap bencana dan perubahan iklim.

Kukar Berbudaya

merupakan representasi dari identitas daerah yang berdiri di atas sejarah panjang peradaban dua kerajaan hingga menjadi seperti hari ini dengan tetap berdampingan dengan alam dan sangat menjunjung tinggi keberagaman. Komitmen Kukar Berbudaya terletak pada pelestarian, pengembangan, dan integrasi nilai-nilai budaya lokal berlandaskan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dalam proses pembangunan yang memerhatikan pelestarian lingkungan, pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan manusia yang berakhlak mulia. Upaya tersebut dimaksudkan untuk melindungi warisan budaya, mempromosikan keanekaragaman budaya, dan konservasi kekayaan biologis. Pembangunan berbudaya harus memastikan bahwa pembangunan ekonomi berlangsung dengan menghormati dan memperkaya identitas budaya lokal, mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal sembari menjaga keseimbangan ekologis. Tanpa melupakan jati diri daerah, masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara terus melaju mencapai kemajuan dan kesejahteraan dalam pembangunan yang berkelanjutan pada tahun 2045.

Kukar sebagai Pusat Pangan

Fokus pembangunan diarahkan pada peningkatan produksi, distribusi, dan pengembangan industri pangan yang berkelanjutan dan inovatif. Langkah strategis yang diambil mencakup pengembangan pertanian terintegrasi hulu-hilir, modernisasi pertanian melalui skema *smart farming* dan *smart fishing*, intensifikasi pertanian, pengembangan infrastruktur logistik, dan promosi industri pengolahan pangan yang ramah lingkungan.

Selain itu, visi ini juga mencakup aspek kedaulatan pangan dan pengembangan agrowisata (*agrotourism*) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pariwisata perdesaan yang khas.

Kukar sebagai Pusat Pariwisata

Pengembangan destinasi pariwisata yang berkelanjutan dan beragam untuk meningkatkan potensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan mencakup pengembangan atraksi wisata alam, budaya, dan sejarah yang mempromosikan kekayaan dan keunikan Kukar, serta penguatan infrastruktur pariwisata dan pelayanan untuk mendukung pertumbuhan sektor. Selain atraksi dan infrastruktur, perlu diperhatikan terkait pembangunan aksesibilitas, amenitas, dan akomodasi yang juga menjadi faktor esensial terhadap kualitas pariwisata yang ditawarkan, sekaligus sebagai pemicu pertumbuhan sektor jasa. Pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam sektor pariwisata harus menjadi bagian dari skema pengembangan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai pusat pariwisata, khususnya terkait dengan pariwisata ekologis yang berbasis konservasi keanekaragaman hayati hutan tropis dan didukung oleh kekayaan sosial-budaya masyarakat Kalimantan.

Kukar sebagai Pusat Industri Hijau

Posisi geografis yang strategis, serta kepemilikan cadangan sumber daya alam yang tinggi, maka harus dapat dimanfaatkan secara optimal dan memiliki nilai tambah yang tinggi, maka diperlukan hilirisasi pemanfaatan sumber daya tersebut melalui skema industrialisasi. Akan tetapi industrialisasi tersebut juga harus dapat memanfaatkan sumber daya yang ramah lingkungan. Hal ini dilakukan dengan mendorong perkembangan industri yang ramah lingkungan dengan prinsip keberlanjutan. Fokus pada penggunaan energi terbarukan, pengurangan emisi, dan inovasi teknologi hijau. Tujuannya adalah untuk menciptakan ekosistem industri yang tidak hanya ekonomis maju tetapi juga meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Kukar yang Sejahtera

Prinsip pada visi ini merupakan perwujudan mandat konstitusi yaitu keadilan sosial. Oleh karena itu, pada visi ini diharapkan Kabupaten Kutai Kartanegara mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata di

seluruh elemen, dengan meminimalisir kemiskinan, khususnya dapat menghilangkan kemiskinan ekstrem. Disamping itu, pendapatan masyarakat wilayah ini pada 2045 harus setara dengan wilayah-wilayah pada negara maju. Disamping itu, seluruh hak dasar warga negara dapat terpenuhi baik secara Pendidikan, Kesehatan, maupun hak untuk hidup layak dan bermartabat di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kukar yang Berkelanjutan

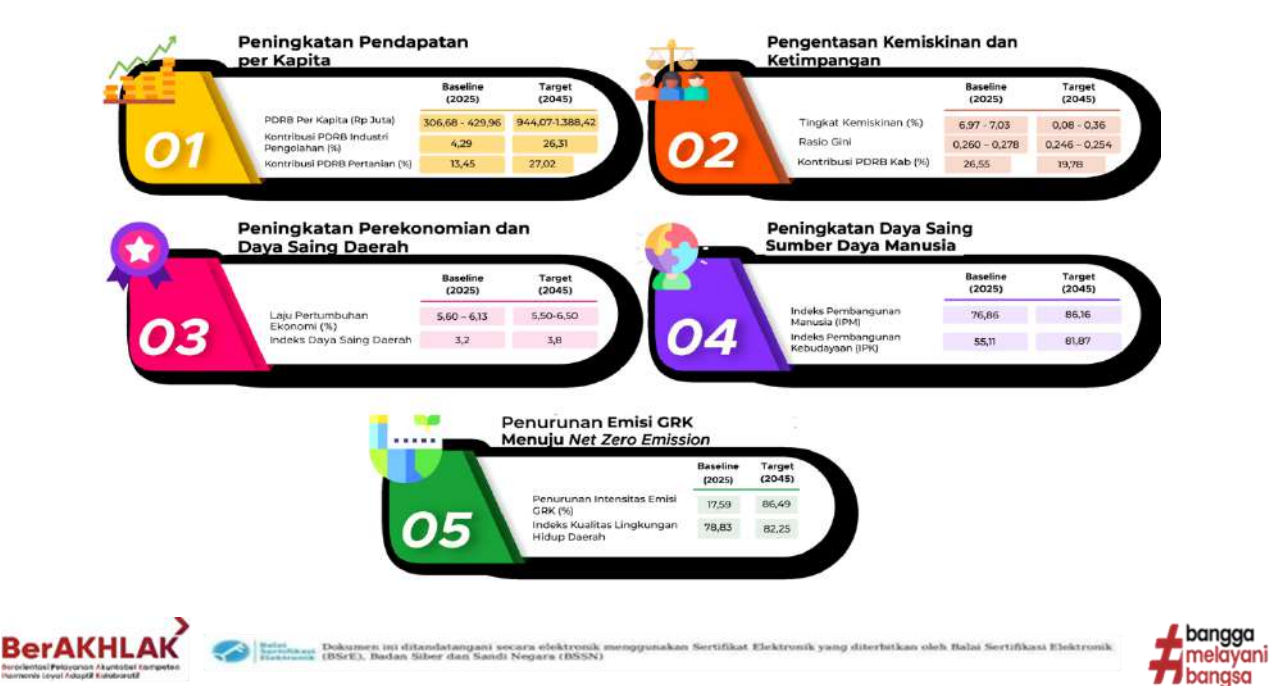
Maksud dari visi berkelanjutan adalah segala arah pembangunan yang memanfaatkan sumber daya wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara harus mampu dikelola secara arif dan bijaksana, agar dapat pula dinikmati oleh generasi penerus selanjutnya. Hal ini sangat terkait dengan pengelolaan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dengan kapasitas lingkungan hidup wilayah Kutai Kartanegara dalam mendukung aktivitas manusia. Oleh karena itu, visi ini menjadi penyeimbang bagi berbagai aktivitas sosial-ekonomi dengan aktivitas konservasi lingkungan.

4.2 Sasaran Visi

Penentuan sasaran visi ini dikelompokkan ke dalam lima sasaran yakni peningkatan pendapatan per kapita, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, peningkatan perekonomian dan daya saing daerah, peningkatan daya saing sumber daya manusia, dan penurunan emisi gas rumah kaca menuju *net zero emission*. Berikut disajikan masing-masing target capaian per indikatornya.

Gambar 4.2

Sasaran Utama Visi Kabupaten Kutai Kartanegara, 2025-2045



Terwujudnya Kukar Maju Tangguh Berbudaya 2045: Pusat Pangan, Pariwisata, Industri hijau, Sejahtera dan Berkelanjutan tercermin dalam lima sasaran visi, yaitu peningkatan pendapatan per kapita, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, peningkatan perekonomian dan daya saing daerah, peningkatan daya saing sumber daya manusia, dan penurunan emisi GRK menuju *net zero emission*.

Sasaran pertama, peningkatan pendapatan per kapita di Kabupaten Kutai Kartanegara yang didorong oleh peningkatan kontribusi PDRB industri pengolahan. Pergeseran struktur ekonomi menuju industrialisasi yang berbasis kegiatan non-pertambangan serta pusat pangan selama dua puluh tahun diharapkan dapat mendorong peningkatan kontribusi PDRB industri pengolahan hingga mencapai 26,31 persen serta kontribusi sektor pertanian hingga 27,02 persen dari total PDRB di tahun 2045. Dengan pertumbuhan yang kuat dalam sektor pengolahan serta pertanian, masyarakat mengalami peningkatan pendapatan karena adanya peluang kerja yang lebih banyak dan penghasilan yang lebih tinggi dalam industri tersebut. Transformasi ekonomi di Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi, memperluas pasar, serta mendorong inovasi dan peningkatan produktivitas sehingga pendapatan per kapita di tahun 2045 meningkat hingga mencapai 944,07-1.388,42 juta rupiah.

Sasaran kedua, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan. Seiring pertumbuhan ekonomi dan penghasilan yang lebih tinggi bagi masyarakat, jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan juga dapat ditekan, sehingga pada 2045, tingkat kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara ditargetkan dapat menurun hingga angka 0,08 – 0,36 persen. Dalam rangka mewujudkan penurunan kemiskinan yang cepat dan signifikan tidak hanya membutuhkan pertumbuhan ekonomi saja, melainkan juga redistribusi pendapatan sebagai dampak dari pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pertumbuhan ekonomi inklusif menyebabkan redistribusi kekayaan yang lebih merata dalam masyarakat, mengurangi kesenjangan antara kelompok-kelompok ekonomi, sehingga dapat menurunkan nilai rasio gini di Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditargetkan menurun hingga angka 0,246 – 0,254 di 2045. Kemudian, secara makro kontribusi PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara juga dioptimalisasi dengan target mencapai 19,78 persen dari total PDRB Provinsi di 2045. Dengan demikian, transformasi ekonomi yang ditandai dengan pertumbuhan industri pengolahan dan sektor pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat menciptakan dampak positif yang

signifikan dalam mengatasi kemiskinan, ketimpangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Sasaran ketiga, peningkatan perekonomian dan daya saing daerah dapat didukung dengan laju pertumbuhan ekonomi yang stabil dan indeks daya saing daerah yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, ditargetkan mencapai 5,50-6,50 persen di tahun 2045, menciptakan lingkungan yang menarik bagi investasi dan bisnis, meningkatkan lapangan kerja, dan mendukung peningkatan pendapatan per kapita. Di sisi lain, indeks daya saing daerah yang tinggi, ditargetkan mencapai 3,8 di tahun 2045, mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam menarik investasi, mengembangkan bisnis, dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kedua faktor ini bekerja bersama-sama, di mana pertumbuhan ekonomi yang kuat meningkatkan daya saing daerah, sementara indeks daya saing daerah yang tinggi memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan menarik investasi dan melahirkan peluang baru. Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan indeks daya saing daerah secara bersama-sama akan mendukung peningkatan perekonomian dan daya saing daerah secara keseluruhan.

Sasaran keempat, peningkatan daya saing sumber daya manusia di Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjadi salah satu faktor kunci dalam pengembangan wilayah. Dengan target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 86,16 serta Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) sebesar 81,87 persen di tahun 2045, Kabupaten Kutai Kartanegara berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup penduduknya melalui upaya peningkatan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan standar hidup. Investasi dalam pendidikan yang berkualitas dan terjangkau, pelayanan kesehatan yang merata, dan nilai kebudayaan yang kuat akan membentuk fondasi yang kokoh bagi peningkatan daya saing sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang lebih terdidik, sehat, dan produktif akan memperkuat ekonomi lokal, meningkatkan partisipasi dalam pasar tenaga kerja, dan membuka peluang untuk inovasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta nilai-nilai kebudayaan yang lestari. Dengan demikian, pencapaian target IPM dan IPK yang tinggi akan menjadi katalisator untuk pembangunan wilayah yang inklusif dan berkelanjutan, dan kuat akan nilai kebudayaan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sasaran kelima, penurunan intensitas emisi GRK menuju net zero emission di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai salah satu prioritas yang mendukung pembangunan wilayah yang seimbang dan berkelanjutan. Melalui langkah-langkah strategis seperti pelestarian hutan dan lahan, pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, teknologi persampahan yang mutakhir serta promosi dan implementasi transisi energi terbarukan dan efisiensi energi, diharapkan dapat menurunkan intensitas emisi GRK di Kabupaten Kutai Kartanegara hingga 86,49 persen dan meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kutai Kartanegara mencapai target angka 82,25 di tahun 2045. Selain itu, upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan praktik-praktik ramah lingkungan juga menjadi bagian integral dari pembangunan yang berkelanjutan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mendukung upaya menuju *net zero emission*. Dengan demikian, peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan bukan hanya akan memberikan manfaat jangka panjang bagi penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara, tetapi juga akan memperkuat fondasi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Tabel 4.1
Target Indikator Sasaran Visi per Tahapan
Kutai Kartanegara, 2025-2045

No	Indikator Sasaran Visi	Target				
		2025	(2025- 2029)	(2030- 2034)	(2035- 2039)	(2040- 2045)
Peningkatan Pendapatan per Kapita						
1	PDRB per Kapita (Rp Juta)	306,68- 429,96	489,00 – 568,62	596,35 – 649,95	719,83 – 829,43	944,07- 1.388,42
2	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	4,29	8,78	14,62	20,46	26.31
3	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, (%)	13,45	16,74	20,33	23,72	27,02
Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan						

No	Indikator Sasaran Visi	Target				
		2025	(2025- 2029)	(2030- 2034)	(2035- 2039)	(2040- 2045)
4	Tingkat Kemiskinan (%)	6,97 – 7,03	5,32 – 5,86	3,67 – 4,40	1,29 – 2,01	0,08-0,36
5	Rasio Gini	0,260 – 0,278	0,257 – 0,272	0,253 – 0,266	0,249 – 0,260	0,246 – 0,254
6	Kontribusi PDRB Kab di Provinsi (%)	26,55	24,86	23,17	21,48	19,78
Peningkatan Perekonomian dan Daya Saing Daerah						
7	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,60 – 6,13	5,90 – 6,45	6,25 – 6,66	6,38 – 7,66	5,50-6,50
8	Indeks Daya Saing Daerah	3,2	3,35	3,50	3,65	3,8
Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia						
9	Indeks Pembangunan Manusia	76,86	79,02	81,38	83,54	86,16
10	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	55,11	60,46	67,15	73,84	81,87
Penurunan Intensitas Emisi GRK Menuju <i>Net Zero Emission</i>						
11	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	17,59	47,03	61,85	75,78	86,49
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	78,83	79,51	80,37	81,23	82,25

4.3 Misi

Dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana telah disampaikan di atas, maka misi dapat dirumuskan dengan berpedoman pada kerangka transformasi yang telah ditetapkan oleh nasional maupun pada skala provinsi Kalimantan Timur. Kerangka misi harus mampu menjawab jenis transformasi yang dimaksud, dan tertuang dalam 8 (delapan) kerangka transformasi yaitu (1) transformasi sosial, (2) transformasi ekonomi, (3)

transformasi tata Kelola, serta ditopang oleh dua landasan transformasi yaitu (4) keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah, dan (5) ketahanan sosial, budaya, dan ekologi. Selanjutnya dilaksanakan melalui kerangka implementasi transformasi diantaranya melalui (6) Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, (7) Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, dan (8) Kestinambungan pembangunan. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan visi “Kukar Maju Tangguh Berbudaya 2045: Pusat Pangan, Pariwisata, Industri Hijau, Sejahtera dan Berkelanjutan” dengan kerangka transformatif, maka dapat dirumuskan misi RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2045 sebagaimana tertuang pada Gambar di bawah ini.

Gambar 4.3 Delapan Misi Kabupaten Kutai Kartanegara



Pemaknaan misi RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2045

Delapan misi sebagaimana tertuang pada Gambar di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan transformasi sosial dengan membangun kualitas hidup manusia yang unggul dan berdaya saing.

Misi ini dilakukan untuk mengimplementasikan transformasi sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini dilakukan dengan menysasar kualitas sumber daya manusia yang ditingkatkan kapasitas dan nilai penghidupannya. Pemenuhan hak warga negara untuk hidup sehat,

mendapatkan pendidikan berkualitas, dan mendapatkan perlindungan sosial yang layak dapat terselesaikan dalam misi ini, sehingga setiap penduduk Kutai Kartanegara dapat berkembang dan berdaya saing secara global.

2. Mewujudkan transformasi ekonomi dengan membangun sektor non-ekstraktif untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Misi ini merupakan implementasi dari transformasi ekonomi yang akan dilakukan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Upaya yang dilakukan adalah menggeser struktur ekonomi dari dominasi sektor ekstraktif atau eksploitatif sumber daya alam, menjadi sektor ekonomi non ekstraktif yang bersih dan dapat menyentuh banyak elemen masyarakat. Akan tetapi, pergeseran ini juga harus diwujudkan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat Kutai Kartanegara. Ke depannya, sektor pangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif menjadi target sektor potensial untuk menjaga ketahanan perekonomian di Kutai Kartanegara.

3. Mewujudkan transformasi tata kelola dengan membangun penyelenggaraan pemerintahan yang cerdas, adaptif, dan efisien.

Misi ini merupakan bagian dari transformasi tata Kelola yang bermakna sebuah perbaikan sistem tata Kelola pemerintahan yang dapat secara efektif dan efisien dilakukan. Digitalisasi harus dilakukan untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelayanan. Hal ini yang dimaknai sebagai kata Cerdas dalam misi ini. Reformasi birokrasi yang sederhana dan terintegrasi harus segera dilakukan, serta kemampuan birokrasi yang adaptif dalam menghadapi berbagai tantangan perubahan di masa depan.

4. Mewujudkan demokrasi substansial yang partisipatif dan stabilitas ekonomi daerah yang tangguh.

Misi ini merupakan landasan atau pondasi dari kondisi yang harus diwujudkan untuk dapat melaksanakan transformasi. Berbagai transformasi tidak dapat dilakukan tanpa stabilitas politik dan ekonomi daerah. Oleh karena itu, partisipasi seluruh masyarakat Kutai Kartanegara harus dilibatkan dalam menjaga stabilitas tersebut. Disamping itu, kekuatan persaudaraan budaya yang dilandasi oleh Pancasila dapat menjadi kekuatan masyarakat Kutai Kartanegara dalam mewujudkan misi ini.

5. Mewujudkan ketahanan sosial-budaya, dan ketahanan ekologi berbasis kearifan lokal.

Misi ini juga merupakan landasan kedua yang harus dilakukan untuk seluruh upaya transformatif. Selain kestabilan ekonomi-politik Kutai Kartanegara, juga perlu dipastikan bahwa untuk mewujudkan upaya transformatif harus dilakukan dengan dasar mewujudkan ketahanan sosial-budaya dan ekologi. Segala hak warga negara dari masyarakat Kutai Kartanegara harus terpenuhi terlebih dahulu, serta kondisi ekologis harus stabil dan tidak memiliki risiko tinggi terhadap kerusakan, sehingga dapat mengganggu upaya transformatif sebagaimana yang dimaksud di atas.

6. Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dengan membangun konektivitas dan integrasi regional untuk pertumbuhan yang inklusif.

Misi ini dilakukan sebagai upaya dalam menyusun kerangka implementasi dari agenda transformatif pada misi sebelumnya. Sama halnya seperti manusia dalam kehidupan sosial, karakter wilayah juga memiliki karakter yang sama. Wilayah tidak bisa hidup sendiri, sebuah wilayah akan saling berinteraksi untuk memenuhi segala kehidupan, sebagaimana memenuhi asas komplementaritas. Oleh karena itu, misi ini dilakukan untuk segala aktivitas pembangunan dilakukan dengan memperhatikan karakter regional, dan setiap wilayah harus diperlakukan dengan tema-tema tertentu sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Disamping itu, Kabupaten Kutai Kartanegara ini harus mampu juga memanfaatkan relasi antar wilayah baik pada skala di dalam Provinsi Kalimantan Timur, maupun secara nasional dan internasional.

7. Mewujudkan sarana dan prasarana yang merata dan berkualitas berbasis inovasi hijau.

Infrastruktur menjadi salah satu aspek penting untuk mewujudkan berbagai upaya transformasi. Oleh karena itu, pemenuhan sarana dan prasarana harus dilakukan secara merata, khususnya untuk memenuhi hak dasar masyarakat Kutai Kartanegara. Selaras dengan hal tersebut, penyediaan sarana dan prasarana harus dilakukan dengan mempertimbangkan agenda transformasi pada misi sebelumnya, serta

tetap mempertimbangkan aspek inovasi hijau yang menekankan pada optimalisasi sumber daya yang ada, tanpa menyisakan sumber daya pembangunan yang tidak dapat dimanfaatkan.

8. Mewujudkan sinergisitas dan kesinambungan pembangunan.

Misi terakhir ini merupakan prinsip dalam pembangunan berkelanjutan, yang harus diwujudkan dalam segala upaya transformasi pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Berbagai elemen harus dapat bersinergi, bukan hanya peran pemerintah semata dalam mewujudkan agenda pembangunan. Begitu juga pemerintah harus membuka peluang aktivitas elemen non-pemerintahan dapat berpartisipasi dalam berbagai hal. Serta sifat berkesinambungan harus dapat diimplementasikan dalam segala nilai pembangunan.

4.4 Pentahapan Pembangunan (*Roadmap*)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara berlaku dan akan diimplementasikan selama jangka waktu 20 tahun kedepan mulai dari tahun 2025 hingga tahun 2045. Di dalam implementasinya, rencana pembangunan tersebut turut serta mengandung prinsip berkelanjutan serta terintegrasi. Hal tersebut dapat diartikan bahwa pembangunan yang dilakukan merupakan satu kesatuan bagian yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya sehingga tidak dapat terpisahkan. Masing-masing aspek rencana pembangunan yang dilakukan akan memberikan dampak dan efek bagi aspek-aspek pembangunan berikutnya. Selain itu, rencana pembangunan tersebut juga terintegrasi antara satu dengan yang lainnya dalam upaya perwujudan visi daerah.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, periodisasi rencana pembangunan jangka panjang bukanlah waktu yang singkat, melainkan jangka waktu yang sangat panjang dan lama. Oleh sebab itu, selama 20 tahun pelaksanaannya akan terbagi ke dalam 4 *milestone* pembangunan selama 5 tahun-an. Hal tersebut dimaksudkan supaya dalam implementasi rencana pembangunan dapat menjadi lebih operasional serta memudahkan dalam upaya monitoring dan evaluasi rencana pembangunan yang dilakukan. Menindaklanjuti hal tersebut, kemudian muncul urgensi adanya rangka pentahapan pembangunan atau dalam kata lain dapat pula disebut sebagai *roadmap* pembangunan Rencana Jangka Panjang Daerah dalam rangka perwujudan visi Kukar Maju Tangguh Berbudaya 2045 yang sekaligus merupakan perwujudan manifestasi dari Indonesia Emas 2045. Berikut

merupakan *roadmap* pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2045:

Gambar 4. 4 *Roadmap* Tahapan Pencapaian Visi



Periode pertama RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara berlangsung selama periode 2025-2029. Pada periode pertama ini, agenda pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dititikberatkan pada penguatan fondasi transformasi. Tahapan ini merupakan salah satu tahapan yang paling penting di dalam *roadmap* pembangunan. Hal tersebut dapat terjadi karena pada tahapan ini, seluruh pondasi yang diperlukan untuk mewujudkan visi mulia daerah dipersiapkan. Pondasi ini terdiri atas berbagai aspek dan komponen yang memiliki dampak dan penentu keberhasilan pembangunan pada periodisasi berikutnya. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwasanya pondasi dalam hal ini difungsikan sebagai sebuah pijakan atau “batu loncatan” bagi keberhasilan pembangunan. Apabila pondasi transformasi tidak kokoh maka bisa jadi upaya implementasi rencana pembangunan tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Oleh sebab itu, penguatan pondasi transformasi menjadi hal paling utama dilakukan pada periode pertama RPJPD.

Upaya pengokohan pondasi transformasi secara umum tersusun atas perwujudan aspek transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang ditopang oleh landasan transformasi berupa stabilitas ekonomi, hukum, sosial budaya, dan ekologi. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mempersiapkan kebutuhan kebutuhan dasar yang diperlukan seperti fasilitas pelayanan, infrastruktur dasar, sumber daya manusia yang berkualitas, dan lain sebagainya. Dalam periode ini pula, berbagai terobosan-terobosan inovatif mulai diimplementasikan seperti diversifikasi ekonomi non ekstraktif, implementasi *smart government*, sinkronisasi perencanaan pembangunan, dan lain sebagainya sehingga nantinya akan dapat memberikan dampak yang baik bagi pelaksanaan rencana pembangunan di masa berikutnya. Berdasarkan hal tersebut, melalui pondasi yang kuat, tangguh, dan kokoh, Kabupaten Kutai Kartanegara siap untuk melanjutkan perjalanan pembangunan di periode berikutnya serta siap untuk dapat menghadapi berbagai tantangan dan rintangan yang menghadang.

Periode kedua RPJPD berlangsung dari tahun 2030-2034 yang dititikberatkan pada upaya akselerasi transformasi. Tahapan ini merupakan tahapan lanjutan dari tahapan penguatan pondasi transformasi. Akselerasi transformasi dapat diartikan sebagai sebuah upaya yang dilakukan untuk dapat mempercepat proses transformasi melalui berbagai upaya percepatan dan penguatan yang ditujukan untuk semakin memperkuat pondasi yang telah diperkokoh pada tahapan sebelumnya. Tahapan ini memfokuskan pada upaya yang dapat ditempuh untuk mendukung perwujudan visi pada periode berikutnya melalui progres yang cepat, tanggap, dan mampu meningkatkan produktivitas sektor secara signifikan.

Tahapan akselerasi transformasi turut serta tersusun atas berbagai macam aspek yang terlibat di dalamnya. Aspek-aspek yang menjadi perhatian utama dalam upaya akselerasi transformasi adalah percepatan peningkatan kualitas SDM, peningkatan produktivitas sektor non ekstraktif, percepatan optimalisasi kolaborasi kelembagaan, percepatan upaya pembangunan wilayah yang inklusif, dan lain sebagainya. Upaya-upaya tersebut diyakini akan dapat membawa *multiplier effect* bagi tahapan berikutnya serta mendukung peran sebagai superhub ekonomi dan mitra IKN sehingga termasuk ke dalam tahapan akselerasi transformasi. Oleh sebab itu, capaian aspek perencanaan pembangunan yang telah mengalami akselerasi transformasi diharapkan dapat mengalami peningkatan yang signifikan

sebagai satu kesatuan dalam *milestone* Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Periode ketiga RPJPD berlangsung dari tahun 2035-2039 yang kemudian difokuskan pada ekspansi transformasi. Secara definitif, ekspansi transformasi yang dimaksud merupakan suatu upaya peningkatan transformasi pembangunan yang dilakukan di suatu wilayah. Hal tersebut dapat pula diartikan sebagai perluasan lingkup transformasi pembangunan sehingga dapat menjangkau berbagai aspek yang termuat di dalam sebuah wilayah administratif tanpa terkecuali. Tahapan ini merupakan tahapan *follow up* pasca implementasi dari penguatan fondasi yang kokoh dan kuat serta akselerasi transformasi pada periode sebelumnya. Ekspansi transformasi melibatkan berbagai aspek perencanaan pembangunan yang termuat dalam dokumen perencanaan dengan tujuan mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif bagi semua serta meningkatkan *output* pembangunan secara lebih signifikan dan masif terhadap pencapaian visi yang telah disepakati untuk dituju.

Upaya ekspansi transformasi pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Kutai Kartanegara mencakup beberapa aspek utama meliputi perluasan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan sekaligus peningkatan kualitas pelayanannya. Di sisi lain dalam aspek ekonomi salah satunya merupakan penguatan jangkauan pasar dan integrasi ekonomi domestik dalam rangka perwujudan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dari periode-periode sebelumnya serta juga memantapkan peran daerah sebagai pusat kegiatan ekonomi berkelanjutan di Kawasan Timur Indonesia. Peningkatan kualitas infrastruktur, perluasan jangkauan, dan upaya penjalinan konektivitas antar wilayah juga tak terlepas dari upaya-upaya ekspansi yang dilakukan. Selain itu, aspek sosial budaya dengan berbasis pada karakteristik lokal turut serta menjadi perhatian dengan dilaksanakannya upaya pelestarian sosial budaya secara lebih masif. Tahapan ekspansi transformasi merupakan tahapan yang dilakukan sebelum seluruh visi dan tujuan yang hendak diraih dapat terlaksana.

Periode keempat RPJPD berlangsung dari tahun 2039-2045 yang dalam hal ini merupakan periode terakhir dari 20 tahun *milestone* perencanaan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada tahapan ini, diharapkan seluruh aspek pembangunan yang hendak diraih telah dapat terwujud dan terlaksana sebagai bentuk perwujudan visi tahun 2045. Menindaklanjuti hal tersebut, maka pada periode keempat ini,

diharapkan telah terwujud Perwujudan Kukar Maju Tangguh Berbudaya 2045: Pusat Pangan, Pariwisata, Industri Hijau, Sejahtera dan Berkelanjutan. Sesuai dengan visi tersebut, maka beberapa aspek pembangunan yang terwujud diantaranya meliputi perwujudan sumber daya manusia Kutai Kartanegara yang berkualitas, berdaya saing, dan sejahtera, Perwujudan pertumbuhan ekonomi Kutai Kartanegara yang berkelanjutan dan inklusif, Perwujudan upaya perencanaan dan pembangunan wilayah yang sinkron, sinergis, berkesinambungan, terintegrasi, dan berlangsung secara efisien dan efektif, serta aspek pembangunan lainnya. Tidak hanya berfokus pada pemenuhan atau ketercapaian visi pembangunan. Namun, pada periode ini juga diharapkan seluruh isu strategis yang berkaitan dengan perwujudan visi telah dapat terentaskan secara sempurna sehingga tidak lagi menjadi bagian dari permasalahan regional yang dapat menghambat pencapaian kesejahteraan masyarakat. Dengan tercapainya periode ini maka sekaligus menjadi penutup dari *milestone* pembangunan Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045 yang telah berlangsung nantinya selama 20 tahun.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

5.1 Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah landasan strategis untuk pembangunan dalam jangka lima tahun untuk mewujudkan visi daerah. Kabupaten Kutai Kartanegara merumuskan arah kebijakan untuk empat periode masa depan yang mencakup 20 tahun ke depan, terbagi menjadi periode 2025–2029, 2030–2034, 2035–2039, dan 2040–2045, sejalan dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pembentukan kebijakan yang kokoh adalah langkah penting karena bukan hanya sebagai panduan, melainkan juga fondasi yang kuat untuk mencapai visi daerah yang telah ditetapkan. Kebijakan ini memiliki peran sentral dalam menetapkan prioritas pembangunan dan tindakan strategis yang akan diambil dalam setiap periode lima tahun.

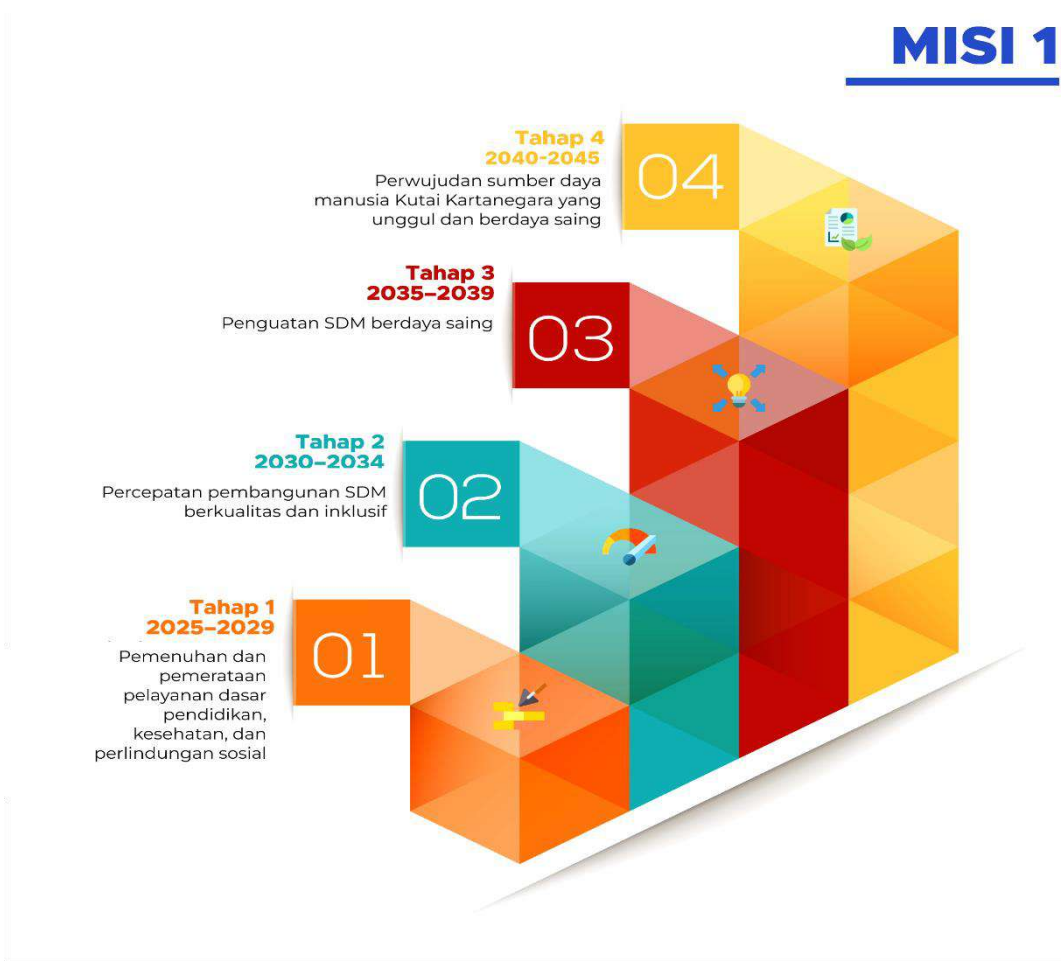
Kekuatan arah kebijakan terletak pada kemampuannya untuk menyatukan berbagai aspek pembangunan, dari ekonomi, sosial, hingga lingkungan. Dengan mengidentifikasi prioritas utama dan tujuan jangka panjang, Kabupaten Kutai Kartanegara dapat merencanakan sumber daya dan tindakan konkret yang mendukung pencapaian visi daerah. Seiring berjalannya waktu, kebijakan ini menjadi pegangan yang mengarahkan setiap kebijakan dan program pembangunan yang diusulkan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, menciptakan kesinambungan pembangunan. Penyusunan kebijakan mencakup pengidentifikasian tantangan dan peluang yang mungkin timbul selama periode lima tahun, serta memberikan kerangka kerja yang dapat disesuaikan jika diperlukan. Selain itu, kebijakan ini mendorong transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas dengan melibatkan pemangku kepentingan dan masyarakat dalam proses pembuatannya. Proses ini menghasilkan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, sesuai dengan visi Kabupaten Kutai Kartanegara untuk masa depan yang lebih baik.

5.1.1 Arah Kebijakan per Misi

Misi 1. Mewujudkan transformasi sosial dengan membangun kualitas hidup manusia yang unggul dan berdaya saing

Misi "Mewujudkan transformasi sosial dengan membangun kualitas hidup manusia yang unggul dan berdaya saing" menjadi landasan utama bagi Kabupaten Kutai Kartanegara dalam merancang kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mencapai misi tersebut, Kabupaten Kutai Kartanegara membagi arah kebijakan menjadi empat tahap, yang masing-masing bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap transformasi sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Gambar 5.1
Roadmap Tahapan Pencapaian Misi Pertama



Tahap pertama: Pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki akses

yang memadai terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Hal ini mencakup pembangunan dan peningkatan infrastruktur pendidikan, fasilitas kesehatan, dan jaringan perlindungan sosial yang mencakup program-program bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar ini, Kabupaten Kutai Kartanegara berupaya untuk memberikan landasan yang kuat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat serta membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Selain itu, dengan memastikan adanya infrastruktur dasar yang berkualitas dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, arah kebijakan tersebut juga bertujuan untuk menciptakan kondisi yang mendukung bagi terciptanya transformasi sosial. Dengan akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta perlindungan sosial yang lebih luas, masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup mereka secara signifikan. Tahap ini menjadi langkah awal yang penting dalam mewujudkan visi transformasi sosial dan peningkatan kualitas hidup yang diinginkan oleh Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tahap kedua: Percepatan pembangunan Sumber daya manusia berkualitas dan inklusif menyoroti pentingnya meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan serta pelatihan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks ini, upaya penguatan mencakup berbagai kebijakan dan program yang ditujukan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kapasitas individu, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Selain itu, pembangunan sumber daya manusia yang inklusif menekankan pentingnya memastikan bahwa semua orang, termasuk mereka yang berada di wilayah pedesaan atau terpinggirkan, memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan, pelatihan, dan layanan kesehatan yang berkualitas.

Dengan menguatkan dan mempercepat pembangunan sumber daya manusia, Kabupaten Kutai Kartanegara berharap untuk menciptakan masyarakat yang lebih terampil, berdaya saing, dan mampu berkontribusi secara positif terhadap pembangunan daerah. Ini akan membuka peluang ekonomi yang lebih luas, memperkuat jaringan sosial, dan memperkuat fondasi kemajuan yang berkelanjutan. Selain itu, pembangunan sumber daya manusia yang inklusif dan berkualitas juga dapat membantu mengurangi

kesenjangan sosial dan ekonomi, menciptakan lingkungan yang lebih harmonis, serta meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara. Tahap kedua ini menjadi langkah penting dalam merespons tantangan sosial dan ekonomi serta mendukung visi transformasi sosial yang diinginkan oleh daerah.

Tahap ketiga: Penguatan sumber daya manusia (SDM) berdaya saing menekankan menggarisbawahi pentingnya pengembangan keterampilan yang relevan dengan pasar kerja yang terus berubah. Melalui program-program pelatihan dan pendidikan yang berorientasi pada kemampuan produktif dan inovatif, Kabupaten Kutai Kartanegara bertujuan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal dalam menghadapi tantangan global dan memanfaatkan peluang ekonomi yang berkembang. Penguatan sumber daya manusia ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi dan tuntutan pasar, serta mendorong terciptanya inovasi dalam berbagai sektor ekonomi.

Selain itu, fokus pada pemerataan kesejahteraan masyarakat menekankan pentingnya memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan didistribusikan secara adil kepada seluruh lapisan masyarakat. Ini mencakup upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan akses terhadap layanan dasar, serta memperkuat jaringan sosial dan komunitas. Dengan meningkatkan aksesibilitas terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja yang layak, tahap ketiga ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensinya dan mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan. Tahap ini menjadi landasan yang penting dalam mencapai visi transformasi sosial yang inklusif dan berkelanjutan yang diinginkan oleh Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tahap keempat: Perwujudan sumber daya manusia Kutai Kartanegara yang unggul dan berdaya saing menitikberatkan pada pencapaian tujuan akhir dalam upaya meningkatkan potensi dan kapasitas individu dalam masyarakat. Arah kebijakan tahap ini memastikan bahwa sumber daya manusia di Kabupaten Kutai Kartanegara tidak hanya memiliki kualitas yang tinggi tetapi juga dapat bersaing secara efektif dalam lingkungan global yang kompetitif. Ini melibatkan penyediaan pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan tuntutan pasar kerja, promosi inovasi dan kreativitas, serta

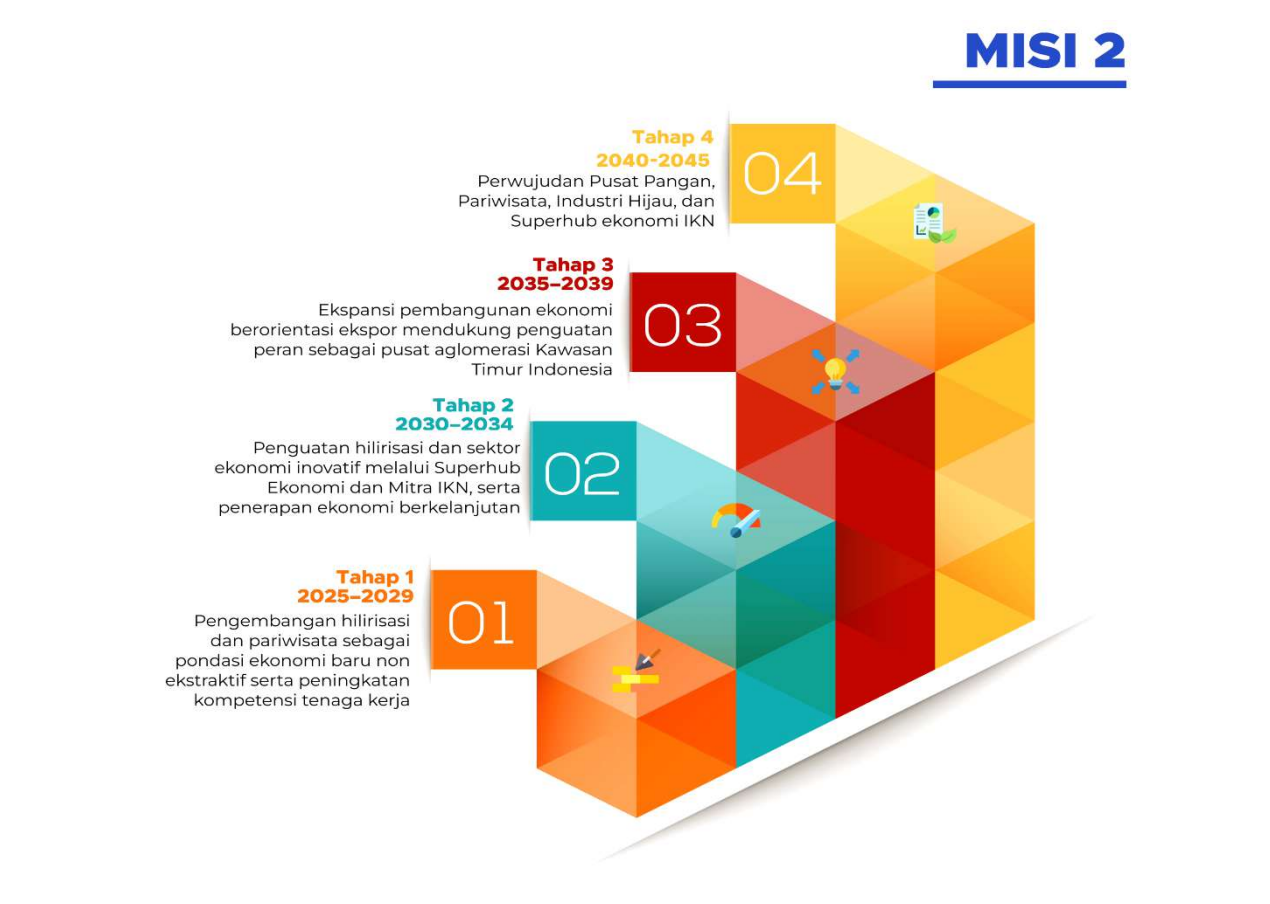
pemberian kesempatan bagi individu untuk terlibat dalam pengembangan ekonomi dan sosial daerah.

Dengan mencapai perwujudan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, Kabupaten Kutai Kartanegara berharap dapat menarik investasi, menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, masyarakat yang terampil dan berdaya saing juga menjadi aset yang berharga dalam membangun keberlanjutan pembangunan, karena mereka memiliki kemampuan untuk berkontribusi pada inovasi, efisiensi, dan pemecahan masalah dalam berbagai sektor. Dengan demikian, tahap keempat ini bukan hanya menjadi akhir dari rangkaian upaya pembangunan sumber daya manusia, tetapi juga awal dari fase baru dalam membangun Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi daerah yang tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan di masa depan.

Misi 2. Mewujudkan transformasi ekonomi dengan membangun sektor non-ekstraktif untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Gambar 5.2

Roadmap Tahapan Pencapaian Misi Kedua



Tahap pertama: Pengembangan hilirisasi dan pariwisata sebagai pondasi ekonomi baru non ekstraktif serta peningkatan kompetensi tenaga kerja berfokus pada optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, peningkatan kapasitas riset inovasi, dan meningkatkan kapabilitas tenaga kerja lokal. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam mengacu pada strategi yang mengarah pada penggunaan yang lebih bijaksana dan berkelanjutan terhadap sumber daya alam yang dimiliki sebuah negara. Ini mencakup praktik-praktik seperti konservasi, penggunaan teknologi yang lebih efisien, dan diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada satu sektor ekstraktif tertentu.

Peningkatan kapasitas riset inovasi menjadi landasan penting dalam langkah-langkah ini. Dengan memperkuat infrastruktur riset dan pengembangan, serta mendorong kolaborasi antara sektor swasta, pemerintah, dan lembaga riset, sebuah negara dapat memacu inovasi dalam sektor-sektor non-ekstraktif. Inovasi adalah kunci untuk menciptakan nilai tambah, meningkatkan daya saing global, dan menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan dalam jangka panjang.

Selain itu, peningkatan kapabilitas tenaga kerja lokal menjadi prioritas dalam tahap awal ini. Hal ini melibatkan investasi dalam pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan untuk memastikan bahwa tenaga kerja lokal siap dan mampu bersaing dalam ekonomi yang semakin berubah dan beragam. Dengan meningkatkan kapasitas tenaga kerja lokal, sebuah negara dapat memastikan bahwa manfaat dari transformasi ekonomi menuju sektor non-ekstraktif dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat, menciptakan kesempatan yang lebih merata dan berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Tahap kedua dalam misi transformasi ekonomi, Penguatan hilirisasi dan sektor ekonomi inovatif melalui Superhub Ekonomi dan Mitra IKN, serta penerapan ekonomi berkelanjutan menekankan percepatan dalam diversifikasi sektor ekonomi serta peningkatan produktivitas dalam beberapa sektor kunci. Fokus utama termasuk sektor agrikultur yang berkelanjutan, pariwisata, dan teknologi. Dalam sektor agrikultur, langkah-langkah menuju pertanian yang lebih berkelanjutan melibatkan adopsi praktik-praktik ramah lingkungan, inovasi dalam rantai pasok, dan peningkatan efisiensi produksi untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat. Pariwisata, sebagai sektor yang berkembang pesat, menawarkan peluang untuk menciptakan

lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan melalui promosi pariwisata lokal dan pengembangan infrastruktur yang mendukung industri ini. Sementara itu, investasi dalam teknologi menjadi aspek penting dalam memperkuat sektor ekonomi non-ekstraktif. Penggunaan teknologi modern meningkatkan efisiensi produksi, mempercepat inovasi, dan memperluas pasar, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di samping itu, peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja lokal menjadi strategi krusial untuk memastikan bahwa tenaga kerja dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi dan tuntutan pasar global, sehingga mampu bersaing secara efektif. Terakhir, dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penting untuk memperhatikan penerapan ekonomi hijau dan transisi energi. Ini melibatkan langkah-langkah untuk mengurangi dampak lingkungan dari aktivitas ekonomi, memperkuat infrastruktur energi terbarukan, dan mengarahkan investasi ke sektor energi yang ramah lingkungan. Langkah-langkah ini dilaksanakan sejalan dengan dukungan peran Superhub ekonomi dan mitra IKN. Dengan demikian, tahap kedua ini bertujuan untuk mempercepat transformasi ekonomi menuju sektor-sektor yang berkelanjutan, menghasilkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan.

Tahap ketiga: Ekspansi pembangunan ekonomi berorientasi ekspor mendukung penguatan peran sebagai pusat aglomerasi Kawasan Timur Indonesia berfokus pada perluasan pertumbuhan ekonomi melalui integrasi sektor-sektor dan ekonomi global dengan tujuan meningkatkan produktivitas dan memperkuat kemitraan serta mendukung penguatan peran daerah sebagai pusat aglomerasi Kawasan Timur Indonesia. Integrasi sektor-sektor ekonomi memungkinkan untuk menciptakan sinergi antara berbagai sektor dalam ekonomi, menghasilkan efisiensi yang lebih besar dan menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi. Melalui integrasi ini, sektor-sektor yang berbeda dapat saling melengkapi, memperluas pasar dan peluang investasi, serta meningkatkan daya saing secara keseluruhan.

Selain itu, memperkuat kemitraan dengan ekonomi global menjadi strategi yang krusial dalam tahap ini. Kemitraan yang kuat dengan negara-negara lain membuka pintu untuk akses ke pasar internasional, teknologi, dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan memperluas jaringan kemitraan internasional, sebuah negara dapat memanfaatkan kesempatan untuk

meningkatkan daya saing, memperluas investasi, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Dengan demikian, tahap ketiga ini dapat mengoptimalkan manfaat dari integrasi sektor-sektor ekonomi dan memperkuat kemitraan global sebagai fondasi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Tahap keempat: Perwujudan Pusat Pangan, Pariwisata, Industri Hijau, dan Superhub ekonomi IKN menitikberatkan pada perwujudan pertumbuhan ekonomi yang meningkat melalui pengembangan sektor non ekstraktif dan industri hijau. Fokus utamanya adalah mengarahkan investasi dan sumber daya ke pengembangan pusat pangan serta sektor-sektor yang berpotensi untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Pengembangan sektor non ekstraktif, terutama pariwisata budaya, serta sektor lainnya seperti teknologi informasi dan komunikasi, layanan keuangan, pendidikan, dan industri kreatif, menjadi prioritas dalam tahap ini. Dengan mengalihkan perhatian dari sektor ekstraktif ke sektor-sektor ini, daerah dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih beragam, meningkatkan nilai tambah, dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang terbatas. Selain itu, upaya ini juga sejalan dengan penguatan peran sebagai Superhub Ekonomi dan Mitra IKN.

Selain itu, pendorong utama dari tahap keempat ini adalah pengembangan industri hijau. Industri hijau mengacu pada sektor-sektor ekonomi yang berorientasi pada praktik produksi yang ramah lingkungan, penggunaan sumber daya yang efisien, dan teknologi yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, investasi dalam energi terbarukan, transportasi berkelanjutan, dan manufaktur yang ramah lingkungan menjadi kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam kegiatan ekonomi, tahap keempat ini bertujuan untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai dapat dipertahankan dalam jangka panjang tanpa merusak lingkungan dan memperburuk masalah perubahan iklim.

Misi 3. Mewujudkan transformasi tata kelola dengan membangun penyelenggaraan pemerintahan yang cerdas, adaptif, dan efisien

Gambar 5.3
Roadmap Tahapan Pencapaian Misi Ketiga



Misi "Mewujudkan transformasi tata kelola dengan membangun penyelenggaraan pemerintahan yang cerdas, adaptif, dan efisien" dilaksanakan dalam empat tahap arah kebijakan yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem tata kelola pemerintahan secara menyeluruh.

Tahap pertama dari arah kebijakan ini adalah Pengembangan *smart governance* dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara berfokus pada penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publik, penataan regulasi, serta peningkatan kualitas kerja pemerintah melalui penguatan sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN). Penguatan infrastruktur dan penerapan digitalisasi pelayanan publik

mengacu pada upaya pemerintah untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan publik melalui penggunaan teknologi digital. Hal tersebut mencakup pembangunan sistem dan platform *online* yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan pemerintah secara lebih mudah dan cepat. Digitalisasi juga membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memungkinkan data yang lebih mudah diakses dan dipantau oleh publik.

Selain itu, penataan regulasi merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa proses pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang jelas dan efisien. Dengan merumuskan dan menerapkan regulasi yang tepat, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, peningkatan kualitas kerja pemerintah melalui penguatan sumber daya ASN mengacu pada upaya untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan integritas dari para pegawai negeri. Ini mencakup pembangunan program pelatihan dan pengembangan, serta implementasi sistem evaluasi kinerja yang lebih baik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja pemerintah secara keseluruhan. Dengan demikian, tahap pertama dari arah kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan landasan yang kuat bagi transformasi tata kelola pemerintahan menuju penyelenggaraan yang cerdas, adaptif, dan efisien.

Tahap kedua: Percepatan reformasi birokrasi dan optimalisasi pelayanan publik berbasis teknologi, kualitas penataan regulasi sangat baik, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan menekankan pentingnya percepatan kolaborasi antara Aparatur Sipil Negara (ASN) dan berbagai lembaga terkait. Kolaborasi yang kuat antar-ASN dan lembaga dapat menghasilkan sinergi yang lebih baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, memungkinkan pertukaran informasi dan sumber daya yang lebih efisien serta efektif. Dengan memperkuat kerja sama lintas lembaga, pemerintah dapat merespons permasalahan dan peluang secara lebih holistik, meminimalkan tumpang tindih dan konflik kepentingan, serta meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan dan program-program strategis. Secara bersamaan, fokus pada tahap ini juga dialokasikan pada upaya optimalisasi pelayanan publik berbasis teknologi, kualitas penataan regulasi sangat baik, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Selain itu, tahap kedua juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas manajemen tata kelola dan pengambilan keputusan di dalam pemerintahan. Manajemen tata kelola yang baik akan membantu memastikan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, termasuk alokasi sumber daya yang tepat dan penggunaan yang efektif. Peningkatan kualitas pengambilan keputusan juga menjadi fokus dalam tahap ini, dengan menekankan pentingnya keputusan yang berbasis data, transparan, dan partisipatif. Dengan demikian, tahap kedua dari arah kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi antar-ASN dan lembaga serta meningkatkan kapasitas manajerial dan pengambilan keputusan di dalam pemerintahan guna mendukung transformasi tata kelola pemerintahan yang cerdas dan adaptif.

Tahap ketiga: Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan menuju cerdas, adaptif dan efisien dengan pelayanan publik sangat baik, serta masyarakat yang partisipatif dan berinteraksi sosial menyoroti pentingnya integrasi infrastruktur teknologi informasi dengan tata kelola pemerintahan sebagai upaya untuk meningkatkan aksesibilitas layanan publik bagi masyarakat dengan pelayanan publik sangat baik, serta masyarakat yang partisipatif dan berinteraksi sosial. Integrasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dengan memastikan bahwa layanan publik dapat diakses dengan mudah dan efisien melalui berbagai platform teknologi. Dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal, pemerintah dapat menyediakan layanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, meningkatkan keterlibatan publik, dan mempercepat respon terhadap permasalahan yang muncul.

Selain meningkatkan aksesibilitas, integrasi infrastruktur teknologi informasi juga bertujuan untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan layanan publik. Dengan menggunakan teknologi untuk memantau dan melacak pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pemerintah dapat meningkatkan tingkat akuntabilitas, memastikan bahwa sumber daya publik digunakan dengan efisien dan tepat sasaran, serta memberikan informasi yang lebih transparan kepada masyarakat tentang proses pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan publik. Dengan demikian, tahap ketiga dari arah kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat integrasi antara infrastruktur teknologi informasi dan tata kelola

pemerintahan guna meningkatkan aksesibilitas layanan publik yang responsif, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Tahap keempat: Perwujudan Tata kelola pemerintahan yang cerdas, adaptif, dan efisien mengarah pada perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien yang berbasis digital. Ini menandakan langkah menuju transformasi penuh menuju pemerintahan yang mengadopsi teknologi secara menyeluruh dalam setiap aspek operasionalnya. Dalam konteks ini, digitalisasi tidak hanya dilihat sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi administratif, tetapi juga sebagai fondasi untuk menyediakan layanan publik yang lebih baik dan responsif.

Dengan memanfaatkan solusi digital, pemerintah dapat mempercepat proses-proses administratif, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan akurasi data. Selain itu, penggunaan teknologi juga memungkinkan pemerintah untuk mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasi yang lebih canggih, memungkinkan untuk analisis data yang lebih mendalam dan pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan masyarakat. Selain itu, penggunaan teknologi juga memungkinkan pemerintah untuk mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasi yang lebih canggih, memungkinkan untuk analisis data yang lebih mendalam dan pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, tahap keempat dari arah kebijakan ini bertujuan untuk membawa pemerintahan ke tingkat berikutnya dengan memastikan bahwa penggunaan teknologi digital terintegrasi secara menyeluruh dalam semua proses dan keputusan pemerintah, menciptakan lingkungan yang lebih efektif, efisien, dan responsif bagi masyarakat.

Misi 4. Mewujudkan demokrasi substantial yang partisipatif dan stabilitas ekonomi daerah yang Tangguh

Gambar 5.4
Roadmap Tahapan Pencapaian Misi Keempat



Misi untuk mewujudkan demokrasi yang substantif yang partisipatif dan stabilitas ekonomi daerah yang tangguh memerlukan pendekatan yang terstruktur dan berkelanjutan.

Tahap pertama dalam arah kebijakan ini, yaitu Pembangunan pondasi demokrasi substansial dan peningkatan stabilitas ekonomi yang menekankan pada penguatan keamanan publik, keadilan, produk hukum, serta peningkatan stabilitas ekonomi. Penguatan keamanan publik memastikan bahwa masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang aman dan terlindungi dari berbagai ancaman. Ini mencakup peningkatan kehadiran dan efektivitas kepolisian, serta upaya pencegahan dan penindakan terhadap kejahatan.

Selain itu, keadilan yang ditekankan dalam arah kebijakan ini menggarisbawahi pentingnya kesetaraan akses terhadap sistem hukum bagi semua warga. Ini mencakup upaya untuk mengurangi disparitas sosial dan ekonomi yang dapat mempengaruhi akses terhadap keadilan. Produk hukum

yang berkualitas dan relevan juga menjadi aspek penting, karena memastikan bahwa kerangka hukum yang ada mendukung pelaksanaan demokrasi yang substantif dan memberikan perlindungan yang cukup bagi hak asasi manusia serta kebutuhan ekonomi masyarakat. Terakhir, peningkatan stabilitas ekonomi menjadi prioritas dalam membangun fondasi yang kokoh bagi pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi daerah. Ini melibatkan kebijakan yang mendukung investasi, pertumbuhan sektor ekonomi yang berkelanjutan, serta perlindungan terhadap pelaku usaha kecil dan menengah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan stabil. Dengan demikian, melalui tahap pertama ini, upaya untuk mewujudkan demokrasi substantif yang partisipatif dan stabilitas ekonomi daerah yang tangguh diinisiasi dengan langkah-langkah konkret untuk memperkuat fondasi yang diperlukan.

Tahap kedua: Peningkatan keamanan wilayah dan penguatan stabilitas ekonomi menyoroti pentingnya penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam penegakan hukum, serta pendekatan keadilan yang bersifat restoratif. Penguatan kualitas SDM penegak hukum menjadi kunci dalam memastikan bahwa sistem hukum beroperasi secara efisien dan efektif. Ini mencakup peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan profesionalisme petugas penegak hukum, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan tepat dan adil. Selain itu, pendekatan keadilan restoratif menekankan pentingnya memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh kejahatan, bukan hanya menghukum pelaku. Ini melibatkan keterlibatan aktif dari semua pihak yang terpengaruh oleh kejahatan untuk mencari solusi yang memperbaiki konflik, memulihkan kerugian, dan mencegah terjadinya kejahatan di masa depan.

Penguatan pengelolaan sektor keuangan serta fiskal-moneter yang adaptif menjadi aspek penting dalam menghadapi tantangan ekonomi yang dinamis. Hal ini mencakup perbaikan dalam pengelolaan keuangan publik, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta kebijakan fiskal dan moneter yang responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi. Dengan memperkuat manajemen sektor keuangan dan mengadopsi kebijakan yang adaptif, pemerintah dapat mengelola risiko ekonomi, mengurangi ketidakstabilan, dan menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan demikian, tahap kedua ini bertujuan untuk memperkuat fondasi institusional dan kualitas SDM yang diperlukan dalam memastikan penegakan hukum yang efektif, pendekatan keadilan yang inklusif, serta pengelolaan ekonomi yang adaptif dan responsif terhadap perubahan. Ini merupakan langkah penting dalam mewujudkan demokrasi substantif yang partisipatif dan stabilitas ekonomi yang tangguh.

Tahap ketiga dalam arah kebijakan ini adalah Penguatan demokrasi partisipatif dan pengokohan stabilitas ekonomi yang menekankan pentingnya memperkuat serta memantapkan citra keamanan wilayah sebagai daya tarik investasi. Citra keamanan wilayah menjadi faktor penting yang memengaruhi keputusan investor dalam menanamkan modalnya. Dalam konteks ini, penguatan citra keamanan melibatkan upaya nyata dalam meningkatkan stabilitas, mengurangi risiko, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi aktivitas investasi.

Langkah-langkah yang diambil dalam tahap ini termasuk peningkatan pengawasan keamanan, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran, serta kerjasama antara berbagai pihak terkait untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Selain itu, upaya komunikasi dan promosi yang intensif juga diperlukan untuk membangun citra positif tentang keamanan wilayah tersebut di mata investor. Ini bisa dilakukan melalui kampanye promosi, pertemuan bisnis, serta penyediaan informasi yang transparan tentang kondisi keamanan dan stabilitas wilayah kepada masyarakat umum maupun investor potensial.

Dengan memfokuskan pada penguatan dan pemantapan citra keamanan wilayah sebagai daya tarik investasi, tahap ketiga ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang menarik bagi investasi domestik maupun asing. Investasi yang lebih besar dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, serta memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Tahap keempat: Kutai Kartanegara yang kondusif, demokratis didukung stabilitas ekonomi yang tangguh. Arah kebijakan tahap ini menitikberatkan pada perwujudan stabilitas keamanan dan ekonomi daerah yang tangguh merupakan tahap penting dalam upaya pengembangan suatu wilayah. Hal ini melibatkan berbagai strategi yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, stabil, dan produktif bagi masyarakat serta pelaku usaha. Salah

satu aspek utama dari tahap ini adalah memperkuat keamanan wilayah, baik secara fisik maupun non-fisik, untuk melindungi masyarakat dan aset-aset penting dari berbagai ancaman seperti kejahatan, konflik, dan bencana alam.

Selain itu, tahap ini juga berfokus pada penguatan ekonomi daerah dengan menciptakan kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan berkelanjutan. Hal ini melibatkan upaya untuk meningkatkan investasi, mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang potensial, serta meningkatkan akses terhadap sumber daya dan pasar. Dengan memperkuat keamanan dan ekonomi daerah, diharapkan wilayah tersebut dapat menjadi lebih tangguh dan mampu mengatasi tantangan yang mungkin muncul, serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan nasional secara keseluruhan.

Misi 5. Mewujudkan ketahanan sosial budaya, dan ketahanan ekologi berbasis kearifan lokal

Gambar 5.5
Roadmap Tahapan Pencapaian Misi Kelima



Tahap pertama: Pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal serta pengembangan resiliensi kebencanaan mengarah pada penguatan karakter dan identitas lokal, serta peningkatan harmonisasi antarmasyarakat. Hal ini menekankan pentingnya mempertahankan dan memperkuat nilai-nilai tradisional serta warisan budaya yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Dengan menguatkan karakter dan identitas lokal, masyarakat akan lebih mampu menjaga keberagaman budaya dan menjalin hubungan yang harmonis antar anggota masyarakat, tanpa harus mengorbankan keberagaman tersebut. Pada saat yang sama, penerapan pengelolaan lingkungan berkelanjutan menjadi aspek penting lainnya dalam tahap ini. Dengan menjaga kelestarian lingkungan alam, masyarakat dapat memastikan kelangsungan hidup dan kesejahteraan ekologi, sehingga menciptakan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan keberlanjutan lingkungan.

Selain itu, tahap pertama juga bertujuan untuk membangun kesadaran akan pentingnya keberlanjutan lingkungan di tingkat lokal. Melalui penerapan praktik-praktik pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, seperti konservasi sumber daya alam dan penggunaan teknologi ramah lingkungan, masyarakat akan lebih mampu menjaga ekosistem alamnya. Dengan demikian, tahap pertama ini merupakan fondasi yang kuat dalam menciptakan ketahanan sosial budaya dan ekologi yang berkelanjutan, yang berakar pada nilai-nilai kearifan lokal. Dengan mengutamakan nilai-nilai budaya dan lingkungan yang berkelanjutan, masyarakat dapat membangun fondasi yang kokoh bagi keberlangsungan hidup dan kesejahteraan generasi mendatang.

Tahap kedua: Percepatan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan serta peningkatan resiliensi kebencanaan, menekankan pada percepatan upaya pelestarian budaya lokal dan lingkungan yang berkelanjutan. Hal ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya memperkuat langkah-langkah konkret untuk melindungi serta mempromosikan keberagaman budaya dan ekologi yang unik di setiap daerah. Percepatan upaya pelestarian budaya lokal mencakup berbagai kegiatan, mulai dari pengumpulan dan dokumentasi tradisi-tradisi lokal, hingga promosi dan pendidikan tentang nilai-nilai budaya tersebut kepada generasi muda. Dengan demikian, masyarakat dapat memastikan bahwa

warisan budaya mereka tidak hanya diwariskan, tetapi juga dipelihara dan dihargai secara aktif.

Selain itu, dalam tahap kedua ini, ditekankan juga percepatan upaya pelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Ini termasuk memperkuat kebijakan dan praktik-praktik yang mendukung konservasi sumber daya alam, mengurangi polusi, dan mengembangkan energi terbarukan. Langkah-langkah konkret seperti penanaman kembali hutan, pengelolaan limbah yang lebih efisien, dan promosi gaya hidup yang ramah lingkungan menjadi fokus utama dalam tahap ini. Dengan percepatan upaya pelestarian budaya lokal dan lingkungan yang berkelanjutan, masyarakat dapat membangun fondasi yang lebih kokoh untuk ketahanan sosial budaya dan ekologi jangka panjang, serta mewariskan warisan yang berharga kepada generasi mendatang.

Tahap ketiga dalam misi ini adalah Penguatan pendidikan karakter dan kualitas lingkungan hidup, serta penguatan resiliensi kebencanaan yang menyoroti pentingnya pengembangan dan penguatan inisiatif budaya lokal sebagai pendukung integrasi stabilitas sosial dan ekologi. Fokus pada pengembangan inisiatif budaya lokal mengarah pada upaya untuk mengidentifikasi, mempromosikan, dan mendukung kegiatan atau praktik budaya yang berpotensi dalam menciptakan harmoni antara masyarakat dan lingkungan di tingkat lokal. Ini bisa meliputi beragam kegiatan, mulai dari festival budaya tradisional hingga program-program pendidikan lingkungan yang terintegrasi dengan kearifan lokal.

Dengan memperkuat inisiatif budaya lokal, masyarakat dapat merasakan keterlibatan yang lebih dalam dalam pelestarian warisan budaya mereka sendiri. Hal ini tidak hanya membangkitkan rasa kebanggaan akan identitas budaya mereka, tetapi juga menghasilkan koneksi yang lebih kuat antara masyarakat dan lingkungan alam mereka. Melalui integrasi stabilitas sosial dan ekologi, tahap kedua ini memberikan landasan yang kokoh bagi pembangunan berkelanjutan yang memperhitungkan kepentingan semua pihak serta menjaga keselarasan antara manusia dan alam. Dengan demikian, upaya ini tidak hanya memperkuat ketahanan sosial budaya, tetapi juga melindungi keberlanjutan ekologi yang menjadi sumber kehidupan bagi seluruh masyarakat.

Tahap keempat dari misi ini menekankan masyarakat dan keluarga yang berkarakter, berbudaya serta lingkungan hidup berkualitas yang tangguh terhadap bencana, yang merupakan perwujudan integrasi stabilitas sosial

budaya dan ekologi melalui pemanfaatan potensi budaya lokal. Pada tahap ini, fokus utama adalah mengimplementasikan konsep-konsep dan praktik-praktik yang telah dikembangkan pada tahap-tahap sebelumnya ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Ini mencakup upaya-upaya konkret untuk mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal ke dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kebijakan pembangunan, praktik pertanian, pendidikan, dan lainnya.

Dengan melakukan perwujudan integrasi stabilitas sosial budaya dan ekologi melalui budaya lokal, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan berkelanjutan. Pendekatan ini memungkinkan masyarakat untuk memanfaatkan kearifan lokal dalam mengatasi tantangan-tantangan sosial dan ekologis yang mereka hadapi. Melalui penerapan praktik-praktik berkelanjutan yang berakar pada budaya lokal, masyarakat dapat membangun fondasi yang kuat bagi keberlanjutan jangka panjang yang memperhitungkan kesejahteraan manusia serta keseimbangan ekosistem alam. Dengan demikian, tahap keempat ini menjadi langkah penting dalam mencapai tujuan akhir dari misi ini, yaitu menciptakan masyarakat yang tangguh secara sosial dan ekologis melalui pemanfaatan potensi budaya lokal.

Misi 6. Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dengan membangun konektivitas dan integrasi regional untuk pertumbuhan yang inklusif

Gambar 5.6
Roadmap Tahapan Pencapaian Misi Keenam



Tahap pertama: Pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan menekankan pada peningkatan konektivitas antarwilayah melalui pemenuhan infrastruktur fisik dan digital. Hal ini mengacu pada upaya untuk memperbaiki jaringan transportasi dan komunikasi antar wilayah, baik dalam bentuk jalan raya, rel kereta api, pelabuhan, bandara, maupun infrastruktur digital seperti jaringan internet dan telekomunikasi. Tujuan dari arah kebijakan ini adalah untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah yang dapat menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan memperbaiki konektivitas antarwilayah, diharapkan aksesibilitas terhadap pasar, sumber daya, dan peluang ekonomi akan meningkat secara merata, sehingga memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah.

Selain itu, pemenuhan infrastruktur fisik dan digital juga dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi investasi dan pengembangan bisnis. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, wilayah-wilayah yang sebelumnya terpinggirkan dapat menjadi lebih menarik bagi investor, sehingga mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang baru. Hal ini tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, tetapi juga pada peningkatan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat lokal. Oleh karena itu, pemenuhan infrastruktur fisik dan digital menjadi langkah awal yang krusial dalam rangka mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata serta integrasi regional yang berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif di seluruh negeri.

Tahap kedua: Percepatan pembangunan kewilayahan yang berkeadilan menitikberatkan pada percepatan pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi dan pengembangan *superhub* ekonomi. Fokus utama dari tahap ini adalah untuk mengidentifikasi, memperkuat, dan memperluas pusat-pusat ekonomi yang memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi di setiap wilayah. Langkah-langkah strategis diarahkan pada pengembangan infrastruktur pendukung dan kebijakan yang mempercepat pertumbuhan ekonomi di pusat-pusat ini.

Pusat pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkembang menjadi *superhub* ekonomi, yang bukan hanya menjadi pusat kegiatan ekonomi tetapi juga menjadi lokomotif pertumbuhan bagi wilayah sekitarnya. Melalui strategi ini, diharapkan akan terjadi peningkatan investasi, inovasi, dan penciptaan

lapangan kerja di pusat-pusat ekonomi yang terpilih. Dengan demikian, tahap kedua ini merupakan langkah penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan memusatkan upaya pada pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang berpotensi menjadi pendorong utama pembangunan regional.

Tahap ketiga: Optimalisasi konektivitas dan integrasi pembangunan ekonomi regional dalam penguatan pembangunan kewilayahan yang menekankan pada perluasan aksesibilitas terhadap pasar serta penguatan upaya pemerataan pembangunan melalui konektivitas antarwilayah. Fokus utama dari tahap ini adalah untuk memastikan bahwa semua wilayah, termasuk yang terpencil atau terpinggirkan, memiliki akses yang lebih baik ke pasar, sumber daya, dan peluang ekonomi. Ini dapat dicapai melalui pembangunan infrastruktur transportasi dan komunikasi yang memadai, serta kebijakan yang mendukung integrasi ekonomi antarwilayah.

Perluasan aksesibilitas terhadap pasar tidak hanya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah yang sebelumnya terpinggirkan, tetapi juga akan membantu dalam mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah. Dengan meningkatnya konektivitas antarwilayah, perdagangan dan investasi dapat mengalir lebih lancar, menciptakan peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Selain itu, penguatan upaya pemerataan pembangunan akan memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi didistribusikan secara merata di seluruh wilayah, sehingga memperkuat ketahanan ekonomi nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, tahap ketiga ini menegaskan pentingnya memperluas aksesibilitas terhadap pasar dan memperkuat konektivitas antarwilayah sebagai langkah strategis dalam mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan inklusif.

Tahap keempat: Pembangunan kewilayahan yang merata dan inklusif serta terintegrasi dengan pembangunan ekonomi regional mengedepankan perwujudan konektivitas pembangunan antarwilayah untuk pertumbuhan yang merata dan inklusif. Fokus utama pada tahap ini adalah mengintegrasikan berbagai upaya pembangunan yang telah dilakukan pada tahap-tahap sebelumnya, serta memastikan bahwa konektivitas antarwilayah menjadi landasan yang kokoh bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif di seluruh negeri.

Dalam tahap ini, upaya-upaya sebelumnya untuk meningkatkan konektivitas fisik dan digital antarwilayah diintegrasikan secara menyeluruh, baik dalam hal infrastruktur maupun kebijakan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem pembangunan yang saling terkait dan saling mendukung antarwilayah. Selain itu, tahap keempat ini juga melibatkan kolaborasi lintas sektor dan lintas wilayah untuk mengidentifikasi potensi-potensi sinergis yang dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama. Dengan demikian, tahap keempat merupakan tahap penyelesaian yang mengintegrasikan berbagai komponen pembangunan untuk mencapai pertumbuhan yang merata dan inklusif di seluruh wilayah.

Misi 7. Mewujudkan sarana dan prasarana yang merata dan berkualitas berbasis inovasi hijau

Gambar 5.7
Roadmap Tahapan Pencapaian Misi Ketujuh



Misi "Mewujudkan sarana dan prasarana yang merata dan berkualitas berbasis inovasi hijau" menekankan pentingnya infrastruktur yang tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata, tetapi juga berkelanjutan dari segi lingkungan.

Tahap pertama dalam arah kebijakan ini adalah Pengembangan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar serta peningkatan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan ramah lingkungan. Ini mengakui bahwa infrastruktur dasar seperti akses air bersih, sanitasi, energi, dan transportasi merupakan fondasi dari kehidupan yang layak bagi masyarakat. Oleh karena itu, prioritasnya adalah untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki akses yang setara terhadap infrastruktur ini, tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan.

Peningkatan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan ramah lingkungan mencerminkan kesadaran akan pentingnya menjaga keberlanjutan ekosistem dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Ini melibatkan adopsi praktik pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, seperti konservasi air, penggunaan energi terbarukan, dan pemulihan ekosistem yang terdegradasi. Langkah-langkah konkret mungkin termasuk investasi dalam teknologi yang lebih bersih dan efisien, serta peraturan yang mengatur penggunaan sumber daya alam agar tidak melebihi kapasitas alam untuk memperbaharui dirinya sendiri. Dengan mengimplementasikan arah kebijakan ini, diharapkan bahwa infrastruktur yang dibangun akan memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.

Tahap kedua: Percepatan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menyoroti pentingnya peningkatan kualitas infrastruktur dan sistem energi efisien dalam rangka mempercepat progres pembangunan yang berkelanjutan dengan berwawasan lingkungan. Hal ini menggambarkan komitmen untuk memperbaiki dan memperbarui infrastruktur yang sudah ada, serta mengadopsi teknologi hijau dan praktik konstruksi yang ramah lingkungan dalam pembangunan infrastruktur baru.

Peningkatan kualitas infrastruktur mencakup berbagai aspek, mulai dari pembangunan bangunan yang lebih tahan terhadap bencana alam hingga peningkatan jaringan transportasi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Sementara itu, sistem energi efisien bertujuan untuk mengurangi konsumsi energi dan emisi karbon melalui penggunaan teknologi hijau dan energi terbarukan. Dengan demikian, tahap ini bertujuan untuk menciptakan infrastruktur yang lebih tangguh, efisien, dan ramah lingkungan, yang akan

mendukung pembangunan berkelanjutan di masa depan. Dengan menggabungkan peningkatan kualitas infrastruktur dan sistem energi efisien, diharapkan dapat mempercepat progres pembangunan yang berkelanjutan yang tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

Tahap ketiga dari misi menekankan Integrasi teknologi dan inovasi dalam peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang ramah lingkungan. Fokus tahap ini adalah pemerataan pembangunan infrastruktur, integrasi inovasi-teknologi, dan optimalisasi pemanfaatan infrastruktur berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan yang ramah lingkungan. Pemerataan pembangunan infrastruktur bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah, sehingga setiap daerah memiliki akses yang setara terhadap infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung kehidupan dan pertumbuhan ekonomi. Ini mencakup pembangunan jaringan transportasi, penyediaan air bersih, sanitasi yang layak, dan akses energi yang terjangkau di daerah-daerah terpencil atau kurang berkembang.

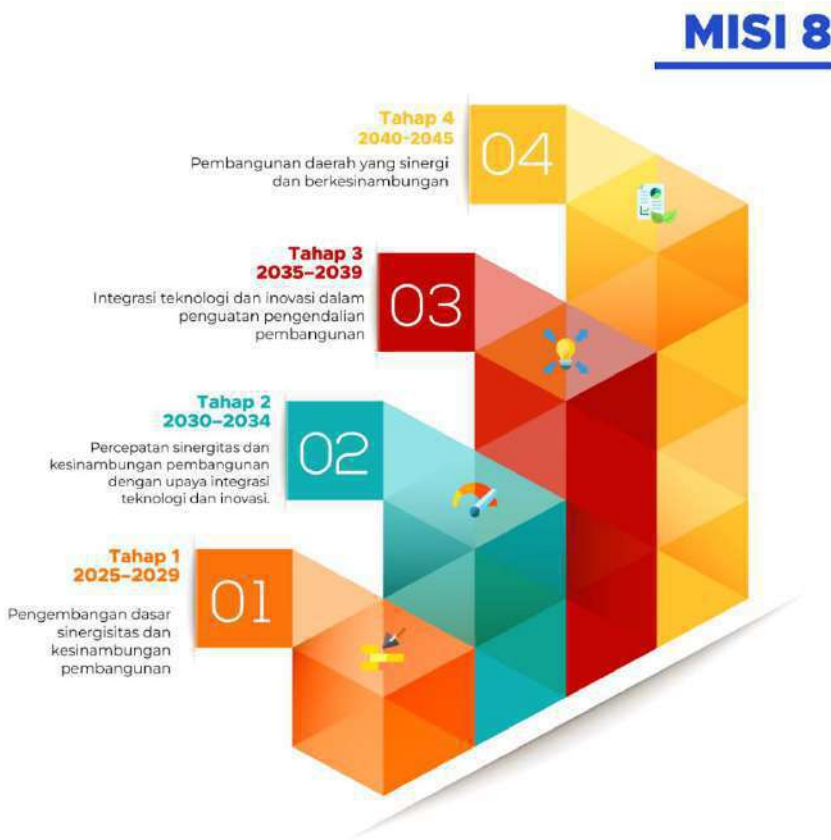
Selain itu, tahap ini juga menekankan pentingnya integrasi inovasi-teknologi dalam pembangunan infrastruktur. Dengan mengadopsi teknologi terbaru dan praktik inovatif, infrastruktur yang dibangun dapat menjadi lebih efisien, tangguh, dan ramah lingkungan. Hal ini mencakup penggunaan teknologi hijau dalam desain dan operasi infrastruktur, serta pengembangan solusi berbasis teknologi untuk mengatasi tantangan lingkungan yang kompleks. Optimalisasi pemanfaatan infrastruktur berkelanjutan juga menjadi fokus, dengan memastikan bahwa infrastruktur yang ada dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan. Dengan demikian, tahap ketiga ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan melalui pemerataan pembangunan infrastruktur, integrasi teknologi inovatif, dan optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang sudah ada.

Tahap keempat: Pemerataan sarana dan prasarana berkualitas yang ramah lingkungan, menandai tahap akhir dalam upaya menuju infrastruktur yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Fokus pada tahap ini adalah perwujudan sarana dan prasarana yang merata dan berkualitas serta berbasis pada prinsip inovasi hijau. Hal ini berarti bahwa infrastruktur yang dibangun tidak hanya memiliki cakupan yang merata, tetapi juga memanfaatkan teknologi dan praktik inovatif yang ramah lingkungan.

Perwujudan infrastruktur berkualitas berbasis inovasi hijau mencakup berbagai aspek, mulai dari pembangunan bangunan yang ramah lingkungan hingga implementasi teknologi hijau dalam sistem transportasi dan energi. Misalnya, penggunaan bahan bangunan yang ramah lingkungan dan efisiensi energi yang tinggi dapat meningkatkan kualitas bangunan sambil mengurangi dampak lingkungan. Selain itu, pembangunan infrastruktur berbasis inovasi hijau juga mencakup penggunaan sumber energi terbarukan, pengelolaan limbah yang efisien, dan pengembangan ruang terbuka hijau dalam lingkungan perkotaan. Dengan perwujudan infrastruktur berkualitas berbasis inovasi hijau, diharapkan bahwa masyarakat dapat menikmati manfaat infrastruktur yang lebih baik sambil menjaga keberlanjutan lingkungan untuk generasi mendatang. Tahap ini merupakan puncak dari upaya untuk menciptakan lingkungan yang seimbang antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan hidup.

Misi 8. Mewujudkan sinergitas dan kesinambungan pembangunan

Gambar 5.8
Roadmap Tahapan Pencapaian Misi Kedelapan



Misi "Mewujudkan sinergitas dan kesinambungan pembangunan" bertujuan untuk mencapai integrasi yang lebih baik antara berbagai aspek pembangunan, serta memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak hanya berkelanjutan secara lingkungan, tetapi juga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

Tahap pertama dalam arah kebijakan ini adalah Pengembangan dasar sinergitas dan kesinambungan pembangunan. Arah kebijakan ini menekankan penguatan kerja sama dan sinergi yang efektif antar *stakeholder*. Penguatan kerja sama dan sinergi antar *stakeholder* adalah kunci dalam mencapai kesinambungan pembangunan. Ini mencakup kolaborasi yang erat antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga internasional untuk merancang, melaksanakan, dan memantau program-program pembangunan. Melalui kerja sama yang efektif, berbagai pihak dapat menyatukan sumber daya, keahlian, dan pengalaman mereka untuk mengidentifikasi solusi yang holistik dan berkelanjutan untuk tantangan pembangunan yang kompleks. Selain itu, sinergi antar *stakeholder* juga membantu memastikan bahwa berbagai kepentingan dan perspektif masyarakat dipertimbangkan secara adil dalam proses pengambilan keputusan, sehingga menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan memperkuat kerja sama dan sinergi antar *stakeholder*, tahap pertama ini bertujuan untuk menciptakan landasan yang kokoh bagi kesinambungan pembangunan yang berkelanjutan dan menyeluruh.

Tahap kedua: Percepatan sinergitas dan kesinambungan pembangunan yang memfokuskan pada peningkatan kolaborasi dan koordinasi antar *stakeholder* sebagai upaya mendukung kesinambungan pembangunan. Kolaborasi yang ditingkatkan ini bertujuan untuk memastikan bahwa berbagai pihak yang terlibat dalam proses pembangunan, termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga internasional, dapat bekerja secara efektif bersama-sama. Dengan meningkatkan kolaborasi dan koordinasi antar *stakeholder*, diharapkan bahwa akan terjadi sinergi yang lebih besar dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Hal ini memungkinkan untuk pertukaran ide, pengetahuan, dan sumber daya yang lebih baik antara berbagai pihak, sehingga mempercepat progres menuju pembangunan yang berkelanjutan. Dengan adanya kolaborasi yang lebih baik, memungkinkan lebih mudahnya identifikasi dan penyelesaian

hambatan-hambatan yang mungkin muncul dalam perjalanan menuju kesinambungan pembangunan. Dengan demikian, tahap kedua ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama lintas-sektoral dan lintas-lembaga, sehingga dapat menciptakan landasan yang lebih kuat bagi kesinambungan pembangunan di masa depan. Selain itu, sinergitas dan kesinambungan pembangunan ini juga dibersamai dengan dukungan upaya integrasi teknologi dan inovasi dalam penerapannya.

Tahap ketiga: Integrasi teknologi dan inovasi dalam penguatan pengendalian pembangunan menekankan pada efisiensi dan optimalisasi kinerja berbasis teknologi digital dan inovasi yang didukung oleh implementasi program yang kolaboratif. Artinya, pada tahap ini, upaya ditekankan pada peningkatan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, baik itu finansial, manusia, maupun alam, untuk mencapai hasil yang lebih optimal dalam pembangunan. Dalam konteks kolaborasi, implementasi program yang kolaboratif menjadi kunci dalam mencapai tujuan efisiensi dan optimalisasi kinerja. Program-program ini melibatkan kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan, baik itu pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, maupun lembaga internasional, untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi berbagai inisiatif pembangunan. Dengan kolaborasi yang kuat, program-program ini dapat memanfaatkan keahlian, sumber daya, dan jaringan yang dimiliki oleh masing-masing pihak, sehingga menciptakan sinergi yang dapat meningkatkan efisiensi dan kinerja pembangunan secara keseluruhan.

Selain itu, implementasi program yang kolaboratif juga memungkinkan adanya pembagian tanggung jawab yang lebih baik di antara semua pihak yang terlibat, sehingga meminimalkan tumpang tindih dan memaksimalkan dampak positif dari setiap program pembangunan yang dilaksanakan. Dengan demikian, tahap ketiga ini bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan secara efisien dan optimal, sambil tetap menjaga kerja sama antar *stakeholder* yang kuat dalam mencapai kesinambungan pembangunan yang diinginkan.

Tahap keempat yang menandai langkah akhir dalam upaya mencapai tujuan tersebut. Pada tahap ini, kebijakan pembangunan diarahkan pada Pembangunan daerah yang sinergi dan berkesinambungan, fokusnya adalah pada perwujudan sinergisitas yang lebih mendalam dan kesinambungan dalam pembangunan. Ini mengharuskan berbagai pemangku kepentingan

untuk terus berkolaborasi secara efektif dan koordinasi dalam melanjutkan proyek-proyek pembangunan yang telah dirancang.

Perwujudan sinergisitas yang lebih kuat mencerminkan integrasi yang lebih erat antara berbagai aspek pembangunan, termasuk ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ini dapat dicapai melalui pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya antara berbagai pihak yang terlibat. Selain itu, perwujudan kesinambungan pembangunan mengharuskan adanya komitmen jangka panjang untuk menjaga pencapaian-pencapaian yang telah dicapai dan terus mengembangkan strategi-strategi yang berkelanjutan dalam jangka waktu yang lebih lama. Dengan demikian, tahap keempat ini menjadi titik puncak dari upaya bersama untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, di mana sinergi dan kesinambungan menjadi landasan bagi perkembangan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat.

5.1.2. Upaya Transformatif

Upaya Transformatif atau Arah Transformatif merupakan serangkaian acuan, pedoman, ataupun strategi yang diperuntukkan merubah sebuah kondisi melalui kebijakan-kebijakan yang dirancang atau direncanakan. Dalam kontekstual perencanaan pembangunan wilayah, sesuai dengan namanya arah transformatif membawa pesan perubahan yang signifikan serta dinilai mampu memberikan dampak dan efek yang sangat masif bagi keberlangsungan atau dinamika yang akan terjadi suatu wilayah perencanaan. Implementasi arah transformatif tidak dapat dipandang sebelah mata saja. Hal tersebut dapat terjadi karena untuk dapat mengimplementasikannya, diperlukan suatu komitmen kuat serta kolaborasi multisektor dalam lingkup masyarakat secara luas dan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Kondisi tersebut terjadi karena pada umumnya, arah transformatif akan mengatasi suatu permasalahan atau isu strategis mulai dari akarnya secara mendasar sehingga melaluinya potensi perubahan yang berkelanjutan dan membawa dampak positif bagi pembangunan di masa mendatang dapat terjadi pascatransformasi.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, arah transformatif membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat benar-benar diimplementasikan secara menyeluruh sesuai dengan peruntukannya. Oleh sebab itu, pada aktualisasi perencanaan pembangunan wilayah di Indonesia, arah transformatif hanya dapat dirumuskan pada saat penyusunan dokumen

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) baik dalam skala nasional maupun daerah provinsi ataupun kabupaten/kota. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang memiliki periodisasi masa berlaku selama 20 tahun mendatang sehingga dinilai linear dengan kebutuhan jangka waktu perumusan dan implementasi arah transformatif yang sangat lama dan memiliki kompleksitas substantif yang tinggi.

Memasuki periodisasi perumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang baru yakni tahun 2025-2045, berbagai usulan dan rencana strategi arah transformatif mulai disusun dan diusung sebagai bagian dari rencana pembangunan nasional ataupun daerah. Urgensitas arah transformatif menjadi sangat penting pada momen ini. Hal tersebut dapat terjadi mengingat tahun 2045 menjadi salah satu *milestone* penting dalam sejarah Bangsa Indonesia sebab bertepatan dengan 100 tahun Indonesia Merdeka yang digaungkan melalui slogan “Indonesia Emas 2045”. Perwujudan visi mulia Bangsa Indonesia pada tahun 2045 perlu untuk direncanakan sedari sekarang sehingga nantinya dapat tercapai di akhir periodisasi perencanaan.

Menindaklanjuti hal tersebut, salah satu wilayah administratif dalam skala kabupaten/kota dengan urgensitas perumusan arah transformatif yang tinggi di Indonesia adalah Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur. Urgensitas tersebut muncul oleh karena Kutai Kartanegara merupakan wilayah dengan karakteristik jati diri yang khas ditinjau dari segi historisnya disertai dengan berbagai mandat pembangunan RPJPN, RPJPD Provinsi Kalimantan Timur, mandat nasional sebagai Mitra IKN, dan mandat pembangunan dari segi perencanaan tata ruang dan tata wilayah. Di sisi lain, dinamika perkembangan wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara mengindikasikan adanya perubahan struktural yang diproyeksi akan terjadi selama jangka waktu 20 tahun mendatang sehingga diperlukan adanya strategi-strategi arah transformatif sebagai bentuk perwujudan upaya pencapaian kondisi ideal yang hendak dicapai nantinya. Oleh sebab itu, direncanakan strategi arah transformatif Kabupaten Kutai Kartanegara yang tertuang di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045.

Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu wilayah administratif kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur. Ditinjau dari sisi historisnya, dahulu kabupaten ini merupakan sebuah Kerajaan Hindu di Kalimantan Timur yang berdiri pada tahun 1300 M di Tepian Batu

atau Kutai Lama. Kerajaan tersebut didirikan oleh Aji Batara Agung Dea Sakti sebagai raja pertama hingga tahun 1325 M. Kerajaan ini memiliki karakteristik Hindu yang sangat kental dengan corak Hindunya serta memiliki potensi yang luar biasa pada sektor ekstraktif batu bara, hasil hutan, pertambangan emas, serta sarang burung walet. Kerajaan Kutai Kartanegara kemudian berubah menjadi Kesultanan Kutai Kartanegara pada tahun 1545-1610 semenjak masa kepemimpinan Aji Raja Mahkota Mulia Alam. Setelah kurang lebih 400 tahun berdiri, Kesultanan Kutai Kartanegara mulai memasuki periode keruntuhannya semenjak berada di bawah kekuasaan Kesultanan Banjar yang setelahnya dipenuhi dengan kependudukan dan kekuasaan Belanda oleh sebab karakteristiknya yang kuat serta potensinya yang melimpah. Meskipun demikian, kondisi Kesultanan ini semakin terpuruk dengan adanya kependudukan oleh Jepang.

Ditinjau secara hukum, perjalanan Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi bagian resmi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengalami perjalanan yang panjang. Hal tersebut dimulai pada tahun 1947 ketika Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Matadipura tercakup di dalam status Daerah Swaparaja Kutai sebagai bagian dari Federasi Kalimantan Timur. Kemudian, Daerah Swapraja Kutai ditetapkan sebagai bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tanggal 27 Desember 1949 sehingga daerah tersebut berubah menjadi Daerah Istimewa Kutai mengacu pada UU Darurat Nomor 3 Tahun 1953. Status Daerah Istimewa Kutai kemudian dicabut melalui UU nomor 28 Tahun 1959 sehingga kembali mengalami perubahan nama menjadi Kabupaten Kutai dengan Ibukota Tenggarong. Pascakejadian tersebut, Kabupaten Kutai mengalami pemekaran menjadi 4 daerah otonomi berdasarkan UU Nomor 47 Tahun 1999. Tak lama setelahnya, kembali terjadi usulan perubahan nama wilayah hasil pemekaran menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara pasca Musyawarah Nasional APKASI pada tahun 2000. Hingga pada akhirnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002, Nama Kabupaten Kutai secara resmi diubah menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara dan hingga kini menjadi bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki beberapa mandat pembangunan yang diamanahkan oleh negara dan provinsi bagi kabupaten ini. Mengacu pada kedua rencana pembangunan tersebut yakni Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional “Indonesia Emas 2045” dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur, terdapat beberapa mandat yang diperuntukkan bagi Kabupaten Kutai Kartanegara yakni Meningkatkan interaksi antar-wilayah antara IKN dengan daerah mitra sebagai *superhub* ekonomi, pengembangan hilirisasi industri berbasis sektor ekonomi potensial yang bernilai tambah dan berkelanjutan, serta pengembangan destinasi wisata potensial dengan mengoptimalkan mitra dan tenaga kerja lokal. Sehingga melaluinya, dapat diketahui bahwasanya terdapat beberapa tema besar mandat RPJPN bagi Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi (1) *Superhub* Ekonomi; (2) Industri Hijau; (3) Wisata Potensial; dan (4) Konservasi Hutan Hujan Tropis.

Superhub ekonomi merupakan salah satu koridor pengembangan ekonomi yang menitikberatkan pada sektor-sektor ekonomi yang mampu menjadi katalisator serta memiliki orientasi dan prinsip berkelanjutan. *Superhub* ekonomi diimplementasikan pada wilayah IKN dengan daerah mitra termasuk salah satunya adalah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan tujuan yakni peningkatan daya saing serta menjadi mesin penggerak aktivitas ekonomi. Di sisi lain, penerapan dan implementasi industri hijau turut serta menjadi mandat yang diamanatkan bagi Kabupaten Kutai Kartanegara. Industri hijau sendiri dapat diartikan sebagai sebuah operasionalitas industri yang berlangsung dengan menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan melalui beberapa upaya seperti efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya, penggunaan energi baru terbarukan, penekanan pada prinsip *zero waste* dan *reduce-reuse-recycle* (3R). Penerapan industri hijau ini memiliki tujuan utama yakni peningkatan nilai tambah serta kompleksitas industri yang dilakukan tanpa mengorbankan lingkungan serta ekosistem di sekitarnya sehingga potensi sumber daya alam akan tetap terjaga kualitas dan kuantitasnya bagi pemenuhan kebutuhan di masa mendatang.

Pengembangan wisata potensial dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan nilai tambah dari bidang pariwisata dan penyediaan lapangan kerja bagi tenaga kerja potensial. Pengembangan wisata potensial ini didasarkan pada karakteristik serta potensi yang dimiliki oleh daerah dengan prinsip pengembangan *eco-tourism* berbasis kesadaran akan lingkungan dan alam. Terakhir, yakni berkaitan dengan Konservasi Hutan Hujan Tropis maka dapat diketahui bahwasanya Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi

Kalimantan Timur memiliki potensi dan keberadaan hutan hujan tropis yang masih baik kualitasnya. Potensi tersebut tidak boleh disalahgunakan sebagai kawasan budidaya karena tidak sesuai dengan peruntukannya dan tentunya akan berdampak buruk bagi lingkungan di masa mendatang. Oleh sebab itu, konservasi hutan hujan tropis menjadi salah satu tema mandat rencana pembangunan nasional kepada Kabupaten Kutai Kartanegara untuk terus dapat mempertahankan kualitas ekologi dan ekosistem yang ada di sekitarnya. Implementasi tema-tema mandat pembangunan tersebut kemudian menjadi salah satu faktor terbentuknya beberapa pembagian kawasan atau zona yang disesuaikan dengan potensi, karakteristiknya, dan luasannya tersendiri. Hal tersebut ditujukan supaya masing-masing kawasan potensial dapat mengoptimalkan potensinya tanpa merusak aset penting yang terdapat di dalamnya. Hal ini sekaligus menjadi representasi dari “keadilan pembangunan” yang tidak serta merta secara eksplisit diartikan harus sama antara satu kawasan peruntukkan dengan kawasan peruntukkan lainnya.

Selain itu, dengan ditetapkannya Ibu Kota Nusantara di Kalimantan maka menjadi suatu hal yang sangat penting untuk dapat diperhatikan bagi pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal tersebut dapat terjadi karena wilayah administratif kabupaten Kutai Kartanegara menjadi salah satu mitra IKN sehingga di masa mendatang akan menjadi *game changer* bagi dinamika pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Mengacu pada Perpres Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Perpres Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022 – 2042, maka dapat diketahui bahwasanya terdapat perincian implementasi Visi *Superhub* ekonomi Ibu Kota Nusantara yang terdiri atas 6 Klaster dan 2 Pemampu. Diantara keseluruhannya, Kabupaten Kutai Kartanegara mengarusutamakan tiga mandat nasional sebagai mitra IKN yang kemudian turut serta dijadikan dalam pokok visi Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal-hal tersebut meliputi Mandat Pusat Pangan, Permukiman Perkotaan, dan Pariwisata. Mandat pertama yakni perwujudan Pusat Pangan dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan dalam mewujudkan daerah sebagai pusat produksi pangan yang maju serta mampu menggunakan sumber daya lokal yang tersedia secara optimal dan maksimal melalui penerapan teknologi pertanian masa kini, dan tentunya dengan penerapan prinsip keberlanjutan produksi, utamanya di

wilayah Kalimantan Timur. Pengembangan pusat pangan ini ditujukan salah satunya sebagai langkah persiapan dalam menghadapi berbagai tren kesehatan serta kebugaran yang dapat terjadi di masa mendatang. Oleh sebab itu, dengan mandat pusat pangan ini maka diharapkan akan dapat terjadi peningkatan kualitas produksi dan kuantitas hasil produksi pangan yang baik serta efektif dan efisien dalam upaya memenuhi kebutuhan lokal intrawilayah maupun ekspor antarwilayah.

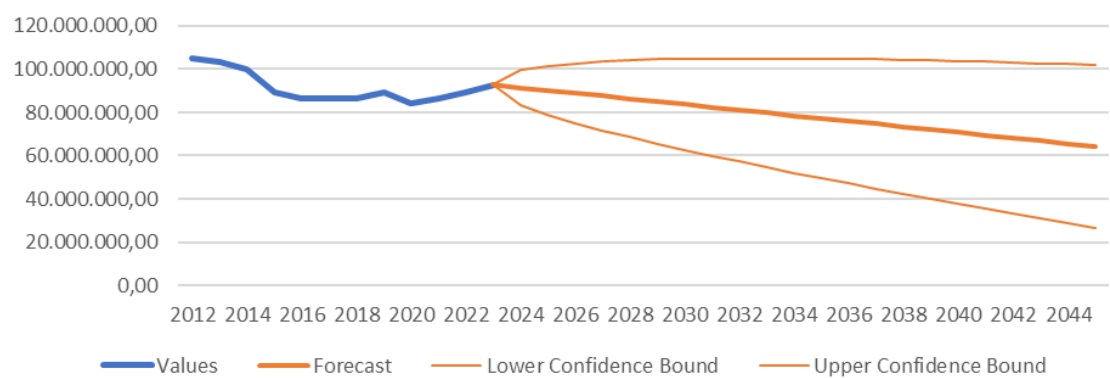
Permukiman perkotaan merupakan suatu mandat yang turut serta diamanahkan kepada Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Mitra IKN. Mandat ini diturunkan dengan mempertimbangkan adanya potensi pengembangan kependudukan dan dinamika perkotaan yang dapat terjadi ketika operasionalitas IKN telah berjalan sepenuhnya di masa mendatang. Permukiman perkotaan ini juga dirancang sebagai salah satu aspek pendukung operasionalitas IKN di masa mendatang dengan peruntukkan utama merupakan bagian dari kawasan budidaya yang sepenuhnya dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dalam melakukan interaksi antarsesama dan dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup. Oleh sebab itu, dalam rangka mempersiapkan kondisi tersebut, permukiman perkotaan mulai ditata dan dipersiapkan sehingga nantinya akan dapat mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan bermukim bagi masyarakat termasuk di dalamnya telah mencakup aspek ketercukupan pemenuhan akomodasi layanan publik dan lain sebagainya dalam lingkup permukiman perkotaan.

Mandat mitra IKN terakhir yakni pariwisata yang dapat diartikan sebagai upaya pengembangan sektor pariwisata yang didasarkan pada pemanfaatan karakteristik lokal dan keunikan budaya, keindahan alam yang dimiliki, serta daya tarik sumber daya historis dengan tujuan utama untuk kesejahteraan masyarakat. Di dalam upaya pengembangannya maka tetap digunakan prinsip-prinsip berkelanjutan sebagai bagian dari mandat dan pemenuhan kebutuhan pendukung pariwisata seperti infrastruktur, promosi, dan peningkatan kualitas pelayanan sehingga sektor pariwisata pada akhirnya mampu memberikan kontribusi ekonomi yang baik dan signifikan.

Dalam mewujudkan berbagai mandat yang telah diamanahkan serta menyesuaikan kondisi perpindahan sebagian wilayah Kutai Kartanegara (Kecamatan Muara Jawa, Kecamatan Samboja, Kecamatan Samboja Barat) yang menjadi deliniasi wilayah IKN, maka perlu untuk dilakukan proses identifikasi analisis pergeseran struktur ekonomi Kabupaten Kutai

Memasuki aspek pertama yakni terkait dengan Pergeseran Struktur Ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan perhitungan dan proyeksi yang dilakukan dengan mendasarkan pada data PDRB ADHK 2010 Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2012-2023 maka diperoleh data proyeksi struktur ekonomi kabupaten di hingga tahun 2045. Mengacu pada hasil pengolahan data tersebut, maka dapat dilakukan sebuah analisis bahwasanya Kabupaten Kutai Kartanegara diproyeksi akan mengalami pergeseran struktur ekonomi di masa mendatang dengan puncak proyeksi pada tahun 2045. Pada periode awal yakni pada tahun 2012, *share* struktur ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara masih didominasi oleh sektor pertambangan dengan persentase sebesar 80,74% disusul oleh sektor lainnya seperti pertanian, industri, dan jasa. Kemudian, pada periode amatan selanjutnya yakni pada tahun 2023 diketahui bahwasanya *share* sektor pertambangan telah mengalami penurunan sebesar kurang lebih 10% sedangkan sektor lain justru mengalami peningkatan *share* secara cukup signifikan.

Grafik 5.2
Realisasi dan Proyeksi *Share*
Sektor Pertambangan dan Penggalian
terhadap PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara, 2025-2045

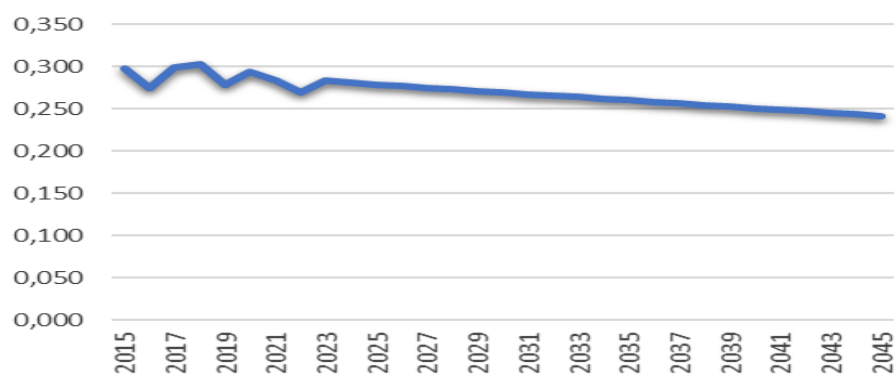


Menindaklanjuti pada kondisi tersebut, maka kemudian dilakukan proyeksi untuk mengetahui *share* struktur ekonomi potensial pada tahun 2045 dan hasil yang didapatkan yakni dengan menggunakan pendekatan skenario proyeksi positif dapat diketahui bahwasanya terjadi penurunan *share* PDRB sektor pertambangan yang terjadi pada Periode ketiga RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2045. Fenomena penurunan sektor pertambangan dan meningkatnya sektor non pertambangan dapat terjadi karena adanya pengaruh dan efek dari IKN serta pengembangan *superhub* wilayah metropolitan Balikpapan dan Samarinda. Apabila meninjau hasil

proyeksi, maka *share* PDRB tertinggi pada tahun 2045 dipegang oleh sektor jasa yang dimungkinkan hal tersebut terjadi oleh sebab adanya pengaruh dari pengembangan perkotaan secara masif dan signifikan. Menindaklanjuti kondisi tersebut, muncul sebuah urgensi adanya penataan perkembangan perkotaan yang terjadi. Hal ini dimaksudkan supaya perkembangan perkotaan yang nantinya terjadi tidak menggusur atau mendesak lahan-lahan dari sektor pertanian sebagai salah satu sektor yang juga potensial dan turut serta mengalami peningkatan yang signifikan di masa mendatang. Penataan ini juga dimaksudkan kembali untuk menjamin “Keadilan Pembangunan” sehingga setiap sektor tetap dapat berkembang sesuai dengan peruntukannya secara optimal tanpa merusak potensi dari sektor lainnya sehingga pada akhirnya seluruh sektor dapat saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya dalam perwujudan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik.

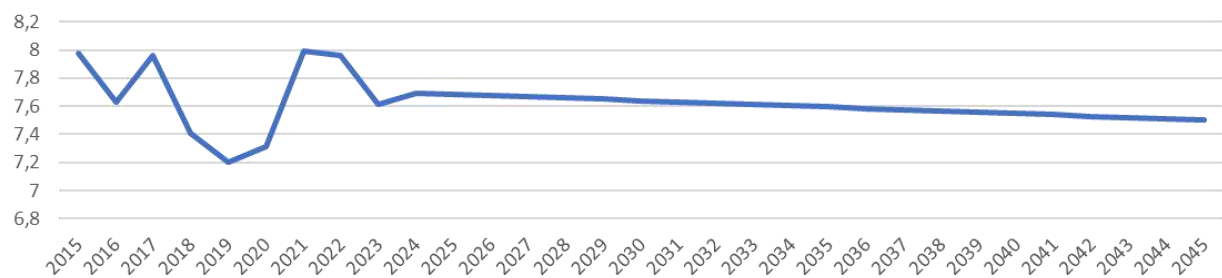
Grafik 5.3

Realisasi dan Proyeksi Rasio Gini Kabupaten Kutai Kartanegara, 2015-2045

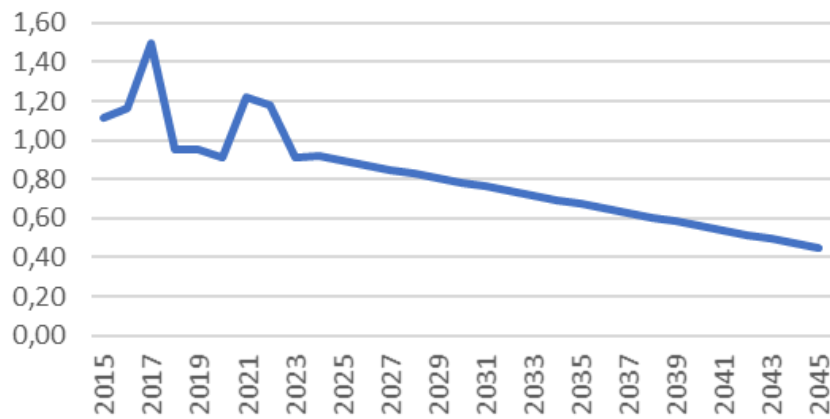


Grafik 5.4

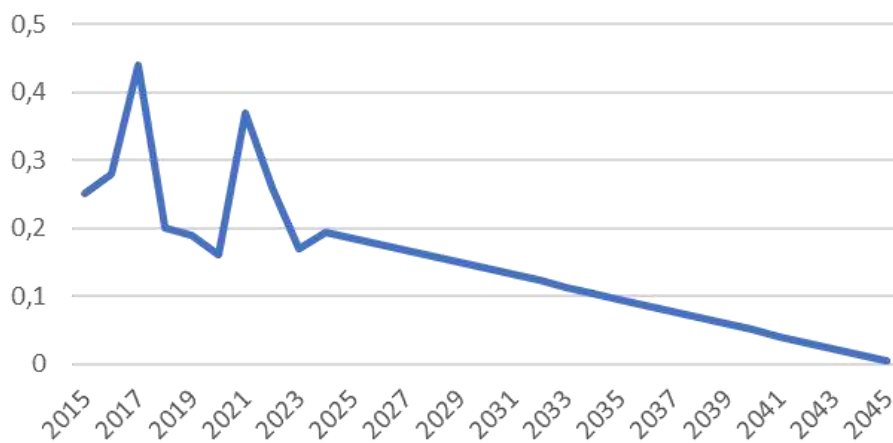
Realisasi dan Proyeksi Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kutai Kartanegara, 2015-2045



Grafik 5.5
Realisasi dan Proyeksi Kedalaman (P1) Kemiskinan
Kabupaten Kutai Kartanegara, 2015-2045

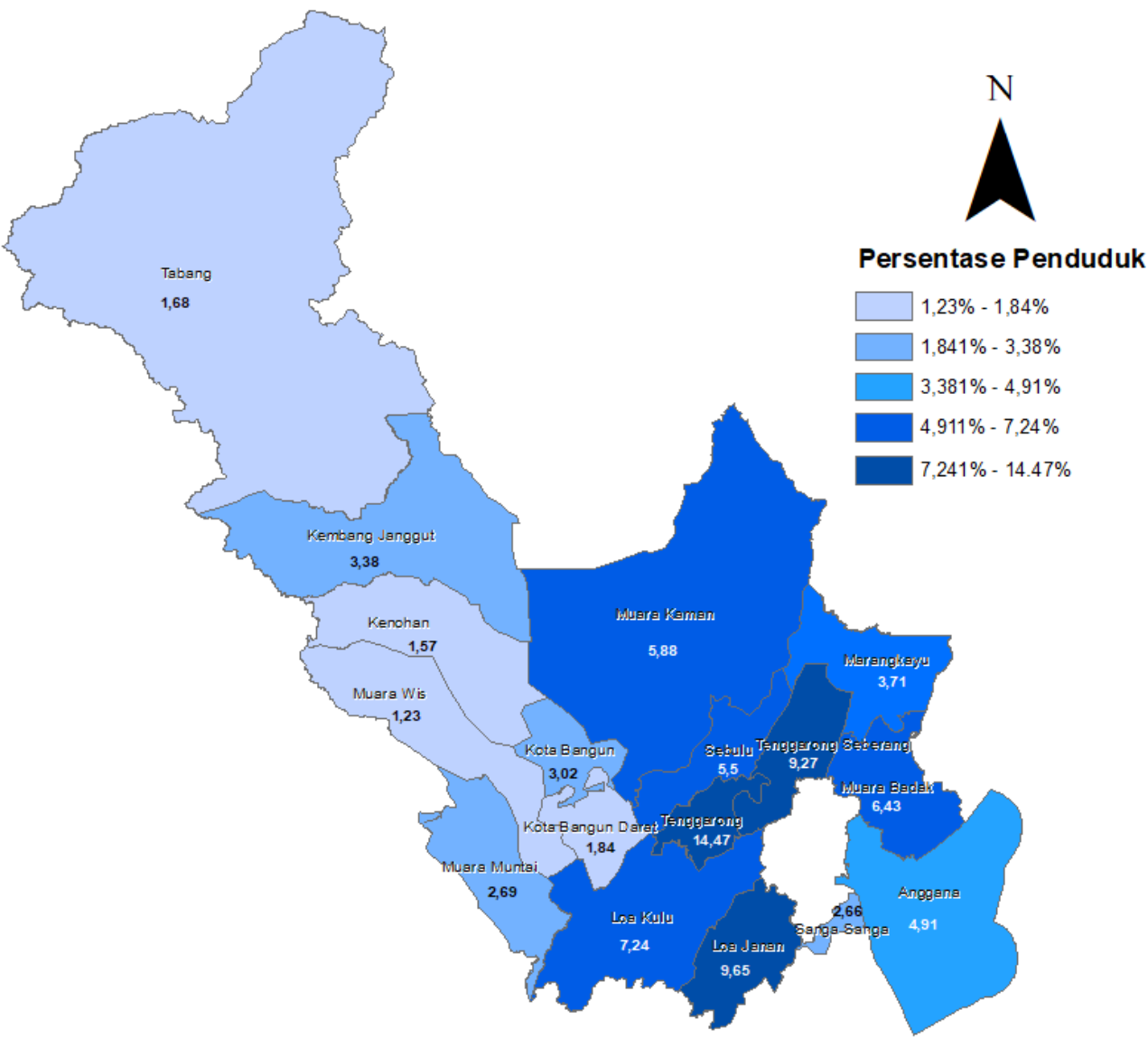


Grafik 5.6
Realisasi dan Proyeksi Keparahan (P2) Kemiskinan
Kabupaten Kutai Kartanegara, 2015-2045

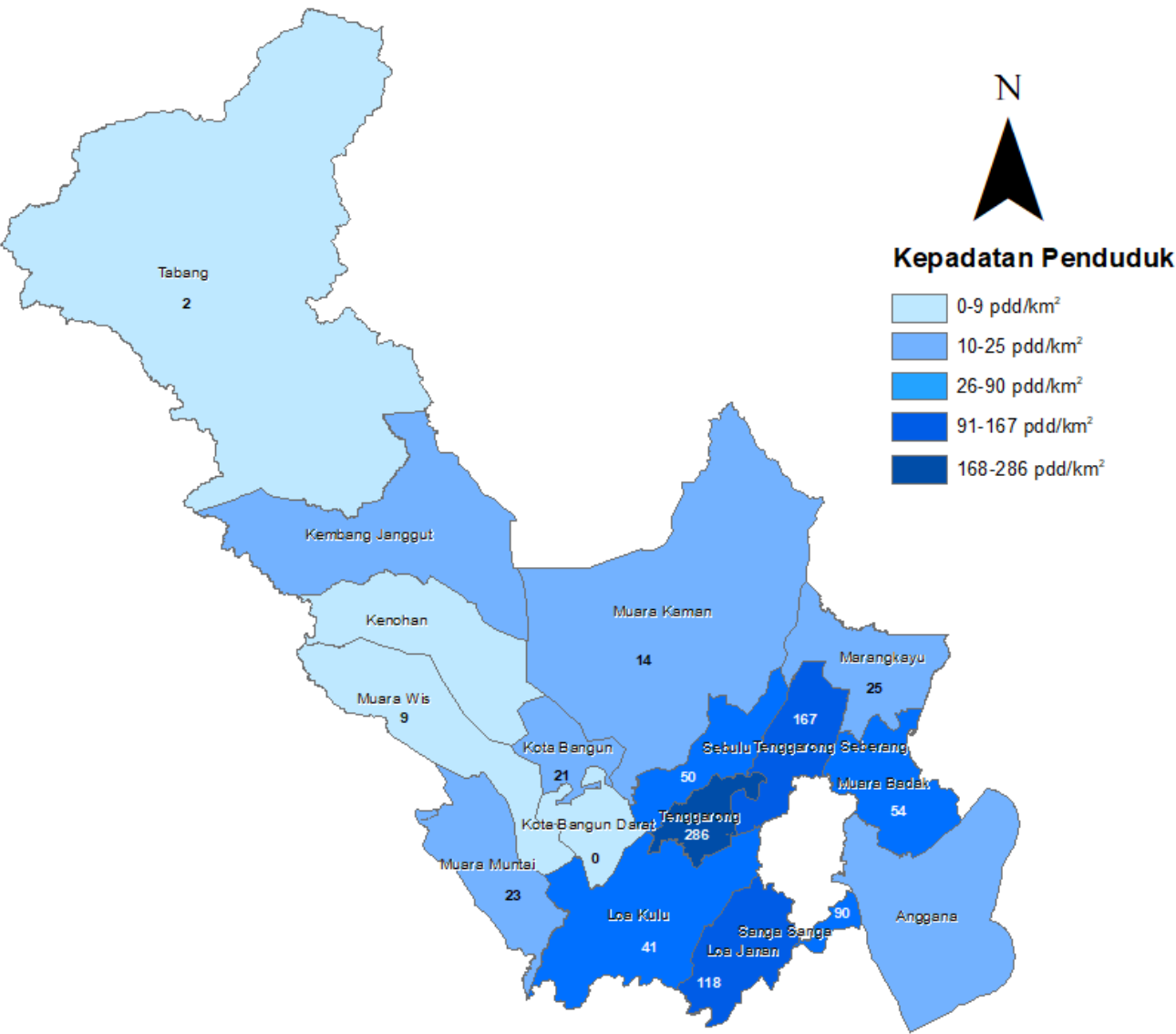


Selain pergeseran struktur ekonomi, terdapat pula *concern* yang berkaitan dengan urgensi pemerataan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Beberapa komponen yang dipertimbangkan dalam analisis ini meliputi proyeksi terhadap Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Kedalaman Kemiskinan, dan Keparahan Kemiskinan. Berdasarkan hasil proyeksi data historisnya, diketahui bahwasanya terjadi tren penurunan seluruh aspek-aspek yang dipertimbangkan dalam analisis ini. Angka rasio gini pada tahun 2045 diproyeksikan mencapai angka 0,241. Penurunan tren rasio gini tersebut mengindikasikan adanya penurunan ketimpangan yang dapat terjadi karena angka kemiskinan yang turut serta menurun dari tahun ke tahun. Selain itu, berdasarkan analisis pada kedalaman kemiskinan yang mendekati angka 0, maka dapat diketahui bahwasanya masyarakat yang termasuk miskin di Kabupaten Kutai Kartanegara pada umumnya tidak berada pada kondisi yang sangat ekstrem melainkan cenderung berada di sekitar garis kemiskinan. Aspek keparahan kemiskinan juga menunjukkan tren penurunan yang baik bahkan diproyeksikan akan mencapai angka 0 absolut pada tahun 2045. Sehingga, berdasarkan beberapa hasil analisis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwasanya upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan memunculkan *trigger* peningkatan kapasitas ekonomi keluarga. Hal tersebut dapat menjadi suatu upaya penyelesaian permasalahan karena kecenderungan kemiskinan masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara bukanlah kemiskinan struktural serta bukan pula merupakan kemiskinan yang absolut sehingga melalui cara-cara tersebut diharapkan mampu memperbaiki kondisi kemiskinan di masa mendatang. Berdasarkan kondisi tersebut, angka kemiskinan di Kutai Kartanegara yang diproyeksikan menurun pada angka 7,5 di tahun 2045 kemudian ditargetkan menurun menjadi 0,36 di tahun 2045 dengan intervensi rencana kebijakan pembangunan di Kutai Kartanegara.

Gambar 5.9
Peta Sebaran Persentase Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara 2023



Gambar 5.10
Peta Sebaran Kepadatan Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara, 2023



Aspek analisis terakhir yakni berkaitan dengan dinamika kependudukan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Analisis dilakukan dengan memetakan distribusi persentase penduduk yang tinggal serta memetakan distribusi kepadatan penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan hasil pengolahan data, maka dapat diketahui bahwasanya persentase penduduk berjenjang dari 1,23% hingga 14,47% di lingkup Kecamatan sedangkan sebaran kepadatan penduduk berjenjang dari 0 penduduk/km² hingga 286 penduduk/km². Hasil analisis ini menunjukkan persebaran jumlah serta

kepadatan penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara masih terdistribusi di kecamatan-kecamatan yang terletak berdekatan dengan perkotaan Samarinda dan Balikpapan. Menindaklanjuti hal tersebut, dibutuhkan suatu upaya penataan dan *controlling* distribusi penduduk untuk menjaga pola distribusi penduduk pada kawasan yang dikhususkan untuk permukiman dan tidak tersebar di kawasan-kawasan lindung dan konservasi yang peruntukannya memang tidak ditujukan sebagai lahan bermukim masyarakat. Penataan ini penting untuk menjamin ketersediaan wilayah konservasi yang membutuhkan ruang fisik luas untuk dapat memproduksi sebagai contoh pertanian dan lain sebagainya. Di sisi lain, ditinjau dari segi piramida penduduknya, maka dapat diketahui bahwasanya Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki bonus demografi hingga tahun 2045. Kondisi ini merupakan indikasi yang baik karena usia produktif mendominasi struktur kependudukan sehingga perlu adanya optimalisasi bonus demografi dalam sektor-sektor ekonomi khususnya pada sektor non-ekstraktif sehingga pertumbuhan ekonomi dapat semakin optimal dan maksimal.

Pasca-identifikasi mandat pembangunan serta identifikasi dan analisis terkait dengan dinamika perkembangan wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara hingga tahun proyeksi 2045 maka kemudian dapat diketahui beberapa jalan menuju kondisi yang diinginkan atau perwujudan Visi Kukar Maju Tangguh Berbudaya 2045. Dalam hal ini, terdapat enam faktor peubah atau *Game Changer* Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara yang linear dengan Kondisi akhir yang diinginkan melalui perwujudan visi rencana pembangunan jangka panjang. Artinya, melalui implementasi *Game Changer* tersebut maka kondisi akhir yang hendak dicapai diharapkan dapat terlaksana pada periode akhir jangka waktu rencana pembangunan pada tahun 2045. Rincian terkait hubungan *Game Changer* dengan kondisi akhir yang diinginkan beserta dengan narasi penjelasan sebagai berikut:

Tabel 5.1
Kondisi Akhir dan *Game Changer* di Kabupaten Kutai Kartanegara

Kondisi Akhir KUKAR MAJU TANGGUH BERBUDAYA 2045	Faktor Peubah (<i>Game Changer</i>)	Penjelasan
Kutai Kartanegara yang Maju dan Tangguh	Struktur ekonomi yang didominasi non-ekstratif, dan tingkat kesejahteraan masyarakat Kukar setara dengan wilayah di Negara Maju	Faktor peubah ini harus dilaksanakan dan menjadi super prioritas, agar kondisi akhir dapat terwujud, sebagaimana Visi besar untuk mewujudkan Kukar Maju dan Tangguh
Pembangunan Wilayah Kukar dengan Karakteristik Kebudayaan Lokal	Karakter Sosial-Budaya Kukar yang Berpengaruh terhadap Arah Skema Pembangunan	Segala bentuk dan proses pembangunan harus didasari oleh nilai-nilai dan norma kebudayaan Kesultanan Kutai Kartanegara, baik dalam pemerintahan, serta didalam kehidupan sosial masyarakat.
Perwujudan Kukar sebagai Pusat Pangan, Pariwisata, dan Industri Hijau yang diimplementasikan secara Tematik di Berbagai Penjuru Kabupaten Kukar	- Transformasi Struktur Ekonomi Kukar Berbasis Non-Pertambangan. - Kondisi wilayah administratif kabupaten Kutai Kartanegara menjadi salah satu mitra IKN - Pembangunan infrastruktur pendukung	Urgensi perwujudan transformasi struktur ekonomi kukar non-ekstraktif ditujukan sebagai pengentasan permasalahan ketergantungan pada sektor ekstraktif sehingga dapat terwujud sektor unggulan lain sebagai kondisi bagian dari pokok visi meliputi pusat pangan, pariwisata, dan industri hijau secara merata, berkeadilan, dan inklusif. Selain itu, wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai salah satu mitra IKN, dibersamai dengan pembangunan infrastruktur pendukung di Kutai

Kondisi Akhir KUKAR MAJU TANGGUH BERBUDAYA 2045	Faktor Peubah (<i>Game Changer</i>)	Penjelasan
		Kartanegara dapat menjadi katalisator perwujudan kondisi tersebut.
Kesejahteraan Masyarakat Kukar yang Ditopang oleh Ekonomi Hijau dan Biru	Angka Kemiskinan dan Ketimpangan yang Rendah untuk Pemerataan Pembangunan	Dengan melakukan <i>maintain</i> dan upaya pengentasan komponen kemiskinan secara merata maka akan terwujud kondisi kesejahteraan masyarakat yang didasarkan pada perwujudan sektor ekonomi berkelanjutan
Sumber Daya Manusia Kukar yang Terampil dan Berpendapatan Tinggi	Transformasi SDM Kukar yang Berdaya Saing Tinggi	Melalui upaya transformasi SDM masyarakat yang digencarkan maka akan dapat tercipta kondisi SDM masyarakat yang terampil, berdaya saing tinggi, kompeten, dan mampu meraih <i>income</i> tinggi
Kondisi Lingkungan yang Nyaman dan Tangguh untuk Mendukung Penghidupan Masyarakat yang Berkelanjutan	Ketahanan Sosial Masyarakat dan Ekologi yang Berkelanjutan	Melalui perwujudan ketahanan sosial masyarakat serta ekologi yang berkelanjutan maka perwujudan kondisi lingkungan yang kondusif, aman, nyaman, tangguh dapat tercipta sehingga penghidupan masyarakat pun dapat terjamin ketercapaiannya

Berdasarkan identifikasi hubungan *Game Changer* dengan Kondisi yang hendak dicapai maka kemudian tibalah pada inti dari arah transformatif yakni perancangan serta penentuan upaya-upaya transformatif yang perlu untuk dapat dilakukan sebagai bentuk perwujudan usaha dalam

mencapai kondisi akhir yang diinginkan tersebut pada akhir masa rencana pembangunan yakni pada tahun 2045. Oleh sebab itu, dalam kontekstual ini terdapat dua bagian utama upaya transformatif meliputi Penentuan Zona dan Tema Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara serta Perwujudan Kerangka Upaya Transformasi yang didasarkan pada komponen Upaya Transformasi, Landasan Transformasi, dan Implementasi Transformasi. Mengacu pada hasil identifikasi dan analisis yang telah dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai kondisi dan upaya pembangunan, maka dalam hal ini dilakukan penentuan zona serta tema pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara. Upaya transformatif ini dilakukan dalam rangka menyesuaikan kondisi dan karakteristik masing-masing wilayah dalam skala kecamatan supaya dapat menjadi lebih optimal dan maksimal dalam perwujudan visi sesuai dengan peruntukkan lahan dan dominasi kegiatan yang terjadi di dalamnya.

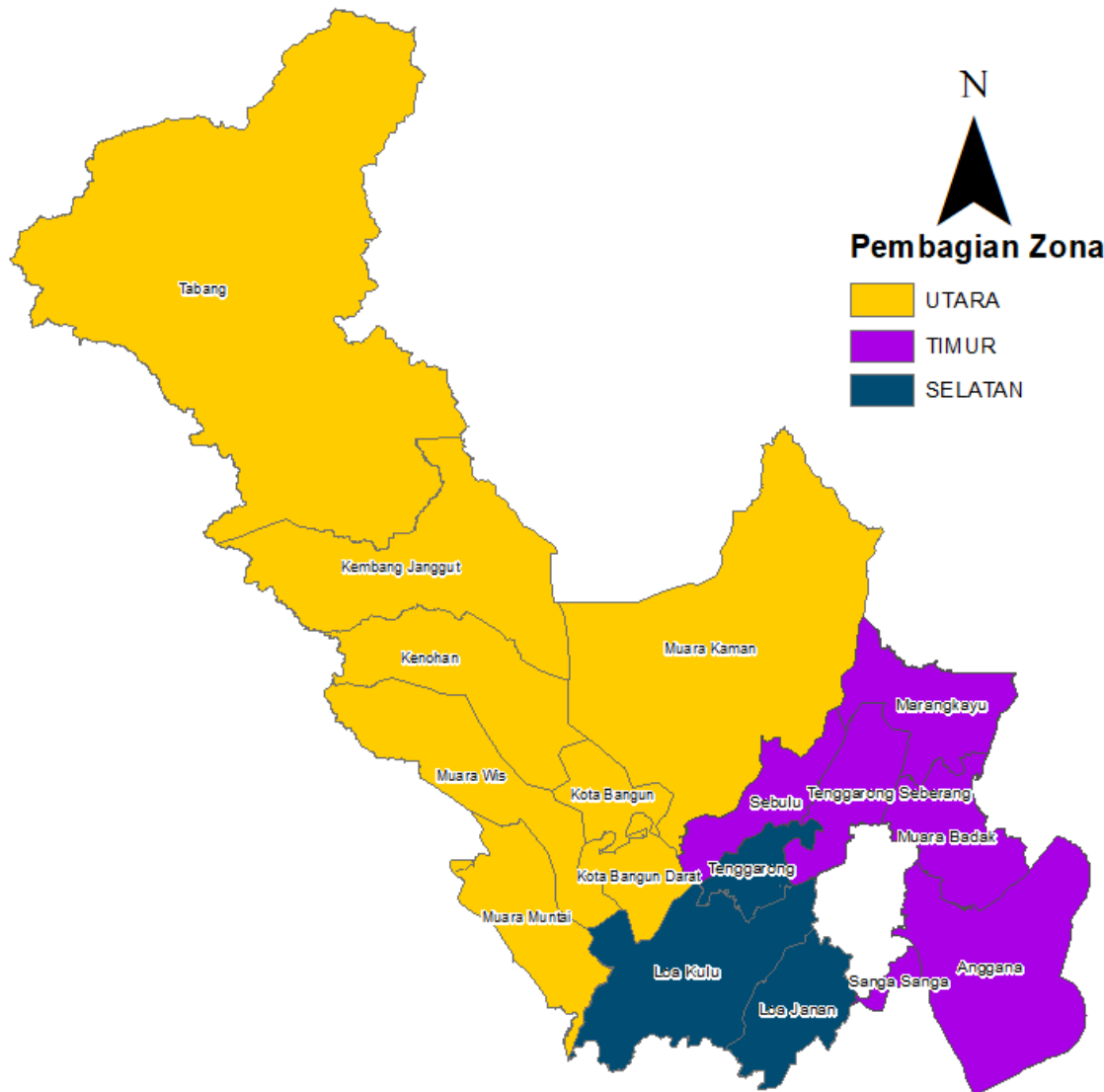
Salah satu upaya transformatif sesuai RPJPN 2025-2045 yaitu dengan dengan menciptakan koridor ekonomi berdasarkan potensi setiap wilayah dan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, yang disebut sebagai *superhub* ekonomi nusantara. Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ini bertujuan untuk mendukung perkembangan Indonesia sebagai negara Nusantara, dengan memperhitungkan dinamika global, nasional, dan lokal. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan diharapkan dapat merangsang peningkatan investasi dan nilai tambah, serta menciptakan peluang kerja melalui konsep ekonomi hijau dan biru. Fokus utama dalam pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah adalah pada sentra dan kawasan yang memiliki potensi unggulan yang akan diperkuat dengan dukungan kawasan perkotaan.

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) serta beberapa pusat pertumbuhan lokal dalam struktur perkotaannya, yang terdiri dari Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Peran dari pusat-pusat pertumbuhan ini sangat penting dalam mendukung pengembangan potensi wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada dapat ditingkatkan dengan melakukan regionalisasi wilayah secara teliti berdasarkan potensi yang unggul di berbagai bagian wilayah tersebut. Kabupaten Kutai Kartanegara dikelompokkan ke dalam tiga fokus utama, yang meliputi sektor-sektor kunci, yaitu pengembangan pariwisata dan pusat

pangan di zona utara, pengembangan permukiman perkotaan dan wilayah pendukung IKN (Ibu Kota Nusantara) zona selatan, serta pengembangan industri hijau dan *superhub* ekonomi (zona timur).

Gambar 5.11

Peta Zonasi Kabupaten Kutai Kartanegara, 2023



Peruntukkan zona utara difokuskan sebagai wilayah pengembangan pariwisata serta pusat pangan. Hal tersebut dapat terjadi karena pada zona tersebut terdapat kawasan konservasi hutan serta dominasi peruntukan lahan yang menjurus pada sektor pertanian, pangan, dan potensi pariwisata berbasis keunggulan lokal. Zona ini merupakan zona yang paling luas dikarenakan sektor-sektor pertanian memerlukan luasan lahan yang luas untuk dapat berproduksi dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengembangan pariwisata dan pusat pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan mandat RPJPD Provinsi Kalimantan Timur 2025-2045 yaitu terkait dengan transformasi ekonomi pada aspek pengembangan kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, dan berkelanjutan; serta pengembangan destinasi wisata potensial berbasis kerakyatan dan ekowisata unggulan yang berkelas dunia. Terdapat beberapa kecamatan yang masuk ke dalam zona tersebut sesuai dengan pusat pertumbuhannya. PKL berada di Kecamatan Kota Bangun dan Kembang Janggut. Kemudian terdapat juga PPK yang berada di Kecamatan Kenohan, Kota Bangun Darat, Muara Kaman, Muara Muntai, Tabang, dan Muara Wis. Kegiatan yang mampu menunjang pengembangan kawasan pariwisata dan pusat pangan bisa meliputi pertanian, perkebunan, hasil hutan bukan kayu, perikanan, serta kegiatan wisata yang dikembangkan.

Zona selatan menitikberatkan pada fokus pengembangan permukiman perkotaan dan wilayah pendukung IKN. Peruntukkan tersebut didasarkan pada lokasinya yang berada di antara Kota Samarinda dan Balikpapan serta mempertimbangkan distribusi dan kepadatan penduduk yang tinggal pada wilayah tersebut. Zona ini nantinya akan ditujukan dalam pengembangan perkotaan yang masif, maju, modern, dan mampu mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan perkotaan di masa mendatang secara lebih baik.

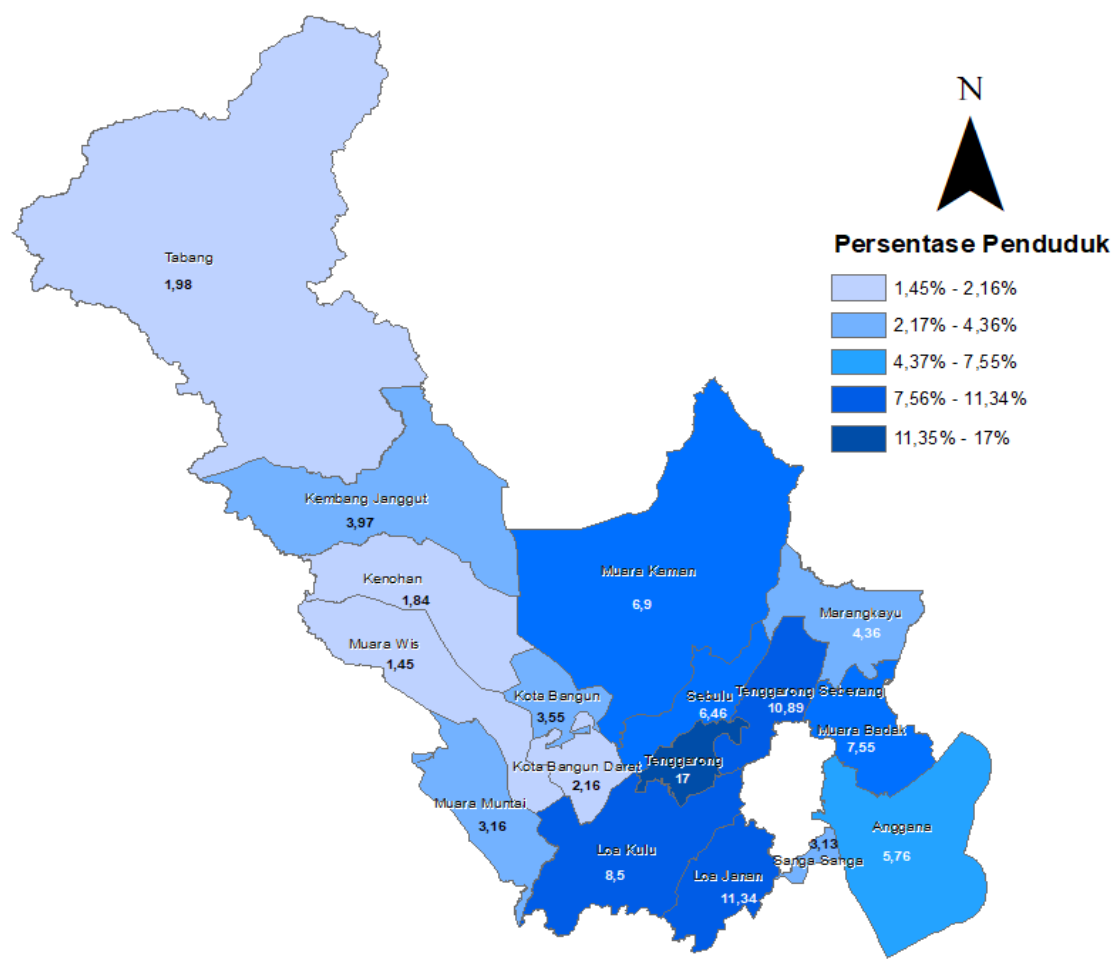
Pengembangan kawasan tersebut sesuai dengan mandat RPJPD Provinsi Kalimantan Timur 2025-2045 yang terkait dengan transformasi ekonomi, yaitu pembangunan dan pengembangan *superhub* ekonomi IKN dan daerah mitra IKN yang menggerakkan aktivitas ekonomi maju dan berdaya saing. Pusat pertumbuhan berupa PKN berada di satu kecamatan, yaitu Kecamatan Tenggarong yang juga merupakan ibu kota dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian, untuk PKL hanya terdapat di Kecamatan Loa Kulu. Selanjutnya, untuk PPK berada di Kecamatan Loa Janan. Terdapat tiga kecamatan yang telah masuk ke dalam wilayah IKN, yaitu Kecamatan Samboja, Samboja Barat dan Muara Jawa.

Terakhir yakni berkaitan dengan zona timur yang difokuskan pada pengembangan industri hijau serta *superhub* ekonomi. Pertimbangan utama penentuan peruntukkan zona ini karena adanya pusat pelayanan transportasi yakni pelabuhan di Samarinda. Keberadaan pelabuhan ini tentu strategis dalam mendukung *superhub* ekonomi, sebagai gerbang konektivitas

antarwilayah yang memberikan keuntungan dan kemudahan dalam kegiatan distribusi sektor perdagangan.

Pengembangan kawasan tersebut sesuai dengan mandat RPJPD Provinsi Kalimantan Timur 2025-2045, yaitu pengembangan kawasan-kawasan industri berteknologi tinggi dan berkelanjutan berbasis komoditi unggulan. Beberapa kecamatan masuk ke dalam kawasan tersebut sesuai dengan perannya. Terdapat PKL di Kecamatan Muara Badak. Kemudian, terdapat juga PPK di Kecamatan Anggana, Tenggarong Seberang, Sebulu, Sanga-sanga dan Marangkayu. Pengembangan berbagai kawasan tersebut juga didukung akibat keberadaan pelabuhan di Samarinda yang turut mendukung transformasi ekonomi. Aktivitas di berbagai kecamatan tersebut yang mampu mendukung industri hijau dan *superhub* ekonomi adalah industri maritim, wisata, perikanan, serta pertanian.

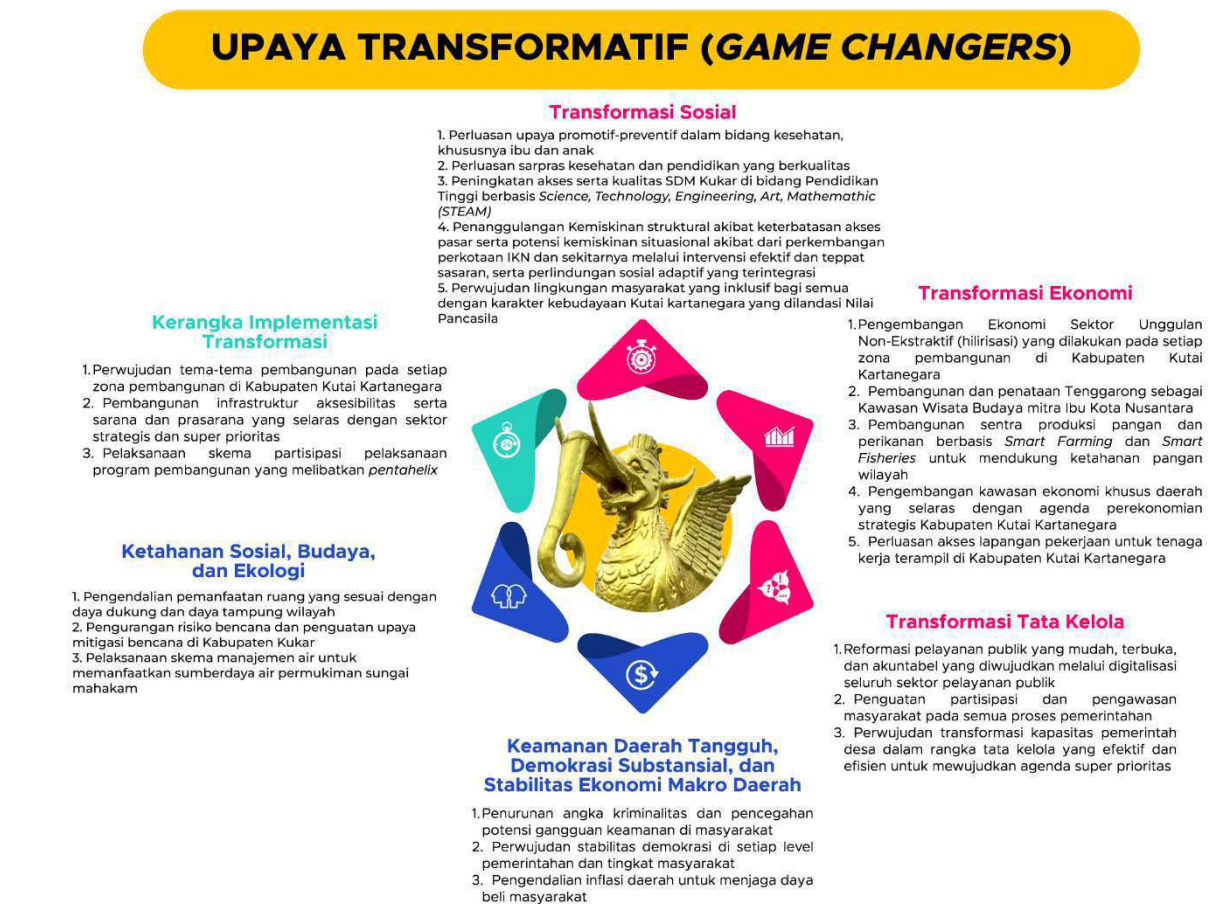
Gambar 5.12
Peta Distribusi Penduduk per Kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara,
2025-2045



Kerangka Upaya Transformasi merupakan bentuk-bentuk implementasi rencana pembangunan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan hasil akhir yang hendak dicapai dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip upaya transformasi, landasan transformasi, serta implementasi transformasi yang mempertimbangkan aspek keselarasan dengan aspek perencanaan pembangunan di skala nasional, Provinsi Kalimantan Timur, dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Berikut merupakan Kerangka Upaya Transformasi Prioritas Kabupaten Kutai Kartanegara:

Gambar 5.13

Upaya Transformatif RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara



Kerangka Upaya Transformasi pada aspek Transformasi Sosial ditujukan dengan fokus pada tiga bidang utama yakni kesehatan, pendidikan berbasis STEAM, dan perlindungan sosial. Komponen-komponen tersebut penting di dalam perwujudan kondisi transformasi sosial yang adaptif serta memiliki kualitas yang baik. Transformasi sosial berpengaruh atau terkait secara langsung dengan aspek sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya pada Transformasi Ekonomi difokuskan pada Pengembangan sektor unggulan non ekstraktif, penanggulangan kemiskinan struktural serta potensi kemiskinan situasional, serta digitalisasi sektor perekonomian dan integrasi teknologi informasi. Inti dari transformasi ini untuk dapat mewujudkan kondisi pertumbuhan ekonomi yang baik, signifikan, namun juga berkelanjutan dan ramah lingkungan. Selain itu, pengembangan ekonomi sektor unggulan non ekstraktif juga ditujukan untuk mengentaskan permasalahan ketergantungan perekonomian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara pada sektor ekstraktif. Pada transformasi tata kelola difokuskan pada upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, adaptif, efisien, transparan, mudah terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, dan penguatan partisipasi publik dalam dinamika pembangunan. Tujuan transformasi ini supaya nantinya aspek pemerintahan dapat berfungsi secara maksimal sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam upaya mewujudkan kondisi yang ideal bagi wilayah dapat tercapai.

Kerangka Upaya Transformasi pada Landasan Transformasi menitikberatkan pada upaya perwujudan wilayah yang stabil dari segi keamanan, demokrasi, dan ekonomi maupun dari segi sosial, budaya, dan ekologi atau lingkungan. Upaya-upaya pada Landasan Transformasi diperuntukkan dalam perwujudan wilayah yang tangguh, aman, tenteram, serta berkelanjutan, dan inklusif bagi semua. Terakhir yakni berkaitan dengan Kerangka Implementasi Transformasi, hal ini diperuntukkan sebagai langkah yang dapat ditempuh dalam pencapaian landasan transformasi sebelum upaya transformasi dapat dilakukan. Oleh sebab itu, fokus utama pada kerangka implementasi transformasi tahap ini meliputi penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana dasar, perwujudan tema pembangunan pada zona yang telah ditetapkan, perwujudan sinergitas dan sinkronisasi perencanaan pembangunan baik dari skala nasional, provinsi,

kabupaten/kota hingga unit terkecil, serta manajemen pembangunan dan keberlanjutan proyek.

5.2 Sasaran Pokok

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), sasaran pokok merupakan kinerja daerah untuk mencapai visi daerah yang dilakukan melalui langkah-langkah transformasi di daerah dalam kerangka mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045 sesuai yang tertuang dalam RPJPN 2025-2045. Sasaran pokok pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara dirumuskan dari arah pembangunan, arah kebijakan transformasi daerah serta indikator utama pembangunan yang ditujukan untuk mencapai visi “Kukar Emas Berbudaya 2045:Pusat Pangan, Pariwisata, Industri Hijau yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan” dengan tetap berpedoman pada keselarasan terhadap RPJPN 2025-2045. Berdasarkan rumusan tersebut terdapat 6 (enam) Sasaran Pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2045, yaitu:

Sasaran Pokok 1.

Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Yang Unggul dan Berdaya Saing

Pencapaian sasaran ini dilakukan dengan memastikan tersedianya pelayanan dasar secara merata dan inklusif bagi seluruh masyarakat Kutai Kartanegara. Pelayanan dasar yang menunjang pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, serta memperkuat perlindungan sosial untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan literasi serta daya saing masyarakat. Memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang merata, pendidikan yang berkualitas, serta tersedianya perlindungan sosial yang adaptif demi terwujudnya kualitas hidup masyarakat Kutai Kartanegara yang unggul dan berdaya saing.

Sasaran Pokok 2.

Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Berbasis Sektor Non Ekstraktif Yang Berkelanjutan

Sasaran pokok ini merupakan kinerja transformasi ekonomi yang berorientasi pada perubahan struktur ekonomi dari sektor ekstraktif menuju non ekstraktif. Pembangunan *Superhub* Ekonomi Ibu Kota Nusantara (IKN)

yang inovatif dan terintegrasi, memanfaatkan potensi lokal, dan menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan merupakan prioritas dari pengembangan sektor non ekstraktif sebagai basis pertumbuhan ekonomi. Didukung hilirasi produk pertanian dan kelautan yang berorientasi ekspor diharapkan mampu meningkatkan produktivitas ekonomi dengan tetap memperhatikan penerapan ekonomi hijau demi keberlangsungan pembangunan. Pemanfaatan potensi pariwisata sumber daya alam dan budaya dengan memanfaatkan efek pengganda keberadaan IKN didukung transformasi digital diharapkan turut serta mendorong pergeseran struktur ekonomi menuju sektor sekunder dan tersier demi penciptaan nilai tambah yang lebih menyejahterakan bagi masyarakat Kutai Kartanegara.

Sasaran Pokok 3.

Meningkatnya Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Adaptif dan Efisien

Optimalisasi reformasi birokrasi menuju Zona Integritas, mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan yang berintegritas. Perwujudan digitalisasi pelayanan publik menuju *smart government* dan *smart governance* didukung peningkatan kualitas sistem pemerintahan berbasis elektronik juga perlu didorong untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang adaptif dan efisien. Tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, kolaboratif dan efisien akan mendorong penyelenggara pemerintah untuk bekerja lebih prima dan memberikan pelayanan publik yang prima.

Sasaran Pokok 4.

Demokrasi Substansial Yang Partisipatif Serta Stabilitas Ekonomi Daerah Yang Tangguh

Pencapaian transformasi di Kutai Kartanegara secara menyeluruh perlu didukung dengan kondisi wilayah yang kondusif dan kondisi ekonomi makro yang stabil. Terwujudnya hukum berkeadilan dan kondisi keamanan yang tangguh akan mendorong meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam demokrasi yang substansial. Didukung ketangguhan stabilitas ekonomi makro daerah, kondisi ini akan menjadi jaminan positif bagi iklim investasi

yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan ketahanan dan kondusivitas daerah.

Sasaran Pokok 5.

Terwujudnya Masyarakat Berkarakter dan Berkebudayaan Maju

Proses pembangunan jangka panjang harus diimbangi dengan terwujudnya ketahanan sosial budaya yang berpijak pada kearifan lokal, norma agama, serta nilai luhur budaya. Hal ini diperlukan guna mencegah berbagai dampak negatif dari modernisasi dan globalisasi yang mengancam pola pikir, perilaku dan karakter masyarakat. Pencapaian sasaran pokok ini difokuskan pada arah pembangunan beragama maslahat dan berkebudayaan maju serta arah pembangunan keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif.

Sasaran Pokok 6.

Terwujudnya Lingkungan Hidup Berkualitas dan Tangguh terhadap Bencana

Keberlangsungan sumber daya menjadi salah satu kunci keberlangsungan pembangunan. Oleh karena itu pelestarian lingkungan baik tanah, air maupun udara didukung dengan teknologi pengelolaan persampahan modern menjadi bagian dari pembangunan lingkungan hidup yang berkualitas. Kondisi sumber daya alam yang lestari akan mendukung adanya ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan yang merupakan bagian dari arah pembangunan untuk mewujudkan lingkungan hidup berkualitas. Peningkatan resiliensi terhadap bencana sehingga wilayah dan masyarakat menjadi elemen yang tangguh terhadap bencana juga harus menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya pembangunan lingkungan hidup berkualitas di Kabupaten Kutai Kartanegara.

5.2.1 Arah Pembangunan Daerah

Perencanaan Pembangunan di Indonesia dilakukan dalam beberapa tingkatan vertikal atau skala meliputi skala nasional serta skala daerah yang tersusun atas wilayah provinsi dan juga wilayah kabupaten/kota. Menindaklanjuti hal tersebut, dalam rangka perwujudan efektivitas pembangunan daerah serta mendukung pencapaian target pembangunan nasional, maka diperlukan adanya penyelarasan antara rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah. Berdasarkan

hal tersebut, dokumen RPJPD Provinsi memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan dokumen RPJP Nasional. Begitupun dengan dokumen RPJPD Kabupaten/Kota yang memiliki keterkaitan substansi dengan RPJPD Provinsi dan RPJP Nasional.

Salah satu aspek yang menjadi komponen penyelarasan dalam dokumen perencanaan pembangunan ialah Arah Pembangunan Daerah. Arah pembangunan daerah dapat diartikan sebagai strategi daerah yang diperuntukkan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan daerah serta kontribusinya terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional. Secara sistematis, arah pembangunan daerah merupakan bagian dari sasaran pokok yang turut serta diselaraskan. Arah pembangunan daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara disesuaikan dengan karakteristik dan potensi yang dimilikinya. Menindaklanjuti hal tersebut, maka arah pembangunan daerah yang termuat di dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2
Misi dan Arah Pembangunan RPJPD
Kabupaten Kutai Kartanegara, 2025-2045

No	Misi	No/Kode	Arah Pembangunan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mewujudkan transformasi sosial dengan membangun kualitas hidup manusia yang unggul dan berdaya saing	KMTB1	Kesehatan untuk Semua
		KMTB2	Pendidikan Berkualitas yang Merata
		KMTB3	Perlindungan Sosial yang Adaptif
2	Mewujudkan transformasi ekonomi dengan membangun sektor non-ekstraktif untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	KMTB4	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
		KMTB5	Penerapan Ekonomi Hijau
		KMTB6	Transformasi Digital
		KMTB7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
		KMTB8	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

No	Misi	No/Kode	Arah Pembangunan
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Mewujudkan transformasi tata kelola dengan membangun penyelenggaraan pemerintahan yang cerdas, adaptif, dan efisien	KMTB9	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif
4	Mewujudkan demokrasi substansial yang partisipatif dan stabilitas ekonomi daerah yang tangguh	KMTB10	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial
		KMTB11	Stabilitas Ekonomi Makro
		KMTB12	Ketahanan dan Kondusifitas Daerah
5	Mewujudkan ketahanan sosial-budaya dan ketahanan ekologi berbasis kearifan lokal	KMTB13	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
		KMTB14	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif
		KMTB15	Lingkungan Hidup Berkualitas
		KMTB16	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan
		KMTB17	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
Kerangka Implementasi Transformasi			
6	Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dengan membangun konektivitas dan integrasi regional untuk pertumbuhan yang inklusif		
7	Mewujudkan sarana dan prasarana yang merata dan berkualitas berbasis inovasi hijau		
8	Mewujudkan sinergisitas dan kesinambungan pembangunan		

Mengacu pada tabel tersebut, maka dapat diketahui bahwasanya arah pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara telah selaras dengan amanat perencanaan pembangunan nasional. Kabupaten Kutai Kartanegara telah

mengakomodasi 17 arah pembangunan sebagai bagian dari 8 misi yang merupakan bentuk perwujudan manifestasi dari 3 substansi Transformasi Indonesia, 2 substansi Landasan Transformasi, dan 3 substansi Kerangka Implementasi Transformasi. Secara umum, seluruh substansi arah pembangunan telah terakomodasi di dalam tabel tersebut meliputi Misi Mewujudkan Transformasi Sosial dengan Membangun Kualitas Hidup Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing mencakup Arah Pembangunan Kesehatan untuk Semua (KMTB1), Pendidikan Berkualitas yang Merata (KMTB2), dan Perlindungan Sosial yang Adaptif (KMTB 3); Misi Mewujudkan Transformasi Ekonomi dengan Membangun Sektor Non-ekstraktif untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan mencakup Arah Pembangunan Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi (KMTB4), Penerapan Ekonomi Hijau (KMTB5), Transformasi Digital (KMTB6), Integrasi Ekonomi Domestik dan Global (KMTB7), dan Perkotaan dan Pedesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi (KMTB8); Misi Mewujudkan Transformasi Tata Kelola dengan Membangun Penyelenggaraan Pemerintahan yang Cerdas, Adaptif, dan Efisien mencakup Arah Pembangunan Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif (KMTB9); Misi Mewujudkan Demokrasi Substansial yang Partisipatif dan Stabilitas Ekonomi Daerah yang Tangguh mencakup Arah Pembangunan Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial (KMTB10), Stabilitas Ekonomi Makro (KMTB11), Ketahanan dan Kondusifitas Daerah (KEB12); serta Misi Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya, Ketahanan Ekologi Berbasis Kearifan Lokal yang mencakup Arah Pembangunan Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju, Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif (KMTB14), Lingkungan Hidup Berkualitas (KMTB15), Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan (KMTB16), serta Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim (KMTB17). Selanjutnya, perwujudan Kerangka Implementasi Transformasi yang ditujukan untuk mendukung ketercapaian Landasan Transformasi dan Transformasi Kutai Kartanegara dapat diraih dengan Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dengan Membangun Konektivitas dan Integrasi Regional untuk Pertumbuhan yang Inklusi, Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Merata dan Berkualitas Berbasis Inovasi Hijau, serta Mewujudkan Sinergitas dan Kesiambungan Pembangunan.

5.2.2 Indikator Utama Pembangunan Daerah

Pengukuran dan evaluasi yang dilakukan terhadap kemajuan pencapaian sasaran pokok juga menjadi penting untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas kebijakan pembangunan. Dalam rangka mengetahui tingkat ketercapaian dari sasaran pokok, digunakan beberapa indikator utama pembangunan. Penggunaan indikator utama pembangunan sebagai alat untuk mengukur pencapaian sasaran pokok ini memberikan landasan yang objektif dan terukur untuk mengevaluasi kemajuan pembangunan. Perkembangan indikator tersebut dapat membantu mengidentifikasi area-area di mana perbaikan atau penyesuaian diperlukan untuk mencapai sasaran pokok yang telah ditetapkan sehingga mampu memberikan efektivitas kebijakan dan program aksi pembangunan yang telah diimplementasikan. Penggunaan indikator utama pembangunan menjadi kunci dalam memastikan bahwa pembangunan berlangsung menuju arah yang diinginkan dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

RPJPN 2025-2045 mencakup 45 indikator utama pembangunan yang dikelompokkan ke dalam delapan agenda pembangunan. Namun demikian, karena perbedaan karakteristik di daerah, tidak semua indikator utama pembangunan di tingkat nasional dapat diadaptasi secara langsung ke tingkat kabupaten atau kota. Indikator utama pembangunan daerah berperan penting dalam mengukur kemajuan pembangunan daerah serta memastikan kesesuaian dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Indikator utama pembangunan daerah juga menjadi alat ukur untuk mengevaluasi kontribusi pembangunan daerah terhadap tujuan pembangunan jangka panjang nasional. Lebih lanjut, sasaran pokok dan indikator utama pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.3
Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, dan
Indikator Utama Pembangunan (IUP) beserta Tahapan Pencapaiannya, 2025-2045

SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (IUP)	Target				
			Baseline 2025	Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
1. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat yang unggul dan berdaya saing	1. Kesehatan untuk Semua	1. Usia Harapan Hidup (Tahun)	74,24	75,66	77,08	78,50	79,93
		Kesehatan ibu dan anak:					
		2. Jumlah Kematian Ibu (Jiwa)	10	8	5	3	0
		3. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	16,00	13,13	10,25	7,38	4,50
		Penanganan Tuberculosis					
		4. Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (%)	47,06	57,04	67,02	77,02	87,00
		5. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis	91,64	93,23	94,82	96,41	98

SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (IUP)	Target				
			Baseline 2025	Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
		<i>(treatment success rate)</i> (%)					
		6. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	99,50	99,50	99,50	99,50	99,50
	2. Pendidikan Berkualitas yang Merata	Hasil Pembelajaran:					
		7. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:					
		i) Literasi Membaca (%)					
		SD	71,76	73,92	76,62	79,32	82,56
		SMP	74,26	76,10	78,40	80,70	83,46
		ii) Numerasi (%)					

SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (IUP)	Target				
			Baseline 2025	Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
		SD	61,11	65,63	71,28	74,37	80,19
		SMP	73,67	75,43	77,63	79,83	82,47
		8. Rata rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,40	10,21	11,02	11,83	12,64
		9. Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,67	14,36	14,96	15,46	15,90
		10. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	8,50	8,83	9,2	9,6	10,00
		11. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi (%)	55,41	61,71	68,02	74,34	80,62
	3. Perlindungan Sosial yang Adaptif	12. Tingkat Kemiskinan (%)	6,97 - 7,03	5,32 – 5,86	3,67 - 4,40	1,29 – 2,01	0,08 – 0,36

SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (IUP)	Target				
			Baseline 2025	Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
2. Terwujudnya Pembangunan Ekonomi berbasis sektor non ekstraktif yang berkelanjutan	4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	13. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	75,82	78,05	81,51	85,45	90,61
		14. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	4,29	8,78	14,62	20,46	26.31
		Pengembangan Pariwisata					
		15. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum (%)	0,31	1,03	2,52	3,85	5,73
		16. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (orang)	1618	2718	3931	5144	6471
		17. Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif (orang)	246	289	344	399	465
		Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD					

SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (IUP)	Target				
			Baseline 2025	Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
		18. Persentase Jumlah Usaha Mikro Naik Kelas (%)	0,17	0,57	1,17	1,67	2,10
		19. Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	1,51	2,70	3,89	5,08	6,30
		20. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,22	0,28	0,40	0,52	0,64
		21. Return on Asset (ROA) BUMD (%)	13,08	13,72	14,52	15,32	16,28
		22. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,85 – 3,91	3,44 – 3,75	3,20 -3,35	2,96 – 3,18	2,59-3,06
		23. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	50,95	60,71	70,46	80,22	89,97

SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (IUP)	Target				
			Baseline 2025	Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
		24. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	49,08	51,97	54,86	58,15	60,62
		Tingkat Penguasaan IPTEK dan Inovasi					
		25. Indeks Inovasi Daerah	60,00	64,58	69,59	74,64	85,00
		5. Penerapan Ekonomi Hijau					
	6. Transformasi Digital	26. Persentase Penduduk Berumur 5 tahun ke atas yang pernah menggunakan internet selama 3 bulan terakhir	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00
	7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	27. Disparitas Harga (%)	± 10%	± 10%	± 10%	± 10%	± 10%
		28. Kontribusi PDRB Pembentukan Modal Tetap Bruto (%)	38,83	39.31	39.79	40.27	40.92

SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (IUP)	Target				
			Baseline 2025	Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
	8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	29. Kontribusi PDRB Net Ekspor Barang dan Jasa (%)	44,87	45,47	46,07	47,02	47,99
		Kota dan Desa Maju, Inklusif dan Berkelanjutan					
		30. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	75,71	81,78	87,85	93,92	100,00
		31. Persentase Desa Mandiri (%)	40,41	49,08	57,75	66,64	75,13
3. Meningkatnya Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang	9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	32. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,00	3,38	3,75	4,13	4,50
		33. Indeks Pelayanan Publik	4,39	4,51	4,65	4,80	4,97

SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (IUP)	Target				
			Baseline 2025	Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
Berintegritas, Adaptif dan Efisien		34. Indeks Integritas Pemerintah	72,50	74,60	76,40	78,35	80,50
4. Meningkatnya Demokrasi Substansial yang partisipatif serta stabilitas ekonomi daerah yang tangguh	10. Stabilitas Ekonomi Makro	35. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,02	0,09	0,16	0.23	0,29
		36. Indeks Perkembangan Harga (%)	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3
		Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan					
		37. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)*	5,03	21,10	37,17	53,24	69,32
		38. Total Kredit/PDRB (%)	1,49	18.05	34.62	51.19	67,76
		39. Indeks Daya Saing Daerah	3,2	3,35	3,50	3,65	3,8
		40. Tingkat Kriminalitas (<i>Crime rate</i>)	66	63	60	57	53

SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (IUP)	Target				
			Baseline 2025	Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
		a. Jumlah kejadian tindak criminal (kasus)	600	550	500	450	400
5. Terwujudnya Masyarakat Berkarakter dan berkebudayaan Maju	11. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	41. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	55,11	60,46	67,15	73,84	81,87
		42. Jumlah kejadian konflik SARA	0	0	0	0	0
	12. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif	43. Indeks Pembangunan Keluarga/I-bangga	71,25	75,31	79,35	83,37	87,50
		44. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,45	0,43	0,40	0,38	0,37
6. Terwujudnya Lingkungan Hidup Berkualitas dan Tangguh	13. Lingkungan Hidup Berkualitas	Kualitas Lingkungan Hidup					
		45. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	78,83	79,51	80,37	81,23	82,25
		46. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak (%)	90	92,50	95,00	98,50	100

SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (IUP)	Target				
			Baseline 2025	Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
terhadap Bencana		Pengelolaan Sampah					
		47. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	30	33,23	36,45	39,68	42,9
		Ketahanan Energi, Air dan Pangan					
		48. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	9,32	7,17	4,92	2,57	0,30
		Ketahanan Air					
		49. Kapasitas Air Baku (m3/detik)	2,66	3,25	4,37	5,34	6,46
		Cakupan Layanan Perkotaan terhadap Air Minum Aman					
		-					

SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (IUP)	Target				
			Baseline 2025	Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
		50. Cakupan Layanan Air Minum Layak Perpipaan	80	85	90	96	100
		51. Indeks Risiko Bencana (IRB)	108,53	107,42	106,20	104,87	103,43
		52. Persentase Penurunan Emisi GRK (%)					
		a) Kumulatif	16,27	22,04	30,08	38,19	46,77
		b) Tahunan	18,18	48,29	63,80	77,98	88,60

5.2.3 Arah Kebijakan Transformasi

Arah Kebijakan Transformasi dapat diartikan sebagai sebuah arah kebijakan yang menggambarkan upaya transformasi turunan yang bersumber dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 dengan tujuan mendukung ketercapaian tujuan pembangunan nasional dan visualiasi upaya transformasi yang khusus terhadap keperluan ataupun karakteristik dari masing-masing daerah serta ditujukan dalam upaya perwujudan visi daerah. Di dalam sistematika penyusunannya, arah kebijakan transformasi diperoleh melalui acuan Arah Kebijakan yang termuat dalam skala provinsi serta dapat pula ditambahkan atau disesuaikan dengan keperluan dari masing-masing wilayah terkait.

Di dalam implementasinya, substansi arah kebijakan transformasi Kabupaten Kutai Kartanegara mengacu pada arah kebijakan Provinsi Kalimantan Timur yang secara khusus diperuntukkan bagi lokus tersebut sebagai bagian dari bentuk perincian sistematis dari arah kebijakan umum. Arah kebijakan ini mencakup aspek Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, Transformasi Tata Kelola, Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah, Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, serta Implementasi Transformasi. Arah kebijakan transformasi Kabupaten Kutai Kartanegara termuat dalam bentuk sajian tabel dan secara umum merupakan perwujudan dari isu strategis dan permasalahan yang menjadi perhatian ataupun *concern* utama untuk dapat dientaskan dan dituntaskan. Oleh sebab itu, Arah Kebijakan Transformasi diharapkan dapat menjadi acuan oleh *stakeholder* dalam penentuan kebijakan, program, dan proyek nantinya sebagai turunan dari kebijakan yang diperuntukkan untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, serta merata. Berikut merupakan Arah Kebijakan Transformasi Kabupaten Kutai Kartanegara pada RPJPD Tahun 2025-2045:

Tabel 5.4
Arah Kebijakan Transformasi

No	RPJPD 2025-2045				Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus Prioritas	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
1	Transformasi Sosial	Perluasan upaya promotif-preventif	Perluasan upaya promotif-preventif kesehatan dilaksanakan melalui pembudayaan perilaku hidup sehat dan pendidikan kesehatan sejak dini, termasuk eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS), kampanye edukasi kesehatan, vaksinasi, dan program kesehatan masyarakat.	Kecamatan Tabang, Kecamatan Kenohan, Kecamatan Muara Wis, Kecamatan Muara Muntai, Kecamatan Kota Bangun Darat, Kecamatan Marangkayu, Kecamatan Anggana, Kecamatan Loa Janan	v	v		
		Penuntasan stunting, eliminasi malaria, dan penurunan insidensi tuberkulosis	Penuntasan stunting dan penurunan insidensi tuberkulosis dilaksanakan melalui pendekatan integrasi multi-sektor, rekayasa lingkungan habitat	Seluruh Kecamatan	v	v	v	v

No	RPJPD 2025-2045				Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus Prioritas	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
			vektor dan pemanfaatan teknologi informasi bidang kesehatan. Kutai Kartanegara telah mendapat sertifikasi eliminasi malaria dari KLHK pada tahun 2021 silam, sehingga akan terus dipertahankan pada periode-periode berikutnya.					
		Pemenuhan dan pemerataan kuantitas maupun kualitas tenaga medis dan kesehatan	Pemenuhan dan pemerataan kuantitas serta kualitas tenaga medis dan kesehatan dilaksanakan melalui pemberian insentif, beasiswa pendidikan kedokteran, perawat, dan profesi kesehatan lainnya, serta afirmasi pendayagunaan tenaga medis dan kesehatan dari masyarakat lokal	Seluruh Kecamatan	v	v		

No	RPJPD 2025-2045				Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus Prioritas	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
			terutama di wilayah 3TP					
		Pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas	Pemeratataan akses pelayanan kesehatan berkualitas dilaksanakan melalui peningkatan sarana dan prasarana layanan kesehatan berbasis kewilayahan dan teknologi, penguatan ketahanan kesehatan, serta peningkatan cakupan kepesertaan.. Akses layanan kesehatan tersebut meliputi sumber daya kesehatan yang merata, tenaga medis, obat-obatan, dan peralatan	Seluruh Kecamatan		v	v	

No	RPJPD 2025-2045				Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus Prioritas	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		Percepatan wajib belajar 13 tahun	Percepatan wajib belajar 13 tahun dilaksanakan melalui pemenuhan akses 1 tahun prasekolah (PAUD) dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Fokus ini merupakan upaya pemenuhan layanan dasar yang menjadi fondasi peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Kutai Kartanegara	Seluruh Kecamatan	v	v	v	v
		Pemerataan akses dan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah	Pemerataan akses dan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah dilaksanakan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan berbasis kewilayahan dengan tingkat kebermanfaatan tinggi. Pemerataan	SD = Kecamatan Tabang SMP/MTs = Kecamatan Kenohan, Kecamatan Kembang Janggut, Kecamatan Muara Kaman, Kecamatan Tabang,	v	v		

No	RPJPD 2025-2045				Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus Prioritas	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
			akses dan kualitas pendidikan ini dilaksanakan hingga ke daerah terpencil di Kabupaten Kutai Kartanegara	Kecamatan Muara Wis				
		Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi	Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dilaksanakan melalui pemberian kemudahan akses bagi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan tinggi dan pemberian dukungan terhadap pengembangan perguruan tinggi serta pengadaan program studi yang sesuai dengan komoditas unggulan wilayah dan potensi pengembangan ekonomi daerah, khususnya program studi Science, Technology,	Kecamatan Tenggarong dan Kecamatan Tenggarong Seberang		v	v	v

No	RPJPD 2025-2045				Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus Prioritas	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
			Engineering, Art, Mathematic (STEAM)					
		Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan	Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan melalui peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang modern dan adaptif, pemenuhan ketersediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, serta peningkatan proporsi dosen kualifikasi Strata-3	Seluruh Kecamatan		v	v	

No	RPJPD 2025-2045				Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus Prioritas	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi dilaksanakan melalui revitalisasi dan pengembangan pendidikan vokasi dalam rangka menyediakan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman sesuai potensi terutama perkebunan, pertambangan, industri, dan pariwisata, dengan memperhatikan sistem produksi dan tata niaga serta keterkaitan dengan DUDI yang dikembangkan melalui skema education to employment	Seluruh Kecamatan	v	v		
		Penyediaan afirmasi akses pendidikan	Penyediaan afirmasi akses pendidikan dilaksanakan melalui sistem pembelajaran	Kecamatan Tabang, Kecamatan Anggana,	v	v	v	v

No	RPJPD 2025-2045				Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus Prioritas	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
			jarak jauh, pemanfaatan TIK, penyediaan asrama siswa dan guru, dan penguatan sekolah terbuka terutama pada wilayah 3TP	Kecamatan Kembang Janggut, Kecamatan Kenohan				
		Pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem	Pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem dilaksanakan secara kolaboratif melalui perlindungan sosial adaptif yang didukung data akurat penerima manfaat menjangkau seluruh penduduk rentan terutama kelompok marginal, pemenuhan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan maupun perlindungan pensiun	Seluruh Kecamatan	v	v	v	v

No	RPJPD 2025-2045				Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus Prioritas	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
			bagi lansia miskin dan tidak mampu, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas yang dilaksanakan secara terintegrasi antara program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program peningkatan infrastruktur, program ketenagakerjaan, serta program peningkatan akses pendidikan dan kesehatan					
		Membangun lingkungan yang inklusif bagi penduduk lansia dan penyandang disabilitas	Membangun lingkungan yang inklusif bagi penduduk lansia dan penyandang disabilitas dilaksanakan melalui pemberian perlindungan sosial, pemberdayaan	Seluruh Kecamatan			v	v

No	RPJPD 2025-2045				Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus Prioritas	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
			ekonomi, perluasan akses bekerja pada sektor formal untuk penyandang disabilitas serta pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur ramah lansia dan penyandang disabilitas					
		Pemenuhan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi bagi seluruh masyarakat	Pemenuhan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi bagi seluruh masyarakat dilaksanakan secara terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif dengan memanfaatkan data sosial-ekonomi masyarakat berbasis individu yang diperbaharui secara berkala, terutama untuk daerah 3TP	Seluruh Kecamatan	v	v	v	v

No	RPJPD 2025-2045				Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus Prioritas	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi	Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dilaksanakan melalui diantaranya sertifikasi tenaga konstruksi, pengembangan media/sarana untuk peningkatan kapasitas tenaga jasa konstruksi, serta pemanfaatan dan dukungan pengembangan teknologi jasa konstruksi yang ramah lingkungan untuk mendukung penegakan standar keandalan bangunan	Seluruh Kecamatan	v	v		

No	RPJPD 2025-2045				Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus Prioritas	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
2	Transformasi Ekonomi	Pembangunan dan pengembangan daerah mitra IKN untuk mendukung superhub ekonomi IKN	Pembangunan dan pengembangan daerah mitra IKN untuk mendukung superhub ekonomi IKN dilaksanakan melalui optimalisasi keunggulan komparatif wilayah, penguatan rantai pasok dan rantai nilai dengan memastikan kelancaran alur barang/jasa dari pusat produksi menuju kawasan industri dan outlet, mengoptimalkan nilai tambah melalui hilirisasi, penguatan struktur ekonomi yang berkelanjutan, efisiensi, inovasi, dan pemerataan pembangunan, yang menggerakkan aktivitas ekonomi	Seluruh Kecamatan	v			

No	RPJPD 2025-2045				Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus Prioritas	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
			maju dan berdaya saing					
		Pembangunan dan pengembangan kawasan-kawasan industri berteknologi tinggi dan berkelanjutan berbasis komoditi unggulan	Pembangunan dan pengembangan kawasan-kawasan industri berteknologi tinggi dan berkelanjutan berbasis komoditi unggulan dilaksanakan melalui pembangunan dan pengembangan superhub ekonomi IKN dan kawasan industri lainnya. Pengembangan kawasan di zona timur yang difokuskan pada industri hijau serta peran superhub ekonomi di Kutai Kartanegara. Zona ini	PKL = Kecamatan Muara Badak PPK = Kecamatan Anggana, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kecamatan Sebulu, Kecamatan Sanga-sanga, dan Kecamatan Marangkayu		v	v	

No	RPJPD 2025-2045				Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus Prioritas	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
			mencakup beberapa kecamatan yang masuk dalam kawasan PKL dan PPK. Karakteristik kawasan ini mendukung pengembangan industri maritim, wisata, perikanan, serta pertanian					
		Pengembangan industri hijau bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan	Pengembangan industri hijau bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan dilaksanakan melalui pengembangan industri biokimia pangan, bioprospeksi/bioekonomi, herbal, nutrisi, industri farmasi maju, industri kendaraan listrik dan bioteknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan kompleksitas industri	Kecamatan Sebulu, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kecamatan Marangkayu, Kecamatan Muara Badak, Kecamatan Sanga-sanga, dan Kecamatan Anggana		v	v	v

No	RPJPD 2025-2045				Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus Prioritas	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
			yang didukung dengan ketersediaan bahan baku yang memadai					
		Percepatan pengembangan industri strategis berbasis sektor ekonomi eksisting	Percepatan pengembangan industri berbasis sektor ekonomi eksisting dilaksanakan melalui penguatan nilai tambah industri strategis, pengembangan industri yang memiliki kontribusi besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, menguasai hajat hidup orang banyak, dan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam strategis	Kecamatan Sebulu, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kecamatan Marangkayu, Kecamatan Muara Badak, Kecamatan Sanga-sanga, dan Kecamatan Anggana		v	v	v
		Pengembangan industri energi terbarukan	Pengembangan industri energi terbarukan dilaksanakan melalui pembangunan dan pengembangan	Kecamatan Kembang Janggut, Kecamatan Kota Bangun, Kecamatan Loa			v	v

No	RPJPD 2025-2045				Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus Prioritas	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
			industri panel surya, bioenergi, hidroelektrik dan industri energi terbarukan lainnya, dalam upaya mendukung percepatan transisi energi	Janan, Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Marangkayu, Kecamatan Muara Badak, Kecamatan Muara Jawa, Kecamatan Muara Kaman, Kecamatan Sanga-Sanga, Kecamatan Sebulu, Kecamatan Tenggarong, Kecamatan Tenggarong Seberang				
		Pengembangan kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, dan berkelanjutan	Pengembangan kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, dan berkelanjutan melalui pengembangan	Kecamatan Kenohan, Kecamatan Kembang Janggut, Kecamatan Muara Muntai,	v	v	v	

No	RPJPD 2025-2045				Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus Prioritas	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
			kawasan sentra produksi pangan berbasis agro-ekosistem dengan pemanfaatan sumber daya lokal yang optimal melalui penerapan teknologi pertanian masa kini dengan penerapan prinsip berkelanjutan produksi untuk pemenuhan konsumsi pangan dan gizi, penguatan cadangan pangan nasional, dan peningkatan kesejahteraan petani	Kecamatan Kota Bangun, Kecamatan Kota Bangun Darat, Kecamatan Muara Wis, Kecamatan Tabang, Kecamatan Muara Kaman				

No	RPJPD 2025-2045				Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus Prioritas	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		Pengembangan destinasi wisata potensial	Pengembangan destinasi wisata dilaksanakan melalui penetapan destinasi super prioritas seperti Derawan dan sekitarnya, pengembangan eco-tourism kelas dunia berbasis aset alam (termasuk menjadi global geopark) dengan pelibatan mitra lokal untuk meningkatkan nilai tambah pariwisata dan penyerapan tenaga kerja seperti ekowisata kelas dunia yang berbasis aset alam, wisata kebugaran dengan identitas khas wilayah, serta destinasi MICE dan perkotaan yang dilakukan dengan pembangunan	Kecamatan Tenggarong, Kecamatan Anggana, Kecamatan Loa Janan, Kecamatan Marangkayu, Kecamatan Muara Badak, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kecamatan Kota Bangun, Kecamatan Muara Wis, Kecamatan Kenohan, dan Kecamatan Muara Muntai	v	v	v	v

No	RPJPD 2025-2045				Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus Prioritas	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
			investasi infrastruktur pariwisata, pemasaran pariwisata terutama dengan penyelenggaraan event-event pariwisata berskala nasional dan internasional, pelatihan pengembangan keterampilan dan pemberian insentif pelaku pariwisata, serta kerja sama antara sektor publik, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat. Kabupaten Kutai Kartanegara berfokus pada pelestarian warisan budaya lokal melalui edukasi dan integrasi pengembangan pariwisata yang berkelanjutan untuk memperkuat destinasi					

No	RPJPD 2025-2045				Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus Prioritas	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
			dengan nilai sejarah tinggi dan alam yang khas					
		Peningkatan rantai nilai domestik untuk mendukung rantai nilai global	Peningkatan rantai nilai domestik untuk mendukung rantai nilai global dilaksanakan melalui optimalisasi empat kawasan peruntukan industri yang ada di RTRW Kutai Kartanegara dan peningkatan daya saing komoditi unggulan daerah dengan memanfaatkan skema-skema kerja sama regional dengan Asia Timur dan Pasifik	Seluruh Kecamatan			v	v

No	RPJPD 2025-2045				Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus Prioritas	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		Penyediaan tenaga kerja sesuai kualifikasi pasar kerja	Penyediaan tenaga kerja sesuai kualifikasi pasar kerja dilaksanakan melalui pelatihan reskilling, upskilling dan newskilling serta transisi school-to-work dalam upaya memperkuat keterkaitan antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi pengembangan unggulan daerah.	Seluruh Kecamatan	v	v		
		Industrialisasi koperasi	Industrialisasi koperasi dilaksanakan melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi	Seluruh Kecamatan			v	v

No	RPJPD 2025-2045				Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus Prioritas	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global dilaksanakan melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.	Seluruh Kecamatan		v	v	
		Peningkatan produktivitas BUMD	Peningkatan produktivitas BUMD dilaksanakan melalui penguatan kelembagaan, mengoptimalkan pengelolaan aset, pengembangan kerja sama strategis, diversifikasi jenis usaha, dan penguatan kapasitas pengelola	Seluruh Kecamatan	v	v	v	v

No	RPJPD 2025-2045				Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus Prioritas	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal	Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal dilaksanakan melalui penguatan ekosistem industri halal, penguatan rantai nilai industri halal, penguatan kewirausahaan dan UMKM industri halal, serta perluasan infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah	Seluruh Kecamatan			v	v
		Pembangunan ketenagalistrikan yang cerdas, andal, dan berwawasan lingkungan	Pembangunan ketenagalistrikan yang cerdas, andal dan berwawasan lingkungan dilaksanakan melalui : (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan	Seluruh Kecamatan	v	v		

No	RPJPD 2025-2045				Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus Prioritas	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
			sumberenergi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauranpembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iii) pengembangan dekarbonisasi pembangkitfosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iv) pengembangan sisteminterkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (v) pengembanganteknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan					

No	RPJPD 2025-2045				Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus Prioritas	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
			keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (vi) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil(isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vii) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (viii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumahtangga dan sektor transportasi; (ix) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDMketenagalistrikan bersertifikat; dan (x) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan					

No	RPJPD 2025-2045				Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus Prioritas	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
			serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.					
		Pembangunan ekosistem digital	Pembangunan ekosistem digital dilaksanakan melalui penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) (perluasan jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok), peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas (peningkatan digitalisasi di sektor strategis), peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital	Seluruh Kecamatan		v	v	v

No	RPJPD 2025-2045				Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus Prioritas	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
			(Peningkatan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill					
		Penguatan pembangunan kawasan perdesaan yang berkontribusi pada pembangunan terpadu berkelanjutan	Penguatan pembangunan kawasan perdesaan yang berkontribusi pada pembangunan terpadu berkelanjutan melalui peningkatan ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan serta penguatan kapasitas aparatur dan kelembagaan desa	Kecamatan Loa Janan, Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Muara Muntai, Kecamatan Muara Wis, Kecamatan Kota Bangun, Kecamatan Kota Bangun Darat, Kecamatan Tenggarong, Kecamatan Sebulu, Kecamatan Tenggarong Seberang,	v	v	v	

No	RPJPD 2025-2045				Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus Prioritas	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
				Kecamatan Anggana, Kecamatan Muara Badak, Kecamatan Marangkayu, Kecamatan Muara Kaman, Kecamatan Kenohan, Kecamatan Kembang Janggut, dan Kecamatan Tabang				
		Pengembangan ekonomi maritim	Pengembangan ekonomi maritim dilaksanakan melalui perlindungan dan pemanfaatan potensi sumber daya perairan laut, budidaya perikanan bernilai ekonomi tinggi, hilirisasi produk perikanan, pengembangan	Kecamatan Anggana, Kecamatan Muara Badak, Kota Bangun, Kecamatan Marangkayu, Kecamatan Muara Kaman, Kecamatan Muara Muntai,		v	v	v

No	RPJPD 2025-2045				Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus Prioritas	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
			industri berbasis pesisir, penguatan dan perluasan kawasan konservasi laut untuk research and development dan portofolio ekonomi karbon, coastal tourism, serta marine services, dengan mengedepankan penerapan blue economy	Kecamatan Muara Wis				
3	Transformasi Tata Kelola	Optimasi regulasi daerah	Optimasi regulasi daerah dilaksanakan melalui pembuatan peraturan daerah yang responsif dan adaptif, pra-regulasi, re-regulasi dan de-regulasi yang memadai, peningkatan partisipasi publik dalam pembentukan produk hukum daerah, pengembangan	Seluruh Kecamatan	v			

No	RPJPD 2025-2045				Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus Prioritas	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
			instrumen penegakan regulasi daerah					
		Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dan masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dan masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan dilaksanakan melalui akomodasi aspirasi sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan, perluasan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, peningkatan transparansi	Seluruh Kecamatan		v	v	v

No	RPJPD 2025-2045				Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus Prioritas	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
			pelaksanaan pembangunan serta untuk pemerataan pembangunan wilayah dapat dilakukan kajian dan analisis yang mendalam dan komprehensi untuk daerah otonom baru.					
		Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat	Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat dilaksanakan melalui optimalisasi pemanfaatan kanal pengaduan masyarakat yang ditetapkan secara resmi oleh Pemerintah, termasuk pemanfaatan teknologi dalam pemantauan penanganan laporan masyarakat	Seluruh Kecamatan		v	v	v

No	RPJPD 2025-2045				Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus Prioritas	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga	Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dilaksanakan melalui peningkatan kualitas manajemen data dan keamanan informasi, penguatan kapasitas digital SDM ASN, percepatan digitalisasi layanan publik, optimalisasi pelaksanaan SPBE dan pengelolaan aset daerah berbasis digital	Seluruh Kecamatan	v	v	v	v
		Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi	Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi dilaksanakan melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang-jasa, transparansi	Seluruh Kecamatan	v	v		

No	RPJPD 2025-2045				Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus Prioritas	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
			layanan perizinan berbasis digital, optimalisasi whistle blowing system, serta membangun sistem manajemen anti penyuapan					
		Optimalisasi penerapan Sistem Merit	Optimalisasi penerapan sistem merit dilaksanakan melalui peningkatan pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja yang memanfaatkan teknologi informasi	Seluruh Kecamatan	v	v	v	v
		Penguatan integritas partai politik	Penguatan integritas partai politik dilaksanakan melalui pendidikan politik, dan pengembangan etika serta budaya politik bagi anggota partai politik di daerah.	Seluruh Kecamatan	v	v	v	v

No	RPJPD 2025-2045				Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus Prioritas	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
4	Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal dan lintas batas	Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal dan lintas batas dilaksanakan melalui peningkatan implementasi Standar Pelayanan Minimal ketenteraman dan ketertiban umum, menerapkan sistem pusat layanan pengaduan dan pencatatan masyarakat, pemetaan wilayah rawan ketenteraman dan ketertiban umum, serta peningkatan kolaborasi pengawasan dengan pihak terkait	Seluruh Kecamatan	v	v		

No	RPJPD 2025-2045				Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus Prioritas	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		Peningkatan stabilitas demokrasi di setiap level pemerintahan dan masyarakat	Peningkatan stabilitas demokrasi bertujuan meminimalisir kejadian konflik suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) di tengah masyarakat. Selain itu, arah kebijakan transformasi ini juga berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik yang menjadi salah satu implementasi kebebasan berdemokrasi	Seluruh Kecamatan			v	v
		Peningkatan kapasitas fiskal daerah dan kualitas belanja daerah	Optimalisasi pendapatan dan belanja daerah dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas fiskal daerah dalam kerangka desentralisasi fiskal dilaksanakan melalui intensifikasi dan	Seluruh Kecamatan	v	v	v	v

No	RPJPD 2025-2045				Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus Prioritas	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
			inisiasi ekstensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan Prioritas Nasional					
		Penguatan pengendalian inflasi daerah	Penguatan pengendalian inflasi daerah dilaksanakan melalui ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan ketersediaan barang substitusi	Seluruh Kecamatan	v	v	v	v

No	RPJPD 2025-2045				Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus Prioritas	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antaretnis dan agama	Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama dilaksanakan sejak usia dini melalui penanaman nilai-nilai kebersamaan, saling menghormati, toleransi, dan kerukunan antar etnis dan agama pada pendidikan formal dan informal.	Seluruh Kecamatan			v	v
		Peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat	Peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dilaksanakan melalui pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat, penguatan kebijakan yang mengakui dan melindungi hak-hak adat termasuk hak	Seluruh Kecamatan	v	v		

No	RPJPD 2025-2045				Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus Prioritas	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
			ulayat masyarakat, penguatan lembaga adat dan peningkatan peran lembaga adat dalam proses pembangunan					
		Perlindungan masyarakat lokal dan promosi budaya	Perlindungan masyarakat lokal dan promosi budaya dilaksanakan melalui pengembangan area pusat budaya sebagai destinasi wisata bernilai ekonomi tinggi, penguatan kebijakan pengembangan dan perlindungan budaya, pelestarian bahasa daerah, penyelenggaraan festival budaya, dan perlindungan masyarakat adat	Seluruh Kecamatan	v	v		

No	RPJPD 2025-2045				Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus Prioritas	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		Pengembangan nilai-nilai luhur budaya dan kearifan lokal, serta pendidikan karakter	Pengembangan nilai-nilai luhur budaya dan kearifan lokal, serta pendidikan karakter dilaksanakan melalui pengembangan kurikulum kebudayaan, pengintegrasian nilai-nilai luhur budaya dan kearifan lokal dalam berbagai aktivitas sosial, pemberian penghargaan terhadap prestasi budaya, serta penguatan pendidikan moral dan akhlak khususnya generasi muda	Seluruh Kecamatan	v	v	v	v
		Penyediaan ruang publik yang inklusif sebagai wahana interaksi sosial antar warga dan ekspresi budaya	Penyediaan ruang publik yang inklusif sebagai wahana interaksi sosial antar warga dan ekspresi budaya dilaksanakan melalui penyediaan dan pengembangan	Seluruh Kecamatan	v	v		

No	RPJPD 2025-2045				Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus Prioritas	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
			sarana dan prasarana ruang publik yang representatif untuk interaksi sosial dan aktivitas kebudayaan					
		Pengembangan diversifikasi pangan	Pengembangan diversifikasi pangan dilaksanakan melalui peningkatan produksi pangan lokal, promosi dan edukasi tentang nilai gizi dan keamanan pangan lokal, peningkatan variasi pengolahan pangan lokal, dan kebijakan pemerintah mendorong peningkatan konsumsi pangan lokal	Seluruh Kecamatan		v	v	v
		Perlindungan dan rehabilitasi hutan dan lahan gambut	Perlindungan dan rehabilitasi hutan dan lahan gambut dilaksanakan melalui penghambatan laju deforestasi, peningkatan restorasi	Seluruh Kecamatan	v	v		

No	RPJPD 2025-2045				Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus Prioritas	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
			hutan dan lahan gambut, penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan, penguatan kebijakan pelestarian hutan, dan pengembangan alternatif ekonomi bagi masyarakat di sekitar hutan dan ekosistem gambut					
		Rehabilitas dan pemanfaatan lahan pascatambang	Rehabilitasi dan pemanfaatan lahan pasca tambang dilaksanakan melalui reklamasi pasca tambang, program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat untuk memastikan pemulihan sosial dan ekosistem serta pengembangan kegiatan ekonomi baru yang berkelanjutan	Seluruh Kecamatan			v	v

No	RPJPD 2025-2045				Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus Prioritas	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		Pelestarian bentang alam, perlindungan keanekaragaman hayati, dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal	Pelestarian bentang alam dilaksanakan melalui perlindungan bentang sungai, gunung, bukit dan hutan yang dapat membentuk identitas wilayah. Perlindungan keanekaragaman hayati dilaksanakan melalui konservasi sumber daya alam dan lingkungan. Penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal dilaksanakan melalui pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan yang didukung inisiatif lokal dengan memanfaatkan pengetahuan tradisional untuk melestarikan ekosistem	Seluruh Kecamatan	v	v	v	v

No	RPJPD 2025-2045				Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus Prioritas	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		Optimalisasi Potensi Energi Terbarukan	Upaya implementasi transisi energi berkelanjutan dilakukan melalui optimalisasi potensi energi terbarukan seperti PLTS apung, tenaga surya, dan tenaga angin di Kutai Kartanegara yang merupakan tertinggi di Kalimantan Timur.	Seluruh Kecamatan		v	v	v
		Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami sebagai tempat wilayah jelajah satwa (<i>home range</i>) dan konektivitas spesies yang dilindungi	Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami sebagai tempat wilayah jelajah satwa (<i>home range</i>) dan konektivitas spesies yang dilindungi dilaksanakan melalui identifikasi spesies yang dilindungi, karakteristik hubungan antar-spesies dan wilayah jelajahnya, serta	Seluruh Kecamatan	v	v		

No	RPJPD 2025-2045				Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus Prioritas	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
			perlindungan dan konservasi kawasan					
		Perencanaan tata ruang yang berwawasan lingkungan	Perencanaan tata ruang yang berwawasan lingkungan dilakukan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana	Seluruh Kecamatan	v	v	v	v
		Peningkatan mitigasi penanggulangan bencana	Peningkatan mitigasi penanggulangan bencana dilaksanakan melalui mitigasi struktural dan non struktural termasuk adaptasi perubahan	Seluruh Kecamatan	v	v	v	v

No	RPJPD 2025-2045				Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus Prioritas	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
			iklim dengan memanfaatkan sistem informasi dan teknologi, terutama di wilayah yang rawan bencana.					
		Pengembangan natural based solution untuk kebakaran hutan	Pengembangan natural based solution untuk kebakaran hutan dilaksanakan melalui restorasi tutupan hutan, peningkatan pemahaman tentang nilai hutan, peningkatan manajemen pengelolaan risiko kebakaran hutan	Seluruh Kecamatan	v	v		
		Peningkatan ketangguhan terhadap bencana	Peningkatan ketangguhan terhadap bencana dilaksanakan melalui peningkatan kesiapsiagaan, pembangunan infrastruktur tangguh bencana, penerapan	Seluruh Kecamatan			v	v

No	RPJPD 2025-2045				Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus Prioritas	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
			teknologi sistem peringatan dini yang andal, dan peningkatan respons adaptif terhadap bencana					
		Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal dilaksanakan melalui pembangunan nilai-nilai keluarga yang kuat dan penguatan penerapan tradisi lokal yang dapat memperkuat kualitas ketahanan fisik, sosial dan ekonomi keluarga	Seluruh Kecamatan	v	v	v	v

No	RPJPD 2025-2045				Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus Prioritas	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas dan lansia	Pemenuhan hak dan perlindungan bagi anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia dilaksanakan melalui peningkatan fasilitas publik, pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang	Seluruh Kecamatan	v	v	v	v
		Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lanjut usia dilaksanakan melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan	Seluruh Kecamatan	v	v	v	v

No	RPJPD 2025-2045				Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus Prioritas	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
			partisipasi di berbagai bidang pembangunan serta peningkatan perlindungan terhadap resiko kekerasan, penelantaran dan eksploitasi					
		Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan	Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan dilaksanakan melalui peningkatan aksesibilitas dan kesetaraan peluang untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek pembangunan	Seluruh Kecamatan	v	v	v	v
		Pembangunan bendung/bendungan	Pembangunan bendung/bendungan diprioritaskan terintegrasi dengan pengembangan Kawasan. Pembangunan ini juga merupakan upaya	Kecamatan Kenohan, Kecamatan Kembang Janggut, Kecamatan Muara Muntai, Kecamatan Kota		v		

No	RPJPD 2025-2045				Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus Prioritas	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
			dalam mendukung pariwisata dan industri hijau di Kabupaten Kutai Kartanegara	Bangun, Kecamatan Kota Bangun Darat, Kecamatan Muara Wis, Kecamatan Tabang, Kecamatan Muara Kaman				
		Pembangunan irigasi baru	Pembangunan irigasi baru diutamakan pada wilayah sawah tadah hujan eksisting dan area dengan kategori lahan yang sesuai untuk tanaman pangan. Pembangunan irigasi juga merupakan upaya dalam mendukung pariwisata dan industri hijau di Kabupaten Kutai Kartanegara	Kecamatan Kenohan, Kecamatan Kembang Janggut, Kecamatan Muara Muntai, Kecamatan Kota Bangun, Kecamatan Kota Bangun Darat, Kecamatan Muara Wis, Kecamatan Tabang, Kecamatan Muara Kaman		v		

No	RPJPD 2025-2045				Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus Prioritas	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		Pengendalian banjir	Pengendalian banjir dilaksanakan melalui pengembangan natural based solution dan pengembangan area yang didedikasikan sebagai retarding basin (pemanfaatan cekungan/kolam retensi), terutama pada daerah sekitar IKN	Kecamatan Tenggarong dan Kecamatan Marang Kayu	v	v		
		Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir	Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir dilaksanakan melalui pengedukasian masyarakat, optimalisasi penerapan prinsip reduce, reuse dan recycle serta penguatan pemilahan sampah sejak dari sumbernya, serta penerapan pengelolaan TPA sanitary landfill	Seluruh Kecamatan	v	v	v	v

No	RPJPD 2025-2045				Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus Prioritas	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
			untuk mencapai ekonomi sirkular					
		Pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem	Pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem dilaksanakan melalui penguatan kerja sama antardaerah yang berada dalam satu kesatuan ekologi/ekosistem	Seluruh Kecamatan			v	v
6	Implementasi Transformasi	Peningkatan kualitas penataan ruang	Peningkatan kualitas penataan ruang dilaksanakan melalui penyusunan perencanaan tata ruang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan, tertib pemanfaatan ruang sesuai pola dan struktur ruang,	Seluruh Kecamatan	v	v	v	v

No	RPJPD 2025-2045				Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus Prioritas	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
			pengendalian konsistensi pemanfaatan ruang dan penuntasan RDTR kabupaten/kota					
		Peningkatan pelaksanaan reforma agraria	Peningkatan pelaksanaan reforma agraria dilaksanakan dalam bentuk pembentukan kelembagaan agraria di daerah, legalisasi aset mendorong redistribusi tanah, penyelesaian konflik agraria secara berkeadilan, berkelanjutan dan akuntabel, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat subjek reforma agraria, salah satunya melalui program perhutanan sosial	Seluruh Kecamatan	v	v	v	v

No	RPJPD 2025-2045				Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus Prioritas	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		Pemanfaatan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II	Pemanfaatan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II ditujukan untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik daerah ke rantai pasok/nilai nasional dan global dengan pembangunan dan pengembangan jaringan konektivitas yang terpadu	Kecamatan Anggana, Kecamatan Muara Badak, Kecamatan Sanga-Sanga, Kecamatan Marang Kayu			v	v
		Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan	Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan dilaksanakan melalui pembangunan jalan tol, penyelesaian jalan Trans Kalimantan, dan pembangunan serta peningkatan jalan termasuk jalan daerah sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah. Selain itu,	Seluruh Kecamatan	v	v		

No	RPJPD 2025-2045				Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus Prioritas	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
			peningkatan kualitas dan kuantitas jalan juga merupakan upaya dalam mendukung pariwisata dan industri hijau di Kabupaten Kutai Kartanegara					
		Pengembangan moda kereta api	Pengembangan moda kereta api ditujukan untuk angkutan logistik serta kereta api antarkota yang pengembangannya diselaraskan dengan pertumbuhan permintaan dan pengembangan wilayah	Kecamatan Sanga-Sanga, Kecamatan Tenggarong, Kecamatan Kota Bangun, Kecamatan Muara Muntai, Kecamatan Muara Wis, Kecamatan Kota Bangun Darat, Kecamatan Muara Kaman, Kecamatan Sebulu, Kecamatan Loa Kulu,		v	v	

No	RPJPD 2025-2045				Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus Prioritas	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
				Kecamatan Loa Janan				
		Pengembangan angkutan sungai	Pengembangan angkutan sungai ditujukan untuk peningkatan kualitas distribusi logistik dan penumpang serta akses ke simpul utama transportasi	Kecamatan Tenggarong, Kecamatan Muara Wis, Kecamatan Tabang, Kecamatan Kota Bangun, Kecamatan Muara Kaman, Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Loa Janan, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kecamatan Sebulu		v	v	

No	RPJPD 2025-2045				Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus Prioritas	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		Pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman, berkelanjutan dan inklusif	Pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman, berkelanjutan dan inklusif dilaksanakan melalui penyediaan air siap minum jaringan perpipaan, peningkatan akses sanitasi, pengembangan dan peningkatan kinerja lembaga penyelenggara SPAM, peningkatan pengawasan kualitas air minum dan pemanfaatan IPTEK dalam pemenuhan akses air minum aman	Seluruh Kecamatan	v	v	v	v
		Pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan	Pengelolaan sumber daya air berkelanjutan dilaksanakan melalui pembangunan sistem dan infrastruktur sumber daya air yang dapat beradaptasi dengan iklim,	Seluruh Kecamatan	v	v	v	v

No	RPJPD 2025-2045				Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus Prioritas	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
			khususnya dengan mempertimbangkan pertumbuhan kota masa depan dalam upaya mendukung pengurangan risiko bencana					
		Pemerataan terhadap akses hunian layak	Pemerataan terhadap akses hunian layak dilaksanakan melalui fasilitasi penyediaan akses perumahan layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan salah satunya untuk daerah kepulauan dan afirmasi, serta penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat	Seluruh Kecamatan	v	v	v	v

No	RPJPD 2025-2045				Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus Prioritas	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		Penanganan kawasan permukiman kumuh	Penanganan kawasan permukiman kumuh dilaksanakan melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh, serta penyediaan hunian vertikal yang terpadu dengan layanan dasar permukiman, termasuk sistem transportasi publik	Seluruh Kecamatan	v	v		
		Penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman	Penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman dilaksanakan melalui instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan SPALD-S maupun dengan mengalirkan	Seluruh Kecamatan	v	v	v	v

No	RPJPD 2025-2045				Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus Prioritas	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
			air limbah domestik ke Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (IPALDT) atau SPALD-T					
		Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen rencana pembangunan pusat dan daerah dilaksanakan melalui penyelarasan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan dengan mempedomani periodisasi dokumen rencana pembangunan di tingkat pusat dan provinsi sebagai acuan penyelarasan lingkup waktu pelaksanaan pembangunan	Seluruh Kecamatan	v	v	v	v

No	RPJPD 2025-2045				Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus Prioritas	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		Sinkronisasi substansii RPJPD dan RTRW	Sinkronisasi substansi RPJPD dan RTRW Kabupaten dilaksanakan melalui penyelarasan visi dan misi RPJPD dengan tujuan penataan ruang, serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD dengan indikasi program utama pemanfaatan ruang (berbasis pola ruang, struktur ruang, kawasan strategis kabupaten) dalam RTRW	Seluruh Kecamatan	v	v	v	v
		Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran daerah	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran daerah dilaksanakan melalui optimalisasi perencanaan, pengukuran, pengelolaan data, pelaporan dan evaluasi	Seluruh Kecamatan	v	v	v	v

No	RPJPD 2025-2045				Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus Prioritas	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
			kinerja yang berorientasi pada pencapaian sasaran daerah					
		Penguatan pengendalian pembangunan	Perkuatan pengendalian pembangunan dilaksanakan melalui penerapan SPIP terintegrasi dan manajemen risiko	Seluruh Kecamatan	v	v	v	v
		Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan	Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan dilaksanakan melalui optimalisasi pemanfaatan sistem penghubung layanan pemerintah, optimalisasi penyelenggaraan satu data, dan pengendalian	Seluruh Kecamatan	v	v		

No	RPJPD 2025-2045				Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus Prioritas	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
			pengembangan aplikasi bersifat khusus					
		Pengembangan pembiayaan inovatif	Pengembangan pembiayaan inovatif dilaksanakan melalui Kerja sama Pembiayaan Badan Usaha (KPBU), CSR, <i>blended finance</i> , pemanfaatan dana abadi daerah, dana jasa ekosistem dan pasar karbon. Pengembangan pembiayaan inovatif ini juga dapat dilakukan sebagai upaya mendukung telaksananya pembangunan yang berkelanjutan serta transisi ke sektor non ekstraktif.	Seluruh Kecamatan	v	v	v	v

No	RPJPD 2025-2045				Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi	Lokus Prioritas	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		Keberlanjutan proyek strategis jangka panjang daerah	Keberlanjutan proyek strategis jangka panjang dilaksanakan melalui penyusunan kebijakan yang mengatur kewajiban internalisasi keberlanjutannya ke dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara antar periode	Seluruh Kecamatan	v	v	v	v

BAB VI

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045, menetapkan visi pembangunan daerah, yaitu KUKAR MAJU TANGGUH BERBUDAYA 2045: Pusat Pangan, Pariwisata, Industri Hijau, Sejahtera dan Berkelanjutan. RPJPD ini menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik di lingkungan pemerintahan, masyarakat, dunia usaha/swasta dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah 20 tahun ke depan. Keberhasilan dalam implementasinya, memerlukan dukungan kontribusi aktif, sinergi, dan kolaborasi dari seluruh unsur pemangku kepentingan dalam pencapaian tujuan RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2045.

Penyusunan RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2045 dilakukan dengan merujuk pada upaya pencapaian Visi Indonesia Emas 2045, dan Visi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur “Kaltim Sejahtera 2045”. Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan jangka panjang daerah, RPJPD ini akan menjadi dasar di dalam penyusunan RPJMD dalam periode lima tahunan dan RKPD dalam masa satu tahunan.

RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045 ditetapkan dengan peraturan daerah dan berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya RPJPD periode berikutnya. Kemudian, untuk menjaga kesinambungan pembangunan berdasarkan RPJPD 2025-2045, pelaksanaan perencanaan pada RPJPD 2025-2045 harus memperhatikan kaidah pelaksanaan yang meliputi:

- 1) Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, sehingga pelaksanaan RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045 menjadi bagian penting dari upaya pencapaian visi Indonesia Emas 2045 dan visi Kaltim Sejahtera 2045, yang tertuang dalam RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045. Selanjutnya, pencapaian visi RPJPD Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045 juga sangat dipengaruhi oleh posisi strategis Kutai Kartanegara sebagai salah satu bagian dari IKN, dan keterlibatan/kolaborasi kabupaten/kota sekitar, serta pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada di Kutai Kartanegara.
- 2) Bupati terpilih berkewajiban melaksanakan Peraturan Daerah tentang RPJPD ini dengan menjabarkannya ke dalam RPJMD sesuai dengan visi

dan misi Bupati terpilih, arah kebijakan pentahapan pembangunan RPJPD pada periode berkenaan, serta menjadikan substansi RPJPD sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan daerah disertai dengan pendanaan pembangunan yang memadai dalam upaya pencapaian target yang telah ditetapkan.

- 3) Target indikator sasaran visi dan indikator utama pembangunan wajib di internalisasi ke dalam RPJMD dan/atau RENSTRA Perangkat Daerah. Untuk target kinerja di setiap tahapan pembangunan dapat dilakukan pemutakhiran dalam RPJMD dan/atau RENSTRA Perangkat Daerah dengan memperhatikan dinamika pembangunan terkini dan tidak mengubah target akhir kinerja RPJPD di tahun 2045.
- 4) Untuk mendorong partisipasi aktif seluruh pihak dalam pembangunan, upaya pemberian insentif bagi unsur pemerintah yang diintegrasikan ke dalam sistem manajemen kinerja dan sistem manajemen anggaran, serta pemberian insentif bagi non-pemerintah berupa dukungan regulasi dan fasilitas kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045, meliputi antara lain:
 - a. Pengendalian dan evaluasi terhadap sasaran visi, sasaran pokok dan arah kebijakan melalui pemantauan, supervisi, dan penilaian hasil capaian kinerja pelaksanaan RPJPD secara periodik;
 - b. Menyusun dan melaksanakan manajemen risiko pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah.
- 6) Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses penyusunan dan substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan sesuai ketentuan yang berlaku, serta terjadi perubahan yang mendasar. Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD lebih dari 7 (tujuh) tahun.
- 7) Melaksanakan komunikasi publik yang efektif untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif melalui berbagai saluran komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

- 8) Peraturan Daerah tentang RPJPD disebarluaskan kepada para pemangku kepentingan pembangunan daerah, baik secara elektronik dan/atau non-elektronik.
- 9) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, DPRD, dan seluruh masyarakat termasuk swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, diaspora, pemuda, dan kelompok rentan, seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lansia secara bersama-sama memiliki komitmen yang kuat untuk mendukung konsistensi implementasi RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045 untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan dengan sebaik-baiknya.
- 10) Unit satuan kerja vertikal maupun lembaga-lembaga lokal non-pemerintah atau lembaga internasional pemerintah dan non-pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, serta komponen masyarakat dalam berbagai bentuk partisipasinya agar melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menyelaraskan dan menjamin konsistensi pelaksanaan program, kegiatan dan partisipasinya terhadap RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045.
- 11) Peningkatan kapasitas pembiayaan daerah melalui pengembangan pembiayaan daerah alternatif dan kreatif baik bersumber dari dana pemerintah maupun non pemerintah, serta optimalisasi jasa sektor keuangan untuk mendukung pencapaian visi RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045.
- 12) Bupati yang mengakhiri masa jabatannya pada 2045, diwajibkan menyusun dan menetapkan RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2046–2065 serta menyusun dan menetapkan RKPD Tahun 2045 dengan berdasarkan pada RPJPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH